

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029



RPJMD 2025-2029 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

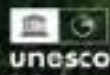


H. MUHIDIN

GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN

HASNURYADI SULAIMAN

WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN



BEKERJABERSAMA
MERANGKUL SEMUA



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Gubernur yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - c. penyusunan RPJMD kabupaten/kota di Daerah.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (6) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sistematika sebagai berikut:
- pendahuluan;
 - gambaran umum Daerah;
 - Visi, Misi, dan Program prioritas pembangunan Daerah;
 - Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - penutup.
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah Kalimantan Selatan Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.
- (2) Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:
- pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia;
 - pembangunan infrastruktur yang handal;
 - pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan syariah;
 - penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim; dan
 - tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melakukan perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup:
 1. bencana alam;
 2. bencana non alam;
 3. goncangan politik;
 4. krisis ekonomi;
 5. konflik sosial budaya;
 6. gangguan keamanan;
 7. pemekaran Daerah; dan/atau
 8. perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

Pasal 8

Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3-78/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 telah berakhir dengan penetapan dan pelantikan kepala daerah. Pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilantik MUHIDIN sebagai Gubernur dan HASNURYADI SULAIMAN sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan masa jabatan tahun 2025-2030. Pelantikan telah menandai dimulainya masa pemerintahan daerah yang baru selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan visi "KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan".

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi sistematika, Visi dan Misi, pengendalian dan evaluasi RPJMD, serta perubahan RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 telah selesai disusun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur selama periode tahun 2025-2029. Pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2030 akan berpedoman pada RPJMD dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya, termasuk partisipasi masyarakat luas.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dokumen RPJMD ini, Saya ucapkan terima kasih. Kedepan, kita masih menghadapi berbagai tantangan, namun dengan sinergi dan kolaborasi serta semangat kebersamaan, kita akan mampu mewujudkan “**KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan**”.

Gubernur Kalimantan Selatan,

H. MUHIDIN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II-232
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-277
BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III-1
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-15
BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
4.1 Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-85
BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-2
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	V-3
5.4 Pedoman Transisi	V-4



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-3
Tabel 2.2	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (ha) Tahun 2024	II-4
Tabel 2.3	Daya Dukung Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan setiap Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-9
Tabel 2.4	Daya Dukung Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan setiap Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-12
Tabel 2.5	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-14
Tabel 2.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.7	Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	II-20
Tabel 2.8	Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Alam (Mitigasi Bencana) berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	II-22
Tabel 2.9	Jumlah Desa Berdasarkan Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota	II-23
Tabel 2.10	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-25
Tabel 2.11	Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2.12	Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-28
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2020-2024	II-29
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2.15	Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030 (dalam ribu)	II-31
Tabel 2.16	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	II-32
Tabel 2.17	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II-33



Tabel 2.18	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II-33
Tabel 2.19	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran 2020-2024 (Miliar Rp)	II-34
Tabel 2.20	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran 2020-2024 (Miliar Rp)	II-35
Tabel 2.21	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (persen)	II-37
Tabel 2.22	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (persen)	II-39
Tabel 2.23	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2.24	PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II-41
Tabel 2.25	PDRB ADHB per Kapita Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-41
Tabel 2.26	Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-42
Tabel 2.27	Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-44
Tabel 2.28	Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2.29	Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-45
Tabel 2.30	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2020-2024 (Rupiah)	II-46
Tabel 2.31	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-46
Tabel 2.32	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-47
Tabel 2.33	Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.34	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020- 2024	II-50
Tabel 2.35	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-52
Tabel 2.36	Kondisi Indeks Modal Manusia Kalimantan Selatan 2019-2023	II-53



Tabel 2.37	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	II-53
Tabel 2.38	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-56
Tabel 2.39	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.40	Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.41	Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dan 2024	II-60
Tabel 2.42	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-61
Tabel 2.43	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2.44	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-62
Tabel 2.45	Nilai Pilar IMDI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024	II-66
Tabel 2.46	Nilai Indeks Masyarakat Digital Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024	II-67
Tabel 2.47	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023	II-72
Tabel 2.48	Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.49	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.50	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-81
Tabel 2.51	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.52	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2020-2024	II-84
Tabel 2.53	Distribusi Subkategori terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.54	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2020-2024	II-86



Tabel 2.55	Peran Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB Tahun 2020–2024 (persen)	II-87
Tabel 2.56	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020–2024 (persen)	II-89
Tabel 2.57	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen) Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.58	Distribusi Subkategori terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen) Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.59	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen) Tahun 2020-2024	II-90
Tabel 2.60	TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024	II-92
Tabel 2.61	Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.62	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.63	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.64	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2.66	Nilai Investasi di Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2.67	Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor dari Januari Sampai Dengan Desember Tahun 2024	II-103
Tabel 2.68	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.69	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-106
Tabel 2.70	Indikator Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024	II-107
Tabel 2.71	Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.72	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-114



Tabel 2.73	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.74	Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.75	Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.76	Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.77	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2.78	Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	II-137
Tabel 2.79	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2024	II-137
Tabel 2.80	Target dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan	II-140
Tabel 2.81	Persentase Capaian Mutu Bidang Kesehatan Tahun 2024	II-140
Tabel 2.82	Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum	II-142
Tabel 2.83	Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	II-143
Tabel 2.84	Persentase Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	II-145
Tabel 2.85	Target Capaian SPM Bidang Tranibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024	II-148
Tabel 2.86	Capaian Pelayanan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024	II-148
Tabel 2.87	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-150
Tabel 2.88	Capaian Bidang Sosial Tahun 2024	II-150
Tabel 2.89	Rekapitulasi Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-155
Tabel 2.90	Rekapitulasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-174
Tabel 2.91	Rekapitulasi Sinergi Perencanaan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah (SINERGI) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-185
Tabel 2.92	Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	II-189
Tabel 2.93	Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022	II-193
Tabel 2.94	Rencana Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	II-230
Tabel 2.95	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-234



Tabel 2.96	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024	II-237
Tabel 2.97	Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024	II-239
Tabel 2.98	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024	II-242
Tabel 2.99	Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024	II-244
Tabel 2.100	Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024	II-248
Tabel 2.101	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024	II-254
Tabel 2.102	Realisasi Belanja Pegawai Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024	II-258
Tabel 2.103	Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024	II-260
Tabel 2.104	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024	II-262
Tabel 2.105	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024	II-263
Tabel 2.106	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2030	II-265
Tabel 2.107	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2030	II-267
Tabel 2.108	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	II-269
Tabel 2.109	Proyeksi SiLPA Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026-2030	II-270
Tabel 2.110	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026-2030	II-271
Tabel 2.111	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	II-273
Tabel 2.112	Proyeksi Neraca Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	II-276
Tabel 2.113	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan	II-289
Tabel 2.114	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	II-304
Tabel 2.115	Indikator Makro Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	II-304
Tabel 2.116	Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	II-330



Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	III-11
Tabel 3.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	III-25
Tabel 3.3	Implementasi Janji dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030 dalam Program Perangkat Daerah	III-69
Tabel 3.4	Indikasi Proyek Strategis RPJMD Tahun 2025-2030	III-80
Tabel 3.5	Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	III-88
Tabel 3.6	Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi dan Sasaran Pembangunan	III-94
Tabel 3.7	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	III-102
Tabel 3.8	Arahan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	III-136
Tabel 3.9	Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025-2029	III-138
Tabel 3.10	Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	III-143
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	IV-3
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	IV-86
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	IV-89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya	I-9
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan	II-2
Gambar 2.2	Peta Wilayah Kalimantan Selatan terhadap wilayah sekitar, ALKI 1, dan ALKI 2	II-3
Gambar 2.3	Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air	II-8
Gambar 2.4	Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan	II-10
Gambar 2.5	Indeks Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-15
Gambar 2.6	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Ketersediaan dan Konsumsi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-15
Gambar 2.7	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-24
Gambar 2.8	Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-27
Gambar 2.9	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2024	II-28
Gambar 2.10	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II-36
Gambar 2.11	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-39
Gambar 2.12	Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-43
Gambar 2.13	Perkembangan Gini Ratio Provinsi di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-43
Gambar 2.14	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-47
Gambar 2.15	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-50



Gambar 2.16	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2.17	Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-54
Gambar 2.18	Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-55
Gambar 2.19	Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-57
Gambar 2.20	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2.21	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-64
Gambar 2.22	Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022	II-65
Gambar 2.23	Indeks Masyarakat Digital Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024	II-65
Gambar 2.24	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi di Kalimantan dan Nasional Tahun 2021-2024	II-71
Gambar 2.25	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023	II-73
Gambar 2.26	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	II-74
Gambar 2.27	Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023 (metode baru)	II-75
Gambar 2.28	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-76
Gambar 2.29	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-77
Gambar 2.30	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-80
Gambar 2.31	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-81
Gambar 2.32	Persentase Tenaga Kerja Formal di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-83
Gambar 2.33	Rasio Ketergantungan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-84



Gambar 2.34	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB	II-87
Gambar 2.35	Rasio Kewirausahaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-91
Gambar 2.36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-92
Gambar 2.37	Skor per Pilar Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022	II-99
Gambar 2.38	Rasio Konektivitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024	II-108
Gambar 2.39	Perkembangan Tingkat Inflasi di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-109
Gambar 2.40	Persentase Literasi dan Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dan 2022	II-113
Gambar 2.41	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023	II-115
Gambar 2.42	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-116
Gambar 2.43	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023	II-120
Gambar 2.44	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2022-2024	II-121
Gambar 2.45	Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (persen)	II-210
Gambar 2.46	Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (ribu rupiah per orang)	II-211
Gambar 2.47	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (persen)	II-212
Gambar 2.48	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (persen)	II-212
Gambar 2.49	Persentase Merokok pada Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (persen)	II-213



Gambar 2.50	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)	II-213
Gambar 2.51	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)	II-214
Gambar 2.52	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024	II-215
Gambar 2.53	Proporsi Remaja (15–24 Tahun) dan Dewasa (15–59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)	II-215
Gambar 2.54	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)	II-218
Gambar 2.55	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)	II-218
Gambar 2.56	Rasio Elektrifikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024	II-219
Gambar 2.57	PDRB ADHB per Kapita per Tahun (ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024	II-220
Gambar 2.58	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)	II-220
Gambar 2.59	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (orang)	II-222
Gambar 2.60	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 (persen)	II-223
Gambar 2.61	Proporsi Penduduk Terlayani Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020	II-224
Gambar 2.62	Proporsi Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman pada Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 (persen)	II-224
Gambar 2.63	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR dan DPRD) di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024 (persen)	II-227
Gambar 2.64	Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran dan Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024 (persen)	II-228



Gambar 2.65	Penduduk Berusia 5 Tahun keatas yang Mengakses Internet di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (persen)	II-229
Gambar 2.66	Rata-Rata Komposisi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	II-235
Gambar 2.67	Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024	II-240
Gambar 2.68	Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-253
Gambar 2.69	Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	II-302
Gambar 2.70	Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan	II-303
Gambar 2.71	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	II-311
Gambar 3.1	Keterkaitan Visi RPJMD dan Visi RPJMN Tahun 2025-2029	III-3
Gambar 3.2	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	III-4
Gambar 3.3	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan	III-6
Gambar 3.4	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	III-6
Gambar 3.5	Cascading Kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	III-10
Gambar 3.6	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	III-15
Gambar 3.7	Penahapan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	III-16
Gambar 3.8	10 Janji Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	III-20
Gambar 3.9	Prioritas dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Misi 1	III-21
Gambar 3.10	Prioritas dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Misi 2	III-21
Gambar 3.11	Prioritas dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Misi 3	III-22
Gambar 3.12	Prioritas dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Misi 4	III-22
Gambar 3.13	Prioritas dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Misi 5	III-23
Gambar 3.14	Pengembangan Gerbang Logistik Kalimantan	III-23



Gambar 3.15	Arahan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan	III-101
Gambar 3.16	Peta Rencana Pola Ruang Klaster Banjarbakula	III-108
Gambar 3.17	Peta Rencana Pola Ruang Klaster Banua Anam	III-109
Gambar 3.18	Peta Rencana Pola Ruang Klaster Saijaan Bersujud	III-110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 telah berakhir dengan penetapan dan pelantikan kepala daerah. Pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilantik **H. MUHIDIN** sebagai **Gubernur** dan **HASNURYADI SULAIMAN** sebagai **Wakil Gubernur Kalimantan Selatan** masa jabatan tahun 2025-2030. Pelantikan telah menandai dimulainya masa pemerintahan daerah yang baru selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan visi “KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan”.

Salah satu kewajiban kepala daerah terpilih adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa tahapan, meliputi:

- a. persiapan penyusunan (termasuk penyusunan Rancangan Teknokratik);
- b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Rancangan Awal RPJMD akan disempurnakan menjadi Rancangan, Rancangan Akhir, dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Perda dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah. Selanjutnya, dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD



masing-masing, guna mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah.

Rangkaian tahapan penyusunan RPJMD menggabungkan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029, meliputi:

- a. Pendekatan teknokratik; dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif; dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik unsur pemerintah maupun non pemerintah.
- c. Pendekatan politis; dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan kementerian/lembaga terkait.
- e. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- f. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- g. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Rencana pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Dalam mengimplementasikan tema pembangunan tahap pertama RPJPD yakni **Pemantapan Fondasi Transformasi**, maka RPJMD memuat perencanaan yang selaras dengan sasaran visi, arah kebijakan, dan sasaran pokok serta indikator utama pembangunan RPJPD. Selanjutnya, guna menjamin perencanaan yang dihasilkan telah mengakomodir prinsip-prinsip pembangunan



berkelanjutan, maka penyusunan RPJMD diintegrasikan dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029. Isu-isu terkini dan lintas sektor yang menjadi komitmen bersama secara nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, inklusi sosial, pengarusutamaan gender, ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim, juga menjadi bagian dalam rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyusunan RPJMD bersamaan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Renstra Perangkat Daerah memuat perencanaan operasional dari RPJMD dan menggambarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya. Tatacara penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Seluruh rangkaian tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diinput kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6); dan
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi dokumen yang penting sebab merupakan pelaksanaan RPJPD dan sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen rencana lainnya. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, posisi RPJMD menjadi sangat strategis dan memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen



lainnya. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen lainnya diuraikan sebagai berikut:

a. Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RPJMN

Memedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

b. Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan RPJMD provinsi memedomani RPJPD provinsi. Memedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

c. Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dengan periode yang sama dengan RPJMD. Dokumen ini merupakan rencana operasional dari RPJMD yang merinci program perangkat daerah kedalam kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran. Renstra Perangkat Daerah disusun oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

d. Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD. Sebagai dokumen rencana tahunan, RKPD disusun memedomani RPJMD dan RKP serta hasil evaluasi RPJMD dan RKPD tahun lalu. RKPD menjembatani antara RPJMD dan APBD, dalam rangka mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan dan mewujudkan visi RPJMD.



e. Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan RPJMD memedomani RTRW melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

f. Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RPJMD Kabupaten/Kota

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota. Memedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

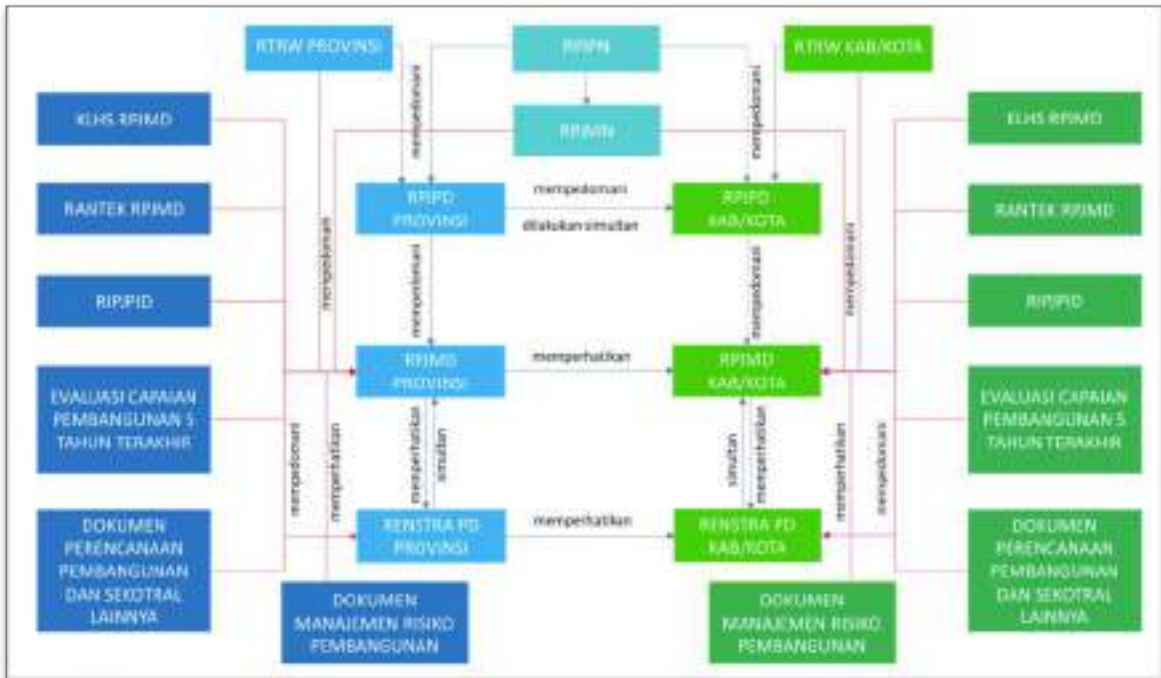
g. Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan RPJMD memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah (KLHS) RPJMD. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

h. Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dokumen Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan memerhatikan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, termasuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID).

Keterkaitan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 yaitu menjabarkan visi, misi, dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur kedalam rencana jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi unsur pemerintah dan non pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan yang akan dicapai dari penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, yaitu:

- Teridentifikasinya kinerja pembangunan dan keuangan daerah.
- Tersusunnya kerangka keuangan daerah untuk mendanai pembangunan jangka menengah.
- Teridentifikasinya permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
- Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran dari visi dan misi.
- Tersusunnya strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.
- Teridentifikasinya program perangkat daerah yang disertai target dan pagu indikatif.



- g. Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai gambaran kinerja kepala daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- h. Tersedianya kebijakan jangka menengah sebagai pedoman penyusunan RKPD provinsi setiap tahun.
- i. Tersedianya kebijakan jangka menengah sebagai pedoman penyusunan RPJMD kabupaten/kota.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum, hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, dan sistematika penyajian dokumen.

Bab II. Gambaran Umum Daerah

Bab ini menyajikan data dan informasi serta analisis kondisi daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama beberapa tahun terakhir. Penyajian kondisi daerah dibagi kedalam 4 (empat) aspek, yaitu: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum. Informasi lain yang disajikan adalah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan informasi lainnya yang menggambarkan perkembangan provinsi.

Selain itu, disajikan juga gambaran keuangan daerah yang memuat kinerja dan kebijakan APBD beberapa tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah untuk membiayai pembangunan jangka menengah periode 2025-2029. Selanjutnya, dalam bab ini disajikan permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan hasil analisis dari faktor-faktor internal dan eksternal daerah.

Bab III. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini memuat visi dan misi kepala daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang terukur. Selanjutnya dipilih Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan



menjadi panduan dalam menentukan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang selain bertujuan mendukung pencapaian sasaran RPJMD, juga mendukung pelaksanaan program prioritas kepala daerah.

Bab IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Penyajian program dilengkapi dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Selain itu, pada bab ini memuat juga memuat ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V. Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, dan hal-hal yang penting dilaksanakan setelah RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan, yang meliputi berbagai kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan maka ibu kota provinsi yang semula berkedudukan di Kota Banjarmasin dipindah menjadi di Kota Banjarbaru.

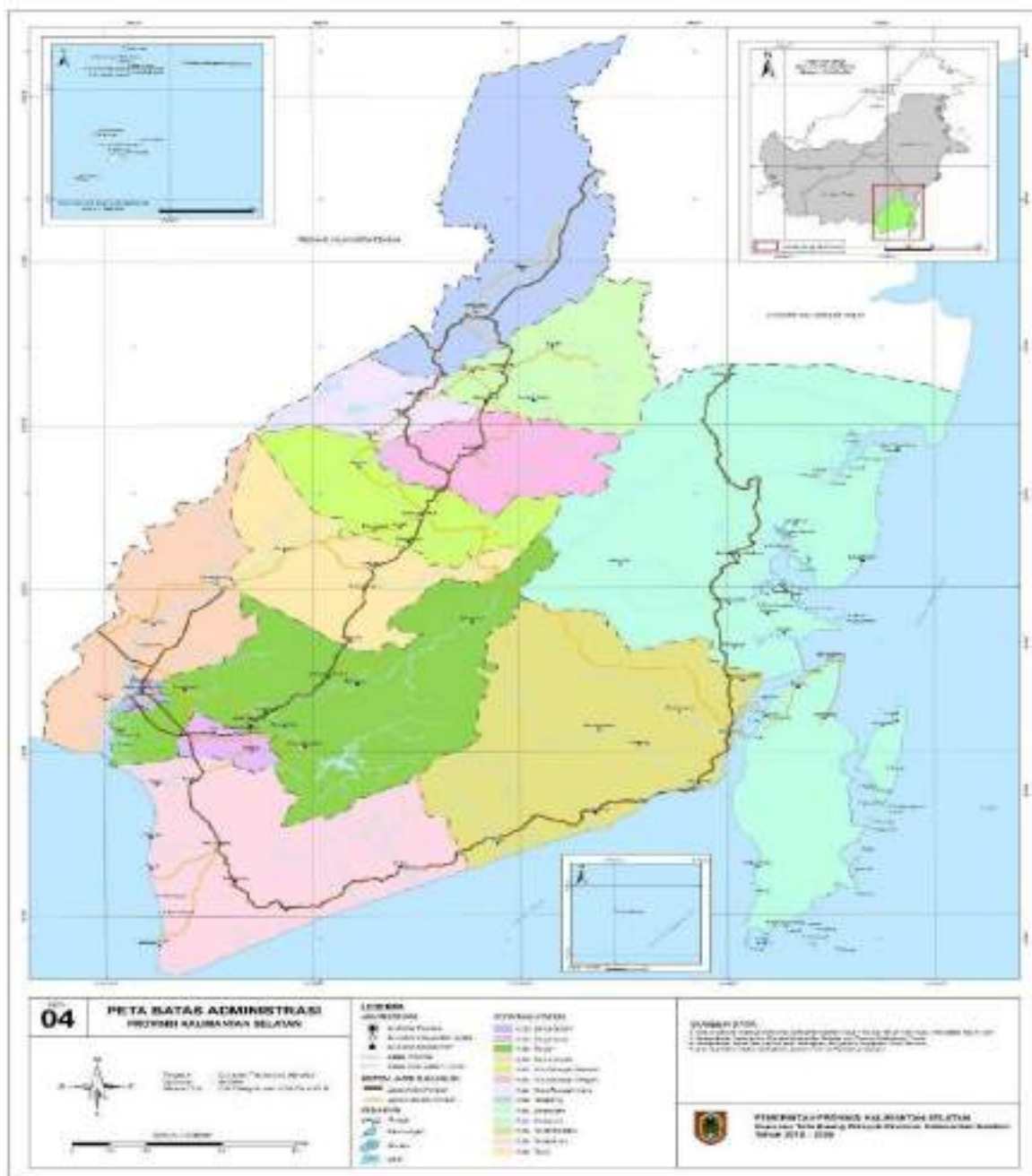
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042, posisi geografis Provinsi Kalimantan Selatan antara 114° 16' 54,153" Bujur Timur – 117° 39' 9,976" Bujur Timur dan 1° 18' 45,286" Lintang Selatan – 5° 8' 9,951" Lintang Selatan.

Adapun wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara administratif berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 6.020.911 hektar yang terbagi ke dalam 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan ibu kota yakni Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 156 kecamatan dan 2.016 desa/kelurahan.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian Selatan.



Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042

Daerah dengan jumlah kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Kotabaru dan jumlah desa/kelurahan terbanyak ada di Kabupaten Banjar. Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan beserta jumlah desa dan kelurahannya disajikan pada tabel di bawah.

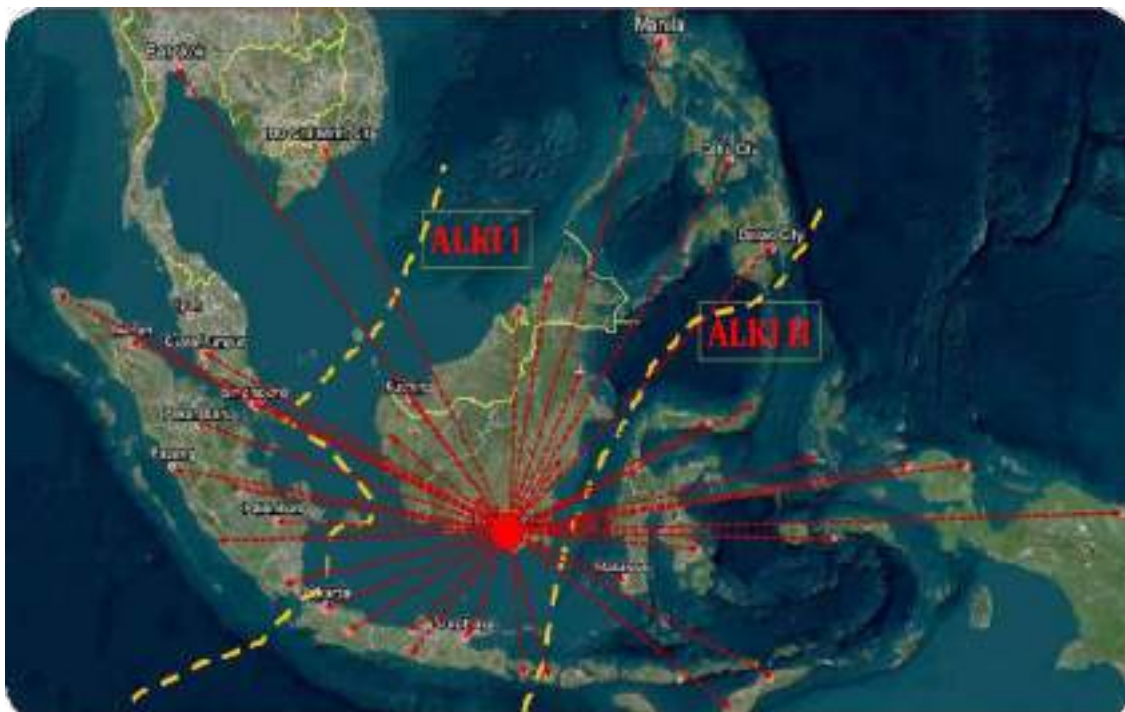


Tabel 2.1.
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Tanah Laut	11	135
Kotabaru	22	202
Banjar	20	290
Barito Kuala	17	201
Tapin	12	135
Hulu Sungai Selatan	11	148
Hulu Sungai Tengah	11	169
Hulu Sungai Utara	10	219
Tabalong	12	131
Tanah Bumbu	12	157
Balangan	8	156
Banjarmasin	5	52
Banjarbaru	5	20
Kalimantan Selatan	156	2.015

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

Berdasarkan letak wilayah, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi sentral atau di tengah-tengah Indonesia dan dilalui oleh ALKI II yang merupakan alur pelayaran internasional hal ini merupakan berpotensi besar terhadap perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan khususnya. Hal ini dapat terlihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.2.
Peta Wilayah Kalimantan Selatan Terhadap Wilayah Sekitar, ALKI 1, dan ALKI 2

Sumber: Google Earth, diolah Tahun 2021



Dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah yang paling kecil, yakni hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan. Hal ini memudahkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sampai ke pelosok, sehingga memiliki peluang pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis penggunaan lahan terluas pada tahun 2024 adalah lahan pertanian bukan sawah seluas 2.393.823,50 ha, lalu lahan bukan pertanian seluas 1.071.021,30 ha dan Lahan Sawah seluas 388.619,40 ha. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar lahan di Kalimantan Selatan sudah termanfaatkan, dengan demikian dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung pengembangan wilayah. Luas penggunaan lahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.2.
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan (ha) Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	Total
Tanah Laut	42.781,00	209.482,00	125.246,50	377.509,50
Kotabaru	31.746,00	518.598,00	391.902,00	942.246,00
Banjar	57.206,80	322.193,70	87.449,50	466.850,00
Barito Kuala	101.893,0	147.589,00	50.214,00	299.696,00
Tapin	34.079,30	80.624,60	96.119,30	210.823,20
Hulu Sungai Selatan	29.221,00	103.249,00	48.024,00	180.494,00
Hulu Sungai Tengah	26.368,00	87.482,00	34.616,00	148.466,00
Hulu Sungai Utara	22.777,00	31.778,00	36.217,00	90.772,00
Tabalong	9.138,20	328.821,40	56.644,40	394.604,00
Tanah Bumbu	16.933,00	411.356,00	79.369,00	507.658,00
Balangan	10.132,80	143.091,40	34.605,80	187.830,00
Banjarmasin	2.023,80	131,90	7.689,80	9.845,50
Banjarbaru	4.319,50	9.426,50	22.924,00	36.670,00
Kalimantan Selatan	388.619,40	2.393.823,50	1.071.021,30	3.853.464,20

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Konsep daya dukung dan daya tampung sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Daya dukung mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Ini mencakup kapasitas penyediaan sumber daya alam yang diperlukan untuk kehidupan.



Di sisi lain, daya tampung adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan. Ini mencakup kapasitas lingkungan untuk menampung limbah dan polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Air

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) untuk air adalah konsep yang mengukur kemampuan lingkungan untuk mendukung ketersediaan air dan menyerap dampak dari penggunaan air oleh manusia. Ini mencakup penilaian ketersediaan air permukaan dan air tanah, serta kebutuhan air untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman.

Penetapan DDDTLH air dilakukan berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion, yang meliputi jumlah populasi, potensi dan ketersediaan sumber daya alam, serta bentuk pemanfaatan sumber daya alam. Peraturan terkait menetapkan bahwa daya dukung dan daya tampung air nasional harus dihitung dengan membandingkan ketersediaan air dengan jumlah pemanfaatan air.

Status Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air Tahun 2023 berdasarkan KepMenLHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, menetapkan ketersediaan air nasional di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 40.162.741.355,47 m³ per tahun, dengan total pemanfaatan air mencapai 18.772.336.345,92 m³ per tahun. Status pemanfaatan air secara Provinsi Kalimantan Selatan dapat dinyatakan belum terlampaui.

Namun, secara administrasi terdapat wilayah-wilayah yang telah mendekati atau melampaui kapasitas daya dukung air. Kota Banjarmasin mencatat pemanfaatan tertinggi sebesar 91,33%, diikuti oleh Kabupaten Barito Kuala dengan 40,65% dan Kota Banjarbaru sebesar 35,91%. Sementara itu, wilayah yang masih memiliki kapasitas daya dukung air terbesar adalah Kabupaten Kotabaru (97,19%), Kabupaten Tabalong (94,79%), dan Kabupaten Tanah Bumbu (94,80%), menunjukkan pemanfaatan air di wilayah ini masih jauh di bawah ambang batas kapasitas.



Data ini menunjukkan variasi tingkat pemanfaatan air di berbagai wilayah, mencerminkan kebutuhan air yang berbeda-beda berdasarkan aktivitas ekonomi, populasi, serta potensi sumber daya air di masing-masing daerah. Kota Banjarmasin, dengan tingkat pemanfaatan tertinggi, kemungkinan besar dipengaruhi oleh aktivitas urbanisasi yang tinggi dan kebutuhan domestik yang besar. Hal ini kontras dengan Kabupaten Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu yang masih memiliki kapasitas daya dukung air yang cukup besar, menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut baik untuk kebutuhan domestik, pertanian, maupun industri.

Pemantauan dan pengelolaan daya dukung dan daya tampung air menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air, menghindari eksploitasi berlebihan, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan. Dengan data ini, strategi pengelolaan air yang terintegrasi dan berbasis wilayah dapat dioptimalkan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan adil di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Annual Water Yield-Invest Model, pada tahun 2022 terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi potensi air di berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Kalimantan Selatan. DAS BARITO mencatat water yield tertinggi, mencapai sekitar 39,96 miliar m³, jauh melampaui DAS lainnya. Hal ini menegaskan peran strategis DAS Barito dalam menyediakan sumber daya air untuk wilayah ini.

DAS seperti BATULICIN, CANTUNG, dan TABUNIO memiliki potensi *water yield* pada tingkat menengah, berkisar antara 2 hingga 7 miliar m³. Sementara itu, DAS MANUNGGUL dan PULAU SEBUKU menunjukkan kontribusi yang relatif kecil, dengan *water yield* kurang dari 1 miliar m³.

Distribusi potensi air ini mencerminkan ketimpangan yang signifikan, dengan sebagian besar sumber daya air terkonsentrasi di DAS Barito. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk mendukung ketahanan air, irigasi, dan kebutuhan domestik serta industri di wilayah ini. Analisis total *water yield* di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data permodelan:

- Tahun 2013: 79,144,724,911 m³
- Tahun 2017: 78,931,021,914 m³



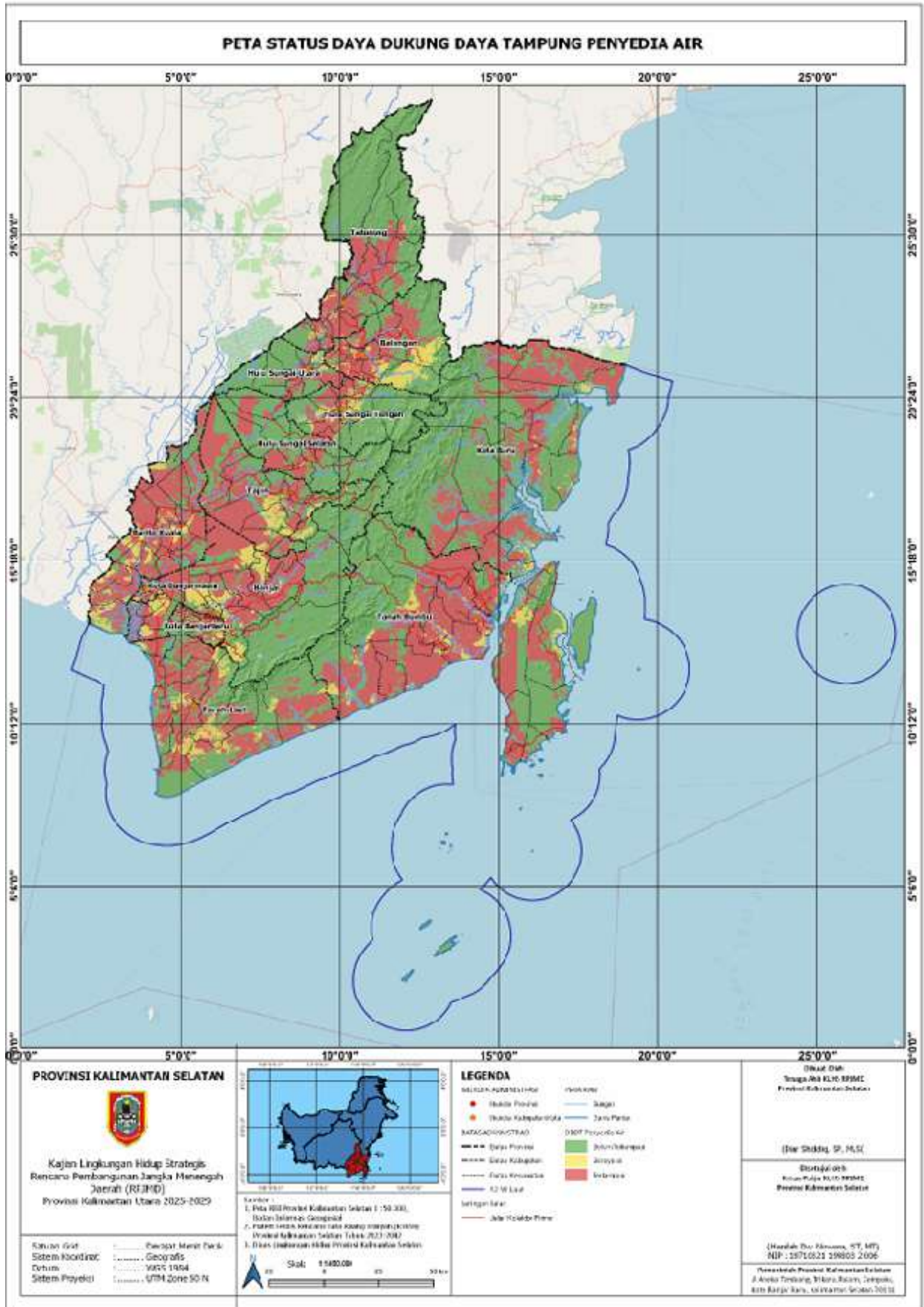
- Tahun 2021: 77,056,181,174.30 m³

Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap potensi sumber daya air di wilayah ini. Meskipun DAS Barito tetap menjadi penyumbang utama *water yield*, dengan kontribusi yang sangat dominan, tren penurunan total menunjukkan potensi ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya air jika tidak dikelola secara optimal.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini perlu ditelaah lebih lanjut, seperti:

1. Perubahan Tata Guna Lahan: Konversi hutan menjadi area perkebunan, tambang, atau permukiman.
2. Perubahan Iklim: Perubahan pola curah hujan dan suhu.
3. Eksploitasi Sumber Daya Air: Penggunaan air yang tidak berkelanjutan untuk irigasi, industri, dan kebutuhan domestik.

Upaya mitigasi diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, termasuk pengelolaan DAS berbasis ekosistem, konservasi hutan, dan optimalisasi penggunaan air.



Gambar 2.3.
Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029



B. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Pangan

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) untuk pangan adalah konsep yang mengukur kemampuan lingkungan untuk mendukung produksi pangan yang berkelanjutan. Ini mencakup penilaian ketersediaan lahan, air, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk pertanian, serta dampak dari aktivitas pertanian terhadap lingkungan.

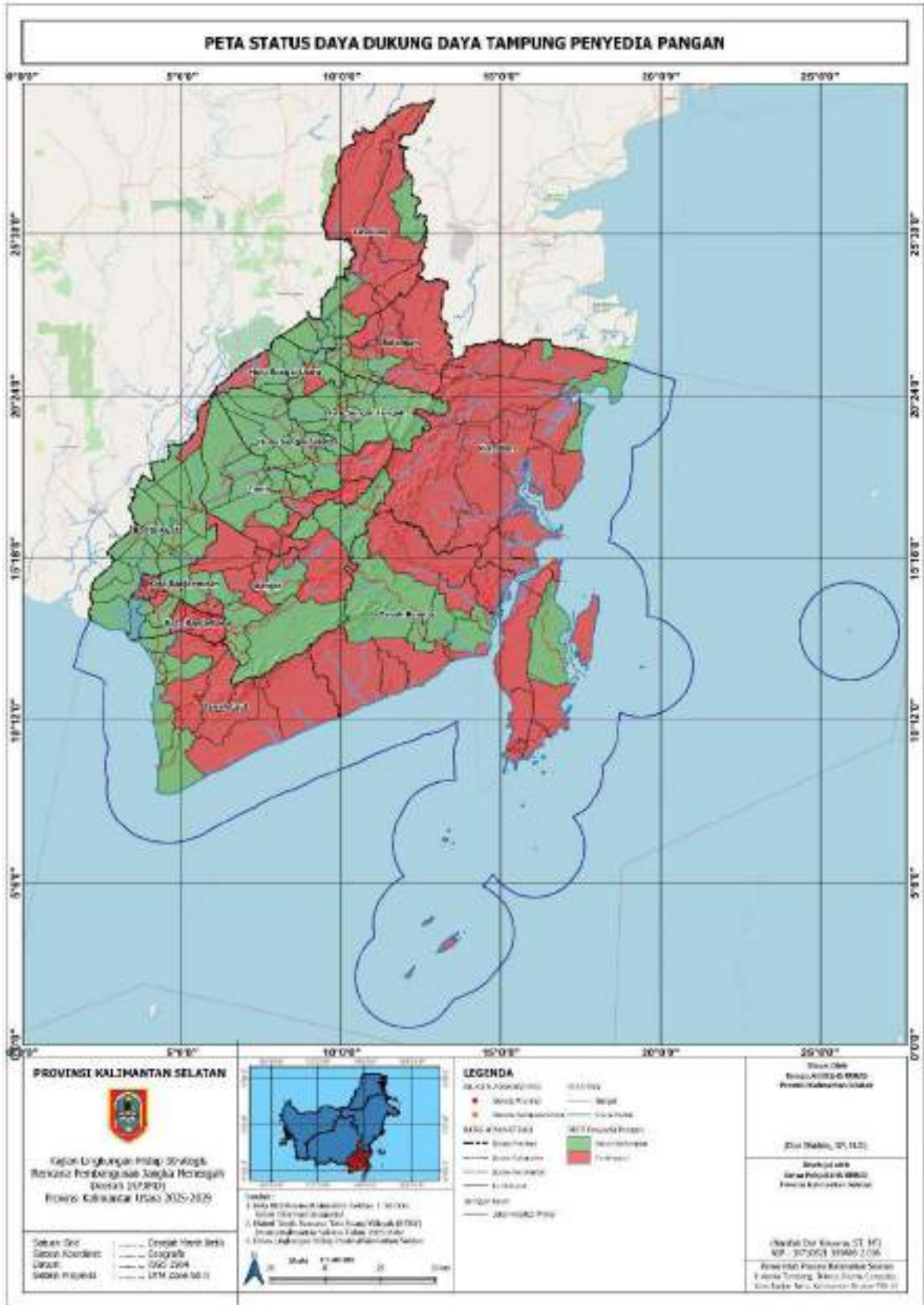
Penentuan DDDTLH pangan melibatkan beberapa langkah, termasuk:

- 1) Inventarisasi Sumber Daya: Mengidentifikasi dan mengukur ketersediaan lahan, air, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk produksi pangan.
- 2) Analisis Kebutuhan: Menilai kebutuhan pangan berdasarkan pertumbuhan populasi dan pola konsumsi.
- 3) Evaluasi Dampak: Menilai dampak dari aktivitas pertanian terhadap lingkungan, termasuk erosi tanah, pencemaran air, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
- 4) Pengelolaan Sumber Daya: Mengembangkan strategi untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan, termasuk praktik pertanian yang ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Tabel 2.3.
Daya Dukung Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan setiap Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kabupaten	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/ GKG ke Beras	Jumlah Penduduk	Angka Konsumsi Beras (kg/ perkapita/ pertahun)	Jumlah Beras di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Balangan	15.618,22	9.241	134.512	124	16.679	0,55	-7.438
Banjjar	141.592,25	83.780	579.910	124	71.909	1,17]	11.871
Banjjarbaru	3.315,90	1.962	265.575	124	32.931	0,06	-30.969
Banjarmasin	8.217,22	4.862	667.489	124	82.769	0,06	- 77.907
Barito Kuala	182.840,52	108.187	321.769	124	39.899	2,71	68.287
Hulu Sungai Selatan	64.172,17	37.971	232.212	124	28.794	1,32	9.176
Hulu Sungai Tengah	110.296,58	65.262	263.061	124	32.620	2	32.643
Hulu Sungai Utara	41.578,50	24.602	231.290	124	28.680	0,86	-4.078
Kotabaru	17.746,68	10.501	334.158	124	41.436	0,25	30.935
Tabalong	55.001,55	32.544	261.353	124	32.408	1	137
Tanah Bumbu	41.297,96	24.436	335.079	124	41.550	0,59	-17.114
Tanah Laut	86.711,61	51.307	361.044	124	44.769	1,15	6.538
Tapin	104.741,11	61.975	194.628	124	24.134	2,57	37.841
Provinsi Kalimantan Selatan	873.130,27	516.631	4.182.080	124	518.578	1	-1.947

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.4.

Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029



Tabel diatas menyajikan data terkait produksi padi, konversi Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras, jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita, serta Daya Dukung Lahan (DDL) dan surplus/defisit beras di setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Barito Kuala memiliki produksi padi tertinggi sebesar 182.840,52 ton dan konversi beras mencapai 108.187 ton, dengan surplus beras tertinggi sebesar 68.287 ton. Di sisi lain, Banjarmasin mengalami defisit terbesar dengan angka -77.907 ton meskipun memiliki populasi yang signifikan. Kabupaten Banjar juga mencatat surplus beras yang tinggi sebesar 11.871 ton dengan produksi padi 141.592,25 ton. Total untuk Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan produksi padi sebesar 873.130,27 ton yang dikonversi menjadi 516.631 ton beras, tetapi masih mengalami defisit beras sebesar 1.947 ton. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara produksi beras dan konsumsi penduduk di beberapa wilayah tertentu, meskipun ada kabupaten yang memiliki surplus beras.

Defisit beras di tingkat provinsi sebesar 1.947 ton menunjukkan bahwa meskipun beberapa kabupaten memiliki surplus, seperti Barito Kuala (68.287 ton) dan Hulu Sungai Tengah (32.643 ton), hal ini tidak mampu menutupi defisit dari kabupaten-kabupaten lainnya, seperti Banjarmasin (-77.907 ton) dan Banjarbaru (-30.969 ton). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan distribusi produksi dan konsumsi beras antar wilayah di Kalimantan Selatan.

Selain itu, jika dilihat dari Daya Dukung Lahan (DDL) untuk pangan, Barito Kuala memiliki nilai tertinggi (2,71), menunjukkan kapasitas lahan yang optimal untuk mendukung produksi beras.

Di sisi lain, kabupaten seperti Banjarmasin (0,07) dan Banjarbaru (0,06) memiliki nilai DDL rendah, yang mengindikasikan keterbatasan lahan produktif untuk mendukung kebutuhan pangan penduduknya. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan lahan pertanian akibat urbanisasi atau alih fungsi lahan.

Kabupaten dengan surplus beras seperti Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan menunjukkan potensi sebagai lumbung pangan regional, yang dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan kabupaten defisit. Sementara itu, defisit beras di daerah padat penduduk seperti Banjarmasin dan Banjarbaru menunjukkan perlunya intervensi dalam bentuk peningkatan efisiensi produksi, diversifikasi pangan, atau optimalisasi distribusi beras antar kabupaten.



Tabel 2.4.
Daya Dukung Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan setiap Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten	Jumlah Produksi Padi (ton) 2023	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras	Jumlah Penduduk (2023)	Angka Konsumsi Beras (kg/perkapita /pertahun)	Jumlah Beras di konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Tanah Laut	52,839	31,264	360,9	124	44,752	0,7	-13,488
Kotabaru	16,759	9,916	339,1	124	42,048	0,24	-32,132
Banjar	114,278	67,616	591,5	124	73,346	0,92	-5,73
Barito Kuala	188,25	111,383	326,3	124	40,461	2,75	70,922
Tapin	107,771	63,766	196,5	124	24,366	2,62	39,4
Hulu Sungai Selatan	85,828	50,783	236	124	29,264	1,74	21,519
Hulu Sungai Tengah	108,485	64,188	266,2	124	33,009	1,94	31,179
Hulu Sungai Utara	80,975	47,911	234,5	124	29,078	1,65	18,833
Tabalong	59,184	35,018	263,4	124	32,662	1,07	2,356
Tanah Bumbu	39,071	23,118	337,3	124	41,825	0,55	-18,707
Balangan	16,068	9,507	136,1	124	16,876	0,56	-7,369
Banjarmasin	4,687	2,773	666,4	124	82,634	0,03	-79,861
Banjarbaru	1,35	799	268,1	124	33,244	0,02	-32,445
PROV, KALSEL	875,545	518,042	4,222,300	124	523,565	0,99	-5,523

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan data terbaru di tahun 2023, produksi padi dan konversi Gabah Kering Giling (GKG) ke beras di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan beberapa tren penting terkait ketahanan pangan regional. Barito Kuala merupakan kontributor terbesar surplus beras dengan 70.922 ton, didukung oleh produksi padi tertinggi (188.250 ton) dan nilai Daya Dukung Lahan (DDL) tertinggi (2,75). Tapin juga menunjukkan performa baik dengan surplus sebesar 39.400 ton, didukung DDL tinggi (2,62) dan produksi padi sebesar 107.771 ton. Kabupaten lain seperti Hulu Sungai Tengah (31.179 ton) dan Hulu Sungai Selatan (21.519 ton) memiliki surplus signifikan dengan nilai DDL yang relatif tinggi.

Banjarmasin mengalami defisit tertinggi sebesar -79.861 ton akibat keterbatasan produksi padi (hanya 4.687 ton) dan nilai DDL yang sangat rendah (0,03). Ini disebabkan oleh keterbatasan lahan produktif akibat urbanisasi. Banjarbaru juga mengalami defisit sebesar 32.445 ton dengan DDL hanya 0,02, menegaskan tantangan serupa dalam penyediaan lahan pertanian produktif. Kabupaten lain dengan defisit besar adalah Kotabaru (-32.132 ton) dan Tanah Laut (-13.488 ton).



Provinsi Kalimantan Selatan secara total mengalami defisit sebesar -5.523 ton, dengan produksi padi mencapai 875.545 ton dan beras yang dikonversi sebesar 518.042 ton. Angka konsumsi beras penduduk 4.222.300 jiwa sebesar 523.565 ton melebihi ketersediaan beras. Kabupaten dengan DDL tinggi seperti Barito Kuala, Tapin, dan Hulu Sungai Tengah berpotensi menjadi lumbung pangan untuk menutupi defisit di wilayah lain. Sebaliknya, kabupaten dengan DDL rendah seperti Banjarmasin dan Banjarbaru memerlukan strategi khusus seperti optimalisasi distribusi pangan dan diversifikasi sumber pangan.

Secara keseluruhan, ketidakseimbangan produksi dan konsumsi antar wilayah menunjukkan pentingnya perencanaan tata ruang, peningkatan produktivitas pertanian, serta kebijakan distribusi pangan yang merata untuk mencapai ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Upaya ini dapat mendukung KLHS dalam menyusun kebijakan berkelanjutan yang memperhitungkan daya dukung lingkungan dan kebutuhan penduduk.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Ketahanan Energi

1. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Intensitas Energi Primer

Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).

Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah.



b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Tabel 2.5.
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

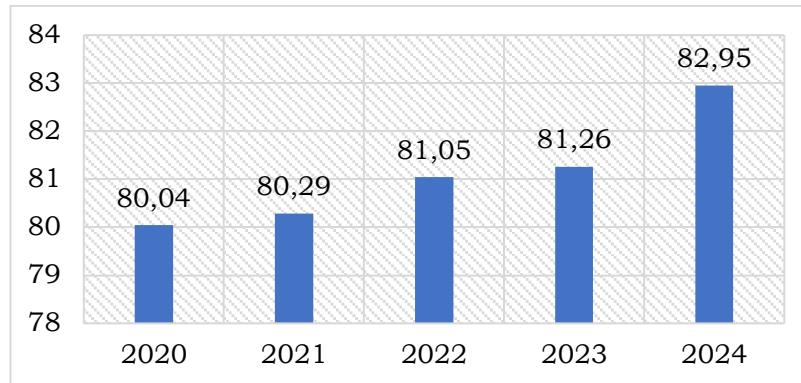
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	2,72	2,78	4,47	4,48	3,83

Sumber: BPS RI, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,72 dan meningkat hingga tahun 2023 menjadi 4,48, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 3,83.

c. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah. Berdasarkan publikasi Badan Pangan Nasional, nilai IKP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mencapai 80,04 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya sampai mencapai 82,95 pada Tahun 2024. Perkembangan nilai IKP Kalimantan Selatan dimuat pada tabel di bawah.

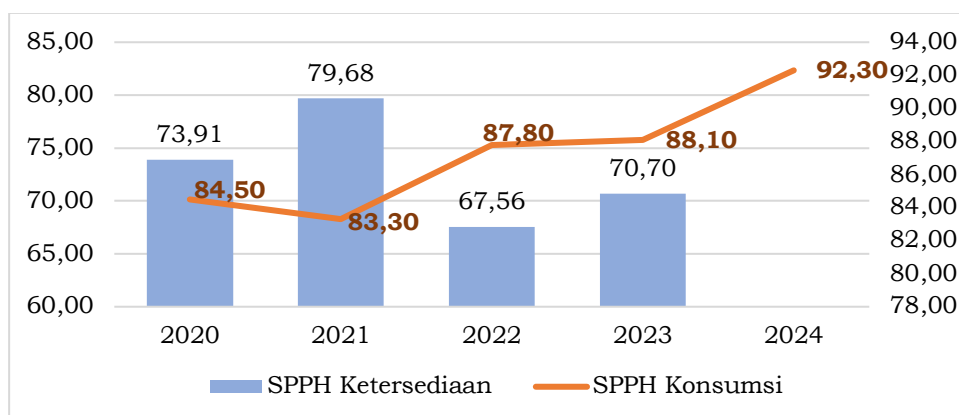


Gambar 2.5.
Indeks Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

d. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Ketersediaan dan Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Konsumsi adalah Nilai kualitas keragaman konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Sementara SPPH Ketersediaan adalah angka kualitas ketersediaan pangan penduduk di suatu wilayah berupa komposisi sembilan kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kecukupan gizi dan zat gizi lainnya.



Gambar 2.6.
Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Ketersediaan dan Konsumsi
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar di atas diketahui bahwa SPPH Ketersediaan dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 berfluktuatif cenderung menurun, dimana pada tahun 2020



mencapai 73,91 berfluktuatif sampai tahun 2023 menjadi 70,70. Adapun angka tertinggi SPPH Ketersediaan terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 79,68 sedangkan terendah di tahun 2022 dengan nilai 67,56. Sementara data tahun 2024 tidak tersedia.

Pada periode yang sama SPPH Konsumsi menunjukkan tren peningkatan, walaupun di tahun 202 sempat mengalami penurunan. Nilai SPPH Konsumsi pada tahun 2021 menurun dari 84,50 di tahun 2020 menjadi 83,30. Pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan dan posisi terakhir pada tahun 2024 menjadi 92,30. Adapun angka tertinggi SPPH Konsumsi berada di tahun 2024 sedangkan terendah di tahun 2021 yakni mencapai 83,30.

e. Ketahanan Air

1. Kapasitas Air Baku

Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.

2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan



keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, berkelanjutan maupun adalah genetik. pemanfaatan Pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di sebuah wilayah secara umum yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perkembangan IKLH Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian IKLH terakhir pada tahun 2024 sebesar 75,59 dengan kategori Baik. Ini berarti terjadi peningkatan 2,09 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya komponen-komponen IKLH.

Adapun capaian dari masing-masing komponen pada tahun 2024, yaitu Indeks Kualitas Air sebesar 56,08, meningkat dari tahun sebelumnya; Indeks Kualitas Udara sebesar 96,41, meningkat dari tahun sebelumnya; Indeks Tutupan Lahan sebesar 52, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya; dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 84,27, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan IKLH dan keempat komponen pembentuknya selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.6.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas lingkunganHidup (IKLH)	Indeks	68,43	71,03	71,97	73,50	75,59
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,67	54,75	54,63	55,64	56,08
3.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,93	89,15	89,52	92,85	96,41
4.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	48,48	50,26	50,52	52,08	52
5.	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	51,67	76,45	84,42	79,94	84,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan, 2025

c. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan



lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

d. Pengolahan Sampah

1. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola



operator pemerintah dan/atau swasta. Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia dapat dijelaskan bahwa Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,2 persen.

2. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:

- a) Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau
- b) Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Adapun Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 65,85 persen.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Jasa Lingkungan Pengatur Iklim merupakan manfaat ekosistem yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan iklim lokal, regional, maupun global. Ekosistem, terutama hutan, rawa, dan lahan basah, memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO₂), yang merupakan salah satu gas rumah kaca utama penyebab perubahan iklim. Selain itu, jasa lingkungan ini juga mencakup regulasi



suhu, kelembapan, dan pola curah hujan melalui interaksi antara vegetasi dan atmosfer.

Jasa lingkungan pengatur iklim di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar berada dalam kategori sedang dengan persentase 36,99%, diikuti oleh kategori tinggi sebesar 36,94%, sementara kategori rendah hanya mencapai 22,08%. Secara administratif, wilayah dengan kategori jasa lingkungan pengatur iklim tinggi mencakup Kabupaten Barito Kuala (24,77%), Banjar (20,05%), dan Kotabaru (21,20%). Sebaliknya, kategori rendah terbesar ditemukan di Kabupaten Tapin (34,81%), Banjar (17,17%), dan Barito Kuala (15,53%).

Tabel 2.7.
Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten	Jasa Lingkungan Pengatur Iklim					Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Balangan	65.950	73.869	17.324	23.577	2.093	182.813
Banjar	151.825	164.716	33.878	102.943	5.636	458.998
Banjarbaru	705	15.420	7.505	5.167	1.740	30.537
Banjarmasin			2.143	2.617	5.086	9.846
Barito Kuala	1.500	1.475	102.947	127.681	9.294	242.897
Hulu Sungai Selatan	29.541	23.758	84.609	29.144	2.703	169.755
Hulu Sungai Tengah	81.176	16.787	29.948	26.405	3.024	157.340
Hulu Sungai Utara		10.544	59.232	18.513	2.484	90.773
Kotabaru	440.674	190.021	272.015	31.806	566	935.082
Tabalong	201.221	77.673	30.919	34.834	2.623	347.270
Tanah Bumbu	158.457	101.732	156.061	69.008	3.225	488.483
Tanah Laut	69.965	144.907	120.907	46.907	1.704	384.390
Tapin	13.094	34.195	59.087	106.157	3.143	215.676
Prov. Kalsel	1.214.107	855.097	976.574	624.760	43.320	3.713.858
Persentase	32,63	22,98	26,25	16,79	1,16	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Perbandingan distribusi jasa lingkungan pengatur iklim menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kapasitas tertinggi dalam kategori tinggi dengan persentase mencapai 76,97%, diikuti oleh Tabalong sebesar 67,30%. Sementara itu, Kota Banjarmasin didominasi oleh kategori rendah sebesar 51,65%, yang mencerminkan tantangan dalam pengaturan iklim di kawasan perkotaan akibat keterbatasan tutupan vegetasi serta meningkatnya emisi dari aktivitas manusia.

Distribusi ini menunjukkan pentingnya peran ekosistem alami, seperti hutan dan lahan basah, dalam mendukung kemampuan



pengaturan iklim di wilayah-wilayah dengan kapasitas tinggi. Di sisi lain, wilayah dengan kategori rendah membutuhkan intervensi berupa peningkatan ruang hijau, restorasi ekosistem, dan pengurangan emisi untuk memperbaiki fungsi ekosistem pengatur iklim.

b. Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Alam (Mitigasi Bencana)

Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Alam (Mitigasi Bencana) adalah salah satu manfaat penting yang diberikan oleh ekosistem dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan lingkungan. Jasa lingkungan ini mencakup kemampuan ekosistem dalam menyerap, mengalirkan, dan menahan air (seperti di kawasan hutan dan lahan basah), yang berfungsi untuk mencegah banjir, erosi tanah, serta mengurangi dampak dari pergerakan tanah dan kebakaran hutan. Selain itu, ekosistem juga berperan dalam menjaga kestabilan iklim lokal, mencegah kebakaran hutan, dan melindungi kawasan pesisir dari dampak abrasi dan bencana tsunami.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, ekosistem alami seperti hutan, rawa gambut, dan lahan basah berperan penting dalam mitigasi bencana. Kawasan hutan berfungsi sebagai penyerap air hujan, mencegah terjadinya banjir, dan mengurangi potensi longsor pada daerah-daerah dengan kemiringan lereng yang curam. Sementara itu, lahan gambut dan rawa berperan dalam menahan air dan mengurangi risiko bencana banjir musiman.

Jasa lingkungan pengatur mitigasi bencana di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan distribusi yang signifikan dalam kategori sedang dengan persentase 36,99%, diikuti dengan kategori tinggi sebesar 36,94%, sementara kategori rendah hanya mencapai 22,08%. Secara administratif, wilayah dengan kategori jasa lingkungan mitigasi bencana tinggi terdapat di Kabupaten Barito Kuala (24,77%), Banjar (20,05%), dan Kotabaru (21,20%). Sementara itu, kategori rendah terbesar ditemukan di Kabupaten Tapin (34,81%), Banjar (17,17%), dan Barito Kuala (15,53%).



Tabel 2.8.
Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Alam (Mitigasi Bencana) berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kab/Kota	Jasa Lingkungan Mitigasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Banjarbaru	67.081	65.089	28.579	15.488	6.575	182.812
2	Banjarmasin	161.688	166.130	16.246	50.624	64.311	458.998
3	Balangan	4.299	13.259	3.356	6.890	2.733	30.536
4	Banjar		931	0	1.218	7.698	9.847
5	Barito Kuala	1.664	51.986	4.995	118.016	66.235	242.896
6	Hulu Sungai Selatan	29.835	43.237	41.278	40.812	14.595	169.756
7	Hulu Sungai Tengah	81.295	27.033	18.005	2.969	28.038	157.341
8	Hulu Sungai Utara	10.495	42.889	10.702	10.512	16.174	90.772
9	Kotabaru	442.705	148.167	285.297	56.815	2.098	935.082
10	Tabalong	192.262	90.269	37.420	17.784	9.535	347.270
11	Tanah Bumbu	176.773	82.446	151.344	65.898	12.023	488.483
12	Tanah Laut	80.513	132.235	100.733	55.200	15.709	384.390
13	Tapin	13.389	77.295	9.177	80.835	34.980	215.675
14	Kalimantan Selatan	1.261.998	940.965	707.133	523.060	280.702	3.713.858
	Persentase	33,92	25,29	19,01	14,06	7,54	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Perbandingan distribusi jasa lingkungan pengatur mitigasi bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kapasitas tertinggi dalam kategori tinggi dengan persentase mencapai 76,97%, diikuti oleh Tabalong sebesar 67,30%. Sementara itu, Kota Banjarmasin didominasi oleh kategori rendah dengan persentase 51,65%, yang mencerminkan tantangan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di daerah perkotaan.

Distribusi ini menyoroti pentingnya keberadaan ekosistem alami seperti hutan dan lahan basah di wilayah dengan kategori tinggi, yang berperan dalam menahan dan mengalirkan air, serta mencegah bencana seperti banjir dan tanah longsor. Di sisi lain, wilayah dengan kategori rendah, terutama di kawasan perkotaan, memerlukan peningkatan pengelolaan ekosistem dan ruang terbuka hijau untuk memperkuat mitigasi bencana.

Namun, tantangan terbesar dalam menjaga jasa lingkungan mitigasi bencana adalah konversi lahan, deforestasi, serta peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat merusak fungsi alami ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan dan lahan gambut, serta penguatan kebijakan pengurangan risiko bencana



sangat penting untuk meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana alam.

c. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK), Provinsi Kalimantan Selatan memiliki total 2.008 desa yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim. Dari jumlah tersebut, 62 desa (3%) tergolong tidak rentan, 538 desa (27%) agak rentan, 1.296 desa (65%) cukup rentan, 12 desa (1%) rentan, dan 100 desa (5%) sangat rentan. Kabupaten dengan jumlah desa sangat rentan tertinggi adalah Kabupaten Tanah Bumbu (17 desa), sedangkan Kota Banjarmasin tidak memiliki desa dengan tingkat kerentanan tinggi. Kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang tergolong tidak rentan adalah Tabalong (10 desa), sementara Hulu Sungai Utara memiliki proporsi desa agak rentan tertinggi (147 desa). Data ini mencerminkan distribusi tingkat kerentanan yang beragam di Kalimantan Selatan, menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis wilayah dalam merancang strategi adaptasi perubahan iklim.

Tabel 2.9.
Jumlah Desa Berdasarkan Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim
di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Menurut Tingkat Kerentanan Berdasarkan Data SIDIK					Total
	Tidak Rentan	Agak Rentan	Cukup Rentan	Rentan	Sangat Rentan	
Balangan	8	68	74		7	157
Banjar	6	69	203	4	8	290
Barito Kuala	2	72	111	1	15	201
Hulu Sungai Selatan	2	31	101		14	148
Hulu Sungai Tengah	4	46	110	1	8	169
Hulu Sungai Utara	3	147	59		10	219
Kota Banjar Baru	9	1	10			20
Kota Banjarmasin	9		43			52
Kota Baru	2	24	169	1	6	202
Tabalong	10	32	87		2	131
Tanah Bumbu	3	7	118	4	17	149
Tanah Laut	3	12	117		3	135
Tapin	1	29	94	1	10	135
Kalimantan Selatan	62	538	1296	12	100	2008
Persentase	3%	27%	65%	1%	5%	100%

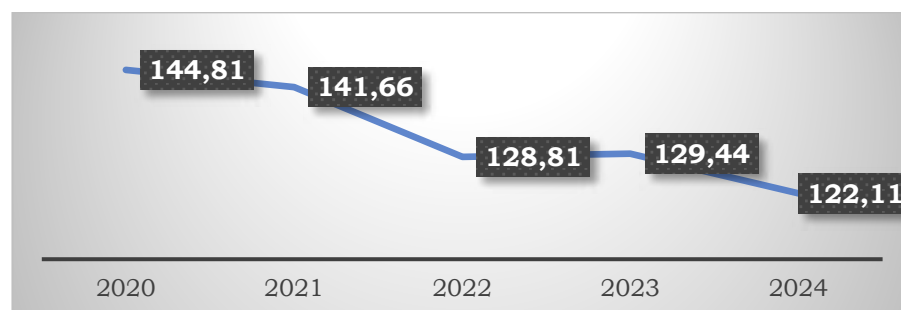
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029



Secara keseluruhan, mayoritas desa di Kalimantan Selatan berada dalam kategori cukup rentan (65%), menunjukkan bahwa meskipun dampaknya tidak parah, wilayah ini tetap memiliki risiko yang signifikan terhadap perubahan iklim. Kabupaten Banjar memiliki jumlah desa cukup rentan tertinggi, yaitu 203 desa, diikuti oleh Kota Baru dengan 169 desa. Sementara itu, kabupaten dengan jumlah desa paling sedikit dalam kategori rentan adalah Hulu Sungai Tengah (1 desa), dan beberapa kabupaten/kota seperti Hulu Sungai Utara dan Kota Banjarbaru tidak memiliki desa yang masuk kategori rentan.

d. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami penurunan, namun sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2023, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 129,44. Selanjutnya pada tahun 2024 indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) Kalimantan Selatan kembali turun menjadi hanya 122,11 dengan kelas risiko Sedang. Perkembangan IRBI Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.7.
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BNPB (publish buku IRBI), 2024

Pada periode IRBI 2012-2024, komponen bahaya dan kerentanan (indeks bahaya, penduduk terpapar, kerugian rupiah, dan kerusakan lingkungan) memakai hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2011. Kedepannya, perhitungan IRBI akan memanfaatkan komponen bahaya dan kerentanan berdasarkan hasil KRB tahun 2021. Indeks risiko bencana



Kalimantan Selatan tahun 2024 yang menggunakan basis data bahaya dan kerentanan tahun 2021 adalah 103,75. Nilai tersebut lebih rendah jika disandingkan dengan indeks risiko yang menggunakan basis data bahaya dan kerentanan tahun 2011, yaitu 122,11.

Indeks Risiko Bencana Indonesia kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 umumnya berada pada kelas risiko Sedang, kecuali di Tabalong, Barito Kuala, Kota Baru dan Tanah Laut yang memiliki kelas risiko Tinggi.

Tabel 2.10.
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko
1	Tabalong	152,40	149,03	130.06	129.09	157,77	Tinggi
2	Barito Kuala	155,45	155,96	140.65	137.92	156,15	Tinggi
3	Kotabaru	158,79	172,71	162,17	147.79	152,79	Tinggi
4	Tanah Laut	178,00	178,00	156,33	169.22	145,09	Tinggi
5	Hulu Sungai Selatan	152,40	150,00	141.29	133.44	119,36	Sedang
6	Banjar	176,40	165,12	150.41	149.60	118,31	Sedang
7	Tanah Bumbu	155,60	143,94	125.17	142.82	118,27	Sedang
8	Hulu Sungai Tengah	140,40	133,87	125.74	121.07	116,35	Sedang
9	Tapin	140,40	128,79	110.71	125.74	106,70	Sedang
10	Balangan	139,89	133,77	126.16	115.21	104,24	Sedang
11	Banjarmasin	96,40	96,40	84.09	92.44	102,77	Sedang
12	Hulu Sungai Utara	128,40	126,00	126.00	114.97	97,69	Sedang
13	Banjarmasin	108,00	108,00	95,78	103.35	91,98	Sedang
	Kalimantan Selatan	144,81	141,66	128,81	129,44	122,11	Sedang

Sumber: BNPB (publish buku IRBI), 2024 dan <https://inikalsel.id/ini-ikd-dan-irbi-provinsi-kalimantan-selatan-2024/>

e. **Persentase Penurunan Emisi GRK**

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka



baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama.

Adapun Persentase Penurunan Emisi GRK di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 secara kumulatif yaitu sebesar 15,26 persen dan tahunan sebesar 26,6 persen.

f. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergi antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penghitungan dan publikasi Bappenas, maka Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai 72,52 persen.

2.1.1.7. Demografi

Penduduk Kalimantan Selatan selama kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS terlihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun tahun 2020 yaitu sebesar 4.073.584 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 4.273.400 jiwa.

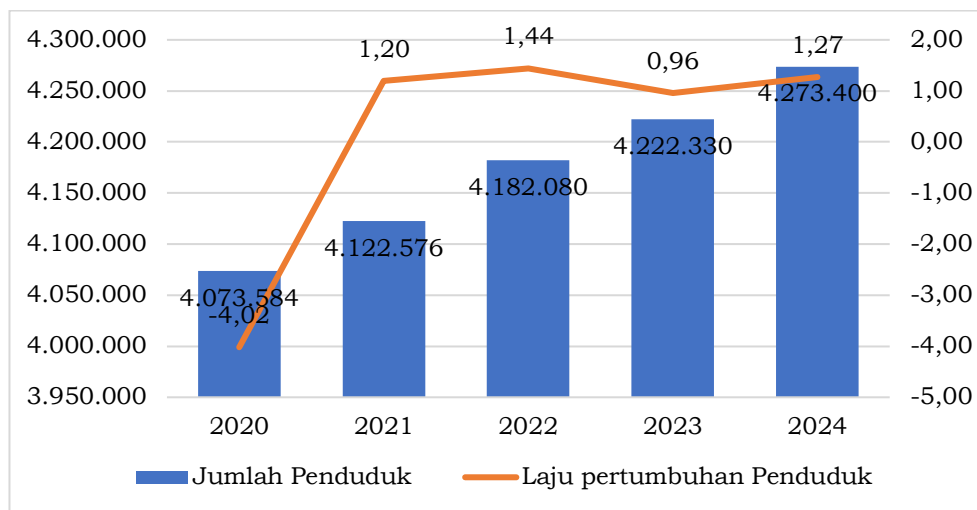
Laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2020-2024 mengalami titik terendah pada tahun 2020. Namun mulai tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,96 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,44 persen. Selanjutnya pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk provinsi Kalimantan Selatan sedikit mengalami peningkatan kembali menjadi 1,27 persen. Perkembangan jumlah penduduk Kalimantan Selatan periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah.



Tabel 2.11.
Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

Kabupaten /Kota	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	348.966	354.340	361.044	360.930	364.980
Kotabaru	325.622	329.483	334.158	339.060	343.680
Banjar	565.635	572.109	579.910	591.510	600.640
Barito kuala	313.021	316.963	321.769	326.280	330.990
Tapin	189.475	191.801	194.628	196.470	198.870
Hulu Sungai Selatan	228.006	229.960	232.212	235.980	238.780
Hulu Sungai Tengah	258.721	260.754	263.061	266.200	268.750
Hulu Sungai Utara	226.727	228.831	231.290	234.510	237.110
Tabalong	253.305	256.903	261.353	263.400	266.890
Tanah Bumbu	322.646	328.146	335.079	337.330	342.360
Balangan	130.355	132.213	134.512	136.120	138.120
Kota Banjarmasin	657.663	662.320	667.489	666.440	668.760
Kota Banjarbaru	253.442	258.753	265.575	268.110	273.470
Kalimantan Selatan	4.073.584	4.122.576	4.182.080	4.222.330	4.273.400

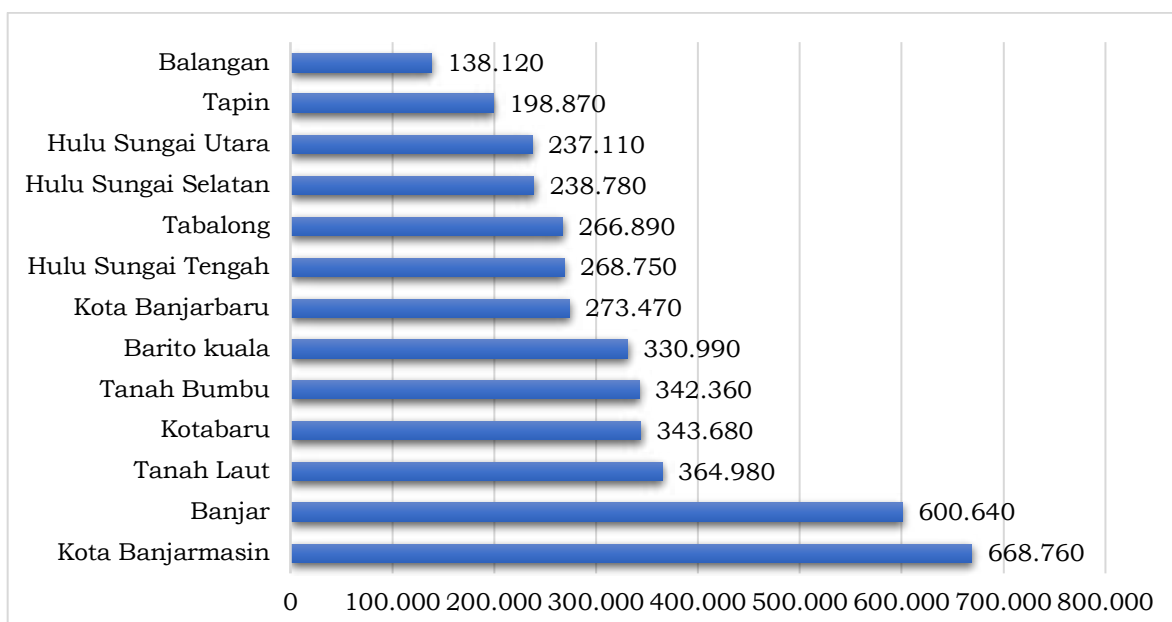
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



Gambar 2.8.
Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Pada Tahun 2024 Kota Banjarmasin merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 668.760 jiwa dan Kabupaten Balangan merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 138.120 jiwa.



Gambar 2.9.
Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Jumlah penduduk Kalimantan Selatan tahun 2024 berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 4,27 juta jiwa yang terdiri atas 2,16 juta jiwa penduduk laki-laki dan 2,11 juta jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,27.

Tabel 2.12.
Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk per km ²
Tanah Laut	364.980	104,63	3.841,372	95,01
Kotabaru	343.680	105,94	9.354,933	36,74
Banjar	600.640	101,87	4.588,438	130,90
Barito kuala	330.990	102,66	2.426,179	136,42
Tapin	198.870	102,12	2.155,939	92,24
Hulu Sungai Selatan	238.780	101,03	1.697,224	140,69
Hulu Sungai Tengah	268.750	101,30	1.573,538	170,79
Hulu Sungai Utara	237.110	100,19	907,491	261,28
Tabalong	266.890	102,77	3.473,069	76,85
Tanah Bumbu	342.360	104,69	4.884,833	70,09
Balangan	138.120	102,27	1.828,513	75,54
Kota Banjarmasin	668.760	100,14	98,372	6.798,28
Kota Banjarbaru	273.470	100,83	305,153	896,17
Kalimantan Selatan	4.273.400	102,27	37.135,054	115,08

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



Pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Adapun laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2024 terdapat di Kota Banjarbaru sebesar 2,07 persen dan yang terendah adalah Kota Banjarmasin yakni 0,41 persen.

Tabel 2.13.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2020-2024

Kabupaten /Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	1,48	1,54	1,89	-0,03	1,19
Kotabaru	-4,85	1,19	1,42	1,47	1,43
Banjar	-3,81	1,14	1,36	2,00	1,61
Barito kuala	-0,18	1,26	1,52	1,40	1,50
Tapin	-0,99	1,23	1,47	0,95	1,29
Hulu Sungai Selatan	-4,08	0,86	0,98	1,62	1,24
Hulu Sungai Tengah	-5,03	0,79	0,88	1,19	1,01
Hulu Sungai Utara	-4,57	0,93	1,07	1,39	1,17
Tabalong	-0,40	1,42	1,73	0,78	1,40
Tanah Bumbu	-10,42	1,70	2,11	0,67	1,58
Balangan	-0,82	1,43	1,74	1,20	1,55
Kota Banjarmasin	-7,19	0,71	0,78	-0,16	0,41
Kota Banjarbaru	-3,53	2,10	2,64	0,95	2,07
Kalimantan Selatan	-4,02	1,20	1,44	0,96	1,27

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Jumlah penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan kelompok umur pada periode tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan jumlah terbanyak pada kelompok umur 5-9 tahun diikuti dengan 10-14 tahun dan 0-4 tahun. Namun bila dikelompokkan berdasarkan usia produktif dan usia tidak/belum produktif, maka penduduk Kalimantan Selatan paling banyak di usia produktif. Kondisi ini merupakan salah satu pilar pembangunan yang perlu diberdayakan dan diperkuat daya saingnya.

Dalam periode yang sama, pada seluruh kelompok umur jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan, kecuali pada kelompok umur diatas 65 tahun. Sejak dua tahun terakhir pada kelompok umur 60-64 tahun juga menunjukkan kecenderungan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.



Tabel 2.14.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020			2021			2022			2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	188.557	180.247	368.804	185.697	177.510	363.207	184.517	176.478	360.955	184.810	176.900	361.710	185.140	177.440	362.580
5-9	198.799	190.550	389.349	199.532	191.945	391.477	198.486	191.259	389.745	195.190	187.260	382.440	191.170	183.110	374.280
10-14	174.728	163.785	338.513	178.843	168.006	346.849	184.643	174.203	358.846	189.900	180.590	370.480	195.010	186.320	381.330
15-19	170.989	160.686	331.675	170.463	159.860	330.323	170.530	159.550	330.080	170.080	159.100	329.170	171.420	160.420	331.840
20-24	173.440	164.980	338.420	173.169	164.038	337.207	173.061	163.308	336.369	171.120	161.690	332.810	170.390	160.640	331.030
25-29	170.662	164.063	334.725	170.803	164.180	334.983	171.630	164.856	336.486	171.630	164.320	335.950	171.920	164.360	336.280
30-34	167.929	163.853	331.782	168.549	164.054	332.603	169.275	164.374	333.649	168.450	163.290	331.730	168.560	163.030	331.590
35-39	160.327	157.409	317.736	161.563	158.381	319.944	163.429	159.976	323.405	163.780	160.500	324.280	165.000	161.560	326.560
40-44	153.553	151.314	304.867	154.749	152.664	307.413	155.964	153.936	309.900	156.480	154.160	310.640	157.220	154.810	312.030
45-49	137.029	135.178	272.207	139.962	138.520	278.482	143.167	142.071	285.238	145.830	144.370	290.190	148.360	146.950	295.310
50-54	116.401	114.393	230.794	119.752	117.903	237.655	123.359	121.772	245.131	126.310	125.190	251.500	129.580	128.780	258.360
55-59	93.884	92.670	186.554	97.299	96.369	193.668	100.845	100.131	200.976	104.080	103.670	207.750	107.400	107.250	214.650
60-64	68.502	68.161	136.663	71.868	71.845	143.713	75.643	75.984	151.627	79.410	80.120	159.540	83.190	84.340	167.530
65-69	46.844	48.284	95.128	49.831	51.180	101.011	52.503	53.999	106.502	55.130	56.740	111.870	57.710	59.690	117.400
70-74	21.312	27.228	48.540	24.380	29.940	54.320	27.951	33.009	60.960	31.810	35.990	67.800	35.360	39.130	74.490
+75	19.427	28.340	47.767	20.043	29.678	49.721	20.902	31.269	52.171	21.720	32.760	54.480	23.270	34.890	58.160
Kalsel	2.062.383	2.011.201	4.073.584	2.086.503	2.036.073	4.122.576	2.115.905	2.066.175	4.182.080	2.135.700	2.086.630	4.222.330	2.160.690	2.112.710	4.273.400

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025



Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan mencapai 4.323,33 ribu orang pada tahun 2025. Angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 4.555,83 ribu orang pada tahun 2030. Lebih lanjut, hasil proyeksi memperlihatkan penduduk umur 0–14 tahun diproyeksikan sebesar 1,12 juta orang pada tahun 2025. Sampai dengan tahun 2030, kelompok umur ini diproyeksikan secara bertahap mengalami penurunan.

Adapun komposisi penduduk umur 15–64 tahun dari 68,38 persen di tahun 2020 akan menurun menjadi 67,95 persen pada tahun 2025 dan pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 68,21 persen dari jumlah total penduduk. Selanjutnya, penduduk yang berumur 65 tahun ke atas meningkat dengan cepat hingga tahun 2030. Berdasarkan hasil penghitungan proyeksi, penduduk umur 65 tahun ke atas meningkat dari 191,01 ribu orang pada tahun 2020 menjadi 362,26 ribu orang pada tahun 2030. Proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mewakili 4,70 persen dari total populasi pada tahun 2020. Pada tahun 2030, proporsi penduduk berumur 65 tahun ke atas diproyeksikan akan meningkat menjadi 7,95 persen.

Tabel 2.15.
Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030
(dalam ribu)

Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	362,69	360,99	359,48	358,21	357,23	356,61
5-9	367,14	363,22	361,20	361,06	361,94	362,06
10-14	388,67	391,31	389,05	382,83	374,66	367,52
15-19	337,48	346,38	357,97	370,38	381,23	388,57
20-24	329,69	328,59	327,77	328,11	330,78	336,42
25-29	335,89	334,76	333,12	331,24	329,48	328,15
30-34	331,72	332,26	333,07	333,87	334,21	333,82
35-39	328,14	328,97	329,18	329,03	328,9	329,05
40-44	313,74	315,95	318,51	321,15	323,41	325,00
45-49	299,49	302,55	304,62	306,08	307,48	309,19
50-54	264,98	271,43	277,66	283,43	288,47	292,57
55-59	221,61	228,61	235,55	242,4	249,07	255,51
60-64	175,16	182,38	189,24	195,89	202,47	209,11
65-69	123,54	130,33	137,57	145,02	152,37	159,40
70-74	80,57	85,94	90,76	95,38	100,23	105,59
75+	62,81	68,47	74,99	82,14	89,63	97,27
TOTAL	4.323,33	4.372,11	4.419,74	4.466,21	4.511,56	4.555,83

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045

Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan sampai tahun 2030 diproyeksikan meningkat, dengan proporsi penduduk laki-laki sedikit lebih



banyak dibandingkan penduduk perempuan. Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 sampai 2030 yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.16.
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2025-2030

Parameter	2025	2030
PENDUDUK		
Laki-Laki (000)	2.185,00	2.296,47
Perempuan (000)	2.138,33	2.259,37
Total (000)	4.323,33	4.555,83
Sex Ratio (%)	102,18	101,64
Komposisi Umur (%)		
0-14	25,87	23,84
15-64	67,95	68,21
65+	6,17	7,95
Dependency Ratio (%)	47,16	46,61
FERTILITAS		
Total Fertility Rate (TFR) ¹	2,25	2,2
Crude Birth Rate (CBR)	16,84	15,86
Jumlah Kelahiran (000)	72,82	72,24
MORTALITAS		
E0 Laki-Laki	71,60	71,77
E0 Perempuan	76,28	76,91
E0 Laki-Laki + Perempuan	73,88	74,27
IMR Laki-Laki	17,21	15,37
IMR Perempuan	12,28	11,03
IMR Laki-Laki + Perempuan	14,81	13,26
Crude Death Rate (CDR)	5,32	6,16
Jumlah Kematian (000)	22,99	28,07
MIGRASI		
Net Migration Rate	-0,14	-0,15

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang baik. Perekonomian Kalimantan Selatan 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 286,81 triliun atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang hanya sebesar 269,19 triliun. dengan kondisi pada tahun 2023 yang mencapai 149,22 triliun.



Tabel 2.17.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.799,22	26.863,97	28.680,49	30.678,59	33.119,22
Pertambangan dan Penggalian	32.753,24	42.459,25	80.558,30	83.006,97	84.512,20
Industri Pengolahan	24.217,73	26.810,22	28.577,38	28.948,75	31.410,22
Pengadaan Listrik dan Gas	274,73	294,97	320,96	350,72	379,20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	805,80	855,21	912,80	985,41	1.061,25
Konstruksi	14.803,23	15.742,37	17.233,32	18.847,73	20.321,36
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.730,12	19.936,38	22.758,70	26.026,96	28.179,44
Transportasi dan Pergudangan	11.796,12	12.126,64	15.596,14	19.072,75	20.816,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.846,09	4.030,64	4.506,71	5.003,67	5.534,47
Informasi dan Komunikasi	7.032,16	7.586,35	8.298,94	8.936,22	9.656,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.569,43	6.933,86	7.461,55	8.261,30	8.924,72
Real Estate	4.352,93	4.687,63	5.072,21	5.523,69	5.992,36
Jasa Perusahaan	1.309,54	1.379,20	1.543,08	1.746,13	1.923,83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.397,08	11.731,82	12.024,81	12.864,24	14.276,42
Jasa Pendidikan	9.093,30	9.464,28	9.932,27	10.537,98	11.513,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.984,44	4.508,16	4.864,99	5.297,09	5.756,06
Jasa lainnya	2.396,87	2.471,45	2.755,99	3.103,81	3.441,88
PDRB	179.162,02	197.882,42	251.098,65	269.192,02	286.818,87

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Peningkatan juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan 2010 yang mencapai Rp 156,75 triliun di tahun 2024 atau mengalami kenaikan dibandingkan

Tabel 2.18.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.399,41	18.614,34	18.911,08	19.537,27	20.350,74
Pertambangan dan Penggalian	31.906,41	33.226,73	35.093,57	36.176,09	37.270,51
Industri Pengolahan	16.298,91	17.277,92	17.855,34	18.395,03	19.282,69
Pengadaan Listrik dan Gas	163,76	171,40	184,86	199,86	213,36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	572,86	601,69	630,96	660,54	691,98
Konstruksi	10.075,35	10.364,04	10.791,13	11.469,97	12.150,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.97,12	12.320,82	13.202,32	14.017,15	14.908,08
Transportasi dan Pergudangan	7.773,29	7.919,63	9.282,10	10.299,23	10.934,10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.628,49	2.705,83	2.966,30	3.241,51	3.503,16



Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Informasi dan Komunikasi	5.510,90	5.908,86	6.319,21	6.734,37	7.187,32
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.316,33	4.367,68	4.384,93	4.762,90	5.099,81
Real Estate	3.144,11	3.318,73	3.513,45	3.735,36	3.948,94
Jasa Perusahaan	806,23	835,41	898,30	966,41	1.032,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.033,24	7.144,27	7.182,47	7.391,99	7.905,77
Jasa Pendidikan	6.117,21	6.211,32	6.429,09	6.656,62	6.985,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.629,63	2.893,56	3.047,17	3.220,53	3.399,82
Jasa lainnya	1.516,09	1.542,36	1.646,94	1.761,26	1.891,78
PDRB	130.864,32	135.424,59	142.339,22	149.226,10	156.756,94

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Risiko perekonomian global yang kembali meningkat pada 2024 memberikan tantangan bagi upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di tengah prospek penurunan ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Perkembangan positif tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap kuat serta permintaan domestik yang solid seiring dengan peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat yang masih terjaga. Perbaikan ekonomi sepanjang 2024 ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.19.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran 2020-2024 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1 Konsumsi Rata	87.613,07	90.903,44	103.215,11	113.382,82	122.633,78
2 Konsumsi LNPR	1.938,91	2.007,59	2.193,86	2.509,41	2.928,14
3 Konsumsi Pemerintah	22.337,92	23.691,71	24.604,59	26.755,60	30.031,82
4 PMTB	44.964,26	46.442,44	51.628,81	56.526,65	61.221,59
5 Perubahan Inventori	70,57	95,34	-859,82	-1.540,46	-691,15
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	22.237,24	34.741,91	70.316,09	71.558,01	70.694,69
PDRB	179.162,02	197.882,42	251.098,65	269.192,02	286.818,87

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Nilai PDRB Kalimantan Selatan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut tidak terlepas dari kontribusi perubahan jumlah volume produksi sekaligus perkembangan harga pada periode waktu yang sama. Nilai ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai Rp. 286,81 triliun rupiah yang sebagian besar masih digerakkan oleh komponen pengeluaran konsumsi (konsumsi akhir rumah tangga dan lembaga nirlaba, belanja pemerintah).



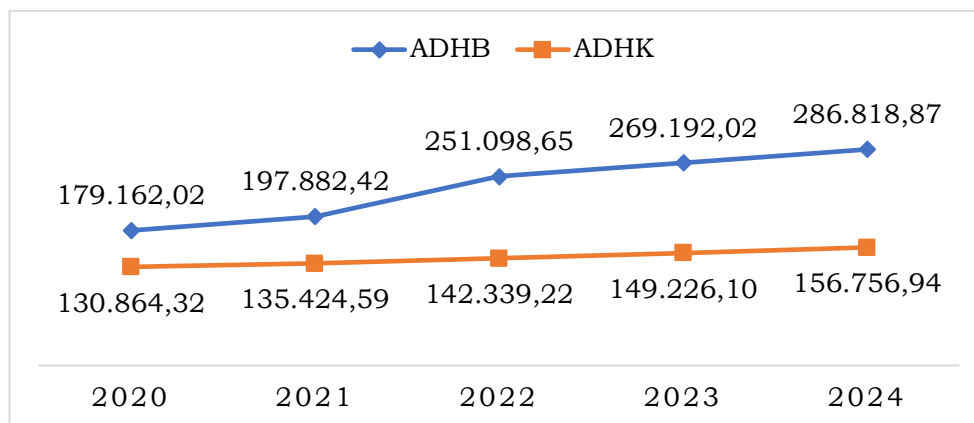
Selain dinilai atas dasar harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan 2010 yaitu produk barang dan jasa diukur dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas saja, tanpa ada pengaruh perubahan harga. Dengan kata lain PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, karena hanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2020–2024, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran 2020-2024 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran		2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Ruta	61.910,59	62.600,00	65.860,02	69.278,91	72.996,12
2	Konsumsi LNPRT	1.247,68	1.261,41	1.324,75	1.434,92	1.630,27
3	Konsumsi Pemerintah	13.401,76	13.896,64	13.807,16	14.492,99	15.182,27
4	PMTB	30.092,96	30.346,15	31.935,78	33.588,68	35.259,02
5	Perubahan Inventori	52,35	68,14	-550,67	-946,15	-417,07
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	24.158,95	27.252,25	29.962,18	31.376,74	32.106,32
PDRB		130.864,32	135.424,59	142.339,22	149.226,10	156.756,94

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Dari gambar di bawah, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan pengaruh harga telah ditiadakan.



Gambar 2.10.
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran 2020–2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Struktur ekonomi Kalimantan Selatan hingga saat ini masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengambil porsi 29,47 persen ekonomi di Kalimantan Selatan. Setidaknya selama 5 (lima) tahun terakhir kategori ini menyumbang secara rata-rata sekitar 26,42 persen. Kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi pintu penghubung perekonomian Kalimantan Selatan dengan ekonomi global. Komoditas ekspor Kalimantan Selatan didominasi oleh komoditas berkode HS27 yang kontennya adalah batu bara. Tiongkok merupakan tujuan utama ekspor batu bara Kalimantan Selatan.

Dominasi suatu sektor ekonomi pada suatu perekonomian wilayah dapat dilihat dari struktur ekonomi wilayah tersebut berdasarkan tiap-tiap lapangan usaha. Komposisi berbagai komponen makro secara agregat, perubahan relatif dari waktu ke waktu, dan hubungannya dengan sirkulasi pendapatan berkaitan erat dengan struktur ekonomi ini. Struktur ekonomi dapat dihitung menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Kategori dominan kedua hingga kelima penyumbang ekonomi Kalimantan Selatan selanjutnya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Kontruksi. Keempat kategori lapangan usaha ini memberikan nilai tambah sekitar 39,41 persen. Bersama dengan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, kelimanya dapat menggerakkan 63 persen lebih perekonomian di Kalimantan Selatan.



Tabel 2.21.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020–2024 (persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,40	13,58	11,42	11,40	11,55
Pertambangan dan Penggalian	18,28	21,46	32,08	30,84	29,47
Industri Pengolahan	13,52	13,55	11,38	10,75	10,95
Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,45	0,43	0,36	0,37	0,37
Konstruksi	8,26	7,96	6,86	7,00	7,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,45	10,07	9,06	9,67	9,82
Transportasi dan Pergudangan	6,58	6,13	6,21	7,09	7,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,04	1,79	1,86	1,93
Informasi dan Komunikasi	3,93	3,83	3,31	3,32	3,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,67	3,50	2,97	3,07	3,11
Real Estate	2,43	2,37	2,02	2,05	2,09
Jasa Perusahaan	0,73	0,70	0,61	0,65	0,67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,36	5,93	4,79	4,78	4,98
Jasa Pendidikan	5,08	4,78	3,96	3,91	4,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,22	2,28	1,94	1,97	2,01
Jasa lainnya	1,34	1,25	1,10	1,15	1,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Kategori yang juga dominan dan mengalami peningkatan peranan adalah Transportasi dan Pergudangan. Diantara 5 (lima) sektor dengan peranan terbesar, kategori Transportasi dan Pergudangan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami peningkatan peranan dalam satu tahun terakhir. Kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen, tepatnya dari 7,09 menjadi 7,26 persen.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan barang dan jasa (produk) yang dihasilkan pada suatu waktu tertentu di wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan peningkatan ukuran ekonomi. peningkatan ukuran pasar serta secara tidak langsung menggambarkan peningkatan kapasitas produksi. Pada periode 2020-2021, perekonomian Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan pertumbuhan. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yakni berkontraksi 1,82 persen. Seiring mulai terkendalinya pandemi dan berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan, maka perekonomian Kalimantan Selatan meningkat pada tahun 2021 menjadi 3,48 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 5,11 persen. Namun pada tahun 2023



pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengalami penurunan hingga menjadi 4,84 persen.

Selanjutnya ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen dibandingkan dengan tahun 2023 (c-to-c). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,07 persen; Jasa lainnya sebesar 7,41 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,07 persen. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian yang mencapai 29,47 persen, kemudian disusul Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,55 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 10,95 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,82 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 61,79 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan tahun 2024, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,73 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0,60 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 0,59 persen.

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan IV-2024 dibanding triwulan IV-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,15 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,35 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,55 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,38 persen. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV-2024 juga didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 30,15 persen; Industri Pengolahan sebesar 11,70 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,90 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,75 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 61,51 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 1,04 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,66 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,60 persen.

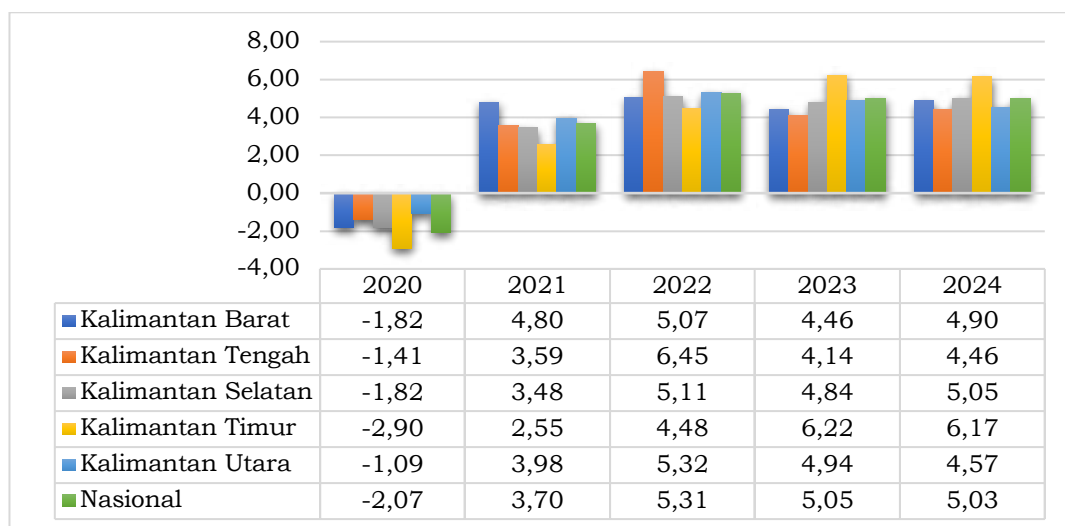


Tabel 2.22.
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020–2024 (persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,91	1,17	1,59	3,31	4,16
Pertambangan dan Penggalian	-4,44	4,14	5,62	3,08	3,03
Industri Pengolahan	-3,63	6,01	3,34	3,02	4,83
Pengadaan Listrik dan Gas	4,74	4,66	7,85	8,11	6,75
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	5,83	5,03	4,87	4,69	4,76
Konstruksi	-1,29	2,87	4,12	6,29	5,93
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,38	2,91	7,15	6,17	6,36
Transportasi dan Pergudangan	-5,32	1,88	17,20	10,96	6,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,02	2,94	9,63	9,28	8,07
Informasi dan Komunikasi	7,36	7,22	6,94	6,57	6,73
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,37	1,19	0,39	8,62	7,07
Real Estate	3,88	5,55	5,87	6,32	5,72
Jasa Perusahaan	-1,99	3,62	7,53	7,58	6,87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,73	1,58	0,53	2,92	6,95
Jasa Pendidikan	1,62	1,54	3,51	3,54	4,94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	10,04	5,31	5,69	5,57
Jasa lainnya	-1,46	1,73	6,78	6,94	7,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1,82	3,48	5,11	4,84	5,05

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 berada pada urutan tertinggi kedua dari 5 (lima) provinsi di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pertama yaitu Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,17 persen. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2024 juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,03 persen.



Gambar 2.11.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025



Dilihat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, daerah yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi pada tahun 2024 adalah Kota Banjarbaru yakni 6,71 persen. Di urutan kedua yaitu Kota Banjarmasin dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,63 persen dan urutan ketiga adalah Kabupaten Kotabaru dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen. Pertumbuhan ekonomi sebagian kabupaten/kota di Kalimantan Selatan Tahun pada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yaitu HSS, HSU, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, dan Banjarbaru.

Tabel 2.23.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

PROV/KAB/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	-1,95	3,47	5,12	4,78	5,01
Kotabaru	-1,88	3,35	4,58	4,29	5,34
Banjar	-1,96	3,21	4,48	4,35	4,76
Barito Kuala	-1,06	3,17	3,59	3,91	5,02
Tapin	-1,49	3,43	4,91	4,88	4,89
HSS	-1,19	4,19	4,02	5,27	5,15
HST	-1,01	3,01	3,92	4,11	4,95
HSU	-0,66	3,21	4,08	4,51	4,43
Tabalong	-2,50	3,27	5,29	4,90	4,87
Tanah Bumbu	-1,39	4,23	5,45	4,84	4,82
Balangan	-2,47	3,27	5,24	4,17	4,15
Banjarmasin	-1,88	3,41	5,69	5,62	5,63
Banjarbaru	-1,83	3,33	7,93	6,81	6,71
KALSEL	-1,82	3,48	5,11	4,84	5,05
INDONESIA	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2024

b. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita (ADHB) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita sebesar Rp44.101 ribu, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai Rp67.117 ribu pada tahun 2024. PDRB per kapita Kalimantan Selatan tahun 2024 mencapai 67.117 ribu rupiah menggunakan angka penduduk hasil proyeksi Interim Sensus Penduduk 2020 sebagai pembagi.



Tabel 2.24.
PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
- ADHB	179,16	197,88	251,09	269,19	286,81
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	44.101	48.066	60.213	63.754	67.117
Jumlah Penduduk (orang)	4.073.584	4.122.576	4.182.080	4.222.330	4.273.400

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2025

Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa tiga wilayah yang tergolong memiliki PDRB per kapita tinggi adalah Kabupaten Balangan (Rp 157.579 juta), Kabupaten Tabalong (Rp 122.313 ribu), dan Kabupaten Kotabaru (Rp 108.024 ribu). Ketiga kabupaten tersebut merupakan daerah yang memiliki potensi tambang batubara, dimana batubara merupakan produk yang dominan di Kalimantan Selatan. Sementara itu, wilayah yang memiliki PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni sebesar Rp 27.887 ribu.

Apabila PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar Rp 67.117 ribu rupiah dijadikan batas, maka ada enam kabupaten/kota yang memiliki nilai di atas PDRB per kapita provinsi yaitu Balangan, Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tapin dan Kota Banjarmasin. Berdasarkan nilai PDRB per kapita tersebut terlihat adanya kesenjangan, terutama antara daerah yang dominan dengan aktivitas pertambangan batubara dan daerah non tambang batubara.

Tabel 2.25.
PDRB ADHB per Kapita Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

PROV/KAB/KOTA	PDRB ADHB per Kapita (Ribu Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	39.660	43.502	53.319	55.872	58.233
Kotabaru	73.768	80.388	99.498	103.069	108.024
Banjar	29.293	31.308	36.189	38.265	40.027
Barito Kuala	27.908	28.971	30.692	32.389	34.292
Tapin	44.425	49.019	65.826	69.702	72.445
Hulu Sungai Selatan	28.837	30.944	36.208	38.839	41.467
Hulu Sungai Tengah	27.294	28.339	30.152	32.285	34.850
Hulu Sungai Utara	21.954	22.931	24.459	26.132	27.887
Tabalong	70.285	77.830	112.270	117.748	122.313
Tanah Bumbu	61.949	69.333	95.160	99.813	104.302
Balangan	82.540	93.645	148.029	153.372	157.579
Banjarmasin	49.815	52.333	57.991	63.095	68.285
Banjarbaru	37.852	38.867	44.860	49.712	53.088
KALSEL	44.101	48.066	60.213	63.754	67.117

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



c. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita

Data mengenai rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita sebulan di Kalimantan Selatan dapat dibedakan menjadi makanan dan non makanan. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, proporsi makanan dan non makanan per kapita mengalami fluktuasi namun konsisten bahwa persentase pengeluaran konsumsi makanan perkapita selalu lebih besar.

Persentase pengeluaran konsumsi makanan perkapita Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai 52,15 persen, sementara untuk non makanan sebesar 47,85 persen. Porsi pengeluaran untuk makanan meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.26.
Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai:					
Rata-Rata Pengeluaran konsumsi makanan perkapita sebulan (Rp)	675.979	701.228	727.961	747.955	799.948
Rata-Rata Pengeluaran konsumsi non makanan perkapita sebulan (Rp)	659.478	682.572	679.758	709.390	734.092
Persentase:					
Persentase pengeluaran konsumsi makanan perkapita (%)	50,62	50,67	51,71	51,32	52,15
Persentase pengeluaran konsumsi non makanan perkapita (%)	49,38	49,33	48,29	48,68	47,85

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2020-2025

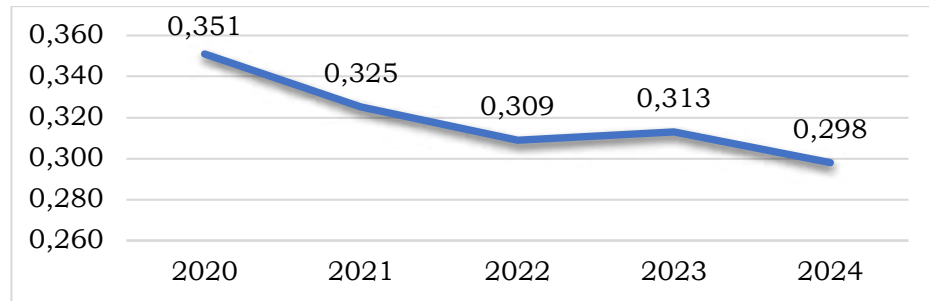
d. Indeks Gini

Indeks Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Semakin tinggi nilai koefisien, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan, dan semakin tidak merata tingkat pengeluaran antar penduduk di suatu wilayah pengamatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien, maka semakin rendah tingkat ketimpangan dan semakin merata tingkat pengeluaran penduduk. Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, sementara nilai 0 menunjukkan pemerataan pengeluaran sempurna.

Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2020 nilai Gini Ratio yaitu sebesar 0,351, dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,309 di Tahun 2022. Namun pada tahun 2023, kesenjangan pendapatan kembali meningkat ditandai dengan meningkatnya nilai indeks gini menjadi 0,313. Pada tahun 2024, gini ratio kembali mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi 0,298. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan



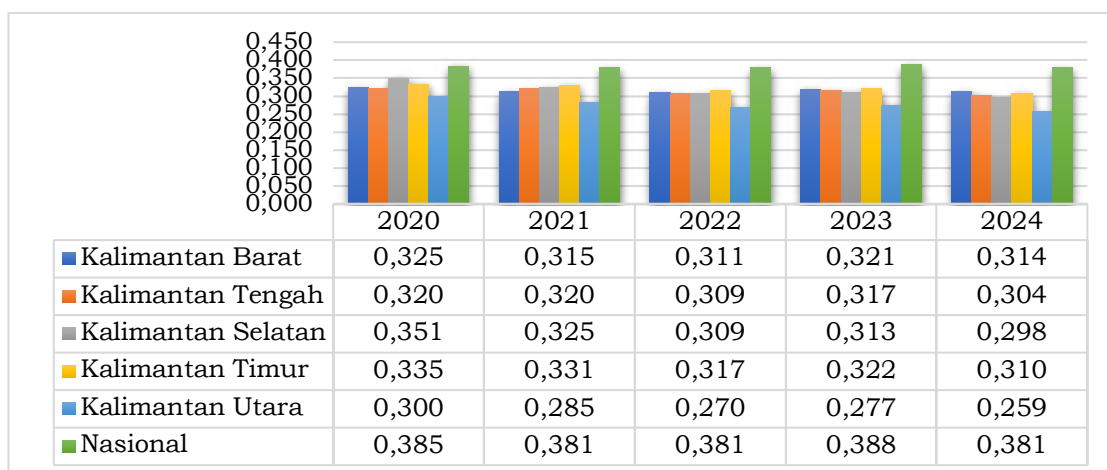
pemerataan pengeluaran di Kalimantan Selatan. Dapat dikatakan bahwa distribusi pengeluaran penduduk semakin merata. Perkembangan indeks gini Kalimantan Selatan disajikan pada gambar di bawah.



Gambar 2.12.
Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS RI, Tahun 2025

Nilai indeks gini Kalimantan Selatan pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan indeks gini Kalimantan Utara yang hanya mencapai 0,259 di tahun 2024. Indeks gini Kalimantan Selatan lebih rendah dibandingkan dengan indeks gini Nasional yang mencapai 0,381.



Gambar 2.13.
Perkembangan Gini Ratio Provinsi di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS RI, Tahun 2025

Ket: * data realiasi Semester 2 (September)

Pada tataran regional Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 berdasarkan data Semester I (Maret), indeks gini yang paling rendah di Kabupaten Balangan dengan indeks gini sebesar 0,218, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan indeks gini sebesar 0,251 dan Kabupaten Tanah Laut dengan indeks gini sebesar 0,257. Sementara Kota Banjarmasin merupakan daerah dengan indeks gini tertinggi di Kalimantan Selatan, yakni 0,347.



Tabel 2.27.
Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	0,250	0,232	0,263	0,259	0,257
Kotabaru	0,287	0,306	0,331	0,316	0,296
Banjar	0,322	0,344	0,3	0,297	0,258
Barito Kuala	0,277	0,284	0,289	0,312	0,272
Tapin	0,274	0,289	0,291	0,281	0,26
HSS	0,300	0,275	0,26	0,293	0,288
HST	0,285	0,331	0,228	0,225	0,251
HSU	0,319	0,378	0,301	0,271	0,276
Tabalong	0,346	0,288	0,337	0,284	0,3
Tanah Bumbu	0,300	0,281	0,292	0,28	0,309
Balangan	0,298	0,277	0,266	0,258	0,218
Banjarmasin	0,342	0,350	0,33	0,37	0,347
Banjarbaru	0,381	0,361	0,341	0,321	0,3
KALSEL	0,351	0,330	0,317	0,313	0,302
INDONESIA	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Ket: * data realiasi Semester 1 (Maret)

e. **Indeka Williamson**

Selain Gini Ratio, keadaan ketimpangan juga dapat ditunjukkan oleh Indeks Williamson. Jika Gini Ratio menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk, maka Indeks Williamson dapat menyajikan tingkat ketimpangan regional. Dalam hal ini Indeks Williamson menyajikan ketimpangan tingkat produksi antar wilayah. sehingga Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan ketimpangan PDRB antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Nilai Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Pada kurun waktu tahun 2020-2024, Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi yaitu dari 0,395 menjadi 0,433. Kondisi 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan kesenjangan pada periode 2021 sampai 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan. Menurunnya indeks willamson pada tahun 2024 menjadi 0,433 mengindikasikan kesenjangan pengeluaran penduudk antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan semakin menurun. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik.



Tabel 2.28.
Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Indeks Williamson				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Williamson	0,395	0,409	0,509	0,504	0,433
Kategori Ketimpangan	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: hasil pengolahan PDRB kabupaten/kota, 2025

f. Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Data 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan garis kemiskinan di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp644.107. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional, terlihat bahwa garis kemiskinan di Kalimantan Selatan lebih tinggi.

Tabel 2.29.
Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal
Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
(Rupiah/Kapita/Bulan)

Tahun	Kalimantan Selatan			Indonesia		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
2020	490.254	503.748	497.262	471.822	433.281	458.947
2021	536.041	517.293	519.150	502.730	464.474	486.168
2022	588.472	572.917	553.073	552.349	513.170	535.547
2023	613.880	594.141	604.266	569.299	525.050	550.458
2024	658.002	629.413	644.107	615.763,	566.655	595.242

Sumber: BPS RI, 2025

Tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2024, garis kemiskinan kabupaten/kota yang lebih besar dari garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru Rp781.405 sedangkan garis kemiskinan yang paling rendah di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp437.579.



Tabel 2.30.
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2020-2024 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	522.845	537.854	575.061	620.532	670.062
Kotabaru	466.121	481.452	505.601	556.962	592.230
Banjar	462.375	482.867	514.991	561.521	589.165
Barito Kuala	340.526	355.160	375.707	417.110	437.579
Tapin	446.577	459.160	484.113	516.532	561.101
Hulu Sungai Selatan	528.622	494.203	516.857	547.855	583.549
Hulu Sungai Tengah	417.778	425.438	444.331	475.655	513.950
Hulu Sungai Utara	488.237	501.994	526.919	561.429	597.894
Tabalong	531.180	542.800	573.018	615.912	637.132
Tanah Bumbu	513.803	530.568	557.500	619.249	643.652
Balangan	441.488	453.928	476.190	508.157	528.104
Kota Banjarmasin	543.546	606.330	651.383	708.617	743.872
Kota Banjarbaru	652.030	653.556	692.830	753.899	781.405
Kalimantan Selatan	389.273	519.150	553.073	604.266	632.739

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Jika dilihat dari Indikator kemiskinan, maka Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mempunyai indikator kemiskinan terendah jika dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Secara kuantitas penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Semester II Tahun 2024 berjumlah 180.200 jiwa atau setara dengan 4,02 persen dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan. Sementara jumlah penduduk miskin di tingkat nasional sebanyak 24.054.720 jiwa atau 8,57 persen.

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan dan nasional disajikan pada tabel berikut ini:

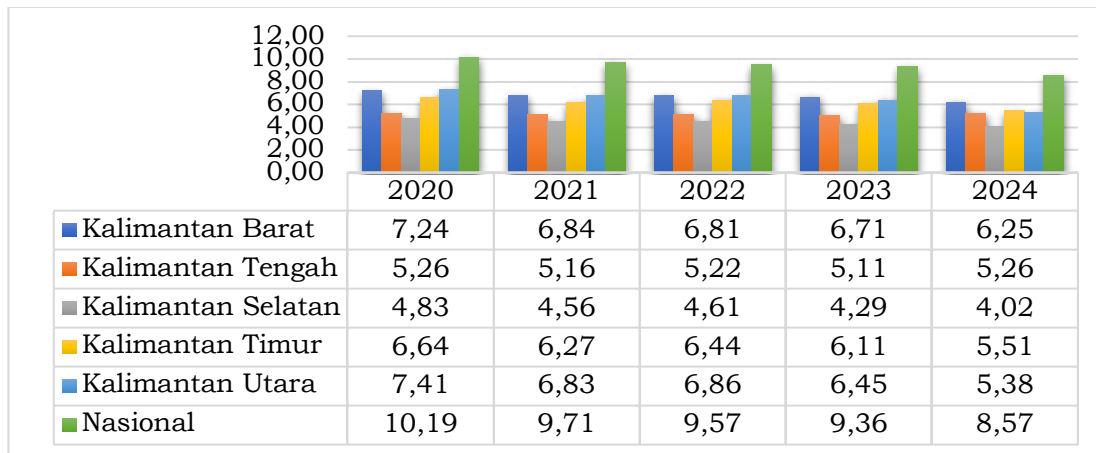
Tabel 2.31.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

TAHUN	KALIMANTAN SELATAN		TAHUN	INDONESIA	
	Semester I			Semester I	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase		Jumlah (Jiwa)	Persentase
2024	183.310	4,11	2024	25.219.200	9,03
2023	188.928	4,29	2023	25.898.550	9,36
2022	195.700	4,49	2022	26.161.160	9,54
2021	208.110	4,83	2021	27.542.770	10,14
2020	187.870	4,38	2020	26.424.020	9,78
	Semester II			Semester II	
2024	180.200	4,02	2024	24.054.720	8,57
2022	201.950	4,61	2022	26.363.270	9,57
2021	197.760	4,56	2021	26.503.650	9,71
2020	206.920	4,83	2020	27.549.690	10,19

Sumber: BPS RI, 2025



Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan selalu paling rendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya diwilayah Kalimantan dan paling rendah dibandingkan Persentase Penduduk Miskin Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.14.
**Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS RI, Tahun 2025

Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Tahun 2020-2024 berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada tabel di bawah. Pada tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase sebesar 5,81 persen dan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu Kabupaten Banjar dengan persentase penduduk miskin hanya 2,36 persen.

Tabel 2.32.
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	4,26	4,57	3,86	3,73	3,74
Kotabaru	4,22	4,86	4,30	4,32	4,45
Banjar	2,55	3,04	2,79	2,44	2,36
Barito Kuala	4,51	5,11	4,75	4,60	4,36
Tapin	3,06	3,60	3,60	3,19	3,33
HSS	5,17	4,84	4,54	4,01	3,38
HST	5,64	6,18	5,92	5,84	5,81
HSU	6,14	6,83	6,49	6,25	5,75
Tabalong	5,72	6,27	5,87	5,77	5,64
Tanah Bumbu	4,60	4,82	4,26	4,12	3,41
Balangan	5,32	6,07	5,83	5,22	4,87



Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjarmasin	4,39	4,89	4,74	4,63	4,58
Banjarbaru	4,01	4,40	4,17	3,92	3,79
KALSEL	4,83	4,83	4,49	4,29	4,02
INDONESIA	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Selain indikator-indikator kemiskinan yang dijelaskan di atas, terdapat juga indikator lainnya yang dapat menggambarkan kondisi kemiskinan sebuah wilayah, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan semakin jauh juga pengeluaran yang harus ditambah agar penduduk tersebut mampu melepas kategori penduduk miskin. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan terjadinya ketimpangan atau perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin timpang pengeluaran di antara penduduk miskin, dan semakin besar jurang perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tingkat Kedalaman Kemiskinan yang pada tahun 2020 tercatat mencapai 0,70 dapat turun sampai 0,57 di tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin menyempit. Pada periode yang sama, Tingkat Keparahan Kemiskinan yang sebelumnya mencapai 0,16 pada tahun 2020, dapat turun menjadi 0,13 di tahun 2022, Namun pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan hingga menjadi 0,15. Kemudian pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi hanya 0,11.

Data mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan ditampilkan pada tabel di bawah.



Tabel 2.33.
Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

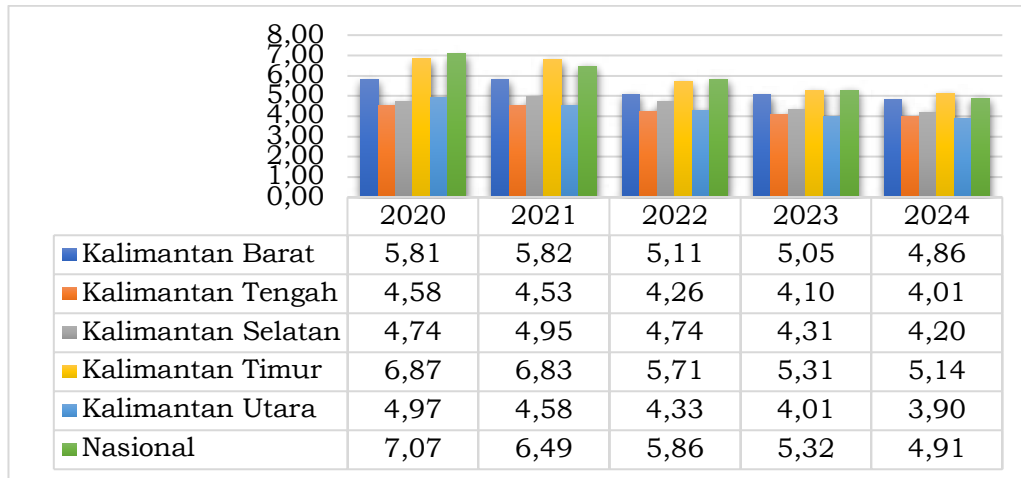
Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	4,83	0,70	0,16
2021	4,56	0,67	0,13
2022	4,61	0,63	0,13
2023	4,29	0,61	0,15
2024	4,11	0,57	0,11

Sumber: BPS RI, 2024

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran Kalimantan Selatan yang tergambar melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif cukup terkendali. TPT Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebesar 4,74 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 4,95 persen yang dipengaruhi banyaknya penduduk kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian akibat pandemi COVID-19. Namun seiring dengan semakin terkendalnya pandemi dan berbagai upaya pemulihan ekonomi serta kembali aktifnya aktivitas penduduk, maka pada tahun 2024 TPT di Kalimantan Selatan mengalami penurunan hingga menjadi 4,20 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur.

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan pun berada di bawah TPT nasional. Dengan kata lain, proporsi penduduk yang tercatat sebagai pengangguran terbuka di Indonesia secara keseluruhan lebih banyak daripada proporsi yang sama di Kalimantan Selatan. Bila TPT Kalimantan Selatan dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, maka menduduki peringkat ketiga terendah setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.



Gambar 2.15.
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS RI, 2024

Pada Tahun 2024, indikator TPT memperlihatkan bahwa tiga daerah yang memiliki pengangguran terbesar meliputi Kota Banjarmasin sebesar 6,56 persen, Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 6,37 persen, dan Kabupaten Kotabaru mencapai 6,05 persen. Adapun daerah yang memiliki TPT terendah di wilayah Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nilai 2,11 persen.

Tabel 2.34.
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
di Kalimantan Selatan Tahun 2020- 2024**

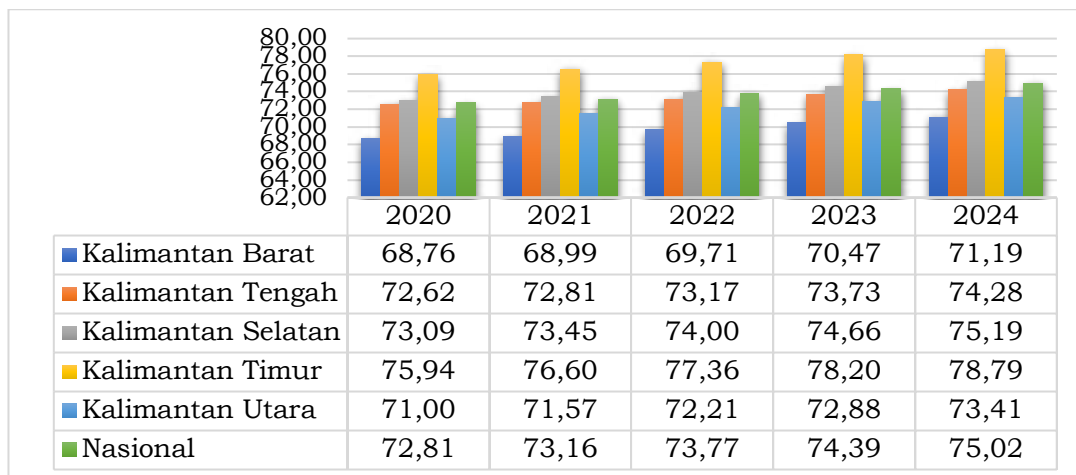
PROV. KAB/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	3,57	3,52	4,17	3,58	3,43
Kotabaru	4,96	5,57	6,70	6,08	6,05
Banjar	3,87	3,98	2,72	2,73	2,71
Barito Kuala	2,93	3,22	3,63	3,42	3,41
Tapin	3,73	4,96	4,15	3,93	3,86
HSS	2,24	2,44	2,29	2,12	2,11
HST	3,90	3,76	3,35	3,26	3,20
HSU	4,49	4,80	4,64	3,85	3,73
Tabalong	3,07	3,43	4,46	3,60	3,44
Tanah Bumbu	6,95	6,83	6,89	6,56	6,37
Balangan	2,46	2,44	3,98	2,70	2,69
Banjarmasin	8,32	8,47	6,96	6,70	6,56
Banjarbaru	5,54	5,70	5,47	5,01	4,93
KALSEL	4,74	4,95	4,74	4,31	4,20
INDONESIA	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024



h. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator pembangunan yang mempunyai cakupan yang sangat luas dalam menunjukkan pencapaian pembangunan manusia serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, IPM menjadi salah satu indikator yang cukup mewakili kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. IPM Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan IPM dari tahun ke tahun selama pada periode 2020 sampai 2024. Capaian IPM Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yaitu 73,09 dan di tahun 2024 mencapai 75,19. Nilai IPM mulai tahun 2020 menggunakan nilai Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 yang menyebabkan terkoreksinya nilai IPM mulai tahun 2020.



Gambar 2.16.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS RI, 2024

Meskipun sudah ada di kategori Tinggi, nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, nilai IPM Kalimantan Selatan telah berada diatas IPM nasional yang mencapai 75,02.

Jika memperhatikan IPM berdasarkan wilayah, maka di tahun 2024 nilai IPM kedua kota di Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik jika dibandingkan dengan nilai IPM kabupaten. Nilai IPM Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin masing-masing 81,65 dan 80,53. Sementara itu, hanya Kabupaten Tabalong yang memiliki nilai IPM kategori tinggi.



Tabel 2.35.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

PROV. KAB/KOTA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	71,36	71,86	72,33	72,98	73,42
Kotabaru	70,68	70,94	71,57	72,01	72,42
Banjar	71,67	72,4	73,25	74,01	74,41
Barito Kuala	68,65	69,08	69,87	70,67	71,40
Tapin	71,71	71,9	72,61	73,52	74,06
HSS	71,57	71,93	72,47	73,21	73,95
HST	71,45	71,67	72,32	72,76	73,33
HSU	69,09	69,63	70,33	71,12	71,74
Tabalong	73,84	74,25	74,82	75,43	75,97
Tanah Bumbu	72,26	72,55	73,34	73,86	74,50
Balangan	71,28	71,58	72,2	72,97	73,83
Kota Banjarmasin	78,62	79,09	79,46	79,98	80,53
Kota Banjarbaru	80,26	80,41	80,82	81,25	81,65
KALSEL	73,09	73,45	74,00	74,66	75,19
INDONESIA	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

i. Indeks Modal Manusia (IMM)

Indeks Modal Manusia (IMM) atau *Human Capital Index* adalah sebuah alat yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur potensi ekonomi suatu negara dengan memperhatikan kualitas modal manusia. IMM mengukur bagaimana modal manusia berkontribusi terhadap produktivitas generasi berikutnya dan sejauh mana negara-negara memanfaatkan modal manusia di negaranya.

Indeks modal manusia diukur melalui tiga indikator, yaitu: 1). Kelangsungan Hidup, yang diukur melalui angka kematian anak dan mencerminkan kemampuan sistem kesehatan suatu wilayah dalam menjaga anak-anak tetap hidup dan sehat; 2). Pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan kualitas pembelajaran yang diterima oleh anak-anak di sekolah; dan 3). Kesehatan yang diukur melalui tingkat stunting dan harapan hidup saat lahir yang sehat, yang menunjukkan kualitas layanan kesehatan dan gizi.

Penilaian IMM dari 0 hingga 1, di mana 1 menunjukkan potensi maksimal dari modal manusia. Perkembangan IMM Kalimantan Selatan pada tahun 2019 sebesar 0,522 dan tumbuh 0,53 pada tahun 2023. Meskipun dalam lima tahun IMM Kalimantan Selatan meningkat perlahan namun kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan. Data terakhir yang tersedia adalah tahun 2023.



Tabel 2.36.
Kondisi Indeks Modal Manusia Kalimantan Selatan 2019–2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,522	0,524	0,526	0,528	0,53

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Bappeda Kalsel

j. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan memberikan gambaran kondisi hidup layak masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kalimantan Selatan mencapai Rp13,399 juta per tahun naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,44 persen. Peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini sejalan dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 sehingga roda perekonomian kembali berjalan.

Tabel 2.37.
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	11.207,00	11.310,00	11.703,00	12.198,00	12.595,00
Kotabaru	11.530,00	11.720,00	12.191,00	12.480,00	12.929,00
Banjar	12.603,00	12.707,00	12.871,00	13.301,00	13.683,00
Barito Kuala	9.805,00	9.868,00	10.230,00	10.750,00	11.168,00
Tapin	11.841,00	11.952,00	12.247,00	12.776,00	13.163,00
Hulu Sungai Selatan	12.672,00	12.736,00	13.157,00	13.743,00	14.150,00
Hulu Sungai Tengah	12.153,00	12.280,00	12.448,00	12.782,00	13.176,00
Hulu Sungai Utara	9.527,00	9.644,00	10.132,00	10.491,00	10.981,00
Tabalong	11.283,00	11.470,00	11.914,00	12.507,00	13.097,00
Tanah Bumbu	11.718,00	11.844,00	12.217,00	12.516,00	13.026,00
Balangan	11.452,00	11.500,00	11.659,00	11.888,00	12.325,00
Kota Banjarmasin	14.306,00	14.432,00	14.770,00	15.280,00	15.714,00
Kota Banjarbaru	13.675,00	13.789,00	14.136,00	14.524,00	14.927,00
Kalimantan Selatan	12.032,00	12.143,00	12.469,00	12.953,00	13.399,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Berdasarkan data Pengeluaran per Kapita Disesuaikan periode tahun 2020-2024 terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota memiliki peningkatan dari tahun ke tahun yang sama dengan provinsi, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun akibat COVID-19. Kondisi pada tahun 2024 menunjukkan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Hulu Sungai Selatan merupakan 3 (tiga) daerah dengan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tertinggi. Bahkan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

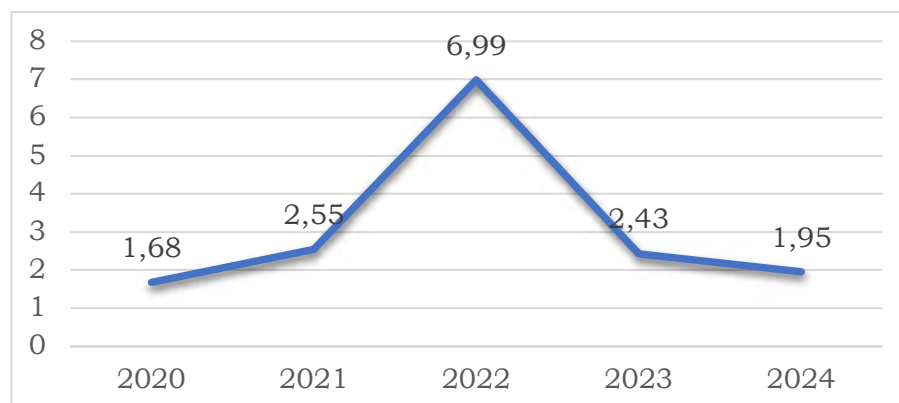


masing-masing tga daerah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi.

k. Laju inflasi

Laju inflasi dalam kegiatan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan cukup fluktuatif. Laju inflasi pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,68 persen dan meningkat hingga menjadi 6,99 persen di tahun 2022, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti perang Rusia dan Ukraina yang membuat krisis energi sehingga harga bahan bakar subsidi di Indonesia juga ikut mengalami kenaikan serta mempengaruhi biaya angkut dan perubahan iklim yang drastis membuat sering terjadi cuaca buruk sehingga mempengaruhi harga bahan pangan akibat menurunnya produksi.

Selanjutnya, laju inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dan desember 2024 terjadi penurunan kembali menjadi hanya 2,43 persen dan 1,95 persen. Penurunan tersebut didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta kelompok pakaian dan alas kaki.



Gambar 2.17.

Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2024

1. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Dilihat dari data, NTP Kalimantan Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir cukup dinamis dan cenderung meningkat. Pada tahun 2023 NTP Kalimantan Selatan mencapai 109,48, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan Nilai Tukar Petani sebesar 2 persen. Hal ini berarti pada tahun 2023, rata-rata laju kenaikan harga hasil produksi pertanian para petani lebih cepat

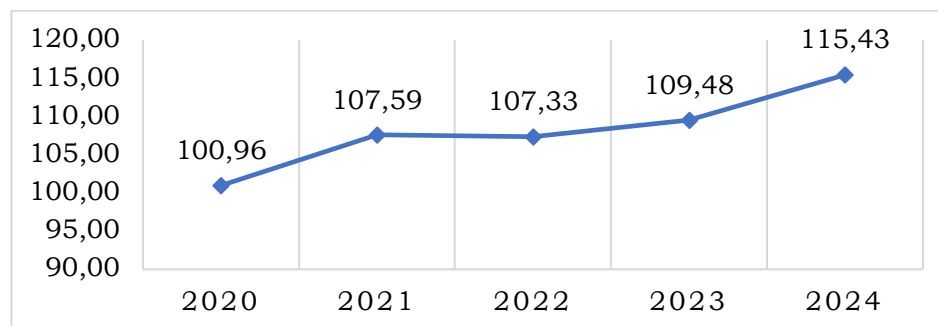


dibandingkan rata-rata laju barang-barang konsumsi dan rata-rata laju kenaikan harga barang-barang yang digunakan sebagai biaya produksi.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan pada Desember 2024, NTP Kalimantan Selatan naik 0,92 persen dibandingkan NTP November 2024, yaitu dari 114,39 menjadi 115,43. Kenaikan NTP pada Desember 2024 terjadi karena It naik sebesar 1,36 persen, sementara Ib hanya naik sebesar 0,44 persen.

Kenaikan NTP Desember 2024 juga dipengaruhi oleh naiknya NTP pada tiga subsektor penyusunnya, yaitu subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor perikanan yang masing-masing naik sebesar 2,73 persen; 2,08 persen; dan 1,20 persen secara berurutan. Sementara subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan mengalami penurunan nilai NTP.

Lebih rinci mengenai perkembangan NTP Kalimantan Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.18.
Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

a. Angka Harapan Hidup

Dimensi kesehatan yang menjadi Indikator pembangunan manusia adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. AHH Kalimantan Selatan selalu mengalami peningkatan pada periode 2020-2024. Dengan kata lain, terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir. AHH Kalimantan Selatan dengan nilai 74,18 di tahun 2024 menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada



tahun 2024 diharapkan dapat mempunyai peluang hidup hingga usia 74,18 tahun.

Masyarakat di wilayah kota di Kalimantan Selatan memiliki derajat kesehatan yang sedikit lebih baik daripada masyarakat di kabupaten. Namun perbedaan derajat kesehatan di wilayah kota dengan kabupaten tidak mencolok seperti perbedaan indikator pendidikan. Nilai AHH di Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin pada tahun 2024 masing-masing 75,11 tahun dan 75,07 tahun. Nilai tersebut tidak terlalu berjarak dibanding Kabupaten Tabalong yang memiliki AHH 74,76 tahun. Adapun kabupaten yang memiliki nilai AHH paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 72,49 tahun.

Tabel 2.38.
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (Tahun)

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	73,81	73,95	74,21	74,46	74,64
Kotabaru	73,21	73,31	73,55	73,76	73,88
Banjar	72,49	72,70	73,04	73,33	73,55
Barito Kuala	71,37	71,56	71,94	72,28	72,52
Tapin	73,92	74,09	74,39	74,47	74,72
Hulu Sungai Selatan	71,64	71,78	72,15	72,52	72,82
Hulu Sungai Tengah	71,46	71,66	72,00	72,33	72,60
Hulu Sungai Utara	71,22	71,50	71,89	72,21	72,49
Tabalong	73,99	74,09	74,45	74,63	74,76
Tanah Bumbu	73,72	73,82	74,06	74,28	74,44
Balangan	73,02	73,15	73,42	73,69	73,87
Kota Banjarmasin	74,21	74,36	74,60	74,88	75,07
Kota Banjarbaru	74,30	74,40	74,64	74,90	75,11
Kalimantan Selatan	73,28	73,43	73,70	73,97	74,18

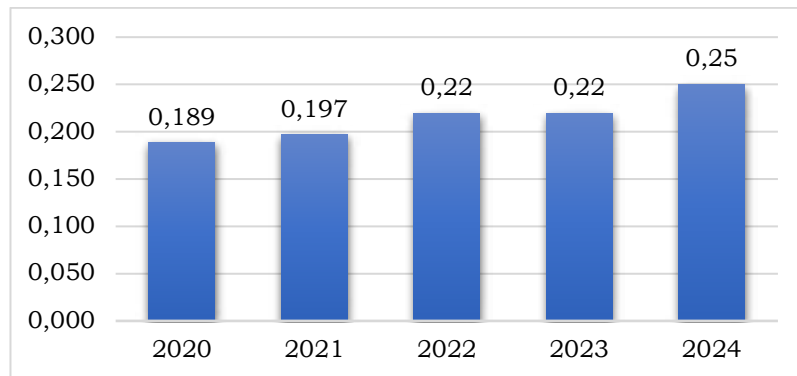
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. 12 Indikator IKS ini juga merupakan rumusan dari program prioritas, yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi stunting, mengendalikan penyakit menular khususnya HIV, AIDS, TB dan Malaria, serta mengendalikan penyakit tidak menular khususnya hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kanker dan gangguan jiwa.



IKS Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.19.

Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: Lakip Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Tahun 2020 sampai 2024

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa IKS setiap tahunnya meningkat namun peningkatannya tidak signifikan dan masih berada dalam nilai indeks keluarga tidak sehat. Adapun menurut Permenkes No 39 Tahun 2016 ketentuan kategori kesehatan mengacu pada nilai berikut: Nilai Indeks $> 0,800$ = keluarga sehat, Nilai Indeks $0,500 - 0,800$ = pra sehat, Nilai Indeks $< 0,500$ = tidak sehat.

Realisasi IKS tahun 2024 adalah 0,25 yang berarti bahwa IKS ini meningkat 3 poin dibandingkan tahun 2023 dimana realisasinya adalah 0,22. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1 sampai 2 poin. Berdasarkan peningkatan capaian ini menggambarkan bahwa status pencapaian indikator sudah sangat memuaskan. Indikator ini tentunya sangat mendukung indikator eselon II yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi stunting.

c. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.



Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dengan capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 146 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.39.
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (AKI)	135	205	137	145	146

Sumber: Lakip Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Tahun 2020 sampai 2024

d. Insidensi Tuberkulosis

1. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis adalah Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Adapun Cakupan penemuan kasus tuberkulosis di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 90 persen.

2. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis adalah Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap.

Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Adapun Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 75,2 persen.

e. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Akses Pelayanan Kesehatan:

Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.



2. Kesadaran Masyarakat:
 Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Komitmen Pemerintah Daerah:
 Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC):
 Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

f. Status Gizi Masyarakat

Status gizi masyarakat Kalimantan Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain prevalensi ibu hamil anemia, persentase remaja putri anemia, prevalensi balita gizi kurang, prevalensi balita gizi buruk, dan prevalensi stunting. Anemia Gizi meskipun sudah mengalami penurunan namun masih menjadi masalah terbesar bagi perempuan khususnya remaja putri dan Ibu hamil. Sementara gizi kurang pada balita sebesar 5,3% pada tahun 2024, yang berarti sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator gizi buruk pada balita 0,6 pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Kasus gizi kurang dan buruk tidak hanya terjadi pada balita saja, tetapi juga terjadi pada anak dan usia di atas 5 tahun serta dewasa yang memiliki riwayat penyakit kronis.

Tabel 2.40.
Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ibu Hamil Anemia	20,13	19,65	16,49	14,44	15,62
Persentase remaja putri anemia	-	-	-	34,55	24,42
Prevalensi Balita Gizi Kurang	12,6	10,2	5,6	5,2	5,3
Prevalensi Balita Gizi Buruk	1,47	1,19	1	0,7	0,6
Prevalensi Stunting	12,2 (EPPGBM)	30 (SSGI) 10,7 (EPPGBM)	24,6 (SSGI) 9,1 (EPPGBM)	24,7 (SKI) 10,3 (EPPGBM)	9,4 (EPPGBM)

Sumber: Bappeda, 2025



Tumbuh kembang jasmani anak-anak dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu masalah yang berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang jasmani anak-anak adalah stunting, yaitu masalah nutrisi yang dialami sejak bayi. Permasalahan stunting juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan berbagai program bidang kesehatan prevalensi stunting di Kalimantan Selatan dapat menunjukkan tren yang membaik. Prevalensi Stunting di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 menunjukkan penurunan yang signifikan dari 10,3 pada tahun 2023 menjadi 9,4 pada tahun 2024 (sumber: aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat/EPPGBM).

Prevalensi stunting di tingkat provinsi dipengaruhi oleh kondisi di kabupaten/kota. Perkembangan nilai stunting berdasarkan perhitungan di tahun 2022 dan 2024 yang diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan dinamika antar kabupaten/kota. Daerah dengan penurunan prevalensi stunting tertinggi adalah Kabupaten Barito Kuala, yakni turun sebanyak 17,1 poin. Sementara daerah yang mengalami peningkatan prevalensi stunting dari tahun 2022 ke 2024 meliputi Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, Tabalong, dan Kota Banjarmasin. Daerah dengan prevalensi stunting terendah pada tahun 2024 berada di Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, dan Barito Kuala.

Tabel 2.41.
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2022 dan 2024

Kabupaten/Kota	Stunting (%)	
	2022	2024
Kab Tanah Laut	26,6	22,5
Kab Kota Baru	31,6	23,2
Kab Banjar	26,4	32,4
Kab Barito Kuala	33,6	16,5
Kab Tapin	14,4	13,2
Kab Hulu Sungai Selatan	20,3	19,8
Kab Hulu Sungai Tengah	31,1	19,6
Kab Hulu Sungai Utara	28,0	27,6
Kab Tabalong	19,7	23,1
Kab Tanah Bumbu	16,1	21,7
Kab Balangan	29,8	16
Kota Banjarmasin	22,4	26,4
Kota Banjarbaru	22,1	15,4
Kalimantan Selatan	24,6	22,9

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 dan 2024



2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah dimensi pendidikan. Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator HLS dan RLS di Kalimantan Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, RLS di Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat sebesar 0,33 tahun. Pada tahun 2024, Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 8,62 tahun yang berarti rata-rata penduduk di wilayah ini telah menamatkan pendidikan minimal jenjang SMP (9 tahun).

Tabel 2.42.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (Tahun)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	7,88	7,89	7,90	7,92	7,94
Kotabaru	7,43	7,46	7,47	7,55	7,56
Banjar	7,35	7,52	7,71	7,94	7,95
Barito Kuala	7,34	7,55	7,63	7,74	7,92
Tapin	7,76	7,77	7,95	8,05	8,15
Hulu Sungai Selatan	7,75	7,76	7,79	7,86	8,09
Hulu Sungai Tengah	8,00	8,01	8,28	8,29	8,35
Hulu Sungai Utara	7,53	7,75	7,76	7,77	7,78
Tabalong	9,10	9,11	9,12	9,14	9,15
Tanah Bumbu	7,96	7,97	8,25	8,30	8,43
Balangan	7,55	7,69	7,85	8,03	8,13
Kota Banjarmasin	9,95	10,20	10,21	10,24	10,35
Kota Banjarbaru	10,95	10,96	10,98	10,99	11
Kalimantan Selatan	8,29	8,34	8,46	8,55	8,62

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

b. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun merupakan Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas.

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,69 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 9,02. Meskipun terjadi



peningkatan, namun Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Selatan	8,69	8,74	8,89	8,95	9,02
Nasional	8,90	8,97	9,08	9,13	9,22

Sumber: BPS RI, 2025

c. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024 HLS mencapai 12,87 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau hingga menempuh jenjang D1.

Tabel 2.44.
Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (Tahun)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	12,01	12,31	12,32	12,41	12,87
Kotabaru	11,93	11,95	12,06	12,07	12,43
Banjar	12,44	12,73	13,02	13,03	12,08
Barito Kuala	12,39	12,40	12,54	12,55	13,04
Tapin	11,94	11,95	12,04	12,33	12,56
Hulu Sungai Selatan	12,17	12,38	12,40	12,46	12,34
Hulu Sungai Tengah	12,20	12,21	12,22	12,24	12,48
Hulu Sungai Utara	12,91	12,92	12,93	13,19	12,31
Tabalong	12,72	12,89	12,90	12,91	13,21
Tanah Bumbu	12,37	12,48	12,49	12,60	12,92
Balangan	12,46	12,47	12,61	12,82	12,61
Kota Banjarmasin	13,93	13,94	13,95	13,97	14,01
Kota Banjarbaru	14,81	14,82	14,83	14,85	14,86
Kalimantan Selatan	12,52	12,81	12,82	12,86	12,87

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

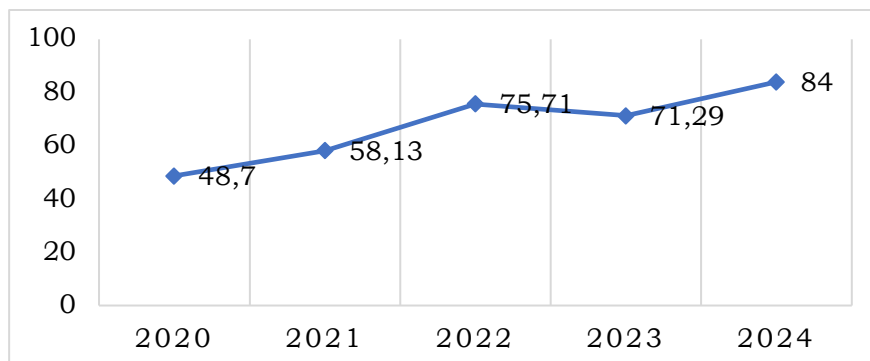
d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM dibentuk dari tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat yang terdiri



dari Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat/hari, Perpustakaan yang Dibina sesuai SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan.

Gambar di bawah menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan IPLM di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2020 sampai 2022. Namun di tahun 2023 capaian IPLM lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Beberapa komponen IPLM yang perlu mendapat perhatian, yaitu: 1). Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1), dimana Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 61 persen dari standar; 2). Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2), dimana pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 47 persen dari standar; 3). Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3), dimana Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 79 persen dari standar; dan 4). Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4), dimana Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 13 persen dari standar.



Gambar 2.20.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

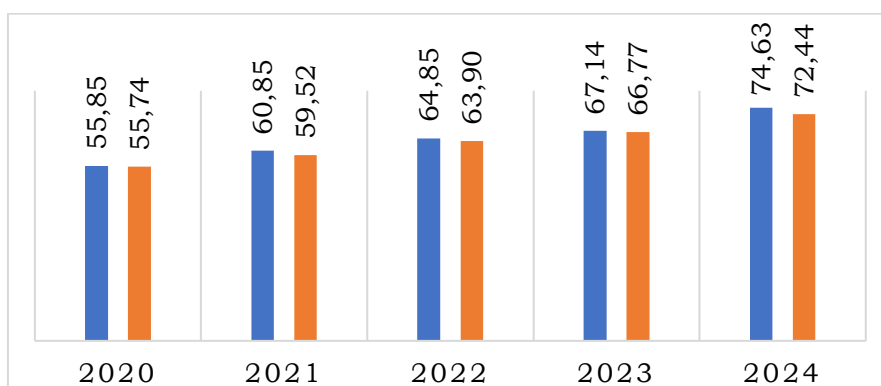
Sumber: Perpustakaan Nasional 2024

Pencapaian IPLM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 84 dan masuk dalam kategori Sedang. Tiga kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara 82,34, Kabupaten Tapin 79,60 dan Kabupaten Tabalong 79,04. Sedangkan tiga Kabupaten /Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kabupaten Tanah Laut 38,23, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 57,53, dan Kabupaten Barito Kuala 58,92.



e. Tingkat Kegemaran Membaca

Indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Tingkat kegemaran membaca di Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 55,85 tahun 2020 meningkat pada tahun 2021 dan 2022 berturut-turut sebesar 60,85 dan 64,95. Selanjutnya pada tahun 2023, Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mencapai 67,14 dengan kriteria Tinggi dan menempati peringkat 14 tertinggi diantara provinsi se-Indonesia. Capaian Kalimantan Selatan lebih tinggi jika dibandingkan nasional yang pada tahun 2023 mencapai 66,77. Sedangkan di Tahun 2024, Tingkat Kegemaran Membaca di Kalimantan Selatan meningkat signifikan menjadi 74,63 dengan kategori Sedang. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan nasional yang pada tahun 2024 mencapai 72,44.



Gambar 2.21.
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

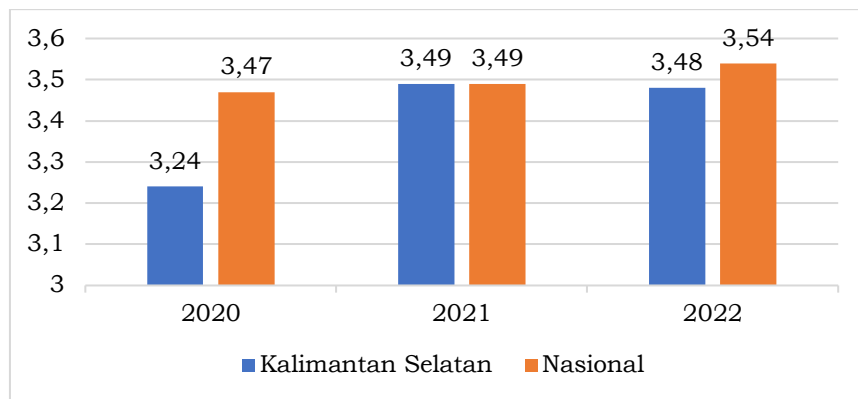
Sumber: Perpustakaan Nasional, 2024

f. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital digunakan untuk mengukur kemampuan literasi digital di Indonesia dari berbagai sudut pandang, guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti dan pengaruhnya terhadap penyediaan program-program yang tepat untuk peningkatan literasi digital masyarakat. Indeks Literasi Digital di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai publikasi Kementerian Komdigi, mulai tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2020, Indeks Literasi Digital Kalimantan Selatan sebesar 3,24 meningkat menjadi 3,49 di tahun 2021, namun sedikit turun pada tahun 2022 menjadi 3,48.



Berikut ini disajikan perkembangan Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Selatan.



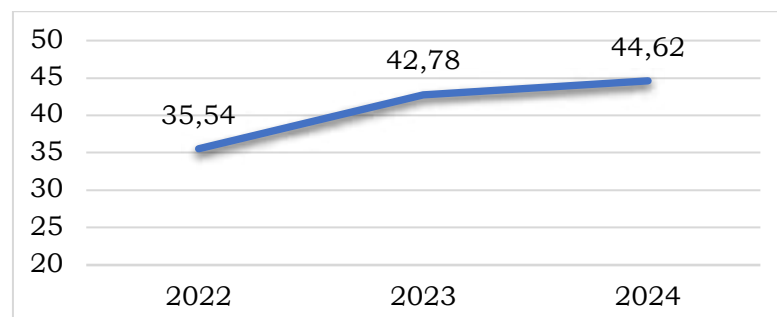
Gambar 2.22.
Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2022

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

g. Indeks Masyarakat Digital

Masyarakat digital merupakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan teknologi digital, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas menjadi hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya mulai dari produksi, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.

Nilai Indeks Masyarakat Digital Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan. Jika Indeks Masyarakat Digital pada tahun 2022 sebesar 35,54 maka pada tahun 2024 meningkat menjadi 44,62.



Gambar 2.23.
Indeks Masyarakat Digital Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2022-2024

Sumber: Badan Pengembangan SDM Komdigi, 2025



Skor IMD dipengaruhi oleh 4 (empat) pilar yaitu Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, Pilar Keterampilan Digital, Pilar Pemberdayaan, dan Pilar Pekerjaan. Capaian IMD pada keempat pilar di tahun 2024 umumnya mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali Pilar Infrastruktur dan Ekosistem dan Pilar Pemberdayaan.

Tabel 2.45.
Nilai Pilar IMDI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024

Pilar IMDI Kalsel	2022	2023	2024
Pilar Infrastruktur dan Ekosistem	40,83	57,74	57,31
Pilar Keterampilan Digital	49,39	53,71	58,65
Pilar Pemberdayaan	19,19	26,36	25,78
Pilar Pekerjaan	33,87	33,27	38,05

Sumber: Badan Pengembangan SDM Komdigi, 2025

Capaian IMD di tingkat provinsi, merupakan gambaran dari kondisi di kabupaten/kota. Perkembangan skor IMD kabupaten/kota pada tahun 2022 sampai 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.46.
Nilai Indeks Masyarakat Digital Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Infrastruktur dan Ekosistem 2024	Keterampilan Digital 2024	Pemberdayaan 2024	Pekerjaan 2024	Nilai IMD			Kategori IMDI 2024
					2022	2023	2024	
Balangan	53,56	51,63	22,31	38,14	36,03	41,09	40,67	Cukup
Banjar	55,02	53,29	23,02	35,62	43,78	42,55	41,31	Cukup
Barito Kuala	55,10	56,09	27,59	40,50	33,17	42,70	44,34	Cukup
Hulu Sungai Selatan	59,38	63,74	20,59	35,19	29,80	44,74	44,44	Cukup
Hulu Sungai Tengah	55,31	59,91	23,88	37,87	31,80	44,12	43,85	Cukup
Hulu Sugnai Utara	54,57	59,22	26,86	38,92	35,13	42,82	44,59	Cukup
Kota Banjarbaru	59,11	63,48	31,77	40,41	40,71	41,21	48,67	Tinggi
Kota Banjarmasin	68,25	64,62	28,62	39,06	28,60	45,22	50,03	Tinggi
Kotabaru	52,68	63,14	24,57	38,17	38,65	43,49	44,36	Cukup
Tabalong	58,27	58,03	27,39	37,10	39,03	40,30	45,04	Cukup
Tanah Bumbu	58,07	53,22	26,81	37,64	27,17	42,27	43,57	Cukup
Tanah Laut	57,59	53,07	25,51	38,74	33,50	40,92	43,17	Cukup
Tapin	58,10	62,98	26,20	37,30	42,42	44,70	46,03	Cukup

Sumber: Badan Pengembangan SDM Komdigi, 2025



h. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi

Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi merupakan jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Adapun Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 untuk Literasi Membaca yaitu sebesar 15,38.

i. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi merupakan jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian



Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Adapun Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 untuk Literasi Membaca yaitu sebesar 52,78 persen dan numerasi yaitu sebesar 43,82 persen.

j. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3.

k. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan



kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

a. Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, baik secara individu maupun kelompok. IKS mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain), peranan sosial (partisipasi dalam kegiatan sosial, kohesi sosial), dan keberdayaan ekonomi (kemampuan untuk berproduksi, memiliki aset, dan lain-lain).

Indikator ini merupakan indikator baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, sehingga gambaran capaian tahun-tahun sebelumnya belum ada. Berdasarkan hasil penghitungan berdasarkan parameter dalam Indeks Kesejahteraan Sosial, maka diketahui skor Indeks Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sebesar 5,78.

b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

c. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan

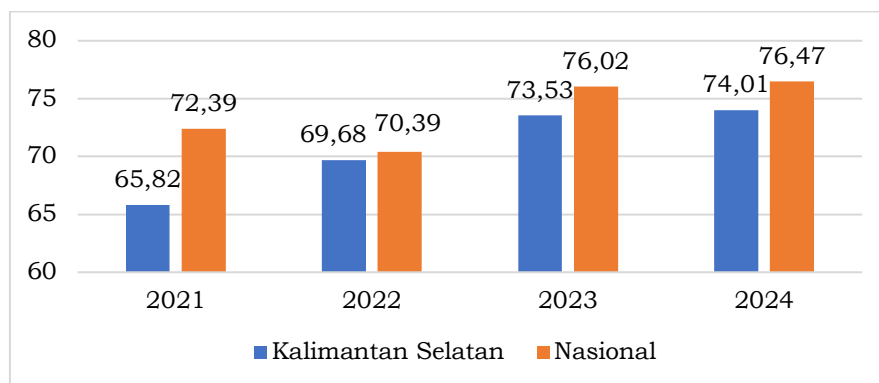


tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan peningkatan, dari yang semula 65,82 pada tahun 2021 menjadi 74,01 di tahun 2024. Peningkatan nilai IKUB Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di wilayah ini. Kondisi ini perlu terus diupayakan bersama antara pemerintah dan seluruh masyarakat, sehingga kerukunan umat beragama semakin baik pada tahun-tahun mendatang.



Gambar 2.24.
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi di Kalimantan dan Nasional Tahun 2021-2024

Sumber: Litbang Kementerian Agama, 2025

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor



dalam pelaksanaan pemajuan. Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data rilis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Akan tetapi jika menggunakan data tahun 2023, skor IPK Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 58,55, mengalami pertumbuhan sebesar 0,18% dari skor 58,45 pada tahun 2022. Selanjutnya, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Kalimantan Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nasional (57,13). Kalimantan Selatan menempati peringkat 12 se-Indonesia.

Tabel 2.47.
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
Kalimantan Selatan	Indeks	54,41	52,45	58,45	58,55
Nasional	Indeks	54,65	51,90	55,13	57,13

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, dan Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2024

Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan yang terjadi pada seluruh dimensi, kecuali Dimensi Ekonomi Budaya dan Dimensi Pendidikan. Capaian tertinggi dicatatkan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan skor 73,84. Sementara itu, Dimensi Ekspresi Budaya memiliki skor terendah sebesar 32,74. Capaian IPK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 menempati peringkat 12 dari 34 provinsi, turun tujuh peringkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Selain itu, Kalimantan Selatan juga menempati Cluster 2, dimana merupakan kelompok provinsi dengan faktor core positif dan faktor support negatif.

Nilai IPK Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diproyeksikan sebesar 62,14 poin. Berdasarkan *baseline* tahun 2018, sampai tahun 2023 IPK Provinsi Kalimantan Selatan sudah mencapai 57,00% dari proyeksi tahun 2024. Proyeksi tersebut dapat tercapai jika capaian IPK Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 naik 3,59 poin. Pada tahun 2045 Indonesia Emas, IPK Nasional ditargetkan sebesar 68,15 poin. Tercapainya target tersebut harus didukung oleh pertumbuhan seluruh provinsi termasuk Kalimantan Selatan dengan target sebesar 71,84 poin.

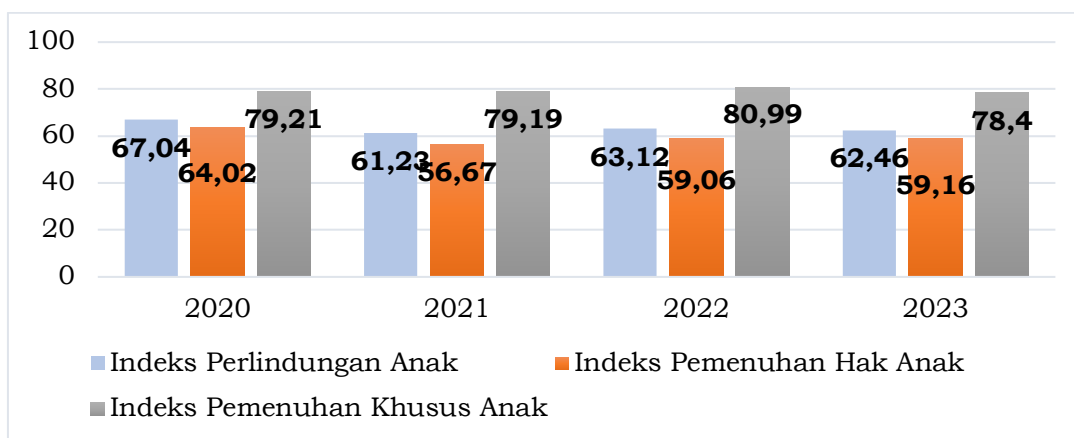


2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak

Sebagai salah satu upaya dari penguatan sistem perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun suatu indeks untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia. Alat ukur yang digunakan yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Indonesia. Sedangkan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan khusus anak. Jadi IPA merupakan indikator komposit yang mencakup IPHA dan IPKA.

Perkembangan IPA selama 4 (empat) tahun terakhir di Kalimantan Selatan menunjukkan fluktuasi dengan capaian tertinggi di tahun 2020 yakni 67,04. Sementara untuk IPHA dan IPKA juga menunjukkan tren fluktuasi dengan capaian tertinggi untuk IPHA ada di tahun 2020 yaitu 64,02 dan IPKA di tahun 2022 mencapai 80,99.



Gambar 2.25.
Capaian IPA, IPHA, dan IPKA di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023

Sumber: Kementerian PPPA, 2025

Berdasarkan data IPA tahun 2023 sebagaimana yang terakhir dipublikasikan oleh Kementerian PPPA, sebagai ibukota provinsi, Kota Banjar Baru mempunyai capaian IPA tertinggi. Kondisi ini diikuti oleh Kabupaten



Tabalong dan Kota Banjarmasin. Sedangkan capaian IPA terendah ada di Hulu Sungai Selatan, Banjar dan Barito Kuala. Ketimpangan antara capaian IPA tertinggi di Kota Banjar Baru dan terendah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 9,67 poin. Untuk IPKA ketimpangannya lebih rendah dibandingkan IPHA, yaitu 7,01 poin, yaitu selisih antara capaian tertinggi di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan. Kota Banjar Baru menduduki peringkat ketiga setelah Tanah Laut dan Tapin. Sedangkan untuk capaian IPKA terendah selain di Hulu Sungai Selatan juga di Banjar dan Kota Baru. Dengan demikian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar harus mendapatkan perhatian khusus karena baik IPA maupun IPHA capaiannya masuk ke peringkat paling bawah.

Untuk IPKA, capaian tertinggi juga ada di Banjar Baru, Tabalong dan Tanah Laut. Sedangkan yang terendah ada di Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala. Sedangkan selisih antara capaian tertinggi dan terendah untuk IPKA sebanyak 18,76 poin, lebih tinggi dibandingkan ketimpangan IPA dan IPHA.



Gambar 2.26.
Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Sumber: Kementerian PPPA, 2024

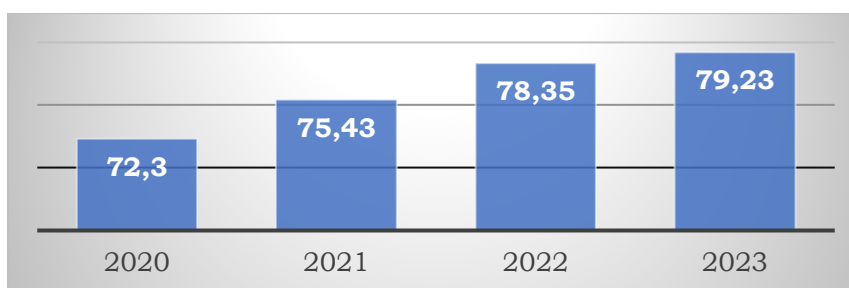
b. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Pembangunan kualitas keluarga diarahkan untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak anak. Indeks Kualitas Keluarga yang dibahas dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan keluarga guna mewujudkan



kesetaraan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan kualitas keluarga.

Secara umum, perkembangan IKK di Kalimantan Selatan selama periode tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan tren positif, yang berarti meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode ini, capaian tertinggi adalah 79,23 pada tahun 2023. Gambar di bawah tidak menyajikan kondisi sampai 2024 sebab data terakhir yang tersedia adalah tahun 2023.



Gambar 2.27.
Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023 (metode baru)

Sumber: Kementerian PPPA, 2025

Hasil perhitungan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 menunjukkan bahwa, nilai IKK menggunakan metadata lama maupun metadata baru mengalami peningkatan sebesar 1,27 poin untuk metadata lama yaitu dari 77,31 persen (2022) menjadi 78,58 persen (2023) dan peningkatan sebesar 0,88 poin untuk metadata baru yaitu dari 78,35 persen (2022) menjadi 79,23 persen (2023). Pada tahun 2023, baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru diperoleh nilai IKK Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi jika dibandingkan nilai IKK nasional. Berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022, nilai IKK Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 menunjukkan kualitas keluarga pada kategori ‘Responsif Gender dan Hak Anak’.

Dimensi penyusunan IKK terdiri dari 5 (lima) dimensi. Pada tahun 2023, dari lima dimensi penyusun IKK, baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru terdapat tiga dimensi mengalami peningkatan dan dua dimensi mengalami penurunan nilai jika dibandingkan tahun 2022. Tiga dimensi yang mengalami peningkatan nilai diantaranya dimensi Kualias Legalitas-Struktur (KLS), dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) dan dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB). Nilai dimensi yang mengalami penurunan adalah dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) dan dimensi Kualitas

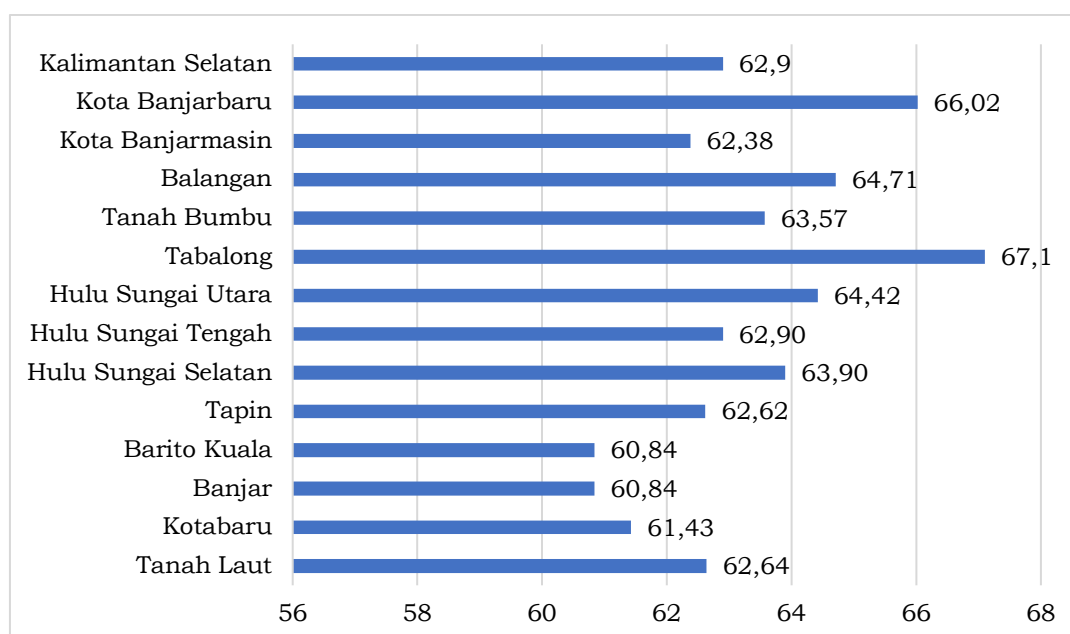


Ketahanan Sosiasal-Psikologi (KKSP). Nilai dimensi pada metadada lama yang mengalami peningkatan tertinggi adalah dimensi Kualitas Legalitas Struktur (KLS) sebesar 3,89 poin yaitu dari 85,15 persen (2022) menjadi 89,04 persen (2023). Begitu juga pada metadada baru yang mengalami peningkatan tertinggi adalah dimensi Kualitas Legalitas Struktur (KLS) sebesar 2,83 poin yaitu dari 86,59 persen (2022) menjadi 89,42 persen (2023).

c. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia. Indikator ini mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan.

Nilai iBangga di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai 62,9. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adapun nilai iBangga untuk masing-masing kabupaten/kota pada periode yang sama, disajikan pada gambar di bawah.



Gambar 2.28.
Nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten/Kota Tahun 2024

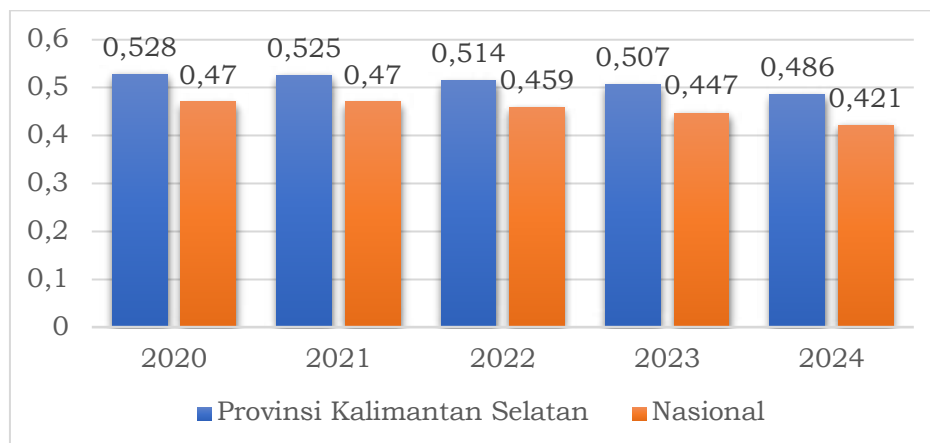
Sumber: BKKBN, 2025



d. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Selama lima tahun terakhir, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalimantan Selatan secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2020, IKG Kalimantan Selatan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,008 poin per tahun sehingga totalnya mencapai 0,042 poin selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, IKG sebesar 0,486, turun sebanyak 0,021 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,507. Penurunan sebesar 0,021 poin tahun ini sedikit lebih besar dibandingkan penurunan IKG pada tahun 2023, yaitu sebesar 0,007 poin. Selain itu, penurunan IKG Kalimantan Selatan pada tahun 2024 ini melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak tahun 2020.

Penurunan IKG pada tahun 2024 dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator pada ketiga dimensinya, khususnya dimensi kesehatan reproduksi dan pasar tenaga kerja. Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan menurun dari 23,3 persen pada tahun 2023 menjadi 16,7 persen pada tahun 2024, selain itu proporsi perempuan yang melahirkan hidup pertama kurang dari 20 tahun menurun dari 30,7 persen pada tahun 2023 menjadi 30,3 persen pada tahun 2024. Sementara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 53,75 persen pada tahun 2023 menjadi 55,52 persen pada 2024.



Gambar 2.29.
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender
Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024



Gambar di atas menunjukkan skor IKG Kalimantan Selatan pada periode 2020 sampai dengan 2024 selalu berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan nasional. Ini menunjukkan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan lebih tinggi di Kalimantan Selatan dibandingkan nasional.

Tiga dimensi pembentuk IKG Kalimantan Selatan pada periode tahun 2020-2024 secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun. Sementara, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja juga mengalami perbaikan. Perkembangan indikator penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) selama 2020–2024 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.48.
Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Gender	2020	2021	2022	2023	2024
Kesehatan Reproduksi						
MTF	Perempuan	0,299	0,287	0,235	0,233	0,167
MHPK20	Perempuan	0,326	0,322	0,318	0,307	0,303
Pemberdayaan						
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-Laki	80,00	80,00	80,00	78,18	80,00
	Perempuan	20,00	20,00	20,00	21,82	20,00
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-Laki	36,39	36,72	36,72	38,24	39,43
	Perempuan	30,00	31,17	31,02	31,86	32,42
Pasar Tenaga Kerja						
TPAK (%)	Laki-Laki	82,91	83,55	82,97	85,52	84,71
	Perempuan	55,50	54,72	51,90	53,75	55,529

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat kabupaten/kota selama kurun waktu 2020-2024 pada umumnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Di tahun 2020, nilai IKG terendah terdapat di Kota Banjarmasin yakni 0,356. Selanjutnya, pada tahun 2024 ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Banjarbaru (0,173), diikuti oleh Kota Banjarmasin (0,284).

Pada tahun 2024, terdapat 9 kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender dibandingkan 2023. Banjarbaru dan Banjarmasin mengalami penurunan paling masing-masing sebesar 0,188 dan 0,116 poin. Semakin rendahnya nilai IKG menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah telah mampu mengurangi hambatan struktural maupun kultural yang membatasi partisipasi perempuan. Hal ini mencerminkan terwujudnya prinsip kesetaraan gender dalam pembangunan.



Perkembangan IKG pada masing-masing kabupaten/kota disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.49.

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

PROV/KAB/KOTA	Indeks Ketimpangan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	0,517	0,483	0,481	0,421	0,473
Kotabaru	0,584	0,588	0,597	0,571	0,551
Banjar	0,509	0,504	0,498	0,530	0,528
Barito Kuala	0,553	0,483	0,509	0,516	0,511
Tapin	0,605	0,586	0,581	0,563	0,577
Hulu Sungai Selatan	0,564	0,567	0,497	0,531	0,459
Hulu Sungai Tengah	0,521	0,436	0,482	0,360	0,39
Hulu Sungai Utara	0,518	0,494	0,445	0,458	0,465
Tabalong	0,523	0,529	0,504	0,503	0,421
Tanah Bumbu	0,591	0,573	0,570	0,557	0,533
Balangan	0,581	0,579	0,555	0,574	0,523
Banjarmasin	0,356	0,459	0,422	0,400	0,284
Banjarbaru	0,409	0,436	0,405	0,361	0,173
KALSEL	0,528	0,525	0,514	0,507	0,486

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

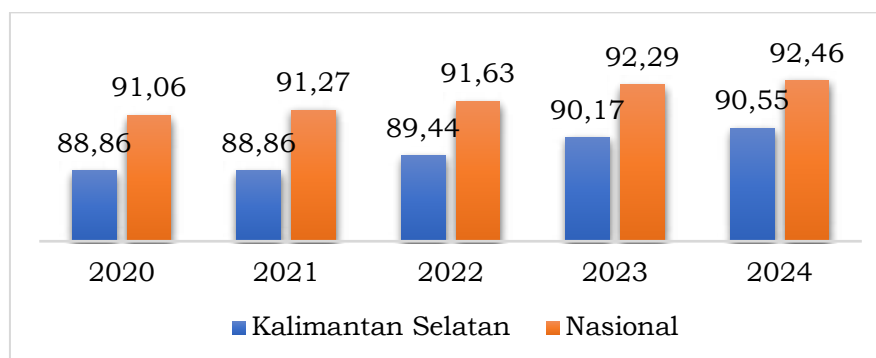
e. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan data tahun 2024, Provinsi Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi dengan IPG dan IDG di bawah nilai rata-rata nasional. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan indikator IPM, maka Kalimantan Selatan juga termasuk kategori provinsi yang memiliki angka IPM di bawah nilai rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan mempunyai kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masih kurang dan belum merata, serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih cukup besar untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam mencapai kualitas hidup yang setara di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan kontribusi dalam ekonomi juga masih kurang dan belum merata.

Berdasarkan gambar di bawah dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Selatan selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun



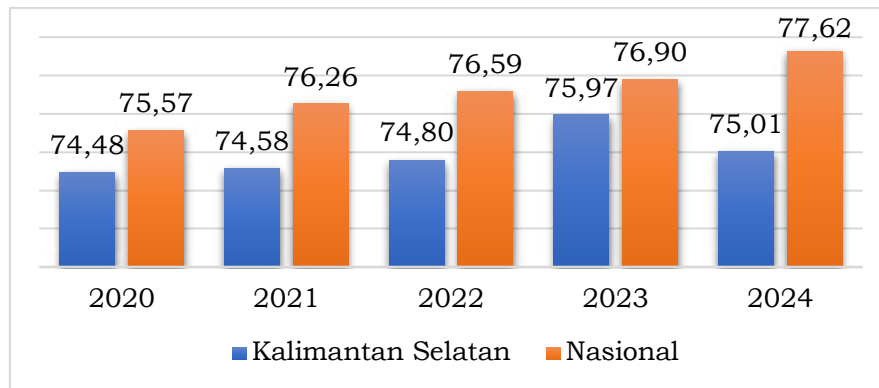
2020 IPG sebesar 88,86 dan meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 mencapai 90,55. Capaian IPG Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sebesar 90,55 menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki masih perlu ditingkatkan. Selain itu, capaian IPG Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2020 sampai 2024 lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPG Nasional.



Gambar 2.30.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS RI, 2025

Berbeda dengan capaian IPG yang selalu mengalami peningkatan, untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2020-2024 justru mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 IDG Kalimantan Selatan sebesar 74,48 dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 75,97, namun pada tahun 2024 menurun menjadi hanya 75,01. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja masih perlu ditingkatkan. Implementasi strategi pengarusutamaan gender harus semakin diperkuat. Perkembangan IDG Kalimantan Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir masih berada di bawah nasional, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.



Gambar 2.31.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS RI, 2025

f. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan selama periode tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren peningkatan, kecuali di tahun 2021. Nilai IPP tahun 2023 dan 2024 adalah capaian tertinggi pada periode ini. Nilai IPP Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 4,5 poin dari tahun 2022 sebesar 50,17 menjadi 54,67 ditahun 2023. Jika dibandingkan dengan nilai IPP nasional, maka IPP Kalimantan Selatan masih lebih rendah.

Peningkatan IPP Kalimantan Selatan tahun 2023 didorong oleh domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi. Selain itu, domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami peningkatan sebesar 2,5 poin. Sedangkan dua domain lainnya yaitu domain pendidikan serta domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami stagnasi.

Tabel 2.50.
Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPP Kalimantan Selatan	50,67	49,33	50,17	54,67	54,67*
IPP Nasional	51,00	53,33	55,33	56,33	56,33*

Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, yang dikelola dalam SIPD

Dari lima domain indikator IPP, hanya satu domain yang nilainya di atas rata-rata nasional yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan dengan nilai 75 sedangkan nilai untuk capaian rata-rata nasional yaitu 70. Selain itu, domain lapangan dan kesempatan kerja serta gender dan diskriminasi memiliki nilai yang sama dengan capaian nasional yaitu 45 dan 53. Sedangkan nilai domain pendidikan lebih rendah 3 poin dari dari nilai



nasionalnya yaitu 67. Nilai domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 33, sedangkan rata-rata nasional sebesar 53 (selisih 20 poin).

Tantangan utama pembangunan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan pada domain partisipasi dan kepemimpinan (33,33 persen) nilainya masih di bawah rata-rata nilai nasional (43,33 persen) dan ketiga indikator berada di bawah rata-rata nasional. Dari persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan 65,85 persen (nasional 71,44), persentase pemuda yang aktif dalam organisasi 1,45 persen (nasional 5,44) dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat 3,48 persen (nasional 6,69 persen).

g. Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan

Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 18,69 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 23,57 persen.

Selanjutnya pada periode tersebut dapat dijelaskan bahwa Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Hanya pada tahun 2022 capaian Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51.
Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Selatan	21,16	20,54	23,57	21,17	18,69
Nasional	24,28	22,40	23,22	22,25	20,31

Sumber: BPS RI yang dikelola dalam SIPD, diolah



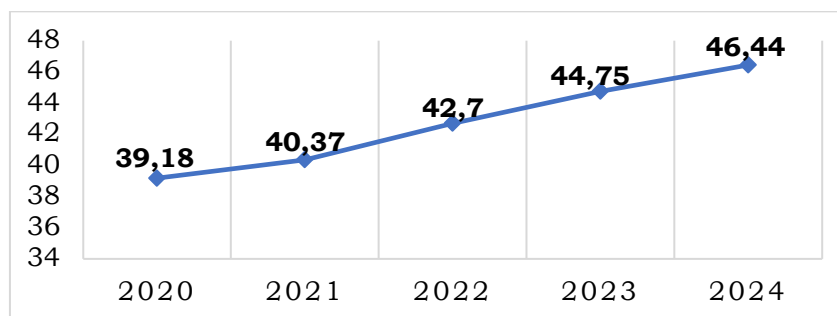
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Persentase Tenaga Kerja Formal

Menurut BPS, tenaga kerja formal adalah mereka yang status pekerjaannya buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Persentase tenaga kerja formal di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan dari tahun ke tahun setelah pandemi COVID-19 menunjukkan semakin membaiknya kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, persentase tenaga kerja formal di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 46,44 persen, berarti meningkat 1,69 poin dari tahun sebelumnya.

Walaupun meningkat selama beberapa tahun terakhir, namun capaian persentase tenaga kerja formal Kalimantan Selatan berada pada posisi keempat di Pulau Kalimantan di atas Provinsi Kalimantan Barat. Lebih lanjut persentase tenaga kerja formal Kalimantan Selatan tahun 2024 berada di atas capaian nasional yang sebesar 42,05 persen.



Gambar 2.32.
Persentase Tenaga Kerja Formal di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS RI yang dikelola dalam SIPD, 2025

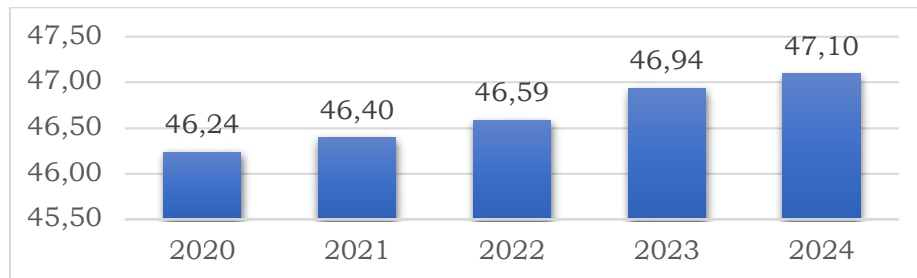
Dengan persentase tenaga kerja formal di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 44,75 persen, maka dapat diartikan bahwa masih terdapat 55,25 persen penduduk di provinsi ini yang bekerja di sektor informal.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 46,24 dan terus mengalami peningkatan



hingga tahun 2024 menjadi 47,10. Rasio ketergantungan 47,10 berarti 1 orang penduduk usia produktif di Kalimantan Selatan menanggung 4 atau 5 orang tidak produktif. Tren yang meningkat ini diharapkan dapat ditekan pada tahun-tahun berikutnya, sebab bila tidak dikendalikan atau diturunkan maka akan mempengaruhi perekonomian masyarakat dan daerah. Perkembangan Rasio Ketergantungan di Provinsi Kalimantan Selatan terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.33.
Rasio Ketergantungan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, diolah

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri Pengolahan merupakan salah satu Lapangan usaha andalan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peranan industri pengolahan terhadap perekonomian Kalimantan Selatan rata-rata sebesar 12,03 persen.

Tabel 2.52.
Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan/Manufaktur	13,52	13,55	11,38	10,75	10,95

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

Kategori Industri pengolahan dalam PDRB atas dasar Tahun 2010, dibagi dalam 16 kategori. Subkategori yang mendominasi kinerja industri manufaktur di Kalimantan Selatan adalah Industri Makanan dan Minuman. Produksi subkategori ini mencapai 7,47 persen pada tahun 2024. komoditas utama dalam subkategori ini adalah adalah crude palm oil (CPO). Komoditas tersebut menjadi kontributor terbesar kedua ekspor



Kalimantan Selatan setelah batubara. Oleh karena itu, kinerja Industri Makanan dan Minuman di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global.

Tabel 2.53.
Distribusi Subkategori terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2020-2024

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Industri Makanan dan Minuman	9,00	9,02	7,72	7,32	7,47
3	Industri Pengolahan Tembakau/Manufacture of Tobacco Product	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,13	0,12	0,10	0,11	0,11
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1,07	0,97	0,78	0,72	0,72
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,10	0,09	0,08	0,08	0,09
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,29	0,55	0,47	0,49	0,49
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,50	1,45	1,12	0,90	0,91
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1,14	1,07	0,88	0,91	0,93
11	Industri Logam Dasar/Manufacture of Basic Metals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,06	0,05	0,04	0,05	0,05
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	0,12	0,11	0,09	0,09	0,09
14	Industri Alat Angkutan	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04
15	Industri Furnitur	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13
	Industri Pengolahan	13,52	13,55	11,38	10,75	10,95

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

Laju pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar -3,63 persen dan meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 6,01 persen, lalu pada tahun berikutnya mengalami penurunan serta peningkatan kembali menjadi 4,83 persen di tahun 2024.



Tabel 2.54.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2020-2024

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Industri Pengolahan/Manufacturing	-3,63	6,01	3,34	3,02	4,83
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas/ Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products	-	-	-	-	
2	Industri Makanan dan Minuman/Manufacture of Food Product and Beverages	-5,68	5,55	4,46	4,41	5,12
3	Industri Pengolahan Tembakau/Manufacture of Tobacco Product	-	-	-	-	
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/Manufacture of Textiles;and Wearing Apparel	-1,01	1,75	6,09	7,61	4,02
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/Manufacture of Leather and Related Product and Footwear	-	-	-	-	
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ Manufacture of Wood and of Product of Wood and Cork, and Aticles of Straw and Plaiting Materials	0,56	-0,67	-1,17	-1,78	4,62
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media	0,62	2,86	5,89	6,51	6,77
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional /Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products	0,86	99,23	5,73	5,21	4,21
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products	-0,27	1,01	-0,14	-4,88	2,91
10	Industri Barang Galian bukan Logam/Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products	1,74	2,39	1,95	4,59	5,18
11	Industri Logam Dasar/Manufacture of Basic Metals	-	-	-	-	
12	. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, ande Electrical Equipment	-1,52	0,58	2,42	7,71	4,51
13	Industri Mesin dan Perlengkapan /Manufacture of Machinery and Equipment	1,66	2,15	1,18	1,07	4,27
14	Industri Alat Angkutan/Manufacture of Transport Equipment	1,87	-0,96	2,44	2,39	5,38
15	Industri Furnitur/Manufacture of Furniture	-2,82	1,25	1,75	1,03	4,12
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment	-0,46	1,12	3,13	4,02	5,03

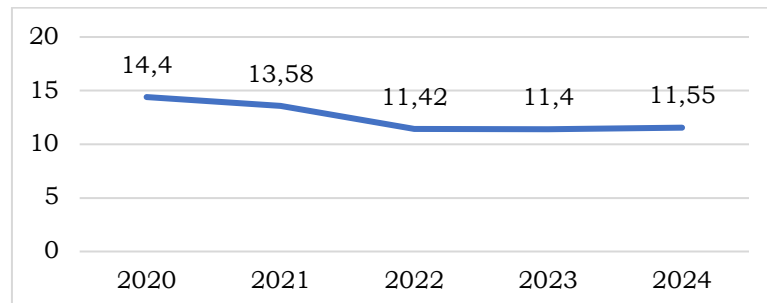
Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

b. Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Data 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan berfluktuasinya



kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 2020 kontribusi sektor ini mencapai 14,40 persen dan mengalami penurunan menjadi 11,55 persen di tahun 2024.



Gambar 2.34.
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Pada 2024, lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,55 persen. Sekitar 69,95 persen NTB (Nilai Tambah Bruto) kategori ini disumbang oleh Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Kemudian diikuti oleh subkategori Perikanan sebesar 27,65 persen dan subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 2,40 persen.

Dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penguatan peranan Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian. Adapun subkategori dengan Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Perikanan yang mengalami penurunan peranan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.55.
Peran Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB Tahun 2020–2024 (persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Jasa Pertanian	67,02	67,40	67,24	68,52	69,95
a. Tanaman Pangan	30,04	28,04	26,49	29,13	30,05
b. Tanaman Hortikultura	1,08	1,07	1,04	1,07	1,08
c. Peternakan	14,01	26,44	27,59	26,12	26,39
d. Jasa Pertanian dan Perburuan	2,03	1,93	1,83	1,82	1,83
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,97	2,89	2,70	2,55	2,40
3. <i>Forestry</i>	30,00	29,70	30,07	28,93	27,65
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025



Dilihat lebih dalam, Subkategori Tanaman Pangan menjadi pendorong utama peningkatan Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong pertumbuhan luas panen dan produksi padi yang pada tahun 2024 tumbuh cukup tinggi. Luas panen padi tumbuh sebesar 14,85 persen menjadi 246,112 ribu hektare. Sementara produksi padi tumbuh sebesar 17,59 persen menjadi 1.029.568 ton-GKG. Pertumbuhan produksi padi pada tahun 2024 terjadi di 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dimana Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru menjadi kabupaten yang tidak mengalami peningkatan produksi padi di tahun 2024. Capaian peranan Subsektor Tanaman Pangan pada tahun 2024 ini mampu melampaui capaian pada tahun 2020 yang sebesar 30,04 persen.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan. Tahun 2020 laju pertumbuhan sektor ini sebesar -0,91 persen akibat pandemi COVID-19 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 4,16 persen.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2024 mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2023, menjadi sebesar 4,16 persen. Ketujuh subsektor di dalamnya juga tercatat mengalami pertumbuhan dengan Subsektor Tanaman Pangan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 7,93 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan peranan Subsektor Tanaman Pangan dibanding tahun 2023.

Subsektor Peternakan kemudian menjadi subsektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua di tahun 2024, yakni mencapai 6,03 persen. Pertumbuhan ini seiring dengan peningkatan peranan dari 10,39 persen di tahun 2023 menjadi 10,61 persen di tahun 2024. Subsektor Tanaman Hortikultura berada di posisi ketiga dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 4,30 persen.

Subsektor Jasa Pertanian dan Perkebunan, Perikanan, Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Perkebunan di sisi lain juga mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024. Subsektor Perikanan, dan Kehutanan dan Penebangan Kayu mampu mencatatkan pertumbuhan yang cepat dibandingkan tahun 2023. Sementara pertumbuhan Subsektor Jasa Pertanian dan Perburuan, dan Perkebunan mengalami perlambatan.



Tabel 2.56.
Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020–2024 (persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,91	1,17	1,59	3,31	4,16

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

c. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Provinsi Kalimantan selatan dengan peranan sebesar rata-rata 1,52 persen selama tahun 2020-2024. Meski demikian, peranan ini menurun di tahun 2022 sampai 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020-2021 yang selalu di atas 2 persen.

Tabel 2.57.
Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,04	1,79	1,86	1,93

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB atas dasar Tahun 2010, dibagi dalam 2 kategori. Subkategori yang mendominasi kinerja Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kalimantan Selatan adalah Penyediaan Makan dan Minum.

Tabel 2.58.
Distribusi Subkategori terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen) Tahun 2020-2024

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Akomodasi	0,31	0,29	0,27	0,29	0,30
2	Penyediaan Makan Minum	1,83	1,75	1,52	1,57	1,63
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,04	1,79	1,86	1,93

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan kategori yang rentan terhadap kondisi pandemi. Seiring dengan pandemi yang mereda, kategori tersebut mampu tumbuh tinggi hingga 8,92 persen pada tahun 2023, yang pertumbuhan yang mana ini lebih cepat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 8,82 persen. Namun pada tahun 2024 Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sedikit mengalami penurunan menjadi 8,41 persen.



Tabel 2.59.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen) Tahun 2020-2024

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,02	2,94	9,63	9,28	8,07
1	Penyediaan Akomodasi	-3,67	2,25	14,13	11,21	6,31
2	Penyediaan Makan Minum	-,1,71	3,07	8,82	8,92	8,41

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

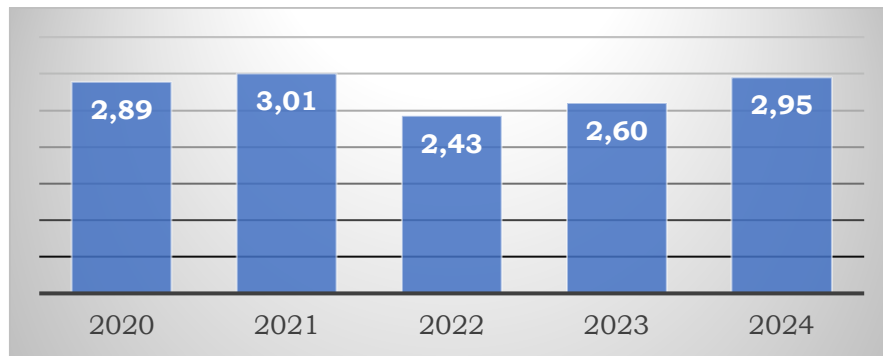
d. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan peningkatan signifikan total kunjungan wisatawan baik nusantara dan mancanegara hingga Desember 2024 sebanyak 19.928.436 wisatawan. Total jumlah tersebut kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 19.910.573 orang dan mancanegara sebanyak 17.863 orang. Salah satu faktor pendorong adalah posisi strategis Kalimantan Selatan sebagai gerbang IKN.

e. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap.

Berdasarkan grafik di bawah, diketahui bahwa Rasio Kewirausahaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Kondisi tahun 2020 masih dipengaruhi oleh lesunya perekonomian akibat pandemi COVID-19. Tahun 2020 rasio kewirausahaan sempat turun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya rasio kewirausahaan sempat meningkat di tahun 2021, namun kembali turun pada tahun 2022. Di tahun 2023 keadaan perekonomian sudah semakin membaik, nilai rasio kewirausahaan juga kembali meningkat yakni mencapai 2,60 dan mencapai 2,95 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan di Kalimantan Selatan semakin banyak penduduk yang memiliki usaha dengan dibantu buruh tetap. Hal ini berdampak pada semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.



Gambar 2.35.
Rasio Kewirausahaan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

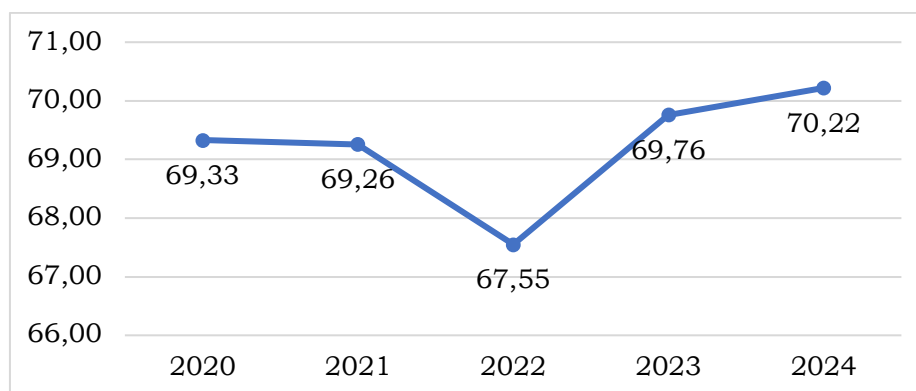
Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2020-2024 yang dikelola dalam SIPD, diolah

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 2,08 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,09 juta orang pengangguran. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 TPAK Kalimantan Selatan sebesar 69,33 persen. Namun pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga mencapai 67,55 persen di tahun 2022. Selanjutnya jika dibandingkan kondisi 2 tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024 mengalami peningkatan. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 70,22 persen, naik sebesar 0,46 persen poin dibanding Agustus 2023 dan naik sebesar 2,67 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

Dengan kondisi TPAK yang cenderung meningkat 2 (dua) tahun terakhir, berarti lebih banyak pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Dengan pasokan tenaga kerja yang lebih besar, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak output.



Gambar 2.36.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Data tiga tahun terakhir (2022-2024) menunjukkan TPAK di tingkat kabupaten/kota beragam, ada yang menunjukkan tren positif meningkat dan ada juga yang fluktuatif, bahkan ada yang mengalami penurunan. Namun bila dilihat kondisi pada tahun 2024, maka seluruh daerah mengalami peningkatan TPAK jika dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kota Banjarmasin. Dengan kondisi TPAK yang secara umum meningkat di kabupaten/kota, mengindikasikan makin banyak orang yang bekerja atau setidaknya rajin mencari pekerjaan.

Tabel 2.60.
TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2022-2024

PROV/KAB/KOTA	TPAK		
	2022	2023	2024
Tanah Laut	70,92	69,61	73,03
Kotabaru	63,96	64	65,8
Banjar	69,91	70,21	71,03
Barito Kuala	70,74	71,89	73,46
Tapin	70,31	70,17	68,12
Hulu Sungai Selatan	69,55	74,91	75,77
Hulu Sungai Tengah	67,63	71,97	74,53
Hulu Sungai Utara	69,35	75,34	73,89
Tabalong	72,32	72,94	74,17
Tanah Bumbu	64,75	68,57	67,35
Balangan	72,54	*73,16	76,91
Banjarmasin	63,15	66,16	63,93
Banjarbaru	62,46	67,18	67,23
KALSEL	67,55	69,76	70,22

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025



Selain data dan informasi TPAK yang diuraikan di atas, pada bagian ini dimuat data pencari kerja. Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 170.560 orang dan menurun hingga tahun 2024 menjadi hanya 6.817 orang. Untuk lowongan kerja terdaftar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 53.057 dan mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi hanya 523, namun meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 4.684. Adapun secara lengkap data Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sampai 2024 disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.61.

Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar - Laki-Laki	Pencari Kerja Terdaftar - Perempuan	Pencari Kerja Terdaftar - Jumlah	Lowongan Kerja Terdaftar - Laki-Laki	Lowongan Kerja Terdaftar - Perempuan	Lowongan Kerja Terdaftar - Jumlah	Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja - Laki-Laki	Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja - Perempuan	Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja - Jumlah
2020	93.590	76.970	170.560	34.725	18.332	53.057	28.937	15.277	44.214
2022	7.227	3.063	10.290	538	442	980	460	426	886
2023	11.441	3.774	15.215	444	79	523	1.348	246	1.594
2024	4.521	2.296	6.817	1.062	516	4.684	1.640	1.142	2.782

Sumber: BPS RI, 2025



g. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai

Pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Pekerja dengan Status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar (status1/2/3):
 - a) Memiliki pembukuan lengkap (laba/rugi; neraca keuangan)
2. Pekerja dengan Status Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Sektor Pertanian, atau Pekerja Bebas Nonpertanian (status 4/5/6):
 - a) Menerima jaminan sosial dari pemberi kerja, atau
 - b) Memperoleh cuti tahunan tanpa pemotongan gaji pokok dan cuti sakit tanpa pemotongan gaji pokok, atau
 - c) Memiliki perjanjian/kontrak kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).

h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.

TPAK laki-laki di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi, dengan capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 84,71 atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 85,52. Begitu pula dengan TPAK perempuan yang mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 sampai 2024, dengan capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 84,71.

Sejak tahun 2020 sampai 2024 TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK Perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.62.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK Laki-Laki	82,91	83,55	82,97	85,52	84,71
TPAK Perempuan	55,50	54,72	51,90	53,75	55,52

Sumber: BPS RI, 2025

i. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan hasil pengukuran informasi data inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan mengalami peningkatan dan konsisten pada kategori Inovatif. Hasil pengukuran menunjukkan Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Selatan tahun 2024 mencapai 51,71 dengan kategori Inovatif.

Tabel 2.63.
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	1,006 (Sangat Inovatif)	36,72 (Inovatif)	45,62 (Inovatif)	47,50 (Inovatif)	51,71 (Inovatif)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

j. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior.

k. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non



pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.

1. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Provinsi

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.

m. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah¹. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

n. Return on Aset (RoA) BUMD

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau merupakan instrumen untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi Indonesia. Indeks Ekonomi Hijau Daerah dikembangkan dari Indeks Ekonomi Hijau nasional dengan beberapa penyesuaian meliputi tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan hasil penghitungan Bappenas, Indeks Ekonomi Hijau Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 53,01. Skor ini terbilang masih rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.



b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014).

Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun. Adapun capaian Porsi EBT dalam bauran energi primer di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 11,93 persen.

2.1.3.4. Transformasi Digital

a. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokkan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK, dan Keahlian TIK). Indikator ini menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk: a. Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu; b. Mengukur kesenjangan digital antarwilayah; dan c. Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia.

Badan Pusat Statistik melakukan penghitungan Indeks Pembangunan TIK tahun 2019 dan 2023. Berdasarkan penghitungan, Indeks Pembangunan TIK di Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan, dari 5,22 di pada tahun 2019 menjadi 6,45 di tahun 2023. Secara umum, nilai Indeks Pembangunan TIK seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan, dengan posisi tertinggi dicapai oleh Kota Banjarbaru sebesar 7,73. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi 6,89.

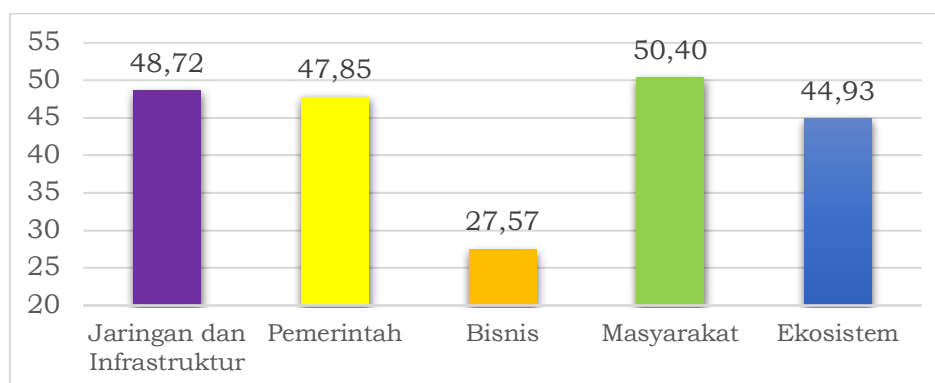
b. Indeks Transformasi Digital

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan Transformasi Digital di Indonesia, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah. Indeks TDN merupakan konsep



holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital.

Pada tahun 2022, Kalimantan Selatan memperoleh skor Indeks TDN sebesar 44,00 dan masuk ke dalam provinsi dengan klasifikasi C (Cukup). Namun demikian, dalam lima tahun, skor Indeks TDN Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat 4,13 poin dari sebelumnya, yakni sebesar 39,87 pada tahun 2018 yang menandakan usaha perbaikan untuk transformasi digital oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan analisis skor per pilar, Pilar Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang cukup baik dan merupakan satu-satunya pilar yang masuk dalam klasifikasi B (Baik) dengan skor 50,40 pada tahun 2022. Data terakhir yang tersedia adalah tahun 2022.



Gambar 2.37.
Skor Per Pilar Indeks Transformasi Digital
Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022

Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil dalam kurun waktu 2020-2024. Tabel di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam



kurun waktu 2020-2024 berfluktuasi, dari (-1,35) persen pada 2020 hingga 4,97 persen pada 2024. Pertumbuhan PMTB masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya.

Tabel 2.64.
Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	44.964,27	46.442,44	51.628,81	56.526,65	61.221,59
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	30.092,96	30.346,15	31.935,78	33.588,68	35.259,02
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	25,10	23,47	20,56	21,00	21,35
Struktur PMTB *					
a. Bangunan (Miliar Rp)	31.829,14	32.781,31	35.767,77	38.721,23	41.381,41
Bangunan (%)	70,79	70,58	69,28	68,50	67,59
b. Nonbangunan (Miliar Rp)	13.135,12	13.661,12	15.861,03	17.805,42	19.840,18
Nonbangunan (%)	29,21	29,42	30,72	31,50	32,41
Total PMTB (Miliar Rp)	44.964,27	46.442,44	51.628,81	56.526,65	61.221,59
Total PMTB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ^s (%)					
a. Bangunan	-1,06	1,68	4,04	4,88	4,86
b. Nonbangunan	-2,11	-1,47	8,63	5,98	5,26
Total PMTB	-1,35	0,84	5,24	5,18	4,97

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran 2020-2024

Data pada tabel di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan proporsi PMTB dalam PDRB selama kurun waktu 2020– 2024 relatif stabil di kisaran 20-25 persen. PMTB yang disajikan pada PDRB Pengeluaran terpilah menurut dua subkomponen, yaitu Bangunan dan Nonbangunan. Pertumbuhan di sektor bangunan cenderung berfluktuasi selama lima tahun terakhir dengan puncak pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 4,88 persen dan pertumbuhan terendah pada 2020 sebesar -1,06 persen. Demikian pula untuk subkomponen nonbangunan menunjukkan pola yang variatif antar tahunnya. Tahun 2022 sub komponen ini mengalami pertumbuhan tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 8,63 persen.

b. Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)

Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (RP) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya.



Data nilai realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren positif. Jika pada tahun 2020 realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai 7.821 juta rupiah, maka di tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 24.850 juta rupiah. Kondisi ini selaras dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan penanaman modal yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan semakin baiknya pelayanan yang diberikan. Perkembangan realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.65.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah	7.821	12.715	15.296	19.762	24.850
2	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	A (88,35)	A (89,25)	A (88,75)	A (94,25)	A (93,25)

Sumber: Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, 2025

Data perkembangan realisasi investasi di kabupaten/kota selama periode Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki nilai paling tinggi pada tahun 2024, disusul dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Sementara daerah yang memiliki nilai investasi terkecil adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.66.
Nilai Investasi di Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Tahun (Dalam Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Balangan	962,02	115,12	403,60	471,22	719.226
Banjar	577,00	1.658,09	438,91	1.214,95	1.317.803
Banjar Baru	88,71	146,75	645,93	361,34	527.201
Banjarmasin	539,06	1.820,53	2.111,04	1.935,90	4.126.873
Barito Kuala	295,80	428,29	600,31	549,78	198.237
Hulu Sungai Selatan	119,08	86,12	198,01	31,18	333.889
Hulu Sungai Tengah	33,08	60,30	49,20	57,83	185.941
Hulu Sungai Utara	65,00	5,99	3,66	12,51	24.128
Kotabaru	543,78	1.635,45	2.236,75	2.848,79	6.678.898
Tabalong	1.810,61	3.579,08	3.204,18	2.319,59	1.092.669
Tanah Bumbu	1.002,64	1.493,94	3.036,39	7.007,92	5.176.629
Tanah Laut	1.614,76	773,62	1.588,80	1.492,18	2.719.131
Tapin	169,05	912,18	779,28	1.458,99	1.750.084
TOTAL	7.821	12.715	15.296	19.762	24.850.709

Sumber: Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, 2025



Selanjutnya, rincian realisasi investasi berdasarkan sektor dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 di Kalimantan Selatan dimuat dalam tabel di bawah.



Tabel 2.67.
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor dari Januari Sampai Dengan Desember Tahun 2024

Sektor	PMDN		PMA			PMDN+PMA	
	Proyek	Tambahan Dalam Rp	Proyek	Tambahan Dalam USD	Tambahan Dalam Rp	Total Proyek	Total Tambahan
Pertambangan	869	Rp 5.998.374.835.951	237	\$ 454.291.596,13	Rp 6.814.376.070.732	1.106	Rp 12.812.750.906.683
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1.108	Rp 3.129.108.624.170	101	\$ 25.372.013,02	Rp 380.580.237.880	1.209	Rp 3.509.688.862.050
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	281	Rp 1.154.413.573.737	80	\$ 40.296.748,93	Rp 604.451.296.214	361	Rp 1.758.864.869.951
Industri Makanan	253	Rp 1.454.119.696.658	81	\$ 11.868.079,30	Rp 178.021.221.449	334	Rp 1.632.140.918.107
Perdagangan dan Reparasi	3.832	Rp 1.210.354.027.150	241	\$ 2.509.867,27	Rp 37.648.038.086	4.073	Rp 1.248.002.065.236
Konstruksi	1.705	Rp 895.339.497.711	13	\$ 129.933,33	Rp 1.949.000.100	1.718	Rp 897.288.497.811
Jasa Lainnya	1.315	Rp 646.421.761.917	138	\$ 2.547.264,29	Rp 38.208.971.893	1.453	Rp 684.630.733.810
Listrik, Gas dan Air	260	Rp 601.163.655.970	17	\$ 2.806.169,70	Rp 42.092.562.603	277	Rp 643.256.218.573
Industri Kayu	66	Rp 498.304.046.034	44	\$ 2.312.151,43	Rp 34.682.314.475	110	Rp 532.986.360.509
Hotel dan Restoran	513	Rp 311.703.751.872	88	\$ 733.176,70	Rp 10.997.662.759	601	Rp 322.701.414.631
Industri Mineral Non Logam	105	Rp 193.101.241.593	3	\$ 127.900,00	Rp 1.918.500.000	108	Rp 195.019.741.593
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	341	Rp 157.877.828.367	12	\$ 50.716,67	Rp 760.750.100	353	Rp 158.638.578.467
Industri Karet dan Plastik	35	Rp 128.297.857.738	8	\$ 130.741,63	Rp 1.961.124.992	43	Rp 130.258.982.730
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	30	Rp 32.166.784.903	26	\$ 5.554.133,33	Rp 83.312.002.900	56	Rp 115.478.787.803
Industri Kimia dan Farmasi	85	Rp 76.378.321.844	34	\$ 464.086,54	Rp 6.961.298.137	119	Rp 83.339.619.981
Perikanan	18	Rp 57.349.953.205	-	-	-	18	Rp 57.349.953.205
Kehutanan	63	Rp 8.625.571.863	19	\$ 1.490.644,90	Rp 22.359.673.466	82	Rp 30.985.245.329
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	22	Rp 16.276.834.107	4	\$ 725.089,97	Rp 10.876.349.480	26	Rp 27.153.183.587
Industri Lainnya	80	Rp 7.751.437.849	6	\$ 386,67	Rp 5.800.000	86	Rp 7.757.237.849
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	20	Rp 1.581.600.000	-	-	-	20	Rp 1.581.600.000
Industri Kertas dan Percetakan	7	Rp 637.000.000	1	\$ 13.300,00	Rp 199.500.000	8	Rp 836.500.000
TOTAL	11.008	Rp 16.579.347.902.639	1.153	\$ 551.423.999,81	Rp 8.271.362.375.266	12.161	Rp 24.850.710.277.905

Sumber: Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, 2025



c. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Pada tahun 2023 nilai ekspor masih tumbuh positif yaitu sebesar 7,66 persen, meski mengalami perlambatan. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekspor tumbuh fantastis sebesar 19,71 persen. Penurunan performa ekspor tidak lepas dari melemahnya situasi perdagangan internasional dan harga-harga komoditas dibanding tahun 2023. Meski demikian, pencapaian ini mengindikasikan ekonomi Kalimantan Selatan masih tangguh di tengah ketidakpastian global. Nilai ekspor luar negeri atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 Kalimantan Selatan tercatat sebesar 201,95 triliun rupiah.

Tabel 2.68.
Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	85.564,07	130.875,01	216.531,52	201.948,10	192.516,67
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	80.665,70	95.627,78	114.471,60	123.240,12	129.241,86
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	47,76	66,14	86,23	75,02	67,12
Struktur Ekspor ⁶					
a. Barang (Miliar Rp)	84.909,39	130.526,77	216.115,81	201.485,75	192.029,41
Barang (%)	99,23	99,73	99,81	99,77	99,75
b. Jasa (Miliar Rp)	654,68	348,24	415,71	462,36	487,26
Jasa (%)	0,77	0,27	0,19	0,23	0,25
Total ekspor (%)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan ⁷ (%)					
Barang	-13,20	18,89	19,72	7,66	4,87
Jasa	-28,78	-47,96	13,95	6,00	2,51
Total Ekspor	-13,30	18,55	19,71	7,66	4,87

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran 2020-2024

Adapun jika komponen ekspor dilihat atas dasar harga konstan 2010, nilai ekspor justru menunjukkan arah pertumbuhan yang positif setelah tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Adapun nilai “riil” masing-masing tahun yaitu 80,66 triliun rupiah (2020); 95,63 triliun rupiah (2021); 114,47 triliun rupiah (2022); 123,24 triliun rupiah (2023) dan 129,24 triliun



rupiah (2024). Seiring dengan nilai nominal ekspor yang mengalami fluktuasi, proporsinya dalam PDRB juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 andil ekspor mencapai 47,76 persen dan berfluktuasi pada tahun berikutnya hingga menjadi 67,12 pada tahun 2024.

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Kalimantan Selatan berupa barang (rata-rata 99 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Komponen ekspor barang mengalami pertumbuhan positif 7,66 persen pada tahun 2023 dan komponen ekspor jasa mengalami pertumbuhan positif sebesar 6 persen. Pertumbuhan fantastis terjadi di tahun 2022 terjadi pada kelompok ekspor barang, terutama pada komoditas batubara yang mengalami kenaikan harga di pasar dunia. Kemudian pada tahun 2023, harga batubara yang merupakan komoditas ekspor unggulan Kalimantan Selatan mengalami pelemahan harga, lebih dari 50 persen. Sejak awal tahun 2021 harga komoditas batubara mengalami perbaikan harga dan terus meningkat hingga tahun 2022, kemudian mulai turun di periode 2023.

d. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi

Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi merupakan Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam Satu Provinsi. Berdasarkan data, pada tahun 2024 nilai Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 10,5 poin.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara.



b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m². 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak.

Tabel 2.69.
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	52,99	57,5	55,96	57,5	60,60

Sumber: BPS RI Tahun 2025

Adapun Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif cenderung meningkat, dimana pada tahun 2020 sebesar 52,99 persen dan meningkat sebesar 7,61 persen pada tahun 2024 menjadi 60,6 persen.



c. Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah

Indikator Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah merupakan salah satu instrumen pengukuran penyediaan dan pemenuhan infrastruktur di Kalimantan Selatan yang digunakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022-2024 memiliki pencapaian terendah pada tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi penyebab penurunan nilai Indeks Infrastuktur Dasar Wilayah masih adanya kendala ketersediaan air baku di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Kotabaru. Selain itu, sistem pengelolaan sampah yang dominan masih tradisional dan masih adanya praktik buang sampah secara sembarangan turut mempengaruhi capaian kinerja.

Tabel 2.70.
Indikator Indeks Infrastuktur Dasar Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024

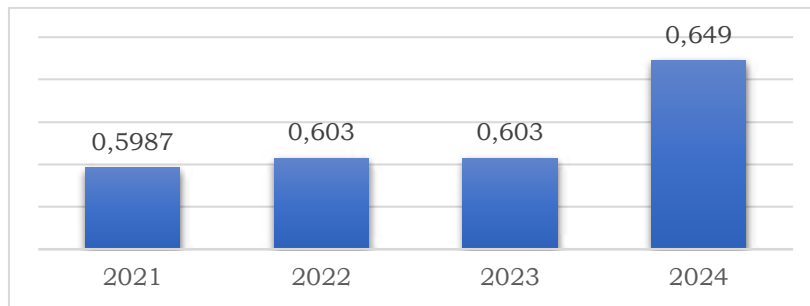
Indikator	2022	2023	2024
Indikator Indeks Infrastuktur Dasar Wilayah	88,52	81,75	87,41

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

d. Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi transportasi di Kalimantan Selatan. Realisasi indikator Rasio Konektivitas di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,603, berarti sama dengan realisasi pada tahun 2022. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan Rasio Konektivitas menjadi 0,649.

Rasio Konektivitas dilihat dari jumlah daerah yang di layani oleh sarana transportasi. Dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0676/KUM/2014 tentang Penetapan jaringan Trayek dan Operasi Angkutan Orang di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 35 Trayek, sedangakn trayek yang dilayani sebanyak 21 Trayek. Jumlah tratek Bus Rapid Transit sebanyak 6 Koridor (Trayek) sedangkan yang terlayani yaitu 1 Koridor (trayek).



Gambar 2.38.

Rasio Konektivitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

e. Indeks Desa

Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran yang berkelanjutan. Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.

Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Dalam penyusunan ID 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

Berdasarkan data yang tersedia, Indeks Desa di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 77,01 persen.

f. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri merupakan Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Berdasarkan data yang tersedia, dapat dijelaskan bahwa Persentase Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 33,67 persen.



2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

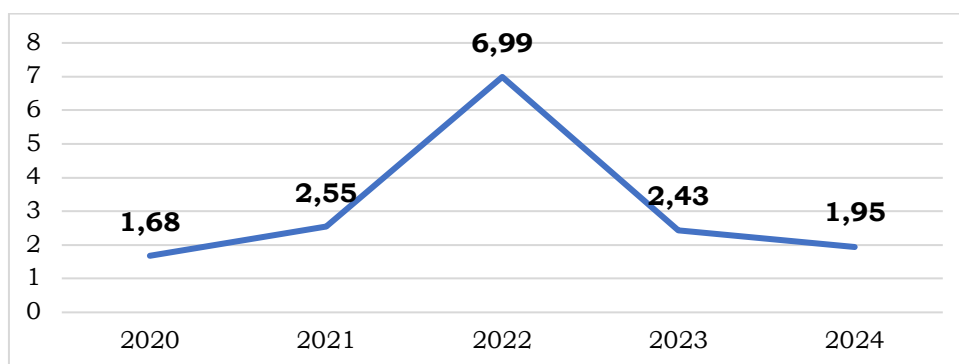
a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Adapun Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,54 persen.

b. Tingkat Inflasi

Indikator makro tingkat inflasi selama lima tahun terakhir di Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang fluktuatif. Tingkat inflasi tertinggi pada periode 2020 sampai 2024 yaitu mencapai 6,99 di tahun 2022. Sementara capaian tingkat inflasi terendah adalah 1,68 pada tahun 2020. Kondisi terakhir di tahun 2024 menunjukkan tingkat inflasi sebesar 1,95, berarti lebih rendah jika dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 2.39.
Perkembangan Tingkat Inflasi di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025



Pada Desember 2024 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 1,95 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,14. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 2,90 persen dengan IHK sebesar 106,63 dan terendah terjadi di Kabupaten Kotabaru sebesar 0,26 persen dengan IHK sebesar 106,82.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,63 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,91 persen; kelompok transportasi sebesar 1,83 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,28 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,62 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,73 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,48 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2024, antara lain: emas perhiasan, tarif parkir, ikan gabus, minyak goreng, sigaret kretek mesin, ikan patin, tarif rumah sakit, bawang merah, udang basah, ikan papuyu, terong, kue kering berminyak, sepeda motor, mobil, sewa rumah, kopi bubuk, cumi-cumi, nasi dengan lauk, es, dan bawang putih. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: beras, cabai rawit, bensin, cabai merah, pepaya, ikan peda, baju musim wanita, sabun detergen bubuk dan air kemasan.

c. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan

1. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR BPRS) di suatu daerah provinsi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB



atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan data yang tersedia dapat dijelaskan bahwa Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 31,98 persen.

2. Aset Dana Pensiun/PDRB

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil pengelolaan aset; d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau e. pengalihan dana awal pemberi kerja.

Yang mana jumlah aset dana pensiun dihitung berdasarkan provinsi. Dari sisi penghitungan, aset dana pensiun per provinsi Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang terdapat dalam suatu provinsi PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu,

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu. Adapun Aset Dana Pensiun/PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,12 persen.

3. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi

Total transaksi saham per provinsi adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.



4. Total Kredit/PDRB

Total Kredit per Provinsi adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Total Kredit per Provinsi /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. Adapun Total Kredit/PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 26,92 persen.

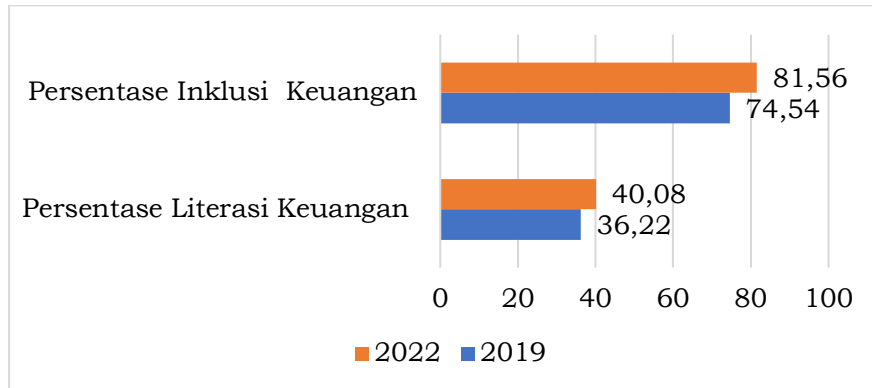
d. Persentase Literasi dan Inklusi Keuangan

Literasi Keuangan adalah pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), keyakinan (*confidence*) yang mempengaruhi sikap (*attitude*), dan perilaku keuangan (*behaviour*) seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sementara Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh OJK setiap 3 (tiga) tahun sekali, diketahui Persentase Inklusi Keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 81,56 persen pada tahun 2022. Skor ini meningkat bila dibandingkan publikasi tahun 2019 sebesar 74,54 persen. Ini berarti besarnya ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal. Sementara Persentase Literasi Keuangan tahun 2022 menunjukkan capaian 40,08 persen yang berarti meningkat dari capaian tahun 2019 yang mencapai 36,22 persen. Walaupun mengalami peningkatan, namun kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang mempengaruhi sikap, dan perilaku keuangan masyarakat Kalimantan



Selatan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Data terakhir yang tersedia adalah tahun 2022.



Gambar 2.40.
Persentase Literasi dan Inklusi Keuangan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dan 2022

Sumber: OJK, 2024

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Nilai SAKIP

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pencapaian indikator Predikat SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 82,04 dengan kategori A sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/400/AA.05/2024. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 0,83 poin. Pada tahun 2023 dengan nilai 81,21 menjadi 82,04 ditahun 2024.



Tabel 2.71.
Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	BB (78,49)	BB (78,91)	A (80,24)	A (81,21)	A (82,04)

Sumber: Lakip Provinsi Kalsel Tahun 2021 s.d. 2024

b. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Nilai indeks RB di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,47 dengan kategori B dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 68,48 dengan kategori B. Namun pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi 67,45 dengan kategori B. Indeks RB Kalimantan Selatan meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 72,51 dengan kategori BB dan predikat Sangat Baik dan pada tahun 2024 kembali meningkat dengan nilai 84,54. Secara lengkap Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.72.
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,47)	B (68,48)	B (67,45)	BB (72,51)	84,54

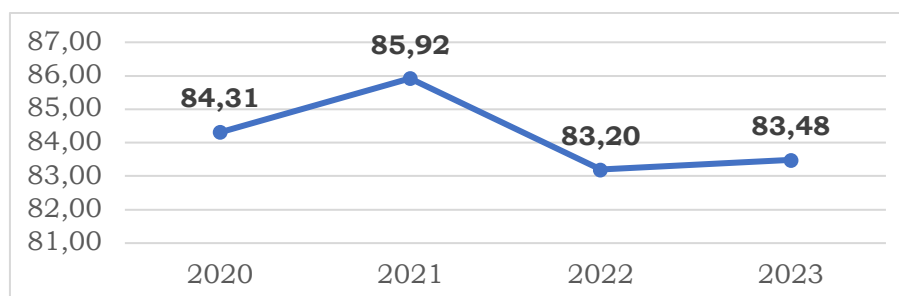
Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2023 dan LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 84,31 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 85,92 persen. Kemudian pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 83,20



persen, namun pada tahun 2023 sedikit meningkat kembali menjadi 83,48 persen. Data terakhir yang tersedia adalah tahun 2023.



Gambar 2.41.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023

Sumber: Lakip Provinsi Kalsel Tahun 2020-2023

d. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Indeks Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,03 dengan kategori sangat baik dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 3,96 dengan kategori baik. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 4,27 dengan kategori sangat baik. Pada tahun 2023 Indeks Pelayanan Publik sempat menurun dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 4,56 dengan kategori prima. Secara lengkap Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73.
Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

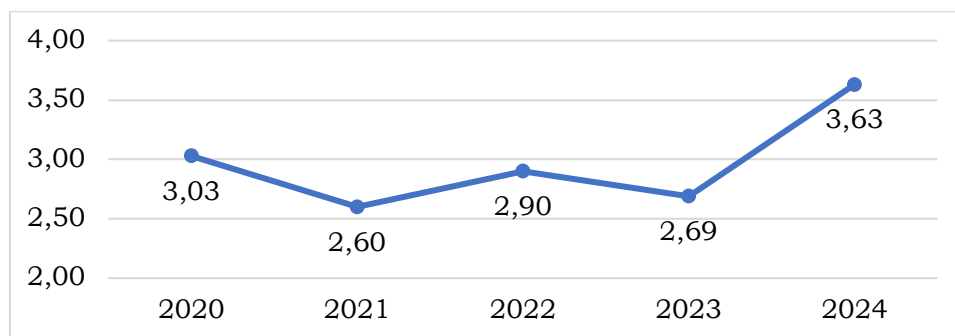
Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	4,03 (Sangat Baik)	3,96 (Baik)	4,27 (Sangat Baik)	4,03 (Sangat Baik)	4,56 (Prima)

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Indeks SPBE di Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung meningkat di tahun 2024. Realisasi indikator kinerja Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk tahun 2024 sebesar 3,63 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 363 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dengan realisasi 2,69.



Gambar 2.42.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Provinsi Kalimantan Selatan, KemenPANRB dan LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tahun 2024, secara prinsip dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Kalsel. Tingkat kematangan pada seluruh domain Kebijakan dan Tata Kelola menuju ke proses yang mulai terintegrasi dan terukur. Begitu juga dengan domain Layanan juga menuju perbaikan menjadi kolaboratif, dimana beberapa aplikasi layanan publik maupun layanan administrasi pemerintah sudah mulai terintegrasi secara keseluruhan. Namun pada domain Manajemen perlu adanya perbaikan selaras dengan semakin baiknya kematangan di tiga domain lainnya agar penerapan SPBE lebih optimal dan efisien. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah dapat menggambarkan predikat BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintah Daerah dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Namun disisi lain, dalam penerapan SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Perencanaan Strategis, Aspek Teknologi Informasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK.

f. Indeks Pemerintahan Digital

Konsep Indeks Pemerintahan Digital merupakan Kelanjutan Indeks SPBE, dengan penyesuaian pada kebijakan Pemerintahan Digital, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Arah kebijakan pembangunan nasional telah mengamanatkan bahwa salah satu strategi pengarusutamaan adalah transformasi digital, maka selanjutnya peran Pemerintahan Digital yakni transformasi digital di lingkungan pemerintah menjadi referensi utama dalam kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, yakni merupakan salah satu sasaran berupa Sasaran Pertama yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah.

g. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Kinerja urusan Persandian dapat dilihat dari indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks KAMI di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sebesar 542, nilai ini meningkat 18,86 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 456. Selain itu, realisasi indikator kinerja persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan persandian dan keamanan informasi tahun 2024 sebesar 18 persen. Pencapaian ini mencapai peningkatan dibandingkan tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 4 persen. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain melalui Assesment Keamanan Informasi ke Seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ada 8 perangkat daerah yang telah menyelenggarakan persandian dan keamanan informasi. Lebih



rinci mengenai capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.74.
Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Provinsi Kalimantan Selatan	Indeks	274	276	346	456	542
2	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan persandian dan keamanan informasi	%	n/a	6	10	14	18
3	Persentase OPD dengan hasil audit persandian dan keamanan informasi level 1 (memenuhi kerangka kerja dasar)	%	n/a	11	13	15	16
4	Persentase terpenuhinya sarana/prasarana KAMI	%	n/a	38,49	50	60	70

Sumber: LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2024

h. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.75.
Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Lakip Provinsi Kalsel Tahun 2021 dan 2022 serta LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

i. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan dinamika dengan angka terendah dialami pada tahun 2021. Walaupun kondisi tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 80,82. Capaian IP ASN Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama jika



dibandingkan dengan IP ASN pada tingkat Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN, ha; tersebut berdasar pada surat Nomor. 310/BM.02/SD/C.II/2024 Perihal Hasil Pengukuran IP ASN Instansi di Wilayah Kantor Regional BKN tanggal 23 September 2024.

Tabel 2.76.
Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	85,00	34,90	74,42	82,23	80,82

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

j. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD). Adapun nilai Indeks Integritas Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 71,53.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

b. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya didefinisikan seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini



biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

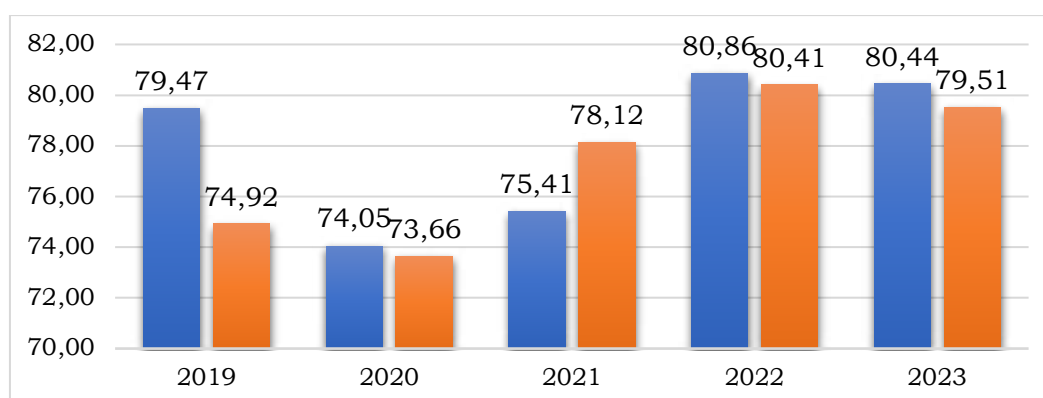
c. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Indikator Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah memberikan gambaran daerah dalam mengupayakan ketentraman dan ketertiban umum.

d. Indeks Demokrasi Indonesia

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Kondisi terakhir tahun 2023 menunjukkan IDI di Kalimantan Selatan mencapai 80,44, yang berarti sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Penurunan ini juga terjadi pada IDI Pusat/Nasional, yang disebabkan oleh meningkatnya hambatan kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kemerdekaan pers.

Mulai tahun 2021, penghitungan IDI menggunakan metodologi baru. Pada periode yang sama, capaian IDI Provinsi Kalimantan Selatan dibandingkan dengan nasional selalu lebih tinggi kecuali pada tahun 2021. Tahun 2021, IDI Kalimantan Selatan sebesar 75,41 dan IDI nasional mencapai 78,12.



Gambar 2.43.
Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS RI, 2024

Peningkatan IDI Kalimantan Selatan dari tahun 2021 ke 2023 disebabkan meningkatnya aspek-aspek pembentuk IDI. Aspek Kebebasan



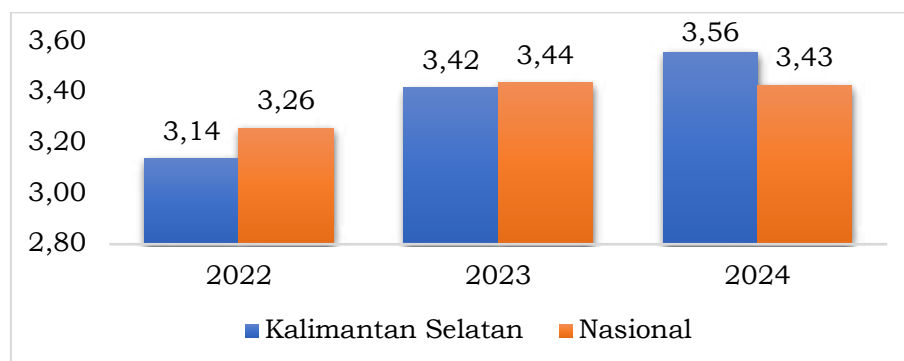
meningkat signifikan yakni dari 70,13 tahun 2021 menjadi 80,70 pada tahun berikutnya. Aspek Kesetaraan juga mengalami peningkatan dari 79,00 menjadi 80,86. Selanjutnya, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi juga meningkat cukup tinggi dari 76,32 menjadi 81,01. Data terakhir yang tersedia adalah tahun 2023.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas.

Penghitungan IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI) 2019* dari *World Economic Forum*, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. IDSD 2022 terdiri dari 4 komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, 24 dimensi dengan jumlah indikator yang digunakan sebanyak 62 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota.



Gambar 2.44.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2022-2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,14 atau lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai IDSD Nasional yang mencapai 3,26. IDSD Kalimantan Selatan



mengalami peningkatan menjadi 3,56 di tahun 2024 dan berada di atas nilai IDSD Nasional yang hanya 3,43.

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Pada subbab ini memuat kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian pembangunan yang disajikan merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Secara umum, dari 113 indikator yang dianalisis, 54 menunjukkan tren meningkat, 30 menurun, dan 20 relatif stabil; sisanya tidak lengkap untuk dianalisis lintas-tahun. Pola besar yang tampak adalah penurunan capaian pada 2021 (dampak pandemi COVID-9) di sejumlah sektor, diikuti pemulihan hingga 2024. Sejumlah indikator layanan dasar (khususnya kesehatan) terjaga tinggi dan stabil, sementara layanan dasar permukiman (air minum, sanitasi, persampahan) melonjak signifikan mendekati 2024. Di sisi lain, ada beberapa nilai yang terlihat tidak lazim (lonjakan/penurunan ekstrem atau persentase melebihi 100) yang kemungkinan terkait perbedaan satuan atau cara input.

Pada urusan pendidikan, capaian menunjukkan perbaikan nyata. Tingkat partisipasi usia 16–18 tahun meningkat dari sekitar 64,7% (2020) menjadi 88,2% (2024), dengan titik rendah pada 2021 lalu pulih kuat setelah itu. Partisipasi penyandang disabilitas usia 4–18 tahun juga membaik. Angka ini sempat melonjak di 2021, turun pada 2022–2023, dan kembali lebih tinggi pada 2024 (sekitar 75,1%). Pola ini mengindikasikan pemulihan akses dan retensi belajar setelah gangguan pandemi, serta semakin efektifnya intervensi layanan pendidikan inklusif.

Pada urusan kesehatan, indikator mutu kelembagaan dan kesiapsiagaan bencana/kejadian luar biasa terjaga di level 100% sepanjang 2020–2024, menandakan konsistensi tata kelola dan standardisasi layanan. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan per 1.000 penduduk juga membaik dari level sangat rendah pada 2020 menuju sekitar 1,49 pada 2024, dengan puncak pada 2022. Tren ini menunjukkan kapasitas rujukan makin memadai, meski pemerataan daya tampung antarwilayah tetap perlu diperhatikan agar manfaatnya merata.

Pada pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan kawasan permukiman, terjadi akselerasi besar layanan dasar permukiman.



Rasio luas kawasan permukiman yang dilayani air minum melonjak dari sekitar 0,33% (2020) menjadi 46,44% (2024), sementara akses sanitasi layak naik menuju 4,53% pada 2024 (dari kisaran 1% pada 2020). Layanan irigasi kewenangan provinsi juga bertambah hingga sekitar 56,8% pada 2024, mendukung produktivitas sektor pertanian. Kapasitas terlayani pengelolaan persampahan meningkat tajam dari 16,7% (2020) menjadi 82,0% (2024). Kombinasi lonjakan indikator-indikator ini mencerminkan prioritas terhadap infrastruktur dasar serta efektivitas pembiayaan lintas tahun. Tantangan yang masih dihadapi adalah memastikan kualitas layanan merata di semua kabupaten/kota.

Sektor-sektor ketenteraman, ketertiban umum dan linmas serta sosial menunjukkan kinerja yang cenderung stabil hingga membaik, seiring penguatan kesiapsiagaan dan beroperasinya kembali layanan perlindungan sosial pascapandemi. Di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagian indikator bergerak naik. Hal ini menandakan penguatan layanan kasus, ekosistem ramah anak, dan arus utama pengarusutamaan gender (PUG) di layanan dasar. Hal serupa terlihat pada pemberdayaan masyarakat dan desa yang mencerminkan penguatan kapasitas komunitas dan sinergi pendanaan.

Pada urusan tenaga kerja, sejumlah indikator mengindikasikan pemulihan lapangan kerja pasca pandemi. Namun demikian, indikator tingkat produktivitas tenaga kerja menampilkan lonjakan ekstrem pada 2024 yang tidak proporsional terhadap 2020. Ini sangat mungkin dipengaruhi perbedaan satuan (misalnya rupiah per orang tanpa pembakuan skala) atau kesalahan input; karenanya, perlu penentuan meta data yang jelas agar interpretasi lebih presisi dan kebijakan ketenagakerjaan lebih terarah.

Pada urusan pangan, lingkungan hidup, dan layanan pendukungnya, perbaikan akses sanitasi dan persampahan berkontribusi pada lingkungan permukiman yang lebih sehat, sementara penguatan ketahanan pangan memerlukan kesinambungan dukungan irigasi, benih unggul, dan manajemen risiko iklim. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil relatif stabil-membaik, mencerminkan peningkatan akses layanan dasar yang menopang akurasi sasaran program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Di urusan perhubungan, kinerja layanan transportasi mencerminkan pemulihan mobilitas, meski peningkatan keselamatan tetap



menjadi agenda kunci. Komunikasi dan informatika serta persandian menunjukkan perbaikan layanan digital pemerintahan. Selanjutnya, pada kelompok transparansi dan partisipasi publik sempat terjadi penurunan keterbukaan informasi keuangan pada 2023, tetapi pulih penuh pada 2024.

Sektor pariwisata memperlihatkan pola pemulihan berbentuk “V”: tingkat hunian akomodasi turun tajam pada 2021, pulih di 2022, namun masih berfluktuasi dan belum menyamai baseline 2020. Ini menandakan perlunya strategi diversifikasi destinasi dan acara (MICE, events), peningkatan lama tinggal, dan penajaman promosi untuk mengembalikan momentum. Di kelautan dan perikanan, data menunjukkan penurunan total produksi yang sangat besar. Secara kebijakan, fokus tetap pada *cold chain*, benih dan pakan, serta praktik penangkapan berkelanjutan.

Pada pertanian, kehutanan, dan ESDM, dinamika capaian dipengaruhi cuaca dan harga komoditas. Integrasi irigasi, benih unggul, asuransi/usaha tani, rehabilitasi hutan, dan penguatan perizinan ESDM menjadi kunci untuk menjaga kinerja. Sementara itu, perdagangan dan perindustrian menunjukkan pemulihan bertahap; percepatan hilirisasi UMKM dan IKM, standardisasi/sertifikasi mutu, dan perluasan akses pasar akan mempercepat kenaikan kinerja sektor riil.

Pada rumpun perencanaan-keuangan, pengadaan, kepegawaian, dan manajemen keuangan, kinerja kelembagaan relatif stabil cenderung membaik. Digitalisasi perencanaan-penganggaran dan pengadaan, serta penguatan kompetensi ASN (termasuk sertifikasi jabatan fungsional) mempertebal fondasi tata kelola. Kedepan, konsistensi disiplin kinerja dan transparansi akan penting untuk menjaga indikator layanan dan akuntabilitas publik di level puncak.

Lebih rinci mengenai capaian setiap IKK tahun 2020-2024 dimuat pada tabel di bawah.



Tabel 2.77.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	64,71	62,71	67,03	85,67	88,19
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	32,60	100	57,94	64,13	75,08
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0.4574483	1.4458323	1.5880815	1.5752963	1.4863347
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100	100	100	100	100
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	100	100	100	100
1.c.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0.3317536	1.2592768	1.5695563	17.8626243	46.4386547
1.c.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	1.1179631	1.1374373	2.2503516	4.4610336	4.5281114

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	38.8976557	90.000526	49.8723633	55.5990272	56.760391
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	16.6666667	100	49.3333333	53.3333333	82
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	100	0	100	100	0
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemantapan jalan	88.7967518	96.8341786	81.6312226	82.0392275	82.906158
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	6.7647059	60.7692308	95.793499	100	99.607843
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	98.666667
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	0	100	100	0
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 ; 15 Ha yang ditangani	0.9230354	5.1839225	30.9286166	34.9711311	39.190914
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	76.6666667	43.9393939	78.1983346	78.1983346	79.018088

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	83.164557	79.8319328	91.0705353	100	100
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	32.8554181	32.8554181	8.3224967	61.11	90.740741
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100	100	100	100
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	100	100	100	100	100
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	95.4545455	94.166667
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100
1.f.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100
1.f.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0	100	100	100	100
1.f.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
2.a.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	100	100	100	100
2.a.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.0497475	0.0665467	42.9451899	66.3847323	5.8800298
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	44.2873546	44.3905241	6803249173	7175669.334	60106649590.871
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100	15.0175204	50.7770501	31.5217898	58.5820553
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	100	33.7452015	24.7350793	35.644276	47.1096269
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	0.0497475	11.7470382	27.8369661	69.116756	58.5820553
2.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	44.2873546	28.9960725	31.2394028	36.9882444	32.9585879
2.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	1.3184209	2.0513309	2.5273402	2.1756378	4.1633
2.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10.2017773	16.2786758	23.3292225	9.1194742	12.5438

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
2.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase cadangan pangan (%)	20,24	20,19	172,92	131,92	214,88
2.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	0	100	100	0
2.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	100	100	98.2611985	4.7791847
2.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	100	0	60.3561675	55.082639	0
2.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	67.55	71.03	71.97	73.5	75.59
2.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	100	89.6825397	7.3170732	5.7591623	3.2
2.f.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	100	100	100	100
2.f.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	15.3846154	53.8461538	100	100	92.3076923
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	54.7911548	17.3469388	65.3061224	100	100
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	90.6750174	8.3208396	70.089955	100	56.2874251

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.47	2.45	2.24	2.24	2.24
2.h.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	100	81.7999707	73.1078884	77.357246	75.8740508
2.h.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0.0012927	9.1981299	24.0165505	6.6727722	5.0836982
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	103	0.599	0.603	0.603	0.649
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0.446	0.265	0.22	0.31	0.618
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	32.6530612	22.9166667	100	100	100
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	12.244898	80	57.1428571	77.7777778	100
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	68.3009098	8.1152439	82.9999981	76.8305651	100
2.k.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	17.314221	19.4029851	90	22.3880597	38.8059701
2.k.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	1.4612303	0.2438143	100	0.3010054	0.3010054

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
2.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	-62.8205128	63.9175258	20.2949676	29.1978314	25.7484171
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	22.1300922	0.239974	22.8799028	13.4278987	13.8032572
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.1527267	5.0200225	2.3933854	20.9984346	20.4895545
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	0	156	147	179	355
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	48.9795918	81.25	87.5	100	100
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	48.9795918	81.25	87.5	100	100
2.o	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	43.9102564	42.4806202	53.6434109	70.6976744	84.0310078
2.p	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	20	28.5714286	71.4285714	77.7777778	100
2.q.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	10.25	82.5	64.95	67.14	74.63
2.q.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	37	49.98	75.71	71.29	81.16

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	46.75	31.91	35.52	57	83.3
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	100	100	100	100
3.a.1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	351579.99	324036.81	79.0454974	97.0390625	92.9992549
3.a.2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	98	100	100	100	100
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	168.9973108	-146.7437875	1331.468741	26.83751	6.6985011
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	19.1846523	18.0194014	259.138806	14.5414725	48.2699661
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	133.4304568	38.9041934	33.27156	31.4668418	40.483844
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	100.3051166	1.916074	17.7631579	1.8580527	1.9296046
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)	15,39	4,88	5,02	4,55	4,42

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	11.746988	76.6467066	188.7755102	-99.057715	-31,25
3.d.1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	43.220339	95.3947368	86.9565217	100	100
3.d.2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0.3971164	27.4648579	27.1048133	27.7245936	0.2313631
3.d.3	Urusan Pilihan	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	4.2972885	3.4977463	3.312364	10.3880501	46.0105555
3.e.1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100	10.5691057	100	100	100
3.e.2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	98.3067729	98.7051793	99.750996	99.2559524	99.3551587
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-94.2597749	54.379613	81.3673509	-17.4450626	-13.4951561
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase enanganan pengaduan konsumen	60	100	95.2380952	100	100
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100	100	102.1212121	100	100
3.f.4	Urusan Pilihan	Perdagangan	Tertib Usaha	100	100	100	100	100
3.f.5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	16826.90826	95.8210523	99.4303351	94.9944172	52.3686201
3.f.6	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100	99.009901	98.4313725	97.2027972
3.f.7	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	0.12	100	17.2	0.07	0.03
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	4.5112782	29.7101449	13.9664804	9.7560976	21.1111111

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	234.21	211.8	244.72	90.1
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	75
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	0
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	100	100	100	0
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	100	125
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Persentase satuan permukiman yang difasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi	0	0	100	100	0
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	0	4.7210068	13.7204415	12.1344027	11.3192822
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	2890.7877	1.9569616	2.669789	9.8035672	42.8393309

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	0	63.1634046	52.1089162	49.136905	46.5280861
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	2
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3
4.i.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	100	0
4.i.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	17.4386921	20.4016064	14.8926655	11.1353712	18.5746778
4.i.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	39.3993627	62.5016569	54.379572	59.912713	73.3578813
4.i.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0	-19.295061	57.8362192	23.035024	81.7455786
4.j.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	209.133217	70.8438409	72.6590198	74.5080699	76.5047641
4.j.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78.4531426	14.6459748	15.3910323	17.3778466	17.3135022

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
4.j.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	98.3443709	95.7615894	98.2384824	57.5063613	65.6375839
4.k.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0	10.3382258	17.5843831	19.4975285	6.6644
4.k.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0	1.7137262	22.7823889	20.1649615	16.7397
4.k.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Assets management	4	100	100	100	4
4.k.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,70	6,52	8,09	2,50	38,60
4.l.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	0	102,21	85,36	77,38	85,0
4.l.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100	100	66,67	58,33	100

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



2.1.5. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan dan melaporkan pencapaian SPM setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan Dasar yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi terdiri atas berbagai jenis pelayanan dasar pada 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar. Capaian penerapan SPM pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan hampir seluruh indikator kinerja pelayanan mencapai target.

A. SPM Bidang Pendidikan

Gambaran penerapan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.78.
Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Layanan	Indikator Capaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pendidikan Menengah	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	100%	91,52%
2	Pendidikan Khusus	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	100%	84,09%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tabel 2.79.
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			87.80 %	
1.	Pendidikan Menengah					91.52 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.21 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	196853	190000	6853	96.52 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.30 %	
	B. Jumlah Mutu		Jumlah	Jumlah Mutu	Mutu Yang	71.51 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Yang Terlayani / Terpenuhi	Belum Terlayani / Terpenuhi		
	SMA					74.87 %	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	90	10	90.00 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	72.31	27.69	72.31 %	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	78.64	21.36	78.64 %	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	70.69	29.31	70.69 %	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3	2.79	0.21	93.00 %	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	0.82	2.18	27.33 %	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	73.71	26.29	73.71 %	
	8 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	100	74.42	25.58	74.42 %	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	60.26	39.74	60.26 %	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	0	100	100.00 %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0.38	99.62	100.00 %	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	32.96	67.04	32.96 %	
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	2.35	2.35	0	100.00 %	
	SMK					68.15 %	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	196853	156491	40362	79.50 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	72.31	27.69	72.31 %	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	75.77	24.23	75.77 %	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	67.18	32.82	67.18 %	
	5 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	100	83.77	16.23	83.77 %	
	6 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	100	71.11	28.89	71.11 %	
	7 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.2	3.2	0	100.00 %	
	8 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	1.21	1.79	40.33 %	
	9 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	71.29	28.71	71.29 %	
	10 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	100	72.13	27.87	72.13 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00 %	
	12 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	57.94	42.06	57.94 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	13 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	0.3	99.7	100.00 %	
	14 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	30.86	69.14	30.86 %	
	15 . Proporsi PTK penggerak*	%	0.55	0.55	0	100.00 %	
2 .	Pendidikan Khusus					84.09 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	68.68 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	4659	4000	659	85.86 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.40 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	77.02 %	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	4659	2823	1836	60.59 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	40.45	59.55	40.45 %	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	67.03	32.97	67.03 %	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	75.82	24.18	75.82 %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	10	8.09	1.91	80.90 %	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	10	7.29	2.71	72.90 %	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	73.83	26.17	73.83 %	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	66.25	33.75	66.25 %	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	63.48	36.52	63.48 %	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0.27	99.73	100.00 %	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	19.89	80.11	100.00 %	
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0.7	0.7	0	100.00 %	

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

B. SPM Bidang Kesehatan

Gambaran penerapan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:



Tabel 2.80.
Target dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Pelayanan 140esehatan bagi penduduk terdampak krisis 140esehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%	100%
2	Pelayanan 140esehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%	100%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tabel 2.81.
Persentase Capaian Mutu Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKS I
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	Pra Krisis Kesehatan						
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	1743722	1743722	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	1743722	1743722	0	100.00 %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2 . Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	36769	36769	0	100.00 %	
	3 . Sarana dan prasarana	Unit	5355	5355	0	100.00 %	
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	Kondisi Berpotensi KLB						
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	65308	65308	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	Mutu Yang	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKS I
			Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Yang Terlayani / Terpenuhi	Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit	65308	65308	0	100.00 %	
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Unit	65308	65308	0	100.00 %	
	3 . Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	Unit	65308	65308	0	100.00 %	
	4 . Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	Unit	65308	65308	0	100.00 %	
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	Formulir	3265400	3265400	0	100.00 %	
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	Unit	65308	65308	0	100.00 %	
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis)	Unit	35000	35000	0	100.00 %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	8 . Tenaga medis: Dokter	Orang	2910	2910	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	115	115	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	608	608	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	12	12	0	100.00 %	
	12 . Tenaga Laboratorium	Orang	1359	1359	0	100.00 %	
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	384	384	0	100.00 %	
	14 . Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	45	45	0	100.00 %	

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



C. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Gambaran penerapan SPM Bidang Pekerjaan umum di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.82.
Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan Dasar	Target Pelayanan	Output	Capaian SPM Tahun 2024	Ket.
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Pencapaian Penerimaan layanan dasar air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase (%) pencapaian penerimaan layanan dasar air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya air curah melalui SPAM lintas Kab/Kota yang tersalurkan kepada penyelenggara SPAM	100%	Data Penyediaan Air Curah yang digunakan bersumber dari pendataan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Air Banjarkua Prov Kalsel
		Pencapaian mutu minimal layanan dasar air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Persentase (%) pencapaian mutu minimal layanan dasar air minum curah lintas Kabupaten/Kota			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/Kota	Pencapaian penerimaan layanan dasar pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/Kota	Persentase (%) pencapaian penerimaan layanan dasar pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/Kota	Tersedianya pengolahan air limbah domestic lintas Kab/Kota melalui kegiatan fisik dan non fisik	100%	Provinsi Kalimantan Selatan saat ini belum memiliki Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional, sehingga yang dilakukan saat ini adalah pendataan daeri aksek air limbah domestik Kab/Kota
		Pencapaian mutu minimal layanan dasar pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/Kota	Persentase (%) pencapaian mutu minimal layanan dasar pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/Kota			

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Tabel 2.83.

Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.83 %	
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota					96.08 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	684000	684000	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.08 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	80.40 %	
	1 SPAM Lintas Regional		950	950	0	100.00 %	
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	Liter/detik	475	475	0	100.00 %	
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Liter/detik	475	475	0	100.00 %	
	2 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	769309000	467755417	301553583	60.80 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					97.57 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	200	200	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.57 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	87.87 %	
	1 SPALD Lintas Regional	-	40	40	0	100.00 %	
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	40	40	0	100.00 %	
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah	Rumah Tangga	0	0	0	0.00 %	
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan	Rumah Tangga	0	0	0	0.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar						
	2 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	1780166000	1348435103	431730897	75.75 %	

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

D. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Gambaran penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.84.
Persentase Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							UPLOAD DOKUMEN
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	2960	2960	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA /SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPE NUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	740	740	0	100.00 % 100.00	2024 3 6300 4 2024 3 6300 4
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 % 100.00	2024 3 6300 4 2024 3 6300 4
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 % 100.00	2024 3 6300 4 2024 3 6300 4
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 % 100.00	2024 3 6300 4 2024 3 6300 4
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi					100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
Ada Relokasi Program Pemerintah							UPLOAD DOKUMEN
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	2960	2960	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00 %	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA /SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPE NUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipe nuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpe nuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpe nuhi	100.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	5	5	0	100.00 %	2024 3 6300 4 2024 3 6300 4
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	5	5	0	100.00 %	
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0	100.00 %	2024 3 6300 4 2024 3 6300 4

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

E. SPM Bidang Tramtibunlinmas

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Tramtibunlinmas dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Target Pencapaian



SPM bidang Trantibumlinmas Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85.
Target Capaian SPM Bidang Tranibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024

NO	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	79,83 %	2021	SatpolPP & Damkar Prov Kalsel.
		91,07%	2022	SatpolPP & Damkar Prov Kalsel.
		96,66%	2023	SatpolPP & Damkar Prov Kalsel.
		98,83%	2024	SatpolPP & Damkar Prov Kalsel.

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah 98,83% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.86.
Capaian Pelayanan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			98.83 %	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi					98.83 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	3135	3135	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.83 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	94.17 %	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada KID20240307113203001924 KI20240222065935400224	unit	100	65	35 35 35	65.00 %	
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	dokumen	10	10	0 0 0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	dalam rangka penegakan perda dan perkada* KID20240307113211001925 KI20240222065935400224						
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** KID20240307113219001926 KI20240222065935400224	orang	267	267	0 0 0	100.00 %	
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal KID20240307113228001927 KI20240222065935400224	dokumen	1	1	0 0 0	100.00 %	
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil KID20240307113244001928 KI20240222065935400224	orang	0	0	0 0 0	100.00 %	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan KID20240307113254001929 KI20240222065935400224	orang	0	0	0 0 0	100.00 %	

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

F. SPM Bidang Sosial

Nilai rata-rata capaian realisasi SPM Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah sebesar 98,83% dengan target 100%. Rincian capaian realisasi yang lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.87.

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	RUMUS/FORMULA	CAPAIAN
1	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti skala provinsi	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi <u>kebutuhan dasarnya di dalam panti</u>	100%	$\frac{113}{120} \times 100\%$	94,17%
2	Rehabilitasi sosial dasar Anak Telantar di dalam panti skala provinsi	Persentase Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	$\frac{290}{290} \times 100\%$	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam panti skala provinsi	Persentase Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	$\frac{180}{180} \times 100\%$	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	$\frac{194}{194} \times 100\%$	100%
5	Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	$\frac{15.500}{15.500} \times 100\%$	100%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tabel 2.88.

Capaian Bidang Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			98.49 %	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti					94.33 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.33 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	120	113	7	94.17 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	95.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	120	113	7	94.17 %	
						94.17 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	2 . Penyediaan sandang	Orang	120	113	7	94.17 %	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	8	8	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	40	40	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	120	113	7	94.17 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	120	113	7	94.17 %	
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	120	113	7	94.17 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	120	120	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	120	113	7	94.17 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	120	96	24	80.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	290	290	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Pengasuhan	Orang	290	290	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	290	290	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan sandang	Orang	290	290	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	22	22	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	290	290	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	290	290	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	290	290	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor	Orang	30	30	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak						
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	100	100	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	290	290	0	100.00 %	
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	5	5	0	100.00 %	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti					99.47 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	180	180	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.47 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.34 %	
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	180	180	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	180	180	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	23	23	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	15	15	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	180	180	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	180	180	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	30	30	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	6	6	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	180	164	16	91.11 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	8	8	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	13	10	3	76.92 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	12 . Pemulasaraan	Orang	46	46	0	100.00 %	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					98.67 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
Ya, Ada Gepeng Tidak Ada Gepeng (Lampirkan Surat Keterangan TTD KDH dan lakukan Tahapan Penerapan SPM)							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	194	194	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.67 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	93.35 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	194	194	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	194	194	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	24	24	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	194	194	0	100.00 %	
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	194	194	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	194	194	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	194	194	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	194	194	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	194	65	129	33.51 %	
	10 . Pemulangan ke daerah asal	Orang	194	194	0	100.00 %	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
Ya Terjadi Bencana Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	15500	15500	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	15500	15500	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	15500	15500	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	13	13	0	100.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	550	550	0	100.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	15500	15500	0	100.00 %	

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

2.1.6. Kerjasama Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Di dalam peraturan dimaksud diatur tentang Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK). KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Sementara KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Adapun perkembangan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada beberapa tabel di bawah.



Tabel 2.89.

Rekapitulasi Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
1	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS POLA FASILITASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TA. 2024	100.3.7.1/01/PKS-A/PEM.OTDA/2024	11 JANUARI 2024	1 TAHUN			APBD 2024 PEMKAB TANAH BUMBU
2	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG	100.3.7.1/02/PKS-A/PEM.OTDA/2024	24 Januari 2024	1 TAHUN			APBD 2024 PEMKAB TANAH LAUT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
						PENYELENGGAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024						
3	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024	100.3.7.1/03/PKS-A/PEM.OTDA/2024	24 Januari 2024	1 TAHUN			APBD 2024 PEMKAB TANAH LAUT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
4	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024	100.3.7.1/04/PKS-A/PEM.OTDA/2024	24 Januari 2024	1 TAHUN			APBD 2024 PEMKAB TANAH LAUT
5	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) DENGAN POLA FASILITASI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024	100.3.7.1/05/PKS-A/PEM.OTDA/2024	31 JANUARI 2024	31 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024	Berjalan sesuai aturan	untuk mewujudkan ASN yang Berakhlak dan Profesional sehingga perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi bagi ASN	PIHAK KESATU

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
6	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DAN PEMPROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PENYELENGGAAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024	100.3.7.1/06/PKS-A/PEM.OTDA/2024	31 JANUARI 2024	31 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024	Berjalan sesuai aturan	untuk mewujudkan ASN yang Berakhlak dan Profesional sehingga perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi bagi ASN	PIHAK KESATU
7	KABUPATEN BANJAR DAN PROVINSI KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR POLA FASILITASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024	100.3.7.1/07/PKS-A/PEM.OTDA/2024	01 FEBRUARI 2024	01 FEBRUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024	Berjalan sesuai aturan	untuk mewujudkan ASN yang Berakhlak dan Profesional sehingga perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi bagi ASN	PIHAK KESATU

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
8	KABUPATEN BANJAR DAN PROVINSI KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS POLA FASILITASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024	100.3.7.1/08/PKS-A/PEM.OTDA/2024	01 FEBRUARI 2024	01 FEBRUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024	Berjalan sesuai aturan	untuk mewujudkan ASN yang Berakhlak dan Profesional sehingga perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi bagi ASN	PIHAK KESATU
9	KABUPATEN BANJAR DAN PROVINSI KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGAAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN	100.3.7.1/09/PKS-A/PEM.OTDA/2024	01 FEBRUARI 2024	01 FEBRUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024	Berjalan sesuai aturan	untuk mewujudkan ASN yang Berakhlak dan Profesional sehingga perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi bagi ASN	PIHAK KESATU

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
						KERJA POLA FASILITASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024						
10	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA POLA FASILITASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024	100.3.7.1/10/PKS-A/PEM.OTDA/2024	15 FEBRUARI 2024	15 FEBRUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024	Berjalan sesuai aturan	untuk mewujudkan ASN yang Berakhlak dan Profesional sehingga perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi bagi ASN	PIHAK KESATU
11	Kota Banjarbaru	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2024	2022	5 TAHUN	PENYELENGGARAAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN	100.3.7.1/12/PKS-A/PEM.OTDA/2024	28 maret 2024	28 maret 2024 s/d 31 desember 2024	Berjalan sesuai aturan	Asn yang terlatih	PIHAK KESATU

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
			22 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			PERJANJIAN KERJA POLA FASILITASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024						
12	Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	Kolaborasi Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Trans Perkotaan Banjarbakula di Kawasan Metropolitan Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut	100.3.7.1/14/PKS-A/PEM.OTDA/2024	16-Apr-24	5 Tahun	proses	pelayanan langsung terhadap masyarakat mengenai angkutan umum	APBD Prov dan APBD Kab/Kota Banjarbakula
13	DISPAR	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PKS PEMPROV KALSEL DENGAN PEMPROV KALTIM tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100.3.7.1/16/PKS-A/PEM.OTDA/2024	27 Mei 2024		proses		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
14	BPSDMD	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024	100.3.7.1/18/PKS-A/PEM.OTDA/2024	30 Mei 2024	30 mei 2024 s/d 31 des 2024	proses		
15	BPSDMD	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024	100.3.7.1/19/PKS-A/PEM.OTDA/2024	30 Mei 2024	30 mei 2024 s/d 31 des 2024	proses		
16	BPSDMD	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024	100.3.7.1/20/PKS-A/PEM.OTDA/2024	30 Mei 2024	30 mei 2024 s/d 31 des 2024	proses		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
17	DISPAR	Sukarela	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PKS PEMPROV KALSEL DENGAN PEMPROV BALI tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100.3.7.1/21/PKS-A/PEM.OTDA/2024	31 Mei 2024	3 (Tiga) Tahun	proses		
18			KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Bidang Pariwisata di Kalimantan Selatan	100.3.7.1/22/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024	04 Juni 2024				
19	BKPSDM Kab. HSU dan BPSDMD Prov. Kalsel	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pola Fasilitasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU Tahun Anggaran 2024.	100.3.7.1/27/PKS-A/PEM.OTDA/2024	10 Juli 2024	10 Juli s/d 31 Desember 2024	proses	untuk membentuk PPPK yang mampu melaksanakan tugas perannya sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional	PIHAK KESATU (BKPSDM Kab. HSU)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
											dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang ditanamkan pada saat bekerja melayani masyarakat	
20	BKPSDM BANJARBARU DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pola Fasilitasi Tahap 2 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024	100.3.7.1/28/PA/PEM.OTDA/2024	15 Juli 2024	15 Juli s/d 31 Desember 2024	proses	untuk membentuk PPPK yang mampu melaksanakan tugas perannya sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil	Pihak Kesatu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
											Negara (ASN) serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang ditanamkan pada saat bekerja melayani masyarakat	
21	BKPP BATOLA DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pola Fasilitasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	100.3.7.1/29/PA/PEM.OTDA/2024	17 Juli 2024	17 Juli s/d 31 Desember 2024	proses	untuk membentuk PPPK yang mampu melaksanakan tugas perannya sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mampu mengaplikasikan	Pihak Kesatu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
											n nilai-nilai yang ditanamkan pada saat bekerja melayani masyarakat	
22	BKPSDM TABALONG DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pola Fasilitasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong	100.3.7.1/30/PKS-A/PEM.OTDA/2024	18 Juli 2024	18 Juli s/d 31 Desember 2024	proses	untuk membentuk PPPK yang mampu melaksanakan tugas perannya sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mampu mengaplikasikan	Pihak Kesatu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
											n nilai-nilai yang ditanamkan pada saat bekerja melayani masyarakat	
23	PEMERINTAH PROVINSI WILAYAH KALIMANTAN (BPBD PROV KALTIM,KALBAR, KALTENG, KALSEL)	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN					proses	mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, sistematis, cepat, tepat, akurat, terkoordinatif, berkesinambungan dan akuntabel pada tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana	Pihak Kesatu
24	PEMERINTAH PROVINSI WILAYAH KALIMANTAN (BPBD PROV KALTIM,KALBAR, KALTENG, KALSEL)	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100.3.7.1/32/PKS-A/PEM.OTDA/2024	06 Agustus 2024	5 Tahun	proses	mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, sistematis, cepat, tepat, akurat,	Pihak Kesatu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
			KALIMANTAN SELATAN 2022-2026								terkoordinatif, berkesinambungan dan akuntabel pada tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana	
25	BKPSDM Kab Tapin DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan Pola Fasilitasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024	100.3.7.1/34/PKS-A/PEM.OTDA/2024	19 Agustus 2024	19 Agustus s/d 31 Desember 2024	proses	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebagai pemenuhan syarat jabatan terkait kompetensi manajerial bagi jabatan Administrator, agar dapat mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural.	Pihak Kesatu
26	Setwan Kab HST DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten HST Tahun 2024	100.3.7.1/35/PKS-A/PEM.OTDA/2024	20 Agustus 2024	20 Agustus s/d 31 Desember 2024	proses		Pihak Kesatu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
			PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026									
27	Setwan Kab Tapin DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024	100.3.7.1/36/P KS-A/PEM.OTDA/2024	21 Agustus 2024		proses		Pihak Kesatu
28	Dinas Peternakan Prov Kaltim DAN DISBUNAKER PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100.3.7.1/37/P KS-A/PEM.OTDA/2024	26 Agustus 2024	3 Tahun	proses	untuk bekerjasama dalam mewujudkan terciptanya pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan, di wilayah kerja PARA PIHAK.	Para Pihak
29	BKPSDM Kab Kotabaru DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dengan Pola Fasilitasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2024	100.3.7.1/38/P KS-A/PEM.OTDA/2024	26 Agustus 2024	26 Agustus s/d 31 Desember 2024	proses	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebagai pemenuhan syarat jabatan terkait kompetensi manajerial bagi jabatan Administrator,	Pihak Kesatu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
30	BKPSDM KOTABARU DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pola Fasilitasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024	100.3.7.1/39/PA/PEM.OTDA/2024	26 Agustus 2024	26 Agustus s/d 31 Desember 2024	proses	agar dapat mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural.	Pihak Kesatu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
											yang ditanamkan pada saat bekerja melayani masyarakat	
31	Setwan Kab HSS DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten HSS Tahun 2024	100.3.7.1/40/PKS-A/PEM.OTDA/2024	26 Agustus 2024	26 Agustus s/d 31 Desember 2024	proses		Pihak Kesatu
32	Setwan Kab HSU DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten HSU Tahun 2024	100.3.7.1/40/PKS-A/PEM.OTDA/2024	26 Agustus 2024	26 Agustus s/d 31 Desember 2024	proses		Pihak Kesatu
33	Setwan Kab BATOLA DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BATOLA Tahun 2024	100.3.7.1/42/PKS-A/PEM.OTDA/2024	04-Sep-24	04 September s/d 31 Desember 2024	proses		Pihak Kesatu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
			KALIMANTAN SELATAN 2022-2026									
34	Setwan Kab TABALONG DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TABALONG Tahun 2024	100.3.7.1/43/PKS-A/PEM.OTDA/2024	11-Sep-24	11 September s/d 31 Desember 2024	proses		Pihak Kesatu
35	Setwan Kab TANAH LAUT DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	100.3.7.1/44/PKS-A/PEM.OTDA/2024	05-Sep-24	05 September s/d 31 Desember 2024	proses		Pihak Kesatu
36	Setwan Kab TANAH BUMBU DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024	100.3.7.1/45/PKS-A/PEM.OTDA/2024	05-Sep-24	05 September s/d 31 Desember 2024	proses		Pihak Kesatu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
37	Setwan Kab KOTABARU DAN BPSDMD PROV KALSEL	WAJIB	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026	02 JULI 2024	5 TAHUN	Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024	100.3.7.1/46/PKS-A/PEM.OTDA/2024	09-Sep-24	09 September s/d 31 Desember 2024	Proses		Pihak Kesatu

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



Tabel 2.90.

Rekapitulasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
		NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (BPKAD) DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSEROD A)	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100.3.7.1/01/PKS.B/PEM.OTDA/2024	02 JANUARI 2024	02 Januari 2024 S.D 31 DESEMBER 2024 (1 TAHUN)	BERJALAN SESUAI KETENTUAN	MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN MENERAPKAN PEMBAYARAN SECARA NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DAPAT DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN AGAR PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	PARA PIHAK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
		NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
										DAPAT BERJALAN DENGAN EFEKTIF DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO	
2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (BADAN KESBANGPO L) DENGAN PROGRAM PASCASARJANA ULM	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	KEGIATAN PENYUSUNAN INDEKS KINERJA ORGANISASI MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100.3.7.1/02/PKS.B/PEM.OTDA/2024	11 JANUARI 2024	11 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL 11 JANUARI 2025 (1 TAHUN)	BERJALAN SESUAI KETENTUAN	TERSEDIA NYA HASIL ANALISIS INDEKS KINERJA ORMAS DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MELIPUTI KOTA BANJARMASIN, KOTA BANJARBARU, KABUPATEN BARITO KUALA, KABUPATEN TANAH BUMBU, DAN KABUPATEN BALANGAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
3	FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT DENGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DAERAH		22 JANUARI 2024	22 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL 22 JANUARI 2026 (3 TAHUN)	BERJALAN SESUAI KETENTUAN	MENINGKATKAN MUTU LULUSAN MAHASISWA FK IK ULM, TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN, MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PERORANGAN, KELOMPOK DAN MASYARAKAT, MENYEBARLUASKAN IPTEK SERTA HASIL PENELITIAN DI BIDANG KESEHATAN	PARA PIHAK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAA N
		NOMOR	TANGG AL TTD	MASA BERLA KU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGA L PENETA PAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSEROD A)	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PENYALURAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 HA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024	100.3.7.1/03B/PKS-B/PEM.OTDA/2024	21 FEBRUARI 2024	21 FEBRUARI 2024 S.D 31 DESEMBER 2024	BERJALAN SESUAI KETENTUAN	TERSALURKANNYA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 HA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024	PARA PIHAK
5	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN					BERJALAN SESUAI KETENTUAN	MENINGKATKAN DAN MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA YANG DIMILIKI GUNA Mendukung Keberhasilan Pembangunan dan Pelayanan Publik MAUPUN DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	PARA PIHAK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAA N
		NOMOR	TANGG AL TTD	MASA BERLA KU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGA L PENETA PAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
6	FAKULTAS KEDOKTER AN GIGI UNIVERSITA S LAMBUNG MANGKURA T DENGAN PEMERINTA H PROVINSI KALIMANTA N SELATAN	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/ 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PENYELENGGAR AAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (TRIDARMA PERGURUAN TINGGI) SERTA PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	100.3.7.1/04B/PKS- B/PEM.OTDA/2024	20 MARET 2024	20 MARET 2024 S.D 15 Maret 2026	TIDAK ADA KENDALA	TERCAPAINYA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN MUTU LULUSAN BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI PROGRAM PROFESI (PSPPDGPP) PADA PIHAK KESATU DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PIHAK KEDUA	PARA PIHAK
7	UNIVERSITA S ISLAM KALIMANTA N MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMAS IN DENGAN PEMERINTA H PROVINSI KALIMANTA N SELATAN	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/ 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN					BERJALAN SESUAI KETENTUAN	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DAN/ ATAU DIPEROLEHNYA MANFAAT YANG SALING MENGUNTUNGAN BAGI PARA PIHAK DALAM KERANGKA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DAERAH	PARA PIHAK
8	PEMERINTA H PROVINSI KALIMANTA N SELATAN DENGAN LEMBAGA PELATIHAN	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/ 2022 TENTANG PEMBENTUKAN	2022	5 TAHUN					TIDAK ADA KENDALA	TERLAKSANYA PELATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI SERTA UNTUK MENINGKATKAN DAN MEMANFAATKAN	PARA PIHAK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
		NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
	KERJA SWASTA CERIKA KABUPATEN BARITO KUALA DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA NOVIE YANTI SIMA KABUPATEN TANAH LAUT	TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN								POTENSI YANG DIMILIKI OLEH PARA PIHAK	
9	DISNAKERTANS DENGAN LPKS CERIKA KAB. BARITO KUALA DAN LPKS NOVIE YANTI SIMA KAB.TANAH LAUT	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI DI LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA CERIKA KABUPATEN BARITO KUALA DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA NOVIE YANTI SIMA	100.3.7.1/07/PKS-B/PEM.OTDA/2024	01-Apr-24	01 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024	TIDAK ADA KENDALA	TERLAKSANYA PELATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI SERTA UNTUK MENINGKATKAN DAN MEMANFAATKAN POTENSI YANG DIMILIKI OLEH PARA PIHAK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
		NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
					KABUPATEN TANAH LAUT						
10	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	KAJIAN GRAND DESAIN (BLUE PRINT) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	100.3.7.1/08/PKS-B/PEM.OTDA/2024	19-Apr-24	19 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 19 APRIL 2029 (5 TAHUN)	TIDAK ADA KENDALA	TERWUJUDNYA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN BERUPA BLUE PRINT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DI KALIMANTAN SELATAN YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PENGAMBILAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KALIMANTAN SELATAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
11	IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN					TIDAK ADA KENDALA	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KOMPETENSI TENAGA MEDIS MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN, KEGIATAN ILMIAH TERAKREDITASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN	PIHAK KESATU

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
		NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
										KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	
12	IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DENGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (BAPELKES)	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PENYELENGGAAN PELATIHAN TERAKREDITASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DI BIDANG KESEHATAN	100.3.7.1/08.2/PKS-B/PEM.OTDA/2024	16 MEI 2024	16 MEI 2024 S.D 16 MEI 2029 (5 TAHUN)	TIDAK ADA KENDALA	TERSEDIAANYA KERANGKA HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN PELATIHAN YANG TERAKREDITASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIBIDANG KESEHATAN	PIHAK KESATU (IDI WILAYAH KALSEL)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAA N
		NOMOR	TANGG AL TTD	MASA BERLA KU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGA L PENETA PAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
13	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSEROD A)	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	FASILITASI LAYANAN PERBANKAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100.3.7.1/09/PKS-B/PEM.OTDA/2024	04 Juni 2024	04 JUNI 2024 S.D 31 DESEMBER 2028	TIDAK ADA KENDALA	TERFASILITASINYA LAYANAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN MENINGKATNYA KAPASITAS/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PARA PIHAK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
		NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
14	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL) DAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	KAJIAN WARISAN GEOLOGI PADA WILAYAH KARST KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024	100.3.7.1/10/PKS-B/PEM.OTDA/2024	10 JUNI 2024	10 JUNI S.D 31 DESEMBER 2024	TIDAK ADA KENDALA	TERLAKSANYA KAJIAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST PADA KAWASAN GEOPARK MERATUS DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024, SEBAGAI BAHAN PENDUKUNG DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK MERATUS DALAM BIDANG KONSERVASI, PENDIDIKAN, DAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN, DAN SEBAGAI BAGIAN DUKUNGAN DALAM PROGRAM USULAN GEOPARK MERATUS MENJADI ANGGOTA UNESCO GLOBAL GEOPARK.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
15	PT. PRODIA WIDYAHUSA DA, Tbk KANTOR CABANG BANJARMAS	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG	2022	5 TAHUN					TIDAK ADA KENDALA	PENINGKATAN KUALITAS PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG KESEHATAN DI	PARA PIHAK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
		NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
	IN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN								WILAYAH KALIMANTAN SELATAN.	
16	PT. PRODIA WIDYAHUSA DA, Tbk KANTOR CABANG BANJARMAS IN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0724/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2022	5 TAHUN	PENYELENGGAAN PELATIHAN TERAKREDITASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DI BIDANG KESEHATAN	100.3.7.1/12/PKS-B/PEM.OTDA/2024	11 JUNI 2024	11 JUNI 2024 S.D 11 JUNI 2029 (5 TAHUN)	TIDAK ADA KENDALA	TERLAKSANYA PELATIHAN YANG TERAKREDITASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIBIDANG KESEHATAN	PIHAK KESATU (PT. PRODIA WIDYAHUSA DA, Tbk KANTOR CABANG BANJARMAS IN)
17	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN PT. INDOCEMENT TUNGGAL	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0600/KUM/2024 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN	02 JULI 2024	5 TAHUN					TIDAK ADA KENDALA	MENINGKATKAN DAN MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA YANG DIMILIKI OLEH PARA PIHAK GUNA Mendukung Keberhasilan Pembangunan dan	PARA PIHAK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG				KETERANGAN/S TATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDA K ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAA N
		NOMOR	TANGG AL TTD	MASA BERLA KU	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGA L PENETA PAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
	PRAKARSA Tbk.	TKKSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026								PELAYANAN PUBLIK PIHAK KESATU MAUPUN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH DI KAWASAN REGIONAL BANJARBAKULA PIHAK KEDUA	

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



Tabel 2.91.

Rekapitulasi Sinergi Perencanaan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah (SINERGI) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
1	Bapelkes Cikarang (kemenkes) dan pemprov kalsel (bapelkes)	NK-RK tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN TERAKREDITASI	100.3.7.1/11/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024	29-Feb-24	3 tahun	Pelatihan (pendidikan)	Masih berjalan		Apbn kemenkes
2	DIRJEN SDA KMENPUPR, DIRJEN CIPTA KARYA KEMEN PUPR DAN BANJARBAKULA	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL DI WILAYAH METROPOLITAN KOTA BANJARMASIN, KOTA BANJARBARU, KABUPATEN BANJAR, KABUPATEN BARITO KUALA, DAN KABUPATEN TANAH LAUT (SPAM REGIONAL BANJARBAKULA)	100.3.7.1/13/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024	27 MARET 2024	5 TAHUN	WAJIB PELAYANAN DASAR			APBD, APBN, SUMBER LAINNYA YG SAH DAN TDK MENGIKAT
3	STAN (KEMENKEU)	PEMENUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEUANGAN NEGARA	100.3.7.1/15/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024	18-Apr-24	5 TAHUN	PALAYANAN DASAR (PENDIDIKAN)	PROSES	PENEMPATAN ASN ASAL PROV KALSEL AGAR BISA KEMBALI KE KALSEL	PARA PIHAK
4	KEJATI	NK-RK ANTARA PEMPROV KALSEL DENGAN KEJATI TENTANG KERJA SAMA PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100.3.7.1/17/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024	19 Januari 2024	1 (Satu) Tahun	Pelayanan Dasar	Berjalan	penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	PARA PIHAK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ADA TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
5	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG SINERGI PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)	100.3.7.1/23/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024	5 Juni 2024	5 TAHUN	SINERGI PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)	PROSES	SINERGI PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)	PUSAT (APBN)
6	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN BATOLA	100.3.7.1/24/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024	5 Juni 2024	5 TAHUN	lingkungan	PROSES	SINERGI PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)	PUSAT (APBN)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
		TENTANG SINERGI PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)							
7	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TENTANG SINERGI PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)	100.3.7.1/25/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024	5 Juni 2024	5 TAHUN	lingkungan	PROSES	SINERGI PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)	PUSAT (APBN)
8	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN	NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN	100.3.7.1/26/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024	5 Juni 2024	5 TAHUN	lingkungan	PROSES	SINERGI PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAU	PUSAT (APBN)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
	HIDUP DAN KEHUTANAN	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TENTANG SINERGI PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)						KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)	
9	Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia	KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM, BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi)	100.3.7.1/33/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024	11-Sep-24	3 TAHUN	Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	PROSES	tercapainya pemberdayaan ekonomi dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan melalui percepatan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP), Dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Selatan	Para Pihak

Sumber: Sekretariat Darah Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



Tabel 2.92.

Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				PKS/KSB /NK
1	PKS	01/PKS-PEMOTDA/2023	BAKEUDA DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan Jasa Perbankan Dalam Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Uang Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	1 (satu) Tahun	BAKEUDA DAN BANK KALSEL	KSDPK	30-Dec-22
2	PKS	02/PKS-PEMOTDA/2023	DINKES KANNGAN & RSUD ULIN	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kab. Kanngan RSUD Ulin	12 Bulan	DINAS SOSIAL DAN PHRI	KSDPK	03-Jan-23
3	KSB	03/KSB-PEMOTDA /2023	PEMPROV KALSEL & 13 KAB/KOTA	Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat & Peningkatan Pelayanan Publik	5 (lima) Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel Dengan DLH Kab/Kota Terkait	KSDD	07-Feb-23
4	NK	04/NK-PEMOTDA /2023	PEMPROV KALSEL & BKKBN	Penyelenggaraan Program Bangga Kencana & Percepatan Penurunan Sutunting Kalsel	5 (lima) Tahun	Prov. Kalsel & BKKBN	KSDD	
5	PKS	05/PKS/PEMOTDA /2023	BKD BJM & BPSDMD PROV	Penyelenggaraan Orientasi Ppk Dengan Pola Fasilitas Di Lingkungan Pemko Bjm 2023	11 Bulan		KSDD	21-Feb-23
6	KSB	06/KSB/PEMOTDA /2023	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN	Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pembangunan Daerah	6 (enam) Tahun	BPBD DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN	KSDD	20-Feb-23
7	PKS	07/PKS/PEMOTDA /2023	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN	Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Keperawatan Dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	10 Bulan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	KSDD	20-Feb-23

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				PKS/KSB /NK
8	PKS	08/PKS/PEMOTDA/2023	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN & PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH	Dukungan Dan Konsultasi Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan	3 (tiga) Tahun	Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Bank Pembangunan Daerah/Bank Kalsel	KSDD	24-Feb-23
9	PKS	09/PKS/PEMOTDA/2023	PEMKOT BJB & PEMPROV KALSEL	Pelayanan Dana Pendamping Kota Banjarbaru Di RSJ Ansari Saleh	1 (satu) Tahun	DINKES BANJARBARU DAN RSJ SM,BANG LIHUM	KSDD	02-Jan-23
10	PKS	010/PKS/PEMOTDA/2023	PEMKOT BJB & PEMPROV KALSEL	Pelayanan Dana Pendamping Kota Banjarbaru Di RSUD Ansari Saleh	1 (satu) TAHUN	DINKES BANJARBARU DAN RSUD ANSARI SALEH	KSDD	02-Jan-23
11	PKS	011/PKS-PEMOTDA/2023	PEMKOT BJB & PEMPROV KALSEL	Pelayanan Dana Pendamping Kota Banjarbaru Di RSUD Ulin	1 (satu) Tahun	DINKES BANJARBARU DAN RSUD ULIN	KSDD	02-Jan-23
12	PKS	012/PKS-PEMOTDA/2023	PEMKAB TANBU & PEMPROV KALSEL	Penyelenggaraan Orientasi P3K Di Pemkab Tanah Bumbu Tahun 2023			KSDD	27-Feb-23
13	PKS	013/PKS-PEMOTDA/2023	PEMKAB HSS & PEMPROV KALSEL	Pelatihan Pelayanan Publik		BKPSDM HSS & BPSDMD PROV KALSEL	KSDPK	17-Feb-23
14	PKS	014/PKS-PEMOTDA/2023	PEMPROV KALTIM & PEMPROV KALSEL	KS Perlindungan Anak Dan Kekerasan		DKPPA KALTIM & DPPPA KALSEL	KSDPK	
15	PKS	015/PKS-PEMOTDA/2023	PEMKOT BJM & PEMPROV KALSEL	Pelayanan Dana Pemdamping Masyarakat Tidak Mampu		DINKES KOTA BJM & RSUD ULIN	KSDD	
16	PKS	016/PKS/PEMOTDA/2023	PEMKOT BJM & PEMPROV KALSEL	Pelayanan Dana Pendamping Masyarakat Tidak Mampu		DINKES KOTA BJM & RSUD ANSARI SALEH	KSDD	
17	PKS	017/PKS-PEMOTDA/2023	PEMKOT BJM & PEMPROV KALSEL	Pelayanan Dana Pendamping Masyarakat Tidak Mampu		DINKES KOTA BJM & RSJ SAMBANG LIHUM	KSDD	
18	KSB	018/KSB-PEMOTDA/2023	PEMPROV SULSEL & PEMPROV KALSEL	Kerja Sama Pembangunan Daerah		SULSEL DILAUTKAN	KSDD	
19	PKS	019/PKS-PEMOTDA/2023		SULSEL (DISLAUTKAN)			KSDD	
20	PKS	20/PKS-PEMOTDA/2023		PKA		BPSDMD	KSDD	06-Jan-23
21	PKS	21/PKS-PEMOTDA/2023		PKP		BPSDMD	KSDD	06-Jan-23
22	PKS	22/PKS-PEMOTDA/2023		PPP		BPSDMD	KSDD	06-Jan-23
23	PKS	23/PKS-PEMOTDA/2023		PKA		DISKOMINPO	KSDD	09-May-23

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				PKS/KSB /NK
24	PKS	24/PKS-PEMOTDA/2023		PKP		BPKSDM BANJAR & BPSDMD PROV KALSEL	KSDD	03-Apr-23
26	PKS	26/PKS-PEMOTDA/2023		LATSAR		BKPSDM BANJAR	KSDD	03-Apr-23
27	PKS	27/PKS-PEMOTDA/2023		Diklat Bendahara Pengeluaran		BKPSDM BAANJAR	KSDD	06-Mar-23
28	NK	28/NK-PEMOTDA/2023		Penyelenggaraan Program Peningkatan Sumber Daya & Daya Saing Industri Prov Kalsel			KSDD	17-May-23
29	PKS	29/PKS-PEMOTDA/2023		Penyelenggaraan Orientasi PPPK		BPKSDM TAPIN & BPSDMD PROV KALSEL	KSDD	03-May-23
30	NK	30/NK-PEMOTDA/2023		Fasilitas Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	5 (lima) tahun	KEMENKES & DINKES PROV	KSDD	06-Jun-23
31	PKS	31/PKS-PEMOTDA/2023	DINKES PROV KAB/KOTA SEKALSEL				KSDD	02-May-23
32	NK	32/NK-PEMOTDA/2023		Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardio	5 (lima) tahun	KEMENKES & DINKES PROV	NK (NOTA KESEPAKATAN)	20-Jun-23
33	NK	33/NK-PEMOTDA/2023		Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes		KEMENKES & DINKES PROV	KSDD	20-Jun-23
34	NK	34/NK-PEMOTDA/2023		Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefropologi		KEMENKES & DINKES PROV	KSDD	20-Jun-23
35	NK	35/NK-PEMOTDA/2023		Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke		KEMENKES & DINKES PROV	KSDD	20-Jun-23
36	NK	36/NK-PEMOTDA/2023		Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi & Tubekulosis		KEMENKES & DINKES PROV	KSDD	20-Jun-23
37	NK	37/NK-PEMOTDA/2023		Jejaring Pengampuan Pelayanan KIA		KEMENKES & DINKES PROV	KSDD	20-Jun-23
38	NK	38/NK-PEMOTDA/2023		Jejaring Pengampuan Pelayanan Kapuker		KEMENKES & DINKES PROV	KSDD	20-Jun-23
39	NK	39/NK-PEMOTDA/2023		Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi E (PIE)		KEMENKES & DINKES PROV	KSDD	20-Jun-23
40	NK	40/NK-PEMOTDA/2023		Jejaring Pengampuan Pelayanan Jiwa PKJN		KEMENKES & DINKES PROV	KSDD	20-Jun-23

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				PKS/KSB /NK
41	NK	41/NK-PEMOTDA/2023		Jejaring Pengampunan Pelayanan Gastro		KEMENKES & DINKES PROV	KSDD	20-Jun-26
42	PKS	42/PKS-PEMOTDA/2023	Jatim & Kalsel	Kerja Sama Bidang Perhubungan	5 (lima) tahun	DISHUB	KSDD	06-Jul-23
43	PKS	43/PKS-PEMOTDA/2023	BKPP BJB & BPSDMD Prov. Kalsel	PKA, PKP, Pelatihan Latsar CPNS 2023 Kota Banjarbaru (Pola Kontribusi)			KSDD	17-Mar-23
44	PKS	44/PKS-PEMOTDA/2023	BKPP BJB & BPSDMD Prov. Kalsel	Pelatihan Latsar PPPK Banjarbaru			KSDD	03-Jul-23
45	PKS	45/PKS-PEMOTDA/2023	BPSDMD Prov Kalsel & BKD Diklet Kota Banjarmasin	Pelatihan PKA Kota Banjarmasin			KSDD	24-Jul-23
46	PKS	46/PKS-PEMOTDA/2023	BPSDMD Prov Kalsel & BKD Diklet Kota Banjarmasin	Pelatihan PKP Kota Banjarmasin			KSDD	24-Jul-23
47	PKS	47/PKS-PEMOTDA/2023	BKPSDM KAB. Tabalong & BPSDMD Prov. Kalsel	Penyelenggaraan Orientasi PPPK Dengan Pola Fasilitasi Di Lingkungan Pemerintah Kab. Tabalong			KSDPK	18-Jul-23

Sumber: Sekretariat Darah Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



Tabel 2.93.

Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
1	PKS	01/PKS-PEMOTDA/2022	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 (lima) Tahun	UIN Dan Dinas Sosial Prov.Kalsel	KSDPK	03-Jan-22
2	PKS	02/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dengan Phri (Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia Prov Kalsel	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kalsel	2 (dua) Tahun	Dinas Sosial Dan PHRI	KSDPK	06-Jan-22
3	KSB	03/KSB-PEMOTDA /2022	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Kabupaten Balangan, Dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Banjir Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	5 (lima) Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel Dengan DLH Kab/Kota Terkait	KSDD	13-Jan-21
4	KSB	04/KSB-PEMOTDA /2022	Pemprov Kalsel Dengan Pemkab Banjar	Penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi Asn Kab Banjar	5 (lima) Tahun	BPSDMD DAN BKPSDM KAB BANJAR	KSDD	05-Jan-22
5	KSB	05/KSB/PEMOTDA /2022	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tapin	Optimalisasi Pendapatan Daerah	5 (lima) Tahun	BAKEUDA DENGAN PEMKAB TAPIN	KSDD	03-Jan-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
6	KSB	06/KSB/PEMOTDA/2022	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten HSU	Optimalisasi Pendapatan Daerah	5 (lima) Tahun	BAKEUDA DENGAN PEMKAB HSU	KSDD	03-Jan-22
7	KSB	07/KSB/PEMOTDA/2022	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong	OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	5 (lima) Tahun	BAKEUDA DENGAN PEMKAB TABALONG	KSDD	03-Jan-22
8	KSB	08/KSB/PEMOTDA/2022	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten Tanbu	Optimalisasi Pendapatan Daerah	5 (lima) Tahun	BAKEUDA DENGAN PEMKAB TANBU	KSDD	03-Jan-22
9	KSB	09/KSB/PEMOTDA/2022	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten Balangan	Optimalisasi Pendapatan Daerah	5 (lima) Tahun	BAKEUDA DENGAN PEMKAB BALANGAN	KSDD	03-Jan-22
10	PKS	010/PKS/PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dengan Pemkot Bjm	Pelayanan Dana Pendamping Perawatan Pasien Tidak Mampu Tingkat Lanjutan Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Tahun 2022	01-01-2022 s/d 31-12-2022	RSJ SAMBANG LIHUM DENGAN DINKES KOTA BJM	KSDD	03-Jan-22
11	PKS	011/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dengan Pemkot Bjm	Pelayanan Dana Pendamping Perawatan Pasien Tidak Mampu Tingkat Lanjutan Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Tahun 2022	01-01-2022 s/d 31-12-2022	RSUD ANSARI SALEH DENGAN DINKES KOTA BJM	KSDD	03-Jan-22
12	PKS	012/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dengan Pemkot Bjm	Pelayanan Dana Pendamping Perawatan Pasien Tidak Mampu Tingkat Lanjutan Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Tahun 2022	01-01-2022 s/d 31-12-2022	RSUD ULIN DENGAN DINKES KOTA BJM	KSDD	03-Jan-22
13	KSB	013/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dengan ULM	Kerja Sama bidang Pemerintahan dan Pembangunan	5 (lima) Tahun	Dinas PUPR dan ULM	KSDPK	01-Mar-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
14	PKS	014/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dengan Ulm ULM	Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi, Pendidikan dan Pelatihan dan pengabdian	5 (lima) Tahun	RSG HASAN AMAN dengan FKG ULM	KSDPK	31-May-21
15	KSB	015/KSB-PEMOTDA/2022	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru	Optimalisasi Pendapatan Daerah	5 (lima) Tahun	BAKEUDA DENGAN PEMKOT BJB	KSDD	15-Mar-22
16	KSB	016/KSB-KS/PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Kerja Sama Pembangunan Daerah	5 (lima) Tahun	PEMPROV JATIM DAN PEMPROV KALSEL	KSDD	13-Apr-22
17	PKS	017/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (Kukm)	5 (lima) Tahun	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalsel	KSDD	13-Apr-22
18	PKS	018/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Kerja Sama Bidang Kelautan Dan Perikanan	2 (dua) Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalsel	KSDD	13-Apr-22
19	PKS	019/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan	2 (dua) Tahun	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
20	PKS	20/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Fasilitasi Peningkatan Dan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan	2 (dua) Tahun	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
21	PKS	21/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Kerja Sama Peningkatan Perdagangan Antar Daerah	5 (lima) tahun	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
22	PKS	22/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Kerja Sama Bidang Perindustrian	5 (lima) tahun	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas	KSDD	13-Apr-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
						Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan		
23	PKS	23/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Kerja Sama Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Hutan	3 (tiga) tahun	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
24	PKS	24/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Fasilitasi Pengembangan Sektor Ketahanan Pangan	5 (lima) tahun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
25	PKS	25/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Survei Kepuasan Masyarakat – Elektronik Sukma-E Jatim	3 (tiga) tahun	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
26	PKS	26/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3 (tiga) tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
27	PKS	27/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Fasilitas Pengembangan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2 (dua) tahun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
28	PKS	28/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Addendum		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
29	PKS	29/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian Melalui Sistem Informasi Manajemen Asn Terintegrasi Dan <i>Assessment Center</i> Sebagai Penilaian Serta Pengukuran Kompetensi ASN	3 (tiga) tahun	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
29	PKS	29/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian Melalui Sistem Informasi Manajemen Asn Terintegrasi Dan <i>Assessment Center</i> Sebagai Penilaian Serta Pengukuran Kompetensi ASN	3 (tiga) tahun	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
30	PKS	30/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Jatim Dan Pemprov Kalsel	Kerja Sama Pengembangan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5 (lima) tahun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan	KSDD	13-Apr-22
31	KSB	31/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Kotabaru	Kerja Sama Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Areal Yang Sudah Diberikan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Kabupaten Kotabaru	5 (lima) tahun	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pariwisata Kotabaru	KSDD	13-Apr-22
32	NK	32/NK-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Badan Informasi Geospasial	Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Provinsi Kalsel	5 (lima) tahun	BAPPEDA prov Kalsel dan BIG	NK (NOTA KESEPAKATAN)	13-Apr-22
33	KSB	33/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Tanah Bumbu	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Pada Pelabuhan Perikanan Batulicin	2 (Dua) tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu	KSDD	05-Jan-22
34	KSB	34/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemprov Kalteng	Kerja Sama Pembangunan Dan Pengembangan Potensi Daerah	5 (lima) tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dan	KSDD	04-Apr-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
						Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng		
35	PKS	35/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Tanah Bumbu	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Pada Pelabuhan Perikanan Batulicin	2 (Dua) tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu	KSDD	10-Jan-22
36	KSB	36/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Banjar	Kerja Sama Pembangunan Daerah	5 (lima) tahun	RSJ sambaing Lihum Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan kab Banjar	KSDD	25-Apr-22
37	PKS	37/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Banjar	Program Pengobatan Tuberkulosis	5 (lima) tahun	RSJ sambaing Lihum Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan kab Banjar	KSDD	25-Apr-22
38	PKS	38/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Banjar	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Iii Dan Ii Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022	Mei-September 2022	BKPSDM Kab Banjar Dan Bpsdmd Prov Kalsel	KSDD	18-Apr-22
39	PKS	39/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Banjar	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022	2022	Bkpsdm Kab Banjar Dan Bpsdmd Prov Kalsel	KSDD	18-Apr-22
40	KSB	40/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel, Pemkot Bjb, Bjm Dan Pemkab Banjar	Program Merdeka Sampah Jalan Protokol Menuju Ibu Kota Prov Kalsel	5 (lima) tahun	DLH	KSDD	03-Jun-22
41	PKS	41/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Tanbu	Optimalisasi Pendapatan Daerah	5 (lima) tahun	BAKEUDA	KSDD	03-Jan-22
42	KSB	42/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkot BJB	Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Kota Banjarbaru	5 (lima) tahun	RSUD ULIN, SAMLIM, ANSAL DAN DINKES BJB	KSDD	13-Jun-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
43	PKS	43/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkot BJB	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Wilayah Kota Banjarbaru Di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022	1 (satu) tahun	RSUD ULIN DAN DINKES BJB	KSDD	13-Jun-22
44	PKS	44/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkot BJB	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Wilayah Kota Banjarbaru Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022	1 (satu) tahun	RSUD ANSAL DAN DINKES BJB	KSDD	13-Jun-22
45	PKS	45/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkot BJB	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Wilayah Kota Banjarbaru Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022	1 (Satu) Tahun	RSJ SAMLIM DAN DINKES BJB	KSDD	13-Jun-22
46	PKS	46/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Tala	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dan Golongan III Tahun Anggaran 2022	06-06-2022 S/D 31 Desember 2022	BPSDMD PROV KALSEL DAN BKPSDM TALA	KSDD	06-Jun-22
47	PKS	47/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Bank Kalsel	Pengembangan Dan Pembinaan Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi Di Kalimantan Selatan	3 (Tiga) Tahun	DISKOP UKM PROV KALSEL DAN BANK KALSEL	KSDPK	07-Jun-22
48	KSB	48/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pt.Pama	Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	3 (Tiga) Tahun	DISKOP UKM PROV KALSEL DAN BANK KALSEL	KSDPK (PROSES)	06-Jun-22
49	PKS	49/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pt.Pama	Pengembangan Dan Pembinaan Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi Di Kalimantan Selatan	1 (Satu) Tahun	DISKOP UKM PROV KALSEL DAN BANK KALSEL	KSDPK (Proses)	06-Jun-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
50	KSB	50/KSB-PEMOTDA/2022	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Untuk Wanita Dan Keluarga, Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum Dan Keadilan, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Banjarbaru, Lembaga Bantuan Hukum Intan, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Dan Yayasan Bantuan Hukum Sipakatuo Dengan Pemprov Kalsel	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga, Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Banjarbaru, Lembaga Bantuan Hukum Intan, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, dan Yayasan Bantuan Hukum Sipakatuo Batulicin dengan Pemprov Kalsel	KSDPK	04-Jan-22
	PKS	51/PKS-PEMOTDA/2022	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan Pemprov Kalsel	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	KSDPK	04-Jan-22
	PKS	52/PKS-PEMOTDA/2022	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga dengan Pemprov Kalsel	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	KSDPK	04-Jan-22
	PKS	53/PKS-PEMOTDA/2022	Lembaga Bantuan Hukum Intan Dengan Pemprov Kalsel	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Lembaga Bantuan Hukum Intan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	KSDPK	04-Jan-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
	PKS	54/PKS-PEMOTDA/2022	Lembaga Bantuan Hukum Intan Dengan Pemprov Kalsel	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Lembaga Bantuan Hukum Intan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	KSDPK	04-Jan-22
	PKS	56/PKS-PEMOTDA/2022	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pelaihari Dengan Pemprov Kalsel	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	KSDPK	04-Jan-22
	PKS	57/PKS-PEMOTDA/2022	Yayasan Bantuan Hukum Sipakatuo Dengan Pemprov Kalsel	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Yayasan Bantuan Hukum Sipakatuo dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	KSDPK	04-Jan-22
	PKS	55/PKS-PEMOTDA/2022	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Banjarbaru Dengan Pemprov Kalsel	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Banjarbaru dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	KSDPK	04-Jan-22
	PKS	58/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan ITS	Penyusunan Dokumen Instrument Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Selatan	90 hari (19 Mei 2022 s/d 17 Agustus 2022)	DPUPR PROV KALSEL DAN ITS	KSDPK	19-May-22
	PKS	59/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan ITS	Penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Ekonomi Keruangan Koridor Pantai Timur Kalimantan Selatan	90 hari (02 Juni 2022 s/d 30 Agustus 2022)	DPUPR PROV KALSEL DAN ITS	KSDPK	02-Jun-22
	KSB	60/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Banjar	Optimalisasi Pendapatan Daerah	5(lima) tahun	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	18-Mar-22
	KSB	61/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkot BJB	Penyelenggaraan Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Banjarbaru	5(lima) tahun	BPSDMD PROV KALSEL	KSDD	27-Jun-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
	PKS	62/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkot BJB	Penyelenggaraan Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Banjarbaru	27 Juni s/d 31 Desember 2022	BPSDMD PROV KALSEL	KSDD	27-Jun-22
	KSB	63/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkot BJB	Penyelenggaraan Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Banjarbaru	27 Juni s/d 31 Desember 2022	BPSDMD PROV KALSEL	KSDD	27-Jun-22
	PKS	64/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan ULM	Penyelenggaraan Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Banjarbaru	60 Hari (15 Maret 2022 s/d 14 Mei 2022)	DPUPR PROV KALSEL dan ULM	KSDPK	15-Mar-22
	PKS	65/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selata	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum		04-Jul-22
	PKS	66/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	67/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
	PKS	68/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	69/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	70/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	71/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Rsud Dr. H. Moch. Ansari Saleh	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh		04-Jul-22
	PKS	72/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	73/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	74/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman Ri	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan		04-Jul-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
			Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan		
	PKS	75/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	76/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	77/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan selatan		04-Jul-22
	PKS	78/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	79/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	80/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan		04-Jul-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
				Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan		Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan		
	PKS	81/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	82/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	83/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		04-Jul-22
	PKS	84/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan RSUD Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin	KSDPK	04-Jul-22
	PKS	85/PKS-PEMOTDA/2022	Perwakilan Ombudsman RI Prov Kalsel Dan Pemprov Kalsel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan	3 (tiga) tahun	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan	KSDPK	04-Jul-22
	KSB	86/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Tala	Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Bidang Kesehatan	5(lima) tahun	RSUD ANSAL PROV KALSEL	KSDD	02-Jun-22
	KSB	87/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab Batola	Optimalisasi Pendapatan Daerah	5(lima) tahun	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	03-Jan-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
	PKS	88/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel, Pemkot Bjm, Pemkab Banjar, HSU, HST, Balangan, Tala	Percepatan Pengendalian Dan Pemulihan Pasca Banjir Melalui Rencana Aksi Penanaman / Revegetasi	5(lima) tahun	DLH	KSDD	13-Jul-22
	KSB	89/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan PT. TMI Dan Pt. PPLI	Pengelolaan Limbah Di Provinsi Kalimantan Selatan	5(lima) tahun	RSJ SAMLIM PROV KALSEL	KSDPK	06-Jul-22
	PKS	90/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan PT. TMI Dan PT. PPLI	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3)	2(dua) tahun (06-07-2022 s/d 20 Mei 2024)	RSJ SAMLIM PROV KALSEL	KSDPK (proses)	06-Jul-22
	KSB	92/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Tapera	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Provinsi Kalimantan Selatan	2(dua) tahun	DISPERKIM PROV KALSEL	KSDPK (proses)	27-Jul-22
	NK	93/NK-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan BP2MI	Penyelenggaraan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	3(tiga) tahun	DINASKERTRANS PROV KALSEL	NK (proses)	28-Jul-22
	KSB	94/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemkab KTB	Kerja Sama Peningkatan Pembangunan Daerah	5(lima) tahun	BPSDMD PROV KALSEL	KSDD (proses)	17-Mar-22
	PKS	95/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Bank Kalsel	Penyaluran Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kegiatan Korban Bencana Dan Kawasan Permukiman Kumuh Sesuai Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022	16 Agustus 2022 s/d 31 Desember 2022	DISPERKIM PROV KALSEL	KSDPK (proses)	16-Aug-22
	PKS	96/PKS-PEMOTDA/2022	Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Djp Kalselteng Dan Pemprov Kalsel	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah	30 Agustus 2022 (5 TH)	BAKEUDA PROV KALSEL	SINERGI	30-Aug-22
	PKS	97/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan ULM	Kolaborasi Program Sungai Martapura Asri DLH Prov Kalsel Dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Teknik ULM	06 September 2022 (1 TH)	DLH PROV KALSEL	KSDPK	06-Sep-22
	KSB	98/KSB-PEMOTDA/2022	Kab. Kapuas Dan Pemprov Kalsel	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah	06 September 2022 (5 TH)	LABKES PROV KALSEL	KSDD	06-Sep-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
	PKS	99/PKS-PEMOTDA/2022	Kab. Kapuas Dan Pemprov Kalsel	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	06 September 2022 (5 TH)	LABKES PROV KALSEL	KSDD	06-Sep-22
	KSB	100/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan UPN Veteran Yogya	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Kawasan Geopark Meratus	01 September 2022 (5 TH)	DISDIK PROV KALSEL	KSDPK	01-Sep-22
	PKS	101/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan UPN Veteran Yogya	Penyusunan Buku Bacaan Sebagai Pendukung Kurikulum Mulok Tingkat Sma Di Kawasan Geopark Meratus Prov Kalsel	10 Oktober 2022 (90 HR)	DISDIK PROV KALSEL	KSDPK	19-Sep-22
	NK	102/NK-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Baznaz	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kalimantan Selatan	21 September 2022 (03 TH)	DINSOS PROV KALSEL	SINERGI	21-Sep-22
	KSB	103/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan UGM	Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	21 September 2022 (05 TH)	RSUD ULIN PROV KALSEL	KSDPK	21-Sep-22
	KSB	104/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan 13 Kabupaten/Kota Se-Kalsel	Kerja Sama Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Provinsi Kalimantan Selatan	27 September 2022 (5 TH)	BIRO EKONOMI SETDA PROV KALSEL	KSDD	27-Sep-22
	KSB	105/KSB-PEMOTDA/2022	Kab. Batola Dan Pemprov Kalsel	Pelayanan Kesehatan	09 MEI 2022 (05 TH)	RSUD ABDUL AZIZ BATOLA DAN RSJ SAMLIM PROV KALSEL	KSDD	09 MEI 2022
	PKS	106/PKS-PEMOTDA/2022	Kab. Batola Dan Pemprov Kalsel	Kunjungan Tenaga Dokter Spesialis Penyakit Dalam	09 MEI 2022 S/D 31 DES 2022	RSUD ABDUL AZIZ BATOLA DAN RSJ SAMLIM PROV KALSEL	KSDD	09 MEI 2022
	PKS	107/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Ulm	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada UPPD Di Provinsi Kalimantan Selatan	11 Oktober 2022 (1 TH)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDPK	11-Oct-22
	KSB	108/KSB-PEMOTDA/2022	Kab. Banjar Dan Pemprov Kalsel	Adendum Penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banjar	23 SEPTEMBER 2022 (05 TH)	BPSDMD PROV KALSEL	KSDD	23-Sep-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
	PKS	109/PKS-PEMOTDA/2022	Kab. Banjar Dan Pemprov Kalsel	Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pola Kemitraan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022	26-Sep-22	BPSDMD PROV KALSEL	KSDD	26-Sep-22
	PKS	110/PKS-PEMOTDA/2022	Kab. Hss Dan Pemprov Kalsel	Pelatihan Dasar Golongan Ii Cpn Di Lingkungan Kabupaten Hss	12/09/2022-31/12/22	BPSDMD PROV KALSEL	KSDD	12-Sep-22
	PKS	111/PKS-PEMOTDA/2022	Kab. Tala Dan Pemprov Kalsel	Pelayanan Pada Bidang Kesehatan	04 Juli 2022 (1 Th)	RSUD BOEDJASIN DAN RSUD M. ANSAL PROV KALSEL	KSDD	04-JULI-2022
	NK	112/NK-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Bps Prov Kalsel	Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Di Kalsel	20 Oktober 2022 (5 Th)	DINSOS PROV KALSEL	KSDD	20-OKT-2022
	KSB	113/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Pemprov Bali	Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik	17 Oktober 2022 (5 Th)	DISKOP UKM PROV KALSEL	KSDD	17-Oct-22
	KSB	114/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kaltim Dan Pemprov Kalsel	Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim Dan Provinsi Kalsel	08 November 2022 (05 Th)	11 SKPD PROV KALSEL	KSDD	08-Nov-22
	PKS	115/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kaltim Dan Pemprov Kalsel	Kerja Sama Peningkatan Dan Pengembangan Penanaman Modal	08 November 2022 (05 Th)	DPMPSTSP PROV KALSEL	KSDD	08-Nov-22
	KSB	116/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Kotabaru	Optimalisasi Pendapatan Daerah	03 Januari 2022 (5 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	03-Jan-22
	KSB	117/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Tanah Laut	Optimalisasi Pendapatan Daerah	03 Januari 2022 (5 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	03-Jan-22
	PKS	118/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Balangan	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22
	PKS	119/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Banjar	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22
	PKS	120/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Kotabaru	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22
	PKS	121/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Tabalong	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22
	PKS	122/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Tanah Laut	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No.	Dokumen Kerja Sama				Jangka Waktu	Satuan Kerja Pelaksana	Keterangan	Tanggal PKS/KSB /NK
	Jenis	Nomor	Antara	Tentang				
	PKS	123/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Tanah Bumbu	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22
	PKS	124/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Tapin	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22
	NK	125/NK-PEMOTDA/2022	Brin Dan Pemprov Kalsel	Pembangunan Dan Pengelolaan Kebun Raya Di Provinsi Kalimantan Selatan	12 Desember 2022 (5 Th)	KEBUN RAYA BANUA BALITBANGDA PROV KALSEL	KSDD	12-Dec-22
	PKS	126/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kota Banjarbaru	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22
	PKS	127/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Hsu	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22
	KSB	128/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Hss	Optimalisasi Pendapatan Daerah	03 Januari 2022 (5 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	03-Jan-22
	PKS	129/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Hss	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22
	KSB	130/KSB-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kota Banjarmasin	Optimalisasi Pendapatan Daerah	03 Januari 2022 (5 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	03-Jan-22
	PKS	131/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kota Banjarmasin	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22
	NK	132/NK-PEMOTDA/2022	Bpjs Dan Pemprov Kalsel	Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemprov Kalsel	19 Desember 2022 (4 Th)	DINKES PROV KALSEL	SINERGI	19-Dec-22
	PKS	133/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Bank Kalsel	Penempatan Deposito Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Prov Kalsel Th 2022	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDPK	22-Dec-22
	PKS	134/PKS-PEMOTDA/2022	Pemprov Kalsel Dan Kabupaten Batola	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	22 Desember 2022 (1 Th)	BAKEUDA PROV KALSEL	KSDD	22-Dec-22

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



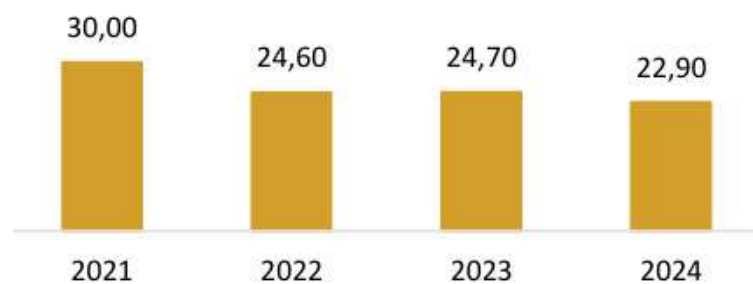
2.1.7. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan 1-Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,11 persen pada tahun 2024 dan mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin dalam satu tahun terakhir. Terlihat adanya tren positif dalam pengurangan kemiskinan di Kalimantan Selatan sejak pemulihan ekonomi pasca COVID-19 pada tahun 2022. Pemberian bantuan sosial dan penanganan bencana menjadi salah satu upaya untuk menangani kemiskinan di Indonesia.

Tujuan 2-Tanpa Kelaparan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Stunting (pendek dan sangat pendek) atau tengkes pada balita merupakan kondisi kurang gizi kronis pada anak berusia 0-59 bulan yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Jika diperhatikan perkembangan stunting di Kalimantan Selatan pada periode 2021-2022, terlihat bahwa terjadi penurunan prevalensi balita stunted.



Gambar 2.45.
Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (persen)

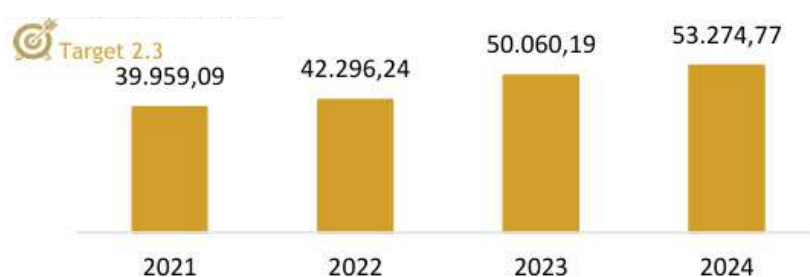
Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Meskipun target nasional sebesar 14% sesuai indikator SDGs 2.2 dan RPJMN belum tercapai, tren penurunan prevalensi stunting di Kalimantan Selatan menunjukkan arah yang menggembirakan. Penurunan signifikan dari 30,00 persen pada tahun 2021 menjadi 22,90 persen pada 2024 mencerminkan bahwa berbagai upaya intervensi yang telah dilakukan



mulai menunjukkan hasil yang nyata di lapangan. Stabilitas angka di tahun terakhir menjadi momentum penting untuk melakukan penguatan terhadap strategi yang sudah berjalan, sekaligus mengoptimalkan program yang mencakup peningkatan kualitas layanan gizi, sanitasi lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta edukasi keluarga mengenai pola asuh yang mendukung pertumbuhan optimal.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Selatan mencatat peningkatan nilai tambah sektor pertanian per tenaga kerja secara signifikan. Jika pada tahun 2021 nilai tambah tersebut berada pada kisaran hampir 40 juta rupiah per tenaga kerja, maka pada tahun 2024 nilainya telah melampaui 50 juta rupiah. Peningkatan ini mengindikasikan membaiknya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini menegaskan bahwa sektor pertanian terus memainkan peran penting dalam perekonomian daerah serta berpotensi meningkatkan taraf hidup para pelaku usaha tani di Kalimantan Selatan.



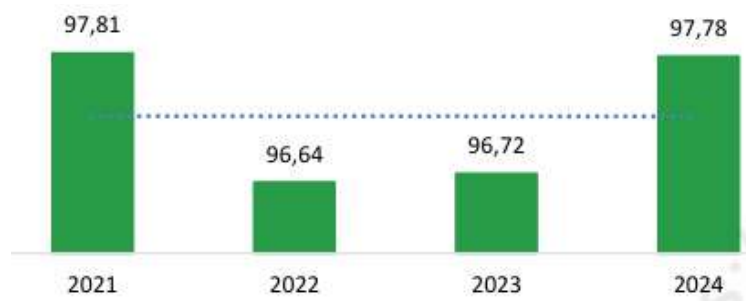
Gambar 2.46.

Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (ribu rupiah per orang)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Tujuan3-Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

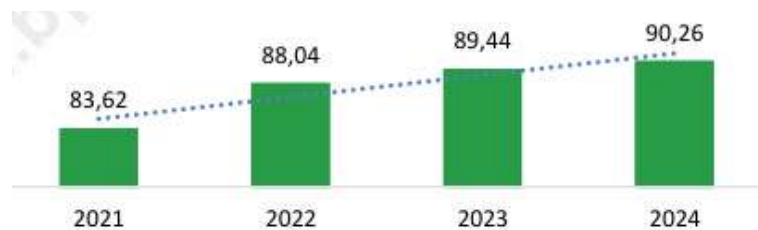
Pada periode 2020-2024, proporsi perempuan pernah kawin di usia produktif yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami kenaikan (kecuali pada periode 2021-2022 untuk persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih). Pada tahun 2024, persentase/proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan masing-masing mencapai 97,78persen dan 90,26 persen.



Gambar 2.47.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

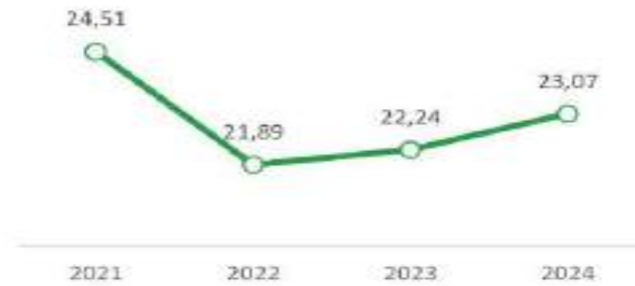


Gambar 2.48.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

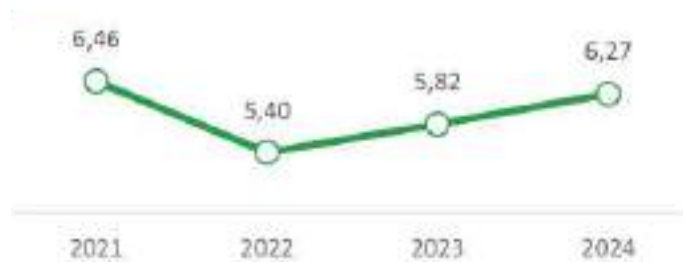
Berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak bahaya merokok bagi kesehatan. Di antaranya yaitu asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia, disfungsi ereksi (impotensi), dan sebagainya. Hingga tahun 2024, persentase merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Selatan masih mencapai 23,07 persen. Ini menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 5 penduduk Kalimantan Selatan usia 15 tahun ke atas merupakan perokok aktif meskipun ada yang merokok tidak setiap hari.



Gambar 2.49.
Persentase Merokok pada Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya, namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya. *Unmet need* merupakan indikator proxy untuk melihat cakupan penduduk yang seharusnya berobat karena sakit hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi kenyataannya tidak berobat.



Gambar 2.50.
***Unmet Need* Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)**

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Terlihat bahwa *unmet need* pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan sempat menunjukkan tren penurunan dalam tiga periode (2020–2022). Namun, sedikit meningkat kembali hingga 2024. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dikarenakan semakin besarnya persentase penduduk yang tidak berobat jalan pada saat memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya.



Tujuan 4-Pendidikan Berkualitas: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

Pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sudah di atas 96 persen. Sedangkan, untuk SMP/ sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan sudah di atas 88 persen. Namun, capaian pada jenjang SMA/ sederajat masih di kisaran 67 persen, bahkan menurun dibanding dua tahun sebelumnya.



Gambar 2.51.
Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

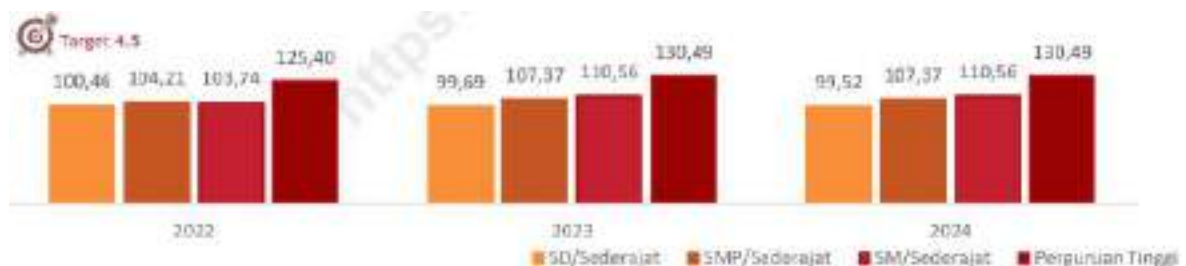
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki menurut jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang konsisten: partisipasi pendidikan perempuan melampaui laki-laki, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Rasio ini menggambarkan perbandingan proporsi perempuan dan laki-laki yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia yang semestinya. Angka rasio di atas 100 menandakan bahwa partisipasi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Pada tahun 2022, rasio APM untuk jenjang SD/ sederajat sebesar 100,46, menunjukkan keseimbangan relatif antara partisipasi anak perempuan dan laki-laki. Angka ini kemudian sedikit menurun menjadi 99,69 pada 2023 dan 99,52 pada 2024, yang mengindikasikan adanya sedikit penurunan proporsi perempuan di jenjang pendidikan dasar.



Untuk jenjang SMP/ sederajat, rasio APM justru meningkat dari 104,21 pada 2022 menjadi 107,37 pada 2023 dan tetap stabil hingga 2024. Hal yang sama juga terlihat pada jenjang SM/ sederajat, di mana angka rasio meningkat dari 103,74 di tahun 2022 menjadi 110,56 pada 2023 dan 2024. Data ini menunjukkan bahwa remaja perempuan di Kalimantan Selatan cenderung memiliki akses dan kesempatan lebih baik dalam menyelesaikan pendidikan menengah dibandingkan remaja laki-laki.

Kecenderungan ini makin jelas terlihat pada jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, rasio APM untuk perguruan tinggi mencapai 125,40 dan terus meningkat menjadi 130,49 pada 2023 dan tetap di angka yang sama pada 2024. Ini menandakan bahwa jumlah perempuan yang menempuh pendidikan tinggi jauh melampaui laki-laki. Fenomena ini dapat mencerminkan keberhasilan kebijakan afirmatif terhadap pendidikan perempuan, meningkatnya kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan tinggi bagi anak perempuan, serta perubahan norma sosial terkait peran gender dalam masyarakat.



Gambar 2.52.
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025



Gambar 2.53.
Proporsi Remaja (15-24 Tahun) dan Dewasa (15-59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025



Proporsi penduduk remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan besaran proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Komputer dalam hal ini hanya mengacu pada komputer desktop, laptop, atau tablet. Peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti smart TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti smartphone, tidak tercakup dalam definisi yang dimaksud.

Proporsi penduduk Kalimantan Selatan yang memiliki keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengalami peningkatan selama periode 2021–2024. Pada kelompok usia 15–24 tahun, proporsi meningkat dari 94,95 persen pada 2021 menjadi 97,03 persen pada 2024. Sementara itu, kelompok usia 15–59 tahun mengalami peningkatan signifikan dari 70,39 persen menjadi 83,04 persen pada periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan akses dan pemanfaatan teknologi digital di kalangan penduduk usia produktif dan remaja, yang sangat penting untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur 15 tahun ke atas adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas.

Angka melek aksara di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sebesar 98,34 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Meskipun penurunannya tidak signifikan, hendaknya momentum ini menjadi bahan evaluasi dalam rangka mengentaskan buta aksara.

Tujuan 5-Kesetaraan Gender: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Perkawinan anak merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan kesetaraan gender, sebagaimana ditekankan dalam indikator TPB 5.3 yang menargetkan penghapusan praktik tersebut sebelum usia 18 tahun. Di Kalimantan Selatan, proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun menunjukkan tren

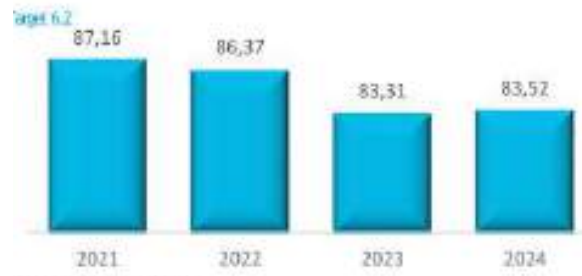


penurunan signifikan, dari 15,30 persen pada 2021 menjadi 7,80 persen pada 2024. Capaian ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas perlindungan hak anak, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi keluarga, perluasan akses pendidikan, dan penguatan kolaborasi lintas sektor agar target penghapusan perkawinan anak dalam agenda TPB 2030 dapat tercapai secara menyeluruh.

Pada tahun 2024, proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 32,19 persen. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada level 31,96 persen. Meskipun peningkatannya relatif kecil, tren ini tetap positif dan mencerminkan komitmen terhadap pencapaian target kesetaraan gender dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan sebesar 5,12 persen poin dari 27,07 persen menjadi 32,19 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir telah terjadi perbaikan nyata dalam keterwakilan perempuan di posisi strategis manajerial, yang dapat mencerminkan hasil dari kebijakan afirmatif, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, serta perubahan budaya organisasi.

Tujuan 6-Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua

Akses terhadap fasilitas sanitasi dasar, termasuk tempat cuci tangan dengan sabun dan air, merupakan bagian penting dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. Proporsi rumah tangga di Kalimantan Selatan yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir, dari 87,16 persen pada 2021 menjadi 83,52 persen pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kembali upaya sanitasi dasar, baik melalui penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan maupun edukasi perilaku hidup bersih.

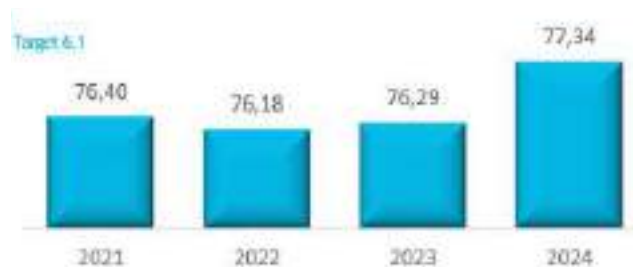


Gambar 2.54.

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 setelah mengalami stagnasi pada tiga tahun sebelumnya. Setelah tercatat sebesar 76,40 persen pada 2021 dan relatif stabil di angka 76,18 persen pada 2022 serta 76,29 persen pada 2023, capaian tahun 2024 melonjak menjadi 77,34 persen. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam penyediaan layanan air minum yang lebih merata dan aman, serta mendukung pencapaian Target 6.1 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu menjamin akses universal terhadap air minum layak bagi seluruh masyarakat.



Gambar 2.55.

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

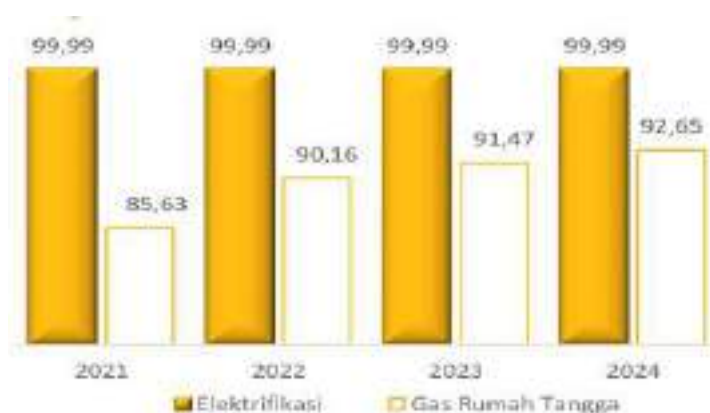
Tujuan 7-Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua

Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen. Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan



indikator yang berguna untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan. Pada periode 2020-2023, rasio elektrifikasi Kalimantan di Selatan relatif stabil, yakni berada di kisaran angka 99,99 persen.

Sementara itu, pada tahun 2024, akses gas rumah tangga terus mengalami peningkatan hingga mencapai 92,65%, mencerminkan perluasan jaringan distribusi yang semakin menjangkau masyarakat.

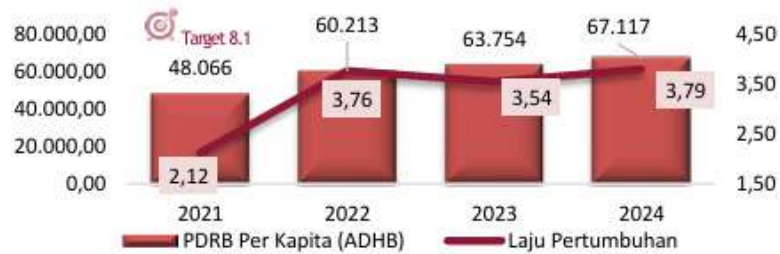


Gambar 2.56.
Rasio Elektrifikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2024

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Tujuan 8-Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp48,066 ribu pada 2021 menjadi Rp67,117 ribu pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan kapasitas ekonomi masyarakat secara umum. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi per kapita (ADHK) juga memperlihatkan perkembangan yang relatif stabil. Setelah tumbuh sebesar 2,12 persen pada 2021, angka ini melonjak menjadi 3,76 persen pada 2022, sedikit menurun ke 3,54 persen pada 2023, dan kembali naik menjadi 3,79 persen pada 2024.

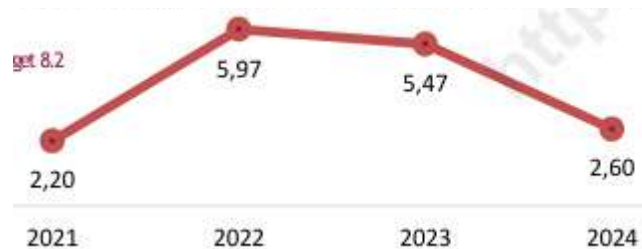


Gambar 2.57.

PDRB ADHB per Kapita per Tahun (ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Namun demikian, peningkatan PDRB per kapita tidak sepenuhnya selaras dengan produktivitas tenaga kerja. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja justru menunjukkan perlambatan, dari puncaknya 5,97 persen pada 2022 menjadi hanya 2,60 persen pada 2024. Ketidaksinkronan ini mengindikasikan bahwa kenaikan output ekonomi belum sepenuhnya diiringi peningkatan efisiensi dan kontribusi produktif tenaga kerja, sehingga perlu perhatian dalam strategi peningkatan kualitas dan kapasitas angkatan kerja, sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 2.58.

Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh takdibayar, pekerjabebas, dan pekerja keluarga/ tak dibayar. Proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal dapat digunakan sebagai proksi proporsi pekerja yang tidak memiliki kondisi



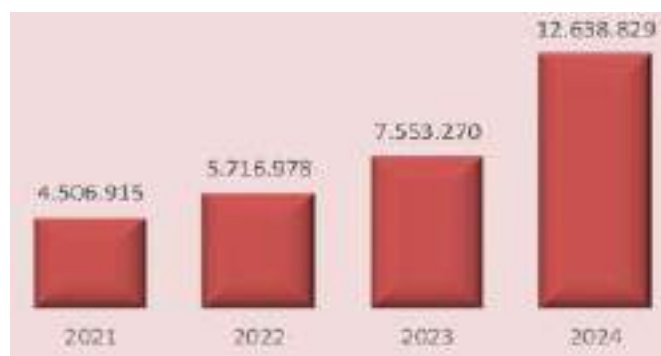
kerja yang terlindungi. Hingga tahun 2024, persentase tenaga kerja informal di Kalimantan Selatan masih relatif tinggi, yaitu sebesar 53,56 persen. Angka tersebut menurun dari keadaan tahun 2023, yaitu sebesar 55,25 persen. Demikian pula jika dibandingkan dengan tahun 2021, proporsi tenaga kerja informal pada tahun 2024 relatif menurun.

Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam, baik berupa uang maupun barang. Upah dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, upah rata-rata per jam pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan setiap tahun, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami sedikit penurunan.

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (youth not in education, employment or training atau NEET) adalah anak muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja, atau pelatihan. Hingga tahun 2024, terdapat sebanyak 18,69 persen penduduk usia muda di Kalimantan Selatan yang menyandang gelar NEET. Artinya, sekitar 1 dari 5 penduduk usia muda di Kalimantan Selatan merupakan seorang NEET, alias tidak terberdayakan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren penurunan dalam empat tahun terakhir, dari 4,95 persen pada tahun 2021 menjadi 4,20 persen pada tahun 2024. Capaian ini menjadi indikator positif bagi kemajuan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Namun demikian, penguatan kualitas pekerjaan dan peningkatan partisipasi angkatan kerja tetap menjadi prioritas dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Kalimantan Selatan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024, mencapai 12.638.829 perjalanan, meningkat sebesar 67,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 7.553.270 perjalanan. Dibandingkan tahun 2021, jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah hampir tiga kali lipat, menandakan tren yang konsisten dalam pertumbuhan pariwisata pasca-pandemi. Capaian ini menjadi indikator positif terhadap TPB yang mendorong peningkatan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lokal secara berkelanjutan.



Gambar 2.59.

Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 (orang)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Tujuan 9-Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif yang Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Sektor industri pengolahan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah hasil produksi domestik. Peningkatan produktivitas dan stabilitas pertumbuhan sektor ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya, menarik investasi, serta mendorong transformasi struktural dari ekonomi berbasis komoditas menuju industri berbasis inovasi dan teknologi. Di Provinsi Kalimantan Selatan, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB menunjukkan tren menurun dalam periode 2021-2023, dari 13,55 persen menjadi 10,75 persen, sebelum mengalami sedikit pemulihan menjadi 10,95 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, laju pertumbuhan sektor ini juga mengalami fluktuasi dimana setelah mencatat angka pertumbuhan cukup tinggi pada 2021, terjadi perlambatan pada dua tahun berikutnya, dan baru pada tahun 2024 pertumbuhan sektor ini kembali menguat mencapai 4,83 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor industri pengolahan mulai menunjukkan tanda pemulihan, penguatan struktur industri dan perluasan basis manufaktur tetap diperlukan untuk meningkatkan kontribusi sektor ini secara berkelanjutan terhadap perekonomian daerah.

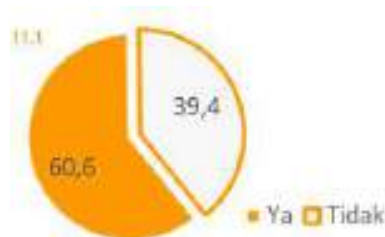


Tujuan 10-Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara

Selama periode 2021 hingga 2024, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dalam pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Koefisien Gini menurun secara konsisten dari 0,330 pada tahun 2021 menjadi 0,302 pada tahun 2024, yang mengindikasikan membaiknya distribusi pengeluaran antarpenduduk. Sementara itu, persentase penduduk miskin juga terus menurun, dari 4,83 persen pada 2021 menjadi 4,11 persen pada 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perbaikan akses terhadap layanan dasar yang secara bertahap mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata dan inklusif di Kalimantan Selatan. Selain itu, proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tren penurunan pada periode 2020-2023. Penurunan pada indikator ini mengindikasikan bahwa penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan.

Tujuan 11-Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sangat krusial dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkembang. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa, dan transportasi. Dengan suara, perencanaan, dan manajemen risiko-informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan penggerak dari pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2.60.

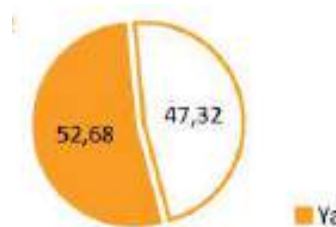
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025



Gambar 2.61.
Proporsi Penduduk Terlayani Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025



Gambar 2.62.
Proporsi Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman pada Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Pada tahun 2024, setidaknya masih terdapat 2 dari 5 rumah tangga di Kalimantan Selatan yang masih belum memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Hunian layak huni didefinisikan sebagai rumah/hunian yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek, yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas. Kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

Akses nyaman pada transportasi publik merupakan salah satu syarat pada pembangunan perkotaan yang inklusif. Pada tahun 2020, baru 52,68 persen rumah tangga yang memiliki akses nyaman ke transportasi umum, yaitu rumah tangga dengan jarak paling jauh 0,5 km ke transportasi umum. Pada tahun yang sama, hanya terdapat sebanyak 1,60 persen penduduk



berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan kendaraan umum dengan rute tertentu.

Tujuan 12-Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Menjamin Pola Produksi Dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini, tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan merupakan upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan. Pada akhirnya, Tujuan 12 adalah seruan untuk bertindak, bukan hanya soal mengurangi dampak negatif pada lingkungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan generasi mendatang.

Tujuan 13-Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Perubahan iklim terjadi akibat berbagai aktivitas di berbagai sektor, seperti emisi industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Berbagai aktivitas tersebut mempercepat pemanasan global yang memicu dampak buruk, termasuk meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap ancaman bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim. Mengingat dampaknya yang luas terhadap berbagai sektor, penanganan perubahan iklim memerlukan upaya yang menyeluruh serta koordinasi yang baik antar sektor. Sebagai negara berkembang, kemampuan Indonesia dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim masih belum sebaik negara-negara maju. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, melalui tujuan ini diharapkan pemerintah dapat mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi perubahan iklim beserta dampaknya, dengan memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Selain itu, pemerintah juga diharapkan terus meningkatkan pendidikan, menumbuhkan kesadaran, serta membangun kapasitas manusia dan



kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan sistem peringatan dini perubahan iklim.

Tujuan 14-Ekosistem Lautan: Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan

Laut dan ekosistem pesisir memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan global serta mendukung kehidupan jutaan manusia, khususnya di negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Namun, keberadaan ekosistem laut saat ini menghadapi berbagai ancaman serius, mulai dari pencemaran laut, penangkapan ikan berlebihan, hingga kerusakan ekosistem terumbu karang dan pesisir akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan, mata pencaharian masyarakat pesisir, serta keanekaragaman hayati laut. Untuk itu, melalui Tujuan 14 SDGs, diharapkan semua pihak dapat bersinergi dalam menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Upaya ini meliputi pengurangan pencemaran laut, perlindungan ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan laut. Dengan langkah nyata tersebut, keseimbangan ekosistem laut dapat terus terjaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi saat ini dan mendatang.

Tujuan 15-Ekosistem Daratan: Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan sekitar 31.750 spesies tumbuhan, 732 mamalia dan 1.711 burung serta ratusan reptile dan amfibi, di mana sebagian besar bersifat endemik. Luas tutupan hutan di Indonesia pada akhir 2024 mencapai sekitar 52,1 persen dari total daratan, termasuk hutan primer yang sangat kaya biodiversitas dan sangat penting untuk penyimpanan karbon. Namun sepanjang tahun 2024, negara ini kehilangan sekitar 175.000 hektar hutan secara bersih, akibat deforestasi legal maupun illegal terutama di Kalimantan dan Sumatera.



Di tingkat provinsi, Kalimantan mencatat berbagai tantangan signifikan pada tahun 2024. Menurut *Global Forest Watch*, pada tahun 2024, Kalimantan Selatan kehilangan 2,22 kha hutan alam atau setara dengan 1.73 Mt emisi CO₂. Hilangnya tutupan hutan tersebut mengancam keanekaragaman hayati local, termasuk jenis flora dan fauna khas Kalimantan yang sangat bergantung pada habitat hutan alam.

Deforestasi ini Sebagian besar disebabkan oleh konversi lahan untuk kegiatan izin tambang, perkebunan dan infrastruktur lainnya. Dalam konteks SDG 15, data tersebut menunjukkan perlunya pendekatan strategis di tingkat provinsi: mempercepat program restorasi dan konservasi hutan alam, memperluas lahan lindung, serta memperkuat penegakan hukum terhadap deforestasi ilegal maupun legal. Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya juga krusial, agar ekosistem daratan di Kalimantan Selatan tetap kuat, seimbang, dan berkelanjutan.

Tujuan 16-Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh: Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi masih ada wilayah yang menghadapi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tersebut menghambat pembangunan wilayah. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga perlu ditingkatkan.



Gambar 2.63.

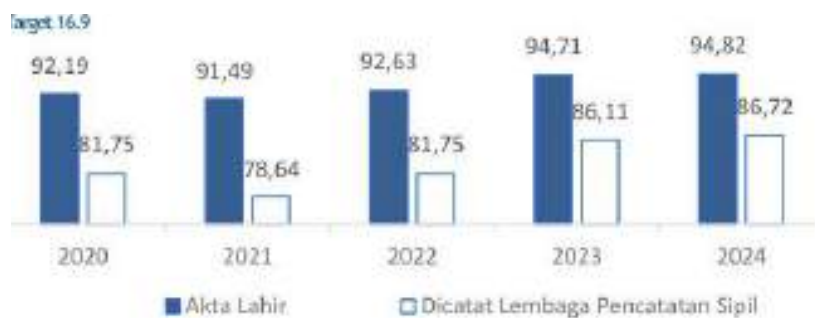
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR dan DPRD) di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025



Keterwakilan perempuan sebagai perwakilan rakyat menggambarkan adanya pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai 20,00 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di DPR yang mencapai 22,46 persen. Jika dilihat trennya, angka nasional terlihat terus meningkat lalu menurun di 2022 sedangkan Kalimantan Selatan mengalami kenaikan di tahun 2023, dan mengalami penurunan Kembali di 2024.

Pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Secara umum, pencatatan kelahiran anak di Kalimantan Selatan sudah terbilang baik. Akan tetapi kepemilikan akta lahir dan pencatatan di lembaga pencatatan sipil mengalami penurunan pada 2021 lalu meningkat kembali di 2022 hingga 2024. Pada tahun 2024, anak yang memiliki akta kelahiran sudah mencapai 94,82 persen dan anak yang kelahirannya tercatat di Lembaga Pencatatan Sipil sebanyak 86,72 persen



Gambar 2.64.

Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran dan Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Tujuan 17-Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen pada kemitraan dan kerja sama yang kuat. Selain Kerja sama antar daerah, peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor



swasta dan Masyarakat juga diperlukan, dengan berlandaskan pada prinsip, visi dan tujuan bersama. Ada beberapa target utama yang perlu dicapai untuk mendukung penguatan kemitraan ini, salah satunya adalah peningkatan sumber daya dan keuangan sebagai landasan pengelolaan pembangunan yang mandiri. Selain itu, pada tujuan ini juga mencakup pemanfaatan dan perluasan infrastruktur teknologi dan informasi.



Gambar 2.65.
Penduduk Berusia 5 Tahun keatas yang Mengakses Internet di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (persen)

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, BPS, 2025

Di tengah pandemi Covid-19, peran internet kian hari kian esensial untuk keperluan sehari-hari. Sekitar 25,18 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 belum mendapatkan akses ke internet. Padahal, internet di sini mencakup akses ringan keseharian seperti WhatsApp dan Facebook. Dibandingkan antar jenis kelamin, lebih banyak penduduk laki-laki yang mampu mengakses internet dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2024, sebanyak 77,92 persen penduduk laki-laki berusia 5 tahun ke atas bisa mengakses internet. Sementara untuk penduduk perempuan sebanyak 71,68 persen.

2.1.8. Rencana Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi pendukung bagi hampir seluruh aspek pembangunan. Dalam rencana pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat beberapa rencana pembangunan infrastruktur, baik yang bersumber dari APBD provinsi maupun dari APBN serta sumber-sumber pembiayaan lainnya baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah.

Berdasarkan arahan pembangunan kewilayahan di Provinsi Kalimantan Selatan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, maka



dapat diidentifikasi beberapa rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun rencana tersebut, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.94.
Rencana Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Lokasi Prioritas	Indikasi Rencana Pembangunan Infrastruktur
Kawasan Lumbang Pangan Rawa Batang Banyu: C1: Kabupaten Barito Kuala C2: Kabupaten Banjar C3: Kabupaten Tapin C4: Kabupaten Hulu Sungai Selatan C5: Kabupaten Hulu Sungai Tengah C6: Kabupaten Hulu Sungai Utara C7: Kabupaten Tabalong	Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui:
	– Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dengan output: sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara
	– Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output: kawasan karet
	– Penguatan pascapanen pangan nabati, dengan output: sarana pascapanen tanaman perkebunan
	– Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul
	– Pengembangan pengairan dan irigasi dengan output: pembangunan dan/atau pengembangan irigasi di Wilayah Sungai (WS) Cengal-Batulicin untuk meningkatkan ketahanan pangan
Provinsi Kalimantan Selatan	– Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output: intervensi cetak sawah di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong.
	Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui:
	– Pembangunan jembatan Laut-Pulau Kalimantan
	– Pembangunan jalan nasional, dengan output: pembangunan jalan strategis ruas Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah)-Serapat-Batas Kota Banjarmasin
	– Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, dengan output: Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan ruas Walangsi-Kaparkias dan Pagatan- Batulicin
	– Pengembangan/pembangunan/rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, dengan output: Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional di Kab. Kotabaru
	– Pengembangan pelabuhan logistik di Pulau Laut, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
– Pengembangan bandara, dengan output: Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan	
Provinsi Kalimantan Selatan	Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, melalui:
	– Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik
	– Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk
	– Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan



Lokasi Prioritas	Indikasi Rencana Pembangunan Infrastruktur
Provinsi Kalimantan Selatan	Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan Prasarana Sarana Umum (PSU) melalui fasilitasi pembangunan rumah baru, penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan pada perumahan tapak, penyaluran subsidi/bantuan pembiayaan rumah, serta penanganan permukiman kumuh, dengan output: bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI, rumah swadaya, dan MBR/pekerja, bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU) bidang perumahan; pembangunan, peningkatan, dan perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional dan kabupaten/kota; infrastruktur air minum berbasis masyarakat; fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka; pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh.

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis kinerja keuangan masa lalu berfokus pada penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah mencakup belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Analisis kinerja keuangan masa lalu yang dilakukan untuk proyeksi tahun-tahun mendatang memberikan gambaran yang penting dalam perencanaan pendanaan pembangunan daerah. Dengan memahami kapasitas pendapatan daerah secara menyeluruh, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, kinerja keuangan masa lalu penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, keputusan kebijakan yang diambil dapat didukung oleh data dan analisis yang akurat. Kinerja keuangan masa lalu Provinsi Kalimantan Selatan dijabarkan sebagai berikut:

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah biasanya diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis kinerja pelaksanaan APBD bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana APBD telah terlaksana



dengan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis ini, dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai berbagai kegiatan pembangunan.

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh gambaran bahwa selama kurun waktu Tahun 2020–2024, realisasi pendapatan daerah rata-rata pertumbuhannya meningkat yakni sebesar 18,08 persen. Adapun pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah terjadi kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,61 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada periode Tahun Anggaran 2020 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.940.404.641.480 dan Rp5.329.101.264.320 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 45,3% dan 43,0% terhadap total pendapatan.

Dari sisi pendapatan transfer, terjadi rata-rata pertumbuhan sebesar 19,41 persen, dengan kontribusi yang relatif stabil yaitu sekitar 53 persen terhadap total pendapatan daerah. Salah satu komponen yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 72,98 persen. Namun demikian, tingginya pertumbuhan ini sangat bergantung pada faktor eksternal sehingga bersifat fluktuatif dan tidak dapat dijadikan dasar yang stabil untuk pembiayaan pembangunan.

Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan pertumbuhan sangat terbatas, yaitu hanya sebesar 2,85 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) justru mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,94 persen, yang berpotensi menghambat pendanaan program tertentu. Sementara itu, komponen pendapatan hibah, meskipun secara keseluruhan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2023, sebelumnya mengalami penurunan sebesar 17,27 persen pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan ini cenderung tidak stabil. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu melakukan upaya strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, melalui penguatan basis PAD dan eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru.

Secara rinci pendapatan daerah tahunan yang mencerminkan rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan selatan Periode tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah.



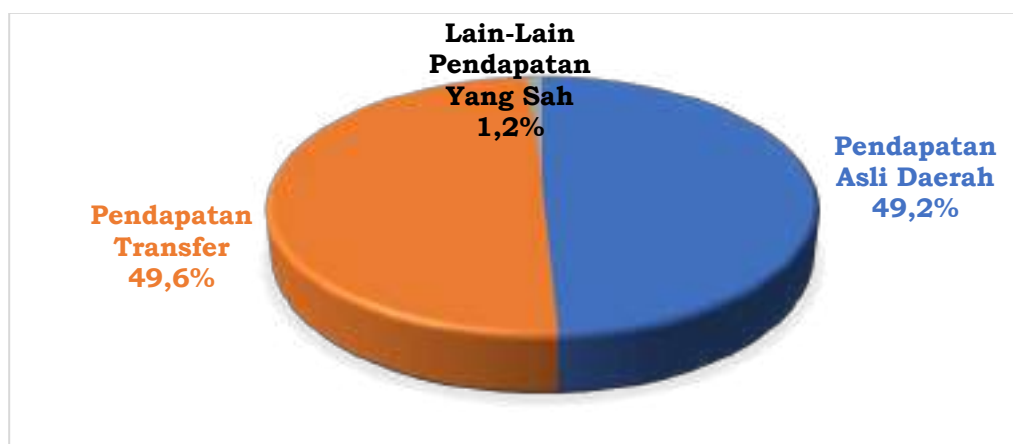
Tabel 2.95.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	6.487.758.292.203	6.623.086.492.762	8.155.596.924.194	9.476.592.022.959	12.405.575.231.420	18,08
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.940.404.641.480	3.564.914.942.945	4.558.042.727.438	4.460.479.914.336	5.329.101.264.320	16,61
3	Pendapatan Pajak Daerah	2.214.723.933.309	2.631.763.313.359	3.821.208.675.853	4.026.378.759.419	4.409.342.181.904	19,73
4	Pendapatan Retribusi Daerah	22.077.561.350	38.361.907.103	25.488.542.108	46.318.253.741	690.776.801.774	378,32
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.864.255.775	42.456.065.688	44.068.503.537	52.563.416.048	63.182.408.455	16,26
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	668.738.891.047	852.333.656.796	667.277.005.940	335.219.485.128	165.799.872.187	(23,64)
8	PENDAPATAN TRANSFER	3.462.610.316.972	2.972.176.267.366	3.526.413.444.092	4.956.932.119.431	6.571.611.850.976	19,41
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	3.398.763.335.972	2.964.090.024.366	3.500.428.437.092	4.909.872.296.431	6.571.611.850.976	19,85
10	Dana Bagi Hasil Pajak	192.688.520.562	213.921.649.415	198.371.453.253			
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.034.304.224.877	540.936.919.388	1.604.105.066.158	3.067.468.706.551	4.658.434.332.042	72,98
12	Dana Alokasi Umum	1.091.037.011.000	1.093.343.743.000	1.088.330.794.738	1.131.610.774.000	1.218.427.651.999	2,85
13	Dana Alokasi Khusus	1.080.733.579.533	1.115.887.712.563	609.621.122.943	710.792.815.880	694.749.866.935	(6,94)
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	63.846.981.000	8.086.243.000	25.985.007.000	47.059.823.000	14.745.157.000	36,61
16	Dana Insentif Daerah (DID)	63.846.981.000	8.086.243.000	25.985.007.000	47.059.823.000		28,78
17	Insentif Fiskal	-	-	-	-	14.745.157.000	-
18	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	277.173.649.119	-
19	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	277.173.649.119	-
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	84.743.333.751	85.995.282.451	71.140.752.664	59.179.989.192		56,80
21	Pendapatan Hibah	84.743.333.751	85.995.282.451	71.140.752.664	59.179.989.192		56,80

Sumber: LRA, Tahun 2020–2024



Berdasarkan tabel di atas proporsi rata-rata komponen Pendapatan Daerah selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer merupakan sumber terbesar, yaitu sebesar 49,6 persen. Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 49,2 persen, sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki proporsi terkecil, yakni sebesar 1,2 persen dari total pendapatan. Grafik berikut menyajikan rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah selama periode tersebut.



Gambar 2.66.
Rata-Rata Komposisi Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Tahun 2020-20204, diolah

B. Belanja Daerah

Selain mengevaluasi kinerja APBD dari pendapatan yang diperoleh, juga penting untuk melihat realisasi belanja daerah. Evaluasi kinerja suatu daerah bisa mempertimbangkan sejauh mana pengeluaran telah terealisasi. Semakin besar pengeluaran yang direalisasikan menandakan kinerja daerah yang lebih baik.

Belanja daerah periode Tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 14,40 persen. Pertumbuhan ini ditunjukkan pada belanja operasi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,33 persen. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.934.780.590.156 dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.186426620.270

Rata-rata pertumbuhan Belanja modal pada periode 2020-2024 sebesar 42,69 persen. Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp553.452.150,00 atau 81,62%. Belanja Modal Aset



Lainnya Tahun Anggaran 2021 merupakan belanja modal aset lainnya BLUD dan pada Tahun Anggaran 2020 nihil.

Secara keseluruhan, peningkatan signifikan pada belanja modal berkontribusi positif terhadap percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Dampaknya terhadap sektor riil dapat terlihat dalam bentuk Peningkatan daya saing wilayah melalui ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, Tumbuhnya sektor konstruksi, dan jasa transportasi, Meningkatnya serapan tenaga kerja melalui proyek-proyek fisik pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan belanja modal pada periode 2020–2024 memberikan kontribusi strategis terhadap pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor riil di daerah. Namun perlu dibarengi dengan efisiensi perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan, dan keberlanjutan pemanfaatannya agar mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Selanjutnya Belanja Transfer terjadi kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,54 persen, Pertumbuhan tersebut terjadi pada komponen Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke kab/Kota yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp1.243.584.302.639 dan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.412.868.158.782,00. Transfer bantuan Keuangan pada tahun anggaran 2021 terealisasi Rp3.500.000.000,00.

Secara rinci Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.96.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
B	BELANJA	6.630.726.561.522	6.434.676.072.255	7.341.779.488.458	8.653.780.279.866	11.128.259.358.458	14,40
1	BELANJA OPERASI	4.299.049.135.342	4.149.939.370.545	4.126.043.978.665	4.362.802.312.618	5.743.177.864.617	8,33
a	Belanja Pegawai	1.934.780.590.156	1.657.814.652.026	1.796.601.374.485	1.782.141.431.621	2.186.426.620.270	3,98
b	Belanja Barang dan Jasa	1.421.082.498.386	1.821.797.775.617	2.029.120.349.834	2.205.751.280.057	3.084.357.776.471	22,03
c	Belanja Hibah	940.903.081.000	670.326.942.902	295.202.254.347	362.441.800.940	454.197.967.876	(9,16)
d	Belanja Bantuan Sosial	-	-	5.120.000.000	12.467.800.000	18.195.500.000	
e	Belanja Bantuan Keuangan	2.282.965.800	-	-	-	-	-
3	BELANJA MODAL	778.100.855.805	956.156.711.887	1.070.308.780.573	2.032.123.253.406	2.968.103.203.659	42,69
a	Belanja Modal Tanah	15.732.123.634	82.799.005.475	65.656.438.118	206.404.346.632	8.160.939.717	130,98
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236.377.444.548	213.723.774.472	204.876.860.944	404.725.429.293	483.304.645.864	25,81
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.103.283.155	141.680.595.186	130.788.222.053	465.719.059.633	783.569.702.085	74,05
d	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	279.499.991.374	496.155.955.639	610.950.787.547	926.413.899.699	1.672.374.069.506	58,20
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	68.388.013.094	21.243.928.965	58.036.471.911	28.540.643.149	20.438.391.487	6,26
f	Belanja Modal Aset Lainnya	-	553.452.150	-	319.875.000	255.455.000	
4	BELANJA TIDAK TERDUGA	309.992.267.735	141.827.932.141	64.065.068.807	17.822.306.820	4.110.131.400	(64,55)
a	Belanja Tidak Terduga	309.992.267.735	141.827.932.141	64.065.068.807	17.822.306.820	4.110.131.400	(64,55)
5	BELANJA TRANSFER	1.243.584.302.639	1.186.752.057.682	2.081.361.660.413	2.241.032.407.022	2.412.868.158.782	21,54
6	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	1.243.584.302.639	1.183.252.057.682	2.081.361.660.413	2.241.032.407.022	2.412.868.158.782	21,60
a	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	1.243.584.302.639	1.183.252.057.682	2.081.361.660.413	2.241.032.407.022	2.412.868.158.782	21,60
7	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	3.500.000.000	-	-	-	
a	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	3.500.000.000	-	-	-	-

Sumber: LRA Tahun 2020-2024, diolah



Selanjutnya, berdasarkan data pada tabel di bawah dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 memiliki kemampuan keuangan sebesar Rp3.808.136.007.822 nilai tersebut masuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kemampuan keuangan daerahnya sebesar Rp10.505.359.405.98244 dan masih tetap dengan kategori kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.



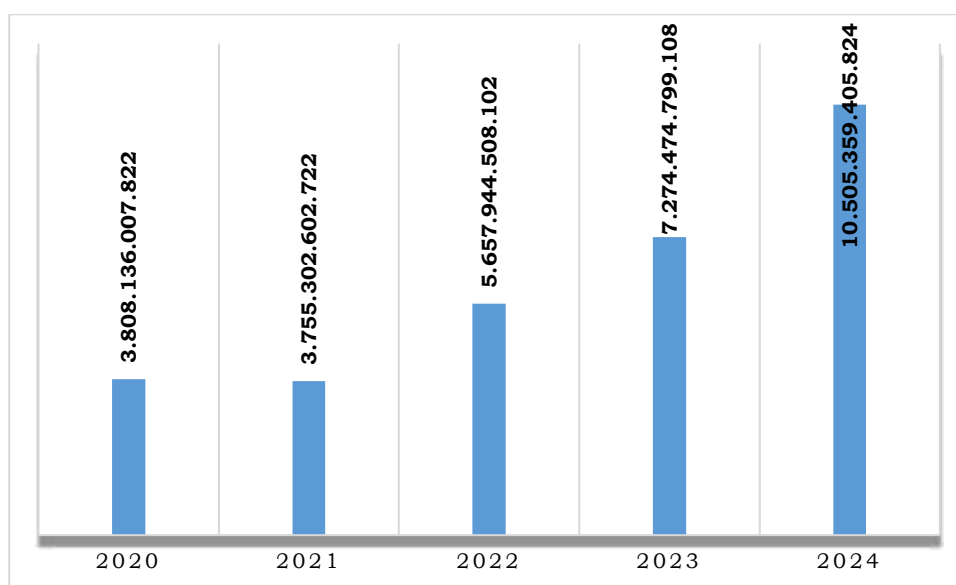
Tabel 2.97.
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pendapatan Umum Daerah					
1	Pendapatan Asli Daerah	2.940.404.641.480	3.564.914.942.945	4.558.042.727.438	4.460.479.914.336	5.329.101.264.320
2	Dana Bagi Hasil	1.226.992.745.439	754.858.568.803	1.802.476.519.411	3.067.468.706.551	4.658.434.332.042
3	Dana Alokasi Umum	1.091.037.011.000	1.093.343.743.000	1.088.330.794.738	1.131.610.774.000	1.218.427.651.999
	Jumlah A	5.258.434.397.919	5.413.117.254.748	7.448.850.041.587	8.659.559.394.887	11.205.963.248.361
B	Belanja Pegawai					
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	899.328.031.018	897.729.852.091	973.577.540.948	766.441.669.645	1.029.084.566.592,32
2	Tambahan Penghasilan PNS	550.970.359.079	760.084.799.935	817.327.992.537	618.642.926.134	700.603.842.537
	Jumlah B	1.450.298.390.097	1.657.814.652.026	1.790.905.533.485	1.385.084.595.779	700.603.842.537
	Kemampuan Keuangan Daerah	3.808.136.007.822	3.755.302.602.722	5.657.944.508.102	7.274.474.799.108	10.505.359.405.824

Sumber: Diolah dari LRA Prov. Kalsel, Tahun 2020-2024



Kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi berupa kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2021, terjadi penurunan sebesar Rp52.833.405.099 dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah kemampuan keuangan daerah sebesar Rp10.505.359.405.824, atau meningkat sebesar Rp3.230.884.606.716 dibandingkan dengan tahun 2023. Grafik berikut menyajikan kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 2.67.
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Tahun 2020-20204, diolah

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel di bawah ini menyajikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel tersebut memberi gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 103,97 persen.

Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 78,76 persen, peningkatan tersebut dikarenakan terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada komponen SiLPA pada periode



tahun 202, SiLPA Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.083.070.712.786. dan Rp424.812.527.050. SiLPA Tahun Anggaran 2022 naik sebesar Rp658.258.185.736. atau 154,95% dari SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp424.812.527.050. SiLPA Tahun Anggaran 2022 tersebut yang sudah terikat penggunaannya pada tahun 2023 pada kas di BLUD sebesar Rp257.232.627.495. dan Kas di SMA/SMK/SLB sebesar Rp8.408.600.378.

Sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 dan tahun 2023 Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.000.000.000. Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilukada yang akan dilaksanakan Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tahun 2024. Selanjutnya, komponen Penyertaan Modal pada tahun 2022 Rp55.561.250.000 dan pada tahun 2024 sebesar Rp57.488.500.000 nilai tersebut kepada PT. Bank Kalsel dan PT. Jamkrida Kalsel.



Tabel 2.98.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
C	PEMBIAYAAN DAERAH	391.307.375.861	236.402.106.543	269.253.277.050	1.399.418.763.316	1.704.720.263.316	103,97
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	391.307.375.861	248.402.106.543	424.814.527.050	1.562.255.763.316	1.762.208.763.316	78,76
a	Penggunaan SILPA	241.042.954.061	248.339.106.543	424.812.527.050	1.562.208.763.316	1.562.208.763.316	85,46
b	Pencairan Dana Cadangan	150.000.000.000	-	-	-	200.000.000.000	-
c	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Talangan	264.421.800	-	-	-	-	-
d	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	63.000.000	2.000.000	47.000.000	-	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	12.000.000.000	155.561.250.000	162.837.000.000	57.488.500.000	-
a	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	100.000.000.000	100.000.000.000	-	-
b	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	12.000.000.000	55.561.250.000	62.837.000.000	57.488.500.000	-
c	Pemberian Pinjaman Dana Talangan	-	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Tahun 2020-2024, diolah



2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas biasanya mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek, sementara rasio solvabilitas memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Dengan melakukan analisis neraca, pemerintah daerah dapat memahami posisi keuangan mereka secara lebih rinci dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

1. Aset

Aset Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,0 persen. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain aset lancar sebesar 38,6 persen, Investasi Jangka Panjang sebesar 7,9 persen, dan Aset Tetap sebesar 6,6 persen.

2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata turun sebesar 12,5 persen. Kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek dan tidak ada kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan dari neraca daerah periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah ekuitas rata-rata tumbuh sebesar 8,5 persen.

Gambaran neraca daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.99.
Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	44.972.940.321	89.305.644.883	817.425.523.067	1.316.372.196.280	1.283.462.891.373	243,1%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	239.085.526	10.787.500	3.961.846	975.023.333		
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-		
6	Kas di BLUD	158.588.444.671	306.857.521.661	257.232.627.495	241.278.001.739	241.278.001.739	17,8%
7	Kas di Sekolah	44.540.721.024	28.638.573.006	8.408.600.379	3.583.541.965		
8	Kas Lainnya	-	-	-	-		
9	Setara Kas	-	-	-	-		
10	Piutang						
11	Piutang Pajak Daerah	236.744.605.467	195.184.772.687	148.223.566.632	146.641.883.140	142.975.836.062	-11,3%
12	Penyisihan Piutang Pajak	-	195.184.772.687	- 148.223.566.632	- 146.641.883.140	- 142.975.836.062	-90,5%
13	Piutang Pajak Netto	-	-	-	-	-	
14	Piutang Retribusi	1.311.882.180	1.253.351.300	1.486.850.300	1.718.048.300	1.675.097.093	6,8%
15	Penyisihan Piutang Retribusi	- 1.050.001.680	- 1.062.142.985	- 1.390.692.390	- 1.670.449.350	- 1.628.688.116	12,4%
16	Piutang Retribusi Netto	261.880.501	191.208.315	96.157.910	47.598.950	46.408.976	-32,4%
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	1.623.233.832	-		
18	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-		
19	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	-	-	1.623.233.832	-		
20	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	12.245.214.195	59.386.063.377	21.207.923.686	46.658.636.573	45.492.170.658	109,5%
21	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	- 3.714.133.896	- 6.540.453.301	- 5.063.650.194	- 4.847.579.789	- 4.726.390.294	11,7%
22	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto	8.531.080.299	52.845.610.075	16.144.273.492	41.811.056.784	40.765.780.364	151,6%
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan	91.694.836.723	61.753.282.820	47.817.159.447	7.220		
24	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
25	Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Netto	91.694.836.723	61.753.282.820	47.817.159.447	7.220		
26	Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-		
27	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-		
28	Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Netto	-	-	-	-		
29	Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran	5.390.841	5.390.841	5.390.841	5.390.841	5.390.841	0,0%
30	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	- 5.390.841	- 5.390.841	- 5.390.841	- 5.390.841	- 5.390.841	
31	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-	-	-	-		
32	Piutang Dana Talangan	5.423.114.221	5.414.034.913	5.320.181.735	4.814.767.623	4.814.767.623	-2,9%
33	Penyisihan Piutang Dana Talangan	- 5.423.114.221	- 5.414.034.913	- 5.320.181.735	- 4.814.767.623	- 4.814.767.623	-2,9%
34	Piutang Dana Talangan Netto	-	-	-	-		
35	Beban Dibayar di Muka	461.644.444	87.377.778	281.944.444	165.277.778	165.277.778	25,1%
36	Persediaan	147.913.749.608	138.187.446.264	88.704.144.810	96.622.311.682	99.810.847.968	-7,5%
37	Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+13+16+19+22+25+28+31+34+35+36)	497.204.383.118	677.877.452.303	1.237.737.626.722	1.700.855.015.730	1.665.529.208.198	38,6%
38	INVESTASI JANGKA PANJANG						
39	Investasi Non Permanen						
40	Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	1.197.745.000	1.134.745.000	1.132.745.000	1.085.745.000	1.112.888.625	-1,8%
41	Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	- 913.058.700	- 912.743.700	- 910.743.700	- 863.743.700	- 842.150.108	-2,0%

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
42	Jumlah Investasi Non Permanen	284.686.300	222.001.300	222.001.300	222.001.300	270.738.518	0,0%
43	Investasi Permanen						
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	849.006.421.391	901.648.069.595	1.007.880.906.370	1.101.491.327.829	1.151.491.327.829	8,0%
45	Jumlah Investasi Permanen	849.006.421.391	901.648.069.595	1.007.880.906.370	1.101.491.327.829	1.151.491.327.829	8,0%
46	Total Investasi Jangka Panjang (42+45)	849.291.107.691	901.870.070.895	1.008.102.907.670	1.101.713.329.129	1.151.762.066.347	7,9%
47	ASET TETAP						
55	Jumlah Aset Tetap (48 s.d.54)	16.341.478.594.244	16.496.834.917.128	16.909.817.378.667	18.400.233.064.708	20.976.265.693.767	6,6%
56	DANA CADANGAN						
57	Dana Cadangan Pemilu Kepala Daerah	-	-	100.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	
58	Jumlah Dana Cadangan	-	-	100.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	
59	ASET LAINNYA						
60	Aset Tidak Berwujud	39.762.770.309	49.553.390.186	65.121.158.289	83.662.107.933	95.374.803.044	24,6%
61	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	- 41.610.512.664	- 43.320.064.421	- 49.384.873.440	28,4%
62	Aset Tidak Berwujud Netto	20.712.445.815	20.918.179.238	23.510.645.625	40.342.043.512	45.989.929.604	24,7%
63	Aset Lain-lain	879.959.540.865	901.857.172.613	901.761.954.923	240.705.912.991	240.705.912.991	-17,7%
64	Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	-	-	- 110.044.024.005	- 101.052.302.659	- 101.052.302.659	-0,4%
65	Aset Lain lain Netto	776.797.057.492	795.914.248.628	791.717.930.919	139.653.610.331	139.653.610.331	-20,1%
66	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	-	-	929.866.000.551	-		
67	Jumlah Aset Lainnya (62+65+66)	797.509.503.308	816.832.427.867	1.745.094.577.094	179.995.653.843	185.643.539.935	7,4%
68	TOTAL ASET (37+46+55+58+67)	18.485.483.588.360	18.893.414.868.193	21.000.752.490.154	21.582.797.063.411	24.178.929.769.729	7,0%
69	KEWAJIBAN						
70	Kewajiban Jangka Pendek						
71	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	2.085.000	-	-	-	-	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
72	Utang Dana BOS	5.386.199.482	5.386.199.482	5.386.199.482	5.651.199.482	5.509.919.495	0,6%
73	Pendapatan Diterima di Muka	234.587.179.958	299.376.242.169	194.810.989.411	11.761.285.353	12.055.317.487	-24,7%
74	Utang Belanja	658.157.512.733	733.542.923.754	714.484.619.199	752.271.094.199	733.464.316.844	2,9%
75	Utang Jangka Pendek Lainnya	644.732.810.663	645.168.223.285	647.971.087.189	20.779.261.136	20.259.779.608	-24,7%
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (71 s.d 75)	1.542.865.787.836	1.683.473.588.690	1.562.652.895.282	790.462.840.171	771.289.333.434	-12,5%
77	EKUITAS						
78	Ekuitas	16.942.617.800.523	17.209.941.279.503	19.438.099.594.872	20.792.334.223.240	23.407.640.436.295	8,5%
79	Jumlah Ekuitas	16.942.617.800.523	17.209.941.279.503	19.438.099.594.872	20.792.334.223.240	23.407.640.436.295	8,5%
80	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS (76+79)	18.485.483.588.359	18.893.414.868.193	21.000.752.490.154	21.582.797.063.411	24.178.929.769.729	7,0%

Sumber: Neraca Prov. Kalsel Tahun 2019–2023

*Data neraca terakhir yang digunakan dalam tabel ini adalah data tahun 2023, sesuai dengan data yang tersedia pada saat penyusunan.



Selanjutnya, berdasarkan data yang dijelaskan di atas, maka dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Adapun rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode tahun 2019 sampai tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (current ratio)	32,2	40,3	79,2	215,2	215,9
2	Rasio Cepat (quick ratio)	22,6	32,1	73,5	202,9	203,0
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Asset	0,083	0,089	0,074	0,037	0,032
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,091	0,098	0,080	0,038	0,033

Sumber: Hasil perhitungan, Tahun 2024

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Dengan tingkat likuiditas dan solvabilitas yang sangat baik, serta struktur utang yang rendah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengambil kebijakan fiskal yang lebih progresif, fleksibel, dan responsif terhadap tantangan pembangunan ke depan. Kekuatan posisi keuangan ini perlu dijaga melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas belanja dan hasil pembangunan. Secara rinci Analisis tersebut disajikan sebagai berikut.

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2020 adalah sebesar 32,2 dan terjadi kenaikan signifikan pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2024 mencapai 215,9. Rasio Lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Berdasarkan tabel di atas, *quick ratio* pada tahun 2020 sebesar 22,6 dan tahun 2023 *quick ratio* sebesar 203,0. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik. Pembayaran kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih likuid.



3. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2020 sebesar 0,08 dan pada tahun 2024 sebesar 0,03 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil. Rasio Total Utang terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva.

4. Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio Utang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebesar 0,09 serta periode tahun 2024 sebesar 0,03. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang.

2.2.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan yang merangkum berbagai aspek dari APBD, terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar dapat mendanai belanja daerah dengan cara yang efektif dan efisien.

Kebijakan pengelolaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2020 sampai dengan 2024 diuraikan sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendapatan

1. Optimalisasi pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum.
 - a. Optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui program kegiatan intensifikasi seperti penyesuaian tarif pajak daerah, pemutakhiran database potensi, serta upaya penagihan, kemudian mengintensifkan kerja sama kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota juga stakeholder.



- b. Optimalisasi pendapatan retribusi daerah melalui pengembangan pengelolaan pungutan berbasis elektronifikasi/digitalisasi.
2. Identifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di luar pajak daerah.
 - a. Mendorong upaya optimalisasi pendapatan pada sektor Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) kepada pemerintah daerah yang terdiri dari dealer, Jasa Raharja, kelapa sawit, dan karet melalui sosialisasi, FGD dan penyesuaian updating regulasi (UU Ciptaker) bersama instansi terkait.
 - b. Rasionalisasi estimasi target penerimaan pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Penghasil berdasarkan potensi.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan.
 - c. Mendorong pengembangan kualitas produk pelayanan pengelolaan pendapatan daerah pada semua Unit Kerja Penghasil secara bertahap dan berkesinambungan.
 - d. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) pelayanan dengan melengkapi dan atau penyesuaian terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang konvensional maupun berbasis digitalisasi, serta melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), khususnya pada Kantor Bersama SAMSAT se Kalimantan Selatan.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah
 - a. Percepatan penyampaian dan ketepatan penyajian pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi tepat guna dan berhasil guna.
 - b. Peningkatan kapasitas pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah berbasis teknologi informatika.
 - c. Pengukuran kinerja capaian pendapatan berdasarkan anggaran kas pendapatan berdasarkan *cashflow* (aliran kas) pada APBD tahun berjalan.

B. Kebijakan Belanja

1. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.



2. Melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RKP, serta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat.
4. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenban.
5. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
6. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).
7. Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Selain untuk pemberian uang/barang atau jasa, belanja hibah dialokasikan untuk Belanja Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta



dan SMA Swasta. Untuk BOS SMA Negeri dan Pendidikan Khusus dialokasikan pada belanja langsung dalam bentuk program kegiatan pada SOPD Dinas Pendidikan. BOS ini pengalokasiannya merupakan yang terbesar dalam belanja hibah.

C. Kebijakan Pembiayaan

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang mana penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

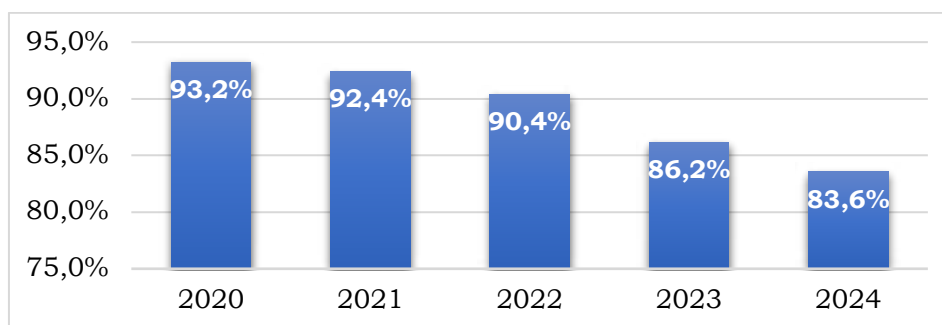
Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD di Kalimantan Selatan. Salah satu peran penting dimaksud yaitu untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus dari selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka untuk menutupinya digunakan dana yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah dan jumlah pembiayaan netto.

2.2.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran merupakan suatu analisis yang penting dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan telah direalisasikan, serta bagaimana efisiensi dan efektivitas penggunaannya.

a) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2020 sampai dengan periode tahun 2024 menyajikan mengenai tingkat realisasi belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi rata-rata pertumbuhan Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2020–2024 terjadi penurunan sebesar 3,5 persen.



Gambar 2.68.
Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: LRA 2020-2024, diolah

Dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 rata-rata penyerapan anggaran Belanja dan Transfer sebesar 89,1 persen. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.630.726.561.521 atau 93,24% dari anggarannya sebesar Rp7.111.270.836.294. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 tersebut turun sebesar Rp375.048.228.436. atau 5,35% dari realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp7.005.774.789.958.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.434.676.072.254. atau 92,39% dari anggarannya sebesar Rp6.964.338.025.282. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp196.050.489.266. atau 2,96% dari realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.630.726.561.521,56. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.128.259.358.456 atau 83,6,37% dari anggarannya sebesar Rp13.319.205.168.020. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp2.474.479.078.591 atau 29,6 % dari realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023. Dari data selama 5 tahun terakhir, diketahui bahwa tingkat realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 83,6%.



Tabel 2.101.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020			2021			2022		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
B	BELANJA	-			-			-		
a	BELANJA OPERASI									
1	Belanja Pegawai	2.073.938.715.651	1.934.780.590.156	93,3%	1.775.845.542.742	1.657.814.652.026	93,4%	1.967.843.037.248	1.796.601.374.485	91,3%
2	Belanja Barang dan Jasa	1.591.682.749.369	1.421.082.498.386	89,3%	2.027.870.672.799	1.821.797.775.617	89,8%	2.357.226.115.518	2.029.120.349.834	86,1%
3	Belanja Hibah	964.330.574.000	940.903.081.000	97,6%	704.362.930.913	670.326.942.902	95,2%	327.067.315.054	295.202.254.347	90,3%
4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	15.000.000	-	-	5.120.000.000	5.120.000.000	100,0%
5	Belanja Bantuan Keuangan	2.282.965.800	2.282.965.800	100,0%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	4.632.235.004.820	4.299.049.135.342	92,8%	4.508.094.146.454	4.149.939.370.545	92,1%	4.657.256.467.820	4.126.043.978.665	88,6%
b	BELANJA MODAL									
1	Belanja Modal Tanah	19.138.170.550	15.732.123.634	82,2%	87.241.800.750	82.799.005.475	94,9%	195.148.782.427	65.656.438.118	33,6%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.736.082.432	236.377.444.548	93,5%	253.149.050.636	213.723.774.472	84,4%	231.451.668.170	204.876.860.944	88,5%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.405.687.341	178.103.283.155	94,5%	169.985.882.197	141.680.595.186	83,3%	136.915.817.175	130.788.222.053	95,5%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	293.292.541.447	279.499.991.374	95,3%	524.429.411.228	496.155.955.639	94,6%	654.736.868.648	610.950.787.547	93,3%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.723.568.704	68.388.013.094	91,5%	33.258.537.487	21.243.928.965	63,9%	83.260.929.846	58.036.471.911	69,7%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	678.120.100	553.452.150	81,6%	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	828.296.050.474	778.100.855.805	93,9%	1.068.742.802.398	956.156.711.887	89,5%	1.301.514.066.266	1.070.308.780.573	82,2%
c	BELANJA TIDAK TERDUGA									
1	Belanja Tidak Terduga	381.239.781.000	309.992.267.735	81,3%	159.001.076.430	141.827.932.141	89,2%	82.198.567.528	64.065.068.807	77,9%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	381.239.781.000	309.992.267.735	81,3%	159.001.076.430	141.827.932.141	89,2%	82.198.567.528	64.065.068.807	77,9%
	JUMLAH BELANJA	5.841.770.836.294	5.387.142.258.883	92,2%	5.735.838.025.282	5.247.924.014.573	91,5%	6.040.969.101.614	5.260.417.828.045	87,1%
d	BELANJA TRANSFER									
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA									
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	1.269.500.000.000	1.243.584.302.639	98,0%	1.225.000.000.000	1.183.252.057.682	96,6%	2.083.269.766.717	2.081.361.660.413	99,9%
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota	1.269.500.000.000	1.243.584.302.639	98,0%	1.225.000.000.000	1.183.252.057.682	96,6%	2.083.269.766.717	2.081.361.660.413	99,9%
e	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN									

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No	Uraian	2020			2021			2022		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	3.500.000.000	3.500.000.000	100,0%	-	-	-
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	3.500.000.000	3.500.000.000	100,0%	-	-	-
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.269.500.000.000	1.243.584.302.639	98,0%	1.228.500.000.000	1.186.752.057.682	96,6%	2.083.269.766.717	2.081.361.660.413	99,9%
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.111.270.836.294	6.630.726.561.522	93,2%	6.964.338.025.282	6.434.676.072.255	92,4%	8.124.238.868.331	7.341.779.488.458	90,4%

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024, diolah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



Lanjutan Tabel 2.101

No	Uraian	2023		(%)	2024		(%)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi			
B	BELANJA	-							
a	BELANJA OPERASI								
1	Belanja Pegawai	2.210.466.021.804	1.782.141.431.621	80,6%	2.717.766.187.963	2.186.426.620.270	80,4%	-3,5%	87,8%
2	Belanja Barang dan Jasa	2.868.583.457.195	2.205.751.280.056	76,9%	3.505.141.720.566	3.084.357.776.470	88,0%	0,1%	86,0%
3	Belanja Hibah	370.002.069.716	362.441.800.940	98,0%	518.140.077.625	454.197.967.876	87,7%	-2,4%	93,7%
4	Belanja Bantuan Sosial	12.480.000.000	12.467.800.000	99,9%	18.405.000.000	18.195.500.000	98,9%		59,8%
5	Belanja Bantuan Keuangan								
	Jumlah Belanja Operasi	5.461.531.548.715	4.362.802.312.617	79,9%	6.759.452.986.154	5.743.177.864.616	85,0%	-2,0%	87,7%
b	BELANJA MODAL								
1	Belanja Modal Tanah	234.540.570.100	206.404.346.632	88,0%	229.883.649.100	8.160.939.717	3,6%	4,1%	60,5%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	448.950.686.999	404.725.429.293	90,1%	573.055.310.234	483.304.645.864	84,3%	-2,4%	88,2%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	486.064.798.255	465.719.059.633	95,8%	1.096.374.276.151	783.569.702.085	71,5%	-5,6%	88,1%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	991.574.499.727	926.413.899.699	93,4%	2.128.724.339.413	1.672.374.069.505	78,6%	-4,5%	91,0%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77.182.891.530	28.540.643.149	37,0%	21.536.933.974	20.438.391.487	94,9%	22,2%	71,4%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	326.000.000	319.875.000	98,1%	275.000.000	255.455.000	92,9%		54,5%
	Jumlah Belanja Modal	2.238.639.446.611	2.032.123.253.406	90,8%	4.049.849.508.872	2.968.103.203.658	73,3%	-5,4%	85,9%
c	BELANJA TIDAK TERDUGA								
1	Belanja Tidak Terduga	99.905.730.832	17.822.306.820	17,8%	97.034.514.212	4.110.131.400	4,2%		54,1%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	99.905.730.832	17.822.306.820	17,8%	97.034.514.212	4.110.131.400	4,2%		54,1%
	JUMLAH BELANJA	7.800.076.726.158	6.412.747.872.843	82,2%	10.906.337.009.238	8.715.391.199.674	79,9%	-3,5%	86,6%
d	BELANJA TRANSFER								0,0%
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA								0,0%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	2.241.032.407.023	2.241.032.407.022	100,0%	2.412.868.158.782	2.412.868.158.782	100,0%	0,5%	98,9%
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota	2.241.032.407.023	2.241.032.407.022	100,0%	2.412.868.158.782	2.412.868.158.782	100,0%	0,5%	98,9%
e	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



No	Uraian	2023			2024			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)		
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-							
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	-							20,0%
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	2.241.032.407.023	2.241.032.407.022	100,0%	2.412.868.158.782	2.412.868.158.782	100,0%	0,5%	98,9%
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	10.041.109.133.181	8.653.780.279.865	86,2%	13.319.205.168.020	11.128.259.358.456	83,6%	-2,7%	89,1%

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024, diolah



b) Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur disajikan dengan mempertimbangkan belanja wajib pegawai diluar tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan tunjangan tambahan penghasilan guru. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024. Realisasi Belanja wajib pegawai Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan maupun penurunan, dari tahun 2020 sebesar Rp1.767.307.270.156 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.002.645.524.250. Lebih rinci proporsi belanja ini disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.102.
Realisasi Belanja Pegawai Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
Belanja						
1)	Belanja Pegawai	1.934.780.590.156	1.741.852.879.242	1.800.992.066.750	2.294.874.332.960	2.186.426.620.270
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan PPPK	165.787.659.000	180.420.370.000	177.450.059.000	189.563.468.000	182.172.547.720
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD dan PPPK		514.747.000	679.085.501	900.792.000	650.003.300
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dan PPPK	1.550.763.000	1.915.687.000	3.020.090.000	4.725.250.000	958.545.000
2)	Jumlah Tunjangan Guru	134.898.000	182.850.804.000	181.149.234.501	195.189.510.000	183.781.096.020
3)	Jumlah Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru	1.767.307.270.156	1.376.666.018.242	1.439.372.683.249	1.905.396.104.960	2.002.645.524.250
	Presentase Belanja Pegawai	26,7%	21,4%	19,6%	22,0%	18,0%

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024, diolah

c) Proporsi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang

tersedia, dapat menutup defisit APBD dan memastikan kelangsungan keuangan dalam menjalankan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran dari periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi kenaikan, pada tahun 2020 sebesar Rp248.339.106.543 dan pada tahun 2024 sebesar Rp2.982.036.136.278 kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1.083.070.712.786,85. Apabila dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp424.812.527.050,45, berarti realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) meningkat sebesar Rp658.258.185.736,40 atau 154,95% dibandingkan Tahun Anggaran 2021.

Dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah dan adanya penghematan pada Belanja Daerah, maka sisa anggaran Tahun 2022 yang semula diperkirakan/dianggarkan sama, maka pada perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 terdapat Sisa Lebih Perhitungan sebesar Rp1.083.070.712.786,85 dan pada tahun 2023 sebesar Rp1.562.161.763.316. Tabel di bawah menyajikan penghitungan penutup defisit rill anggaran pada periode tahun 2020-2024.



Tabel 2.103.
Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	6.487.758.292.203	6.623.086.492.762	8.155.596.924.194	9.476.592.022.959	12.405.575.231.420
2	Belanja Daerah	6.630.726.561.522	6.434.676.072.255	7.341.779.488.458	8.653.780.279.866	11.128.259.358.458
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	12.000.000.000	155.561.250.000	162.837.000.000	57.488.500.000
A.	Defisit Riil	-142.968.269.318	176.410.420.508	658.256.185.736	659.974.743.093	1.219.827.372.962
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	241.042.954.061	248.339.106.543	424.812.527.050	1.562.208.763.316	1.562.208.763.316
2	Pencairan Dana Cadangan	150.000.000.000	-	-	-	200.000.000.000
3	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Talangan	264.421.800	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Dana Talangan	-	63.000.000	2.000.000	47.000.000	-
5	Koreksi					
B.	Total Realisasi Penerimaan	391.307.375.861	248.402.106.543	424.814.527.050	1.562.255.763.316	1.762.208.763.316
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		248.339.106.543	424.812.527.050	1.083.070.712.787	2.222.230.506.409	2.982.036.136.278

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Kalsel Tahun 2020–2024



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp248.339.106.543, meningkat menjadi Rp2.982.036.136.278 pada tahun 2024. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah. Bila ditelaah lebih dalam, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari Pelampauan Pendapatan dan Penghematan Belanja.



Tabel 2.104.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	241.042.954.061	248.339.106.543	424.812.527.050	1.562.208.763.316	1.562.208.763.316	85,5%
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	241.042.954.061	248.339.106.543	424.812.527.050	1.562.208.763.316	1.562.208.763.316	85,5%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalsel Tahun 2020–2024, diolah



Tabel 2.105.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024

URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024		Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	248.339.106.543		424.812.527.050		1.083.070.712.787		2.222.230.506.409		2.982.036.136.278		
Bersumber Dari:											
Pelampauan Pendapatan	232.469.590.029		104.912.425.977		300.609.332.913			13,5%			
Penghematan Belanja	454.628.577.411		529.661.953.027		782.459.379.873			35,2%			
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan											
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan											
Penghematan Pembiayaan Netto											

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Kalsel Tahun 2020–2024



2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Analisis kerangka pendanaan dengan tujuan menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan seperti belanja dan pengeluaran periodik wajib, serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2025, Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditargetkan sebesar Rp10.031.897.562.453. APBD tahun 2025 menjadi tahun dasar dalam melakukan proyeksi pendapatan 2026-2030. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan kenaikan sebesar 1,5 persen. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen pendapatan yang memiliki peningkatan terbesar 1,9 persen, pendapatan transfer sebesar 1,2 persen, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan mengalami pertumbuhan kenaikan sebesar 1,4 persen.



Tabel 2.106.
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2030

Kode	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	PENDAPATAN DAERAH	10.031.897.562.453	9.480.011.540.546	9.563.845.512.583	9.721.603.875.985	9.885.275.651.250	10.059.596.798.807	1,5%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.629.579.951.953	4.576.252.521.764	4.665.039.186.990	4.746.138.765.116	4.835.394.141.487	4.925.206.977.222	1,9%
4.1.01	Pajak Daerah	3.711.664.179.990	3.745.635.821.790	3.789.642.180.008	3.829.183.601.808	3.869.260.437.826	3.909.873.042.204	1,1%
4.1.02	Retribusi Daerah	687.329.954.307	700.351.936.428	738.053.025.803	776.384.345.620	817.077.052.915	857.474.646.452	5,2%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.101.474.476	70.406.749.492	73.379.876.277	75.832.940.590	83.514.324.672	91.635.518.069	6,9%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	156.484.343.180	59.858.014.054	63.964.104.902	64.737.877.098	65.542.326.074	66.223.770.497	2,6%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.385.678.960.000	4.886.887.427.175	4.881.698.531.704	4.958.117.807.866	5.032.291.344.517	5.116.553.394.026	1,2%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.185.678.960.000	4.626.887.427.175	4.681.698.531.704	4.758.117.807.866	5.032.291.344.517	5.116.553.394.026	2,6%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.489.293.000	6.813.757.650	7.154.445.533	7.512.167.809	7.887.776.200	8.282.165.010	5,0%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.413.740.066.000	2.813.736.399.000	2.831.087.415.358	2.869.251.583.948	3.104.354.692.281	3.148.710.162.554	2,9%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.248.888.342.000	1.244.776.011.525	1.275.895.411.813	1.307.792.797.108	1.340.487.617.036	1.373.999.807.462	2,5%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	516.561.259.000	561.561.259.000	567.561.259.000	573.561.259.000	579.561.259.000	585.561.259.000	1,1%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.000.000.000	260.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	-	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	200.000.000.000	260.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.638.650.500	16.871.591.607	17.107.793.889	17.347.303.004	17.590.165.246	17.836.427.559	1,4%
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.638.650.500	16.871.591.607	17.107.793.889	17.347.303.004	17.590.165.246	17.836.427.559	1,4%

Sumber: Hasil proyeksi, 2025



B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Lebih lanjut, belanja pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,1 persen setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan positif ditunjukkan oleh komponen belanja operasi sebesar 0,3 persen dan belanja modal sebesar 3,6 persen serta belanja bagi hasil sebesar 0,5 persen. Sementara Belanja Tidak Terduga secara umum diproyeksikan konstan sebesar Rp100 miliar per tahun. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2029, yaitu menjadi Rp200 miliar, atau naik 100 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Terduga selama periode lima tahun mencapai 12,5 persen.

Kenaikan pada tahun 2029 tersebut secara khusus disebabkan oleh alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2029. Kebutuhan pendanaan Pilkada pada umumnya ditampung melalui Belanja Tidak Terduga untuk menjamin fleksibilitas, kesiapsiagaan anggaran, serta pengalokasian dana kontingensi terhadap kegiatan yang bersifat khusus, dan mendesak. Adapun proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, ditunjukkan pada tabel di bawah.



Tabel 2.107.
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2030

KODE	URAIAN	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	BELANJA DAERAH	11.728.295.956.102	11.132.749.974.354	11.174.015.485.552	11.390.269.599.622	11.513.474.731.797	11.648.340.902.343	1,1%
5.1	BELANJA OPERASI	6.850.333.234.866	6.849.795.592.395	6.835.285.147.430	6.831.913.288.793	6.932.637.538.185	6.934.955.788.184	0,3%
5.1.01	Belanja Pegawai	3.222.405.820.646	3.131.169.992.819	3.209.449.242.640	3.289.685.473.706	3.371.927.610.548	3.456.225.800.812	2,5%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.346.415.097.220	3.430.075.474.651	3.344.323.587.790	3.260.715.498.087	3.279.197.610.637	3.197.217.670.372	-1,7%
5.1.05	Belanja Hibah	258.824.817.000	265.295.437.425	258.824.817.000	258.824.817.000	258.824.817.000	258.824.817.000	-0,6%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.687.500.000	23.254.687.500	22.687.500.000	22.687.500.000	22.687.500.000	22.687.500.000	-0,6%
5.2	BELANJA MODAL	2.931.691.654.845	2.682.954.381.959	2.731.230.338.122	2.943.318.810.829	2.858.224.506.112	3.083.159.363.221	3,6%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	256.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	12,5%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	256.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	12,5%
5.4	BELANJA TRANSFER	1.690.271.066.391	1.500.000.000.000	1.507.500.000.000	1.515.037.500.000	1.522.612.687.500	1.530.225.750.938	0,5%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.690.271.066.391	1.500.000.000.000	1.507.500.000.000	1.515.037.500.000	1.522.612.687.500	1.530.225.750.938	0,5%

Sumber: hasil proyeksi, 2025



2.2.2.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Berdasarkan hasil analisis dari realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam periode tahun 2020-2024, maka dapat dilakukan proyeksi untuk pembangunan jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Rata-rata penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 0,9 persen selama kurun waktu lima tahun. Penurunan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang diproyeksikan turun sebesar 2,5 persen serta pencairan dana cadangan sebesar Rp100.000.000.000 yang terjadi pada tahun 2028 hingga tahun 2030. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mencakup penyertaan modal sebesar Rp50.000.000.000 pada periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.



Tabel 2.108.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030

Kode	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	1.696.398.393.649	1.652.738.433.808	1.610.169.972.963	1.668.665.723.639	1.628.199.080.548	1.588.744.103.534	-0,9%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.746.398.393.649	1.702.738.433.808	1.660.169.972.963	1.718.665.723.639	1.678.199.080.548	1.638.744.103.534	-0,9%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.746.398.393.649	1.702.738.433.808	1.660.169.972.963	1.618.665.723.639	1.578.199.080.548	1.538.744.103.534	-2,5%
6.2.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0,0%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0,0%

Sumber: hasil proyeksi, 2025



2.2.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

2.2.3.1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA untuk pembangunan jangka menengah tahun 2026-2030 dilakukan berdasarkan APBD tahun 2025. Proyeksi besaran SiLPA periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 rata-rata turun sebesar 2,50 persen per tahun. Target SiLPA pada tabel di bawah menunjukkan angka yang semakin kecil dari tahun ke tahun. SiLPA diproyeksikan berasal dari efisiensi belanja pada pengadaan barang/jasa dan pelampauan target pendapatan.

Tabel 2.109.
Proyeksi SiLPA Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2026-2030

Tahun	SiLPA
	(Rp)
2026	1.702.738.433.808
2027	1.660.169.972.963
2028	1.618.665.723.639
2029	1.578.199.080.548
2030	1.538.744.103.534

Sumber: Hasil proyeksi, 2025

2.2.3.2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sampai 2030 dilakukan berdasarkan pengertian belanja wajib sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024. Proyeksi kebutuhan pengeluaran wajib Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 sebesar Rp8.787.507.578.496 dan meningkat menjadi sebesar Rp10.760.282.573.481 tahun 2030. Rincian komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.110.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi									
		2026	%	2027	%	2028	%	2029	%	2030	%
	Total Belanja	11.132.749.974.354		11.174.015.485.546		11.390.269.599.624		11.513.474.731.798		11.648.340.902.342	
A	Belanja Wajib	8.787.507.578.496	78,9%	9.239.105.108.971	82,7%	9.717.298.627.215	85,3%	10.223.763.232.189	88,8%	10.760.282.573.481	92,4%
1	Belanja Pegawai	3.131.169.992.819	28,9%	3.209.449.242.640	29,5%	3.289.685.473.706	29,7%	3.371.927.610.548	30,2%	3.456.225.800.812	30,6%
2	Pendidikan	2.185.513.863.463	19,6%	2.329.757.778.452	20,8%	2.483.521.791.830	21,8%	2.647.434.230.091	23,0%	2.822.164.889.277	24,2%
3	Infrastruktur	3.318.929.592.212	34,5%	3.537.978.945.298	36,6%	3.771.485.555.688	38,2%	4.020.403.602.363	40,2%	4.285.750.240.119	42,4%
4	Peningkatan Kapasitas SDM	66.606.393.650	0,6%	71.002.415.631	0,6%	75.688.575.063	0,7%	80.684.021.017	0,7%	86.009.166.404	0,7%
5	Penguatan APIP	85.287.736.351	0,8%	90.916.726.950	0,8%	96.917.230.929	0,9%	103.313.768.170	0,9%	110.132.476.870	0,9%
B	Pengeluaran Pembiayaan										
1	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	0,4%	50.000.000.000	0,4%	50.000.000.000	0,4%	50.000.000.000	0,4%	50.000.000.000	0,4%
	Total Belanja Wajib Mengikat	8.787.507.578.496	78,9%	9.239.105.108.971	82,7%	9.717.298.627.215	85,3%	10.223.763.232.189	88,8%	10.760.282.573.481	92,4%

Sumber: Hasil proyeksi, 2025



2.2.3.3. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Proyeksi belanja Tahun 2025 sampai dengan 2030 disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemuktahirannya. Kapasitas kemampuan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta Belanja dapat diproyeksikan kapasitas kemampuan keuangan daerah Tahun 2026-2030 untuk mendanai pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil analisis, total Penerimaan diproyeksikan meningkat dari Rp11.182.749.974.354 pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp11.698.340.902.341 pada tahun 2030. Sementara pada sisi Pengeluaran diproyeksikan pada tahun 2026 sebesar Rp11.182.749.974.354 dan tahun 2030 mencapai Rp11.698.340.902.342 Adapun proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan tahun 2025-2030 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.111.
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030

KODE	URAIAN	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	PENDAPATAN DAERAH	10.031.897.562.453	9.480.011.540.546	9.563.845.512.583	9.721.603.875.985	9.885.275.651.250	10.059.596.798.807	1,5%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.629.579.951.953	4.576.252.521.764	4.665.039.186.990	4.746.138.765.116	4.835.394.141.487	4.925.206.977.222	1,9%
4.1.01	Pajak Daerah	3.711.664.179.990	3.745.635.821.790	3.789.642.180.008	3.829.183.601.808	3.869.260.437.826	3.909.873.042.204	1,1%
4.1.02	Retribusi Daerah	687.329.954.307	700.351.936.428	738.053.025.803	776.384.345.620	817.077.052.915	857.474.646.452	5,2%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.101.474.476	70.406.749.492	73.379.876.277	75.832.940.590	83.514.324.672	91.635.518.069	6,9%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	156.484.343.180	59.858.014.054	63.964.104.902	64.737.877.098	65.542.326.074	66.223.770.497	2,6%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.385.678.960.000	4.886.887.427.175	4.881.698.531.704	4.958.117.807.866	5.032.291.344.517	5.116.553.394.026	1,2%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.185.678.960.000	4.626.887.427.175	4.681.698.531.704	4.758.117.807.866	5.032.291.344.517	5.116.553.394.026	2,6%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.489.293.000	6.813.757.650	7.154.445.533	7.512.167.809	7.887.776.200	8.282.165.010	
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.413.740.066.000	2.813.736.399.000	2.831.087.415.358	2.869.251.583.948	3.104.354.692.281	3.148.710.162.554	2,9%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.248.888.342.000	1.244.776.011.525	1.275.895.411.813	1.307.792.797.108	1.340.487.617.036	1.373.999.807.462	2,5%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	516.561.259.000	561.561.259.000	567.561.259.000	573.561.259.000	579.561.259.000	585.561.259.000	1,1%
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.000.000.000	260.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	-	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	200.000.000.000	260.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.638.650.500	16.871.591.607	17.107.793.889	17.347.303.004	17.590.165.246	17.836.427.559	1,4%
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.638.650.500	16.871.591.607	17.107.793.889	17.347.303.004	17.590.165.246	17.836.427.559	1,4%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.746.398.393.649	1.702.738.433.808	1.660.169.972.963	1.718.665.723.639	1.678.199.080.548	1.638.744.103.534	-0,9%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.746.398.393.649	1.702.738.433.808	1.660.169.972.963	1.618.665.723.639	1.578.199.080.548	1.538.744.103.534	-2,5%
6.2.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	-
	Total Penerimaan	11.778.295.956.102	11.182.749.974.354	11.224.015.485.546	11.440.269.599.624	11.563.474.731.798	11.698.340.902.341	1,1%
		-	-	-	-	-	-	
5	BELANJA DAERAH	11.728.295.956.102	11.132.749.974.354	11.174.015.485.546	11.390.269.599.624	11.513.474.731.798	11.648.340.902.342	1,1%
5.1	BELANJA OPERASI	6.850.333.234.866	6.849.795.592.395	6.835.285.147.424	6.831.913.288.795	6.932.637.538.186	6.934.955.788.183	0,3%
5.1.01	Belanja Pegawai	3.222.405.820.646	3.131.169.992.819	3.209.449.242.640	3.289.685.473.706	3.371.927.610.548	3.456.225.800.812	2,5%

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



KODE	URAIAN	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.346.415.097.220	3.430.075.474.651	3.344.323.587.784	3.260.715.498.090	3.279.197.610.637	3.197.217.670.371	-1,7%
5.1.05	Belanja Hibah	258.824.817.000	265.295.437.425	258.824.817.000	258.824.817.000	258.824.817.000	258.824.817.000	-0,6%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.687.500.000	23.254.687.500	22.687.500.000	22.687.500.000	22.687.500.000	22.687.500.000	-0,6%
5.2	BELANJA MODAL	2.931.691.654.845	2.682.954.381.959	2.731.230.338.122	2.943.318.810.829	2.858.224.506.112	3.083.159.363.221	3,6%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	256.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	12,5%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	256.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	12,5%
5.4	BELANJA TRANSFER	1.690.271.066.391	1.500.000.000.000	1.507.500.000.000	1.515.037.500.000	1.522.612.687.500	1.530.225.750.938	0,5%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.690.271.066.391	1.500.000.000.000	1.507.500.000.000	1.515.037.500.000	1.522.612.687.500	1.530.225.750.938	0,5%
		-	-	-	-	-	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0,0%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0,0%
	Total Pengeluaran	11.778.295.956.102	11.182.749.974.354	11.224.015.485.546	11.440.269.599.624	11.563.474.731.798	11.698.340.902.342	1,1%

Sumber: Hasil proyeksi, 2025



2.2.3.4. Proyeksi Neraca Daerah

Berdasarkan proyeksi kapasitas keuangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 hingga 2030, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,6 persen, posisi keuangan daerah diperkirakan mengalami perkembangan pada beberapa komponen neraca. Aset daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,8 persen per tahun dan ekuitas meningkat sebesar 12,04 persen. Sementara kewajiban menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata sebesar 2,41 persen per tahun.

Perkembangan positif pada komponen aset dan ekuitas mencerminkan prospek keuangan daerah yang semakin kuat, serta kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Peningkatan aset menunjukkan adanya penambahan nilai ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk infrastruktur maupun investasi jangka panjang. Sementara itu, peningkatan ekuitas mencerminkan kinerja akumulatif yang sehat dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan daerah. Di sisi lain, penurunan kewajiban menandakan pengelolaan utang yang lebih efisien, serta upaya konsisten dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.



Tabel 2.112.
Proyeksi Neraca Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	ASET	27.142.232.437.966	30.518.507.682.360	34.365.423.467.445	38.748.724.303.141	42.342.387.651.749	47.983.859.708.559	12,08%
a	ASET LANCAR	1.635.716.089.163	1.606.839.336.067	1.578.881.844.014	1.551.827.143.771	1.525.659.392.742	1.500.363.366.393	-1,71%
1	Kas di Kas Daerah	1.251.376.319.089	1.220.091.911.111	1.189.589.613.334	1.159.849.873.000	1.130.853.626.175	1.102.582.285.521	-2,50%
2	Kas di BLUD	241.278.001.739	241.278.001.739	241.278.001.739	241.278.001.739	241.278.001.739	241.278.001.739	0,00%
3	Piutang	39.791.884.607	38.797.087.492	37.827.160.304	36.881.481.297	35.959.444.264	35.060.458.158	-2,50%
4	Beban Dibayar dimuka	165.277.778	165.277.778	165.277.778	165.277.778	165.277.778	165.277.778	0,00%
5	Persediaan	103.104.605.951	106.507.057.947	110.021.790.860	113.652.509.958	117.403.042.787	121.277.343.199	3,30%
b	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.201.810.942.315	1.251.859.987.495	1.301.909.232.434	1.351.958.707.785	1.402.008.444.327	1.452.058.472.981	3,86%
1	Investasi Non Permanen	319.614.486	368.659.666	417.904.605	467.379.956	517.116.497	567.145.152	12,17%
2	Investasi Permanen	1.201.491.327.829	1.251.491.327.829	1.301.491.327.829	1.351.491.327.829	1.401.491.327.829	1.451.491.327.829	3,85%
b	ASET TETAP	23.912.942.890.894	27.260.754.895.619	31.077.260.581.006	35.428.077.062.347	40.388.007.851.075	46.042.328.950.226	14,00%
c	DANA CADANGAN	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	0,00%
d	ASET LAINNYA	192.082.130.080	199.422.122.845	207.789.714.596	217.328.769.194	228.203.291.434	240.600.246.789	4,61%
B	KEWAJIBAN	752.609.865.972	734.412.454.344	716.685.423.882	699.417.401.204	682.597.306.916	666.214.348.504	-2,41%
1	Kewajiban Jangka Pendek	752.609.865.972	734.412.454.344	716.685.423.882	699.417.401.204	682.597.306.916	666.214.348.504	-2,41%
C	EKUITAS	26.389.622.571.993	29.784.095.228.015	33.648.738.043.563	38.049.306.901.936	41.659.790.344.833	47.317.645.360.055	12,40%
D	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27.142.232.437.966	30.518.507.682.360	34.365.423.467.445	38.748.724.303.141	42.342.387.651.749	47.983.859.708.559	12,08%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025



2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, ditemui berbagai kendala dan permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “kesenjangan” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi pada saat perencanaan dilakukan. Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan perlu ditangani. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam 4 (empat) kelompok yakni permasalahan pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum.

2.3.1.1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Subbab ini memuat permasalahan pada aspek geografi dan demografi yang diidentifikasi berdasarkan hasil pencapaian pembangunan pada aspek geografi dan demografi di Kalimantan Selatan. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan bencana untuk mengimbangi potensi ancaman bencana.

Beberapa ancaman bencana yang perlu diwaspadai yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, dan tsunami. Walaupun nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan cenderung menurun dan berada pada kriteria Sedang, namun dengan berkaca pada kejadian bencana beberapa tahun terakhir maka sangat diperlukan pengelolaan bencana yang terpadu. Disamping itu, pada tahun 2024 masih terdapat kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) kategori tinggi diantaranya Tabalong, Barito Kuala, Kotabaru dan Tanah Laut.



2. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya potensi bencana.

Kondisi lingkungan di Kalimantan Selatan diindikasikan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan semakin baiknya pengelolaan lingkungan. Walau demikian, capaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sebab pembangunan daerah tak dipungkiri memiliki dampak negatif pada lingkungan hidup, sosial dan budaya. Komponen IKLH Kalimantan Selatan yang perlu diwaspadai adalah Indeks kualitas air laut yang fluktuatif selama beberapa tahun terakhir dan mengalami penurunan di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, penurunan kualitas air sungai juga perlu mendapatkan perhatian.

Kalimantan Selatan menghadapi berbagai dampak perubahan iklim yang berdampak pada aspek sosial dan lingkungan. Berdasarkan data dari BMKG dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), wilayah ini menunjukkan perubahan signifikan dalam iklim, terutama peningkatan suhu udara. Kalimantan Selatan juga menghadapi peningkatan potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang semakin signifikan dengan pola curah hujan yang melebihi rata-rata tahunan.

Beberapa tantangan seperti alih fungsi lahan, fenomena El Nino, dan degradasi lingkungan perlu terus diatasi untuk menjaga keberlanjutan pangan, air, dan energi di masa mendatang. Alih fungsi lahan yang tidak terencana, seperti pembukaan hutan atau konversi lahan gambut menjadi tantangan dan permasalahan bila tidak ditangani dengan baik.

3. Kepadatan Penduduk Cenderung Meningkat

Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun secara otomatis meningkatkan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi terkini kepadatan penduduk berdasarkan data tahun 2024 mencapai 115,08 jiwa per km² atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang hanya 113,70 jiwa per km². Dibandingkan dengan provinsi lainnya, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki angka kepadatan penduduk yang paling tinggi di seluruh regional Kalimantan. Bertambahnya penduduk yang



memasuki periode bonus demografi menyebabkan meningkatnya kepadatan wilayah, meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana dasar dan wilayah serta fasilitas umum dan sosial, meningkatnya kebutuhan terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta berbagai hal lainnya yang bila tidak diantisipasi sejak dini akan menimbulkan masalah perkotaan dan memperburuk kualitas hidup masyarakat.

2.3.1.2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Subbab ini memuat permasalahan yang berkaitan dengan indikator-indikator yang mewakili gambaran kesejahteraan masyarakat. Hasil identifikasi kinerja pembangunan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut:

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan yang Masih Rentan

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha selama 5 (lima) tahun terakhir masih didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Secara total, kelima lapangan usaha tersebut mencapai 68,88 persen, 12 lapangan usaha lainnya berbagi nilai sebesar 31,12 persen.

Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian daerah menjadi salah satu yang membuat struktur ekonomi berkelanjutan masih belum kuat. Pada struktur perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2024 sektor ini mengalami penurunan hingga menjadi 29,47 persen.

Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya dan akan habis. Keadaan tersebut berpotensi memiliki imbas terhadap ketersediaan tenaga kerja dan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat, jika tidak diantisipasi dengan memperbarui sektor-sektor perekonomian yang



baru. Perlu adanya kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri, Pertanian dan Pariwisata dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk kedepannya.

2. Belum kokohnya perekonomian daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalsel selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan posisi pada tahun 2024 mencapai 5,05%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 berada pada urutan kedua tertinggi dari 5 (lima) provinsi di Pulau Kalimantan. Meski terjadi peningkatan pada tahun 2024 dan menempati peringkat dua besar, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 5,11%.

Perekonomian Kalimantan Selatan masih didominasi oleh sektor pertambangan dan galian, yang diikuti dengan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Dominasi sektor pertambangan dan penggalian harus dikurangi secara bertahap dan diupayakan untuk mengembangkan ke sektor unggulan dan potensial lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan jasa. Dengan dukungan inovasi dan IPTEK, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan berkembangnya hilirisasi di seluruh Kalimantan Selatan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3. Terjadi Penurunan Pengeluaran konsumsi non pangan

Penurunan Pengeluaran konsumsi non pangan digambarkan dengan menurunnya indikator Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, dimana pada tahun 2020 yaitu mencapai 49,38% dan menurun sampai 2024 menjadi 47,85%.

4. Potensi Fluktuasi Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan yang dapat dilihat dari indikator Gini Ratio menunjukkan kecenderungan menurun selama 5 (lima) tahun terakhir, walau sempat meningkat pada tahun 2023. Secara umum, penduduk di Kalimantan Selatan memiliki pendapatan yang tidak terlalu timpang jika dibandingkan dengan rata-rata nasional berdasarkan data tahun 2024 dan di regional Pulau Kalimantan. Walau demikian, melihat data beberapa tahun terakhir yang menunjukkan fluktuasi, menandakan bahwa gini ratio di Kalimantan Selatan masih rentan dan perlu tetap mendapat perhatian.



5. Belum optimalnya penanganan kemiskinan walaupun sudah berada pada peringkat 2 terendah se-Indonesia

Penanganan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan yang diukur oleh indikator Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan pada 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dengan kondisi tahun 2024 mencapai 4,02 persen. Walau upaya penanganan kemiskinan di Kalimantan Selatan dinilai cukup berhasil dengan berada pada peringkat kedua terendah setelah Provinsi Bali, namun bila ditelaah lebih dalam maka masih terdapat beberapa daerah kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi bila dibandingkan tingkat kemiskinan provinsi.

6. Masih Tingginya Pengangguran

Pengangguran masih menjadi salah satu masalah utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Selatan. Berbanding terbalik dengan kemiskinan yang cukup rendah, kondisi pengangguran di Kalimantan Selatan dapat dikatakan masih cukup tinggi baik di tingkat nasional maupun regional Kalimantan.

Penanganan masalah pengangguran masih harus terus diupayakan sebab indikator tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan masih menunjukkan angka 4,20 persen pada tahun 2024. Posisi ini menempatkan Kalimantan Selatan pada posisi 21 terendah se-Indonesia dan posisi ketiga terendah di Pulau Kalimantan.

Lebih lanjut, di kabupaten/kota menunjukkan masih adanya sebagian daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka diatas provinsi. Tentu hal ini akan mempengaruhi kondisi pengangguran di provinsi bila tidak ditangani secara tepat, cepat, dan terpadu lintas sektor.

Salah satu indikasi rendahnya daya saing maupun kualitas tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan adalah variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 38,44 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 13,86 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan tahun sebelumnya.



7. Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020-2024 mengalami tren peningkatan di setiap tahunnya, dimana IPM pada tahun 2024 sudah mencapai 75,19 dan berada di atas nasional (75,02). Meskipun angka IPM Provinsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun di kabupaten/kota menunjukkan masih adanya sebagian daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibawah provinsi.

Salah satu permasalahan pembangunan SDM di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik pendidikan formal maupun informal.

Selanjutnya, terkait pembangunan SDM, Kalimantan Selatan masih menemui masalah tenaga kerja. Permasalahan yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Masih rendahnya daya saing juga diiringi antara lain ditunjukkan dengan belum optimalnya keterampilan sumberdaya manusia terutama dalam menghadapi tantangan kerja kedepan. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, pengangguran, hingga kemiskinan.

8. Belum optimalnya kondisi kualitas modal manusia

Kondisi kualitas modal manusia yang diukur oleh indikator Indeks Modal Manusia pada pada tahun 2023 yaitu hanya mencapai 0,53 atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 0,522. Meskipun terjadi peningkatan, namun Indeks Modal Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu untuk dioptimalkan kembali. Belum optimalnya kondisi Indeks Modal Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, kurang gizi, Ketimpangan pendapatan dan pemerataan pembangunan.

B. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Belum optimalnya Rata-Rata Lama Sekolah

Dalam penelaahan permasalahan pendidikan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang



dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah hanya mencapai 8,62 tahun yang berarti rata-rata penduduk Kalimantan Selatan hanya mengenyam pendidikan sampai bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8. Lebih lanjut, di kabupaten/kota menunjukkan masih adanya sebagian daerah yang memiliki Angka Rata-Rata Lama Sekolah dibawah provinsi.

C. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Masih belum optimalnya upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dan 2024 yang hanya mencapai 73,53 dan berada pada posisi terendah bila dibandingkan IKUB provinsi lain di Pulau Kalimantan dan juga masih di bawah IKUB nasional.
2. Masih rendahnya Pembangunan Kebudayaan
Pembangunan Kebudayaan yang diukur oleh Indeks Pembangunan Kebudayaan fluktuasi sejak tahun 2020 sampai 2023 dan meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Namun demikian, capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2023 dan 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 58,64.

D. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Masalah ketimpangan gender masih mewarnai pembangunan di Kalimantan Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalimantan Selatan tahun 2024 yang masih berada di angka 0,486. Angka ini lebih tinggi dibanding nasional yang hanya mencapai 0,421. Hal ini menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan, kesetaraan gender masih perlu upaya yang besar.
2. Peran perempuan dalam pembangunan belum optimal. Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Salah satu komponen IDG yang membutuhkan perhatian adalah masih rendahnya persentase perempuan yang duduk di lembaga legislatif.



3. Masih rendahnya pembangunan kepemudaan.
Pembangunan kepemudaan yang diukur oleh Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaian dimaksud masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPP Nasional yang mencapai 56,33. Salah satu komponen IPP yang cukup rendah di Kalimantan Selatan yaitu Pemuda Berusaha dengan Jenis Jabatan *White Collar* per Jumlah Pemuda.

2.3.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini memuat permasalahan hasil identifikasi pencapaian pembangunan pada aspek daya saing daerah di Kalimantan Selatan. Adapun rumusan permasalahan terkait daya saing daerah yang menggambarkan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Stabilitas Ekonomi Makro, antara lain:

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Penduduk Kalimantan Selatan yang bekerja di sektor formal lebih sedikit dibandingkan yang bekerja di sektor informal. Hal tersebut diukur oleh Indikator persentase tenaga kerja formal sudah menunjukkan peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir namun masih berada pada kisaran 44,75 persen dan capaian persentase tenaga kerja formal Kalimantan Selatan masih berada pada posisi terendah kedua di Pulau Kalimantan di atas Provinsi Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya beban ketergantungan penduduk
Pada tahun 2024 rasio ketergantungan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 47,10 atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Provinsi Kalimantan Selatan diprediksi akan mengalami bonus demografi, dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah.



Jumlah penduduk usia kerja yang semakin meningkat akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Permasalahan bonus demografi ini harusnya bisa diselesaikan dan dipersiapkan dari sekarang. Pengembangan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Penduduk berkualitas akan mampu menjawab tantangan bonus demografi yang terjadi di Kalimantan Selatan.

3. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat cenderung menurun di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini ditunjukkan oleh indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dimana komponen yang perlu mendapat perhatian, meliputi: 1). Pemerataan Layanan Perpustakaan; 2). Ketercukupan Koleksi Perpustakaan; 3). Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; dan 4). Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari.
4. Tingkat kegemaran membaca masyarakat menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Walaupun meningkat, namun masih berada di posisi 14 secara nasional dengan nilai 67,14, namun masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian membaca dapat membudaya dalam masyarakat Kalimantan Selatan.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan/manufaktur. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang fluktuatif beberapa tahun terakhir menandakan belum kokohnya pondasi sektor ini. Sub-sektor pada sektor industri belum dikembangkan dan dioptimalkan sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Hasil sumber daya alam belum diolah dengan baik sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi. Selain itu, industri kreatif yang dapat membuka lapangan usaha maupun wirausaha, belum berkembang dengan baik.
2. Masih belum berkembangnya sektor pariwisata
Sektor pariwisata yang dapat menjadi sumber ekonomi potensial di Kalimantan Selatan belum berkembang dengan baik. Penurunan kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB mengindikasikan bahwa sektor tersebut belum dikembangkan secara serius, sementara potensi yang dimiliki cukup besar.



3. Tren perkembangan kewirausahaan di masyarakat belum stabil dan sangat rentan untuk menurun. Hal ini dibuktikan dengan tren Rasio Kewirausahaan periode tahun 2020 sampai 2024 yang fluktuatif. Masyarakat diharapkan dapat berwirausaha dan membuka lapangan kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan membuka lapangan kerja baru, maka akan membantu upaya mengurangi pengangguran.
4. Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir masih fluktuatif dan akan mempengaruhi kinerja ketenagakerjaan. Kondisi yang harus diantisipasi adalah menurunnya TPAK sebab mencerminkan partisipasi angkatan kerja rendah karena orang sulit untuk mencari pekerjaan. Hal ini dapat disebabkan oleh perekonomian yang lesu sehingga banyak dunia usaha memangkas produksi dan tenaga kerjanya.

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Aktivitas perekonomian, sosial, dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan masih belum memenuhi kriteria untuk penciptaan ekonomi hijau. Hal ini diindikasikan dengan masih rendahnya nilai Indeks Ekonomi Hijau di Kalimantan Selatan bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

D. Transformasi Digital

Literasi Digital masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Belum stabilnya investasi daerah
Pembentukan Modal Tetap Bruto sejak tahun 2020 dan 2024 mengalami fluktuasi dan menurun pada tahun 2024 menjadi 4,97
2. Belum stabilnya ekspor daerah
Ekspor Barang dan Jasa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dan menurun pada tahun 2024 menjadi 4,87.



F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Pelayanan infrastruktur dasar secara umum masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil capaian indikator Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah tahun 2023 dan 2024 yang mengalami penurunan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan turunnya nilai indeks tersebut, yaitu di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Kotabaru masih terkendala ketersediaan air baku. Penyebab lainnya adalah sistem pengelolaan sampah yang umumnya masih tradisional dan masih adanya praktik buang sampah secara sembarangan.
2. Konektivitas daerah yang belum teintegrasi.
Konektivitas di Kalimantan Selatan masih menjadi salah satu fokus pembangunan yang masih perlu terus ditingkatkan. Perkembangan daerah seiring bertambahnya penduduk membutuhkan konektivitas yang baik dan menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, penyediaan air bersih, limbah domestik, penyediaan listrik dan energi yang terbarukan, perumahan dan permukiman yang layak dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, serta infrastruktur telekomunikasi dan digital belum merata ke seluruh wilayah dan perlu peningkatan kualitas.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2020 sampai 2024 fluktuasi dan mengalami penurunan di tahun 2024. Namun demikian, capaian inflasi pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 1,68.
2. Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang mempengaruhi sikap, dan perilaku keuangan masyarakat Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Persentase Literasi Keuangan tahun 2022 yang mencapai 40,08 pada tahun 2022.

2.3.1.4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini memuat permasalahan hasil identifikasi pencapaian pembangunan pada Aspek Pelayanan Umum di Kalimantan Selatan, antara lain:



A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah provinsi masih dalam proses penataan dan peningkatan dan belum mencapai kondisi yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian dikator Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai 84,54 pada tahun 2024. Nilai ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih perlu ditingkatkan terus pada tahun-tahun mendatang.
2. Belum optimalnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 85,92.
3. Kualitas pelayanan publik masih belum optimal, yang ditunjukkan dengan masih berfluktuasinya capaian indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) beberapa tahun terakhir.
4. Belum optimalnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik/digital. Hal ini yang ditunjukkan oleh Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 yang berada pada angka 3,63.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Belum stabilnya kehidupan berdemokrasi yang ditunjukkan oleh indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan yang berfluktuasi sejak tahun 2019 sampai 2023.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Belum optimalnya daya saing daerah, yang ditunjukkan oleh indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tahun 2024 yang masih berada pada angka 3,56.

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan daerah yang dimuat pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan tercermin dalam bentuk tata kelola pemerintahan. Permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahanan daerah dan tata kelola pemerintahan dirumuskan



berdasarkan capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut akan menjadi input bagi pengambilan kebijakan untuk pembangunan jangka menengah. Rumusan masalah juga sebagian merupakan gambaran belum optimalnya pelayanan yang diberikan ke masyarakat, walaupun kecenderungannya membaik dari tahun ke tahun.

Permasalahan di masing-masing sektor secara rinci disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.113.
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Permasalahan	Masalah
	Pendidikan	
	Belum optimalnya cakupan dan mutu layanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Partisipasi sekolah untuk jenjang SMP/MTs/Paket B mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 sampai 2024 dan menurun pada tahun 2024 menjadi hanya 93,70. b. Belum optimalnya partisipasi sekolah untuk jenjang SMU/SMK/MA/ Paket C dimana pada tahun 2024 mencapai 72,31. c. Belum optimalnya partisipasi sekolah untuk jenjang Perguruan Tinggi dimana pada tahun 2024 hanya sebesar 29,45. d. Partisipasi kasar untuk jenjang SD/MI/Paket A mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 sampai 2024 dan menurun pada tahun 2024 menjadi hanya 105,32. e. Partisipasi murni untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sejak tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan menurun pada tahun 2024. f. Masih ditemui anak yang mengalami putus sekolah untuk jenjang Pendidikan SMA dan SMK. g. Belum optimalnya anak sekolah yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. h. Menurunnya Lulusan SMK yang diterima di Dunia Kerja. Salah satu penyebab utama adanya indikasi kurangnya keselarasan kurikulum dengan kebutuhan industri. i. Kondisi SMK dengan sarpras yang memenuhi standar sejak tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan pada tahun 2023. j. GTK bersertifikat Pendidik sejak tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan pada tahun 2022. k. Peserta didik pendidikan khusus yang mandiri pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 67,25. l. Menurunnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. m. Menurunnya nilai rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional. n. Menurunnya nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional. o. Iklim keamanan sekolah SMA pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 77,36. p. Iklim keamanan sekolah SMK pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun



No.	Permasalahan	Masalah
		<p>capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 76,42.</p> <p>q. Iklim keamanan sekolah SDLB pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 85,26.</p> <p>r. Menurunnya Iklim Kebinekaan SDLB.</p> <p>s. Iklim keamanan sekolah SMPLB pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 82,31.</p> <p>t. Iklim keamanan sekolah SMALB pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 77,62.</p> <p>u. Belum optimalnya SMA yang terakreditasi minimal B.</p>
Kesehatan		
	Belum optimalnya cakupan dan mutu layanan kesehatan	<p>a. Kasus Kematian Ibu sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2024</p> <p>b. Kasus kematian bayi pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya 9.</p> <p>c. Prevalensi Stunting pada tahun 2022 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19.</p> <p>d. Masih cukup tingginya balita dengan gizi kurang.</p> <p>e. Menurunnya persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>f. Sarana air minum yang dilakukan pengawasan mengalami penurunan.</p> <p>g. Menurunnya tempat pengolahan makanan (tpm) yang memenuhi syarat kesehatan.</p> <p>h. Menurunnya Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar.</p> <p>i. Puskesmas/institusi yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan olahraga pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 83,4.</p> <p>j. Belum optimalnya kab/kota yang eliminasi rabies.</p> <p>k. Menurunnya Kabupaten/Kota dengan layanan rehidrasi oral aktif (LROA).</p> <p>l. Menurunnya kegiatan Imunisasi Dasar lengkap.</p> <p>m. Menurunnya Puskesmas yang terakreditasi (Minimal Madya).</p> <p>n. Menurunnya Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah dengan akreditasi Paripurna (17 RSUD).</p> <p>o. Faskes yang melaksanakan kesehatan tradisional pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 97 persen.</p> <p>p. Menurunnya ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas.</p> <p>q. Menurunnya fasyankes dengan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar.</p> <p>r. Sumber daya manusia kesehatan yang sesuai standar masih rendah.</p> <p>s. Jumlah tempat tidur yang Dimanfaatkan (BOR) pada RSJ Sambang Lihun.</p> <p>t. Menurunnya Nilai ALOS Pasien pada RSJ Sambang Lihun.</p>
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan jalan	<p>a. Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi rusak berat yang memerlukan perbaikan.</p>



No.	Permasalahan	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> b. Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang belum dalam kondisi mantap dan memenuhi standar (lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton). c. Jaringan jalan belum merata, konektivitas antar kawasan terutama daerah-daerah yang terisolir belum terhubung dengan baik, selain itu aksesibilitas pada kawasan- kawasan yang dianggap strategis daerah belum layak dan terhubung. Sehingga hal ini mengakibatkan tingkat mobilitas antar wilayah terbatas.
2	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman ke seluruh masyarakat. b. Masih rendahnya penyediaan air baku karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih. c. Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi sehingga berpengaruh terhadap belum terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi. d. Masih rendahnya pembangunan infrastruktur dalam penanganan potensi abrasi pantai dan bencana banjir yang disebabkan daerah pengaliran sungai yang cukup luas dengan debit yang cukup besar.
3	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya akses sanitasi yang layak dan aman ke seluruh masyarakat. b. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional di Kalimantan Selatan. Masih terdapat sampah yang belum terkelola.
4	Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya penataan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan perkotaan dan kawasan strategis daerah. b. Masih belum optimalnya kemampuan pemda untuk membina pelaku jasa konstruksi dalam menghadapi kebutuhan/ peluang pasar
5	Belum optimalnya pengelolaan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya keselarasan perencanaan penataan ruang antar stakeholder yang diakibatkan kurangnya koordinasi, sinkronisasi serta system pendataan dan informasi. b. Belum optimalnya penyusunan rencana kawasan strategis provinsi yang aplikatif. c. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman		
	Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (<i>Backlog</i> Rumah) yang masih tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Luasan Kumuh Yang Sudah Ditangani pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19. b. Belum optimalnya penanganan permukiman dan kawasan kumuh. c. Capaian rumah layak huni (RLH) masih rendah dan berada dibawah capaian nasional. d. Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di Kalimantan Selatan sehingga perlunya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru. e. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penanganan rumah di daerah rawan bencana dan program pemerintah yang belum optimal. f. Belum optimalnya penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), yang salah satu penyebab karena kurangnya kolaborasi antar perangkat daerah terkait PSU untuk mewujudkan permukiman yang layak. Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang tidak memenuhi standar, berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman.



No.	Permasalahan	Masalah
		g. Masih rendahnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak.
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
1	Masih tingginya pelanggaran K3	a. Meningkatnya kasus tindak pidana. b. Meningkatnya masyarakat yang beresiko terkena tindak pidana. c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan. d. Belum optimalnya pengawasan ke seluruh wilayah.
2	Belum optimalnya pemenuhan ketahanan bencana daerah	a. Masih tingginya risiko bencana dan belum optimalnya peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana b. Masih lambatnya pelayanan tindak lanjut (respon <i>time rate</i>) dari pengaduan masyarakat. c. Masih rendahnya kapasitas penanganan risiko bencana. d. Rendahnya literasi masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, terutama terhadap masyarakat rentan termasuk perempuan, lansia, dan disabilitas.
Sosial		
	Belum optimalnya upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial terutama untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan	a. Walaupun jumlah PPKS menunjukkan penurunan, namun masih terbilang cukup banyak untuk segera mendapatkan penanganan. b. Cenderung menurunnya PPKS yang mandiri. c. Belum optimalnya pelayanan dan pembinaan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). d. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). e. Belum optimalnya KPM PKH yang telah graduasi. f. Belum optimalnya PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. g. Belum optimalnya pelayanan panti sosial yang diindikasikan oleh menurunnya Indeks Kepuasan Layanan Panti Sosial. h. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana baik dalam penampungan maupun perawatan dan rehabilitasi medik, untuk SPM pelayanan PPKS dalam panti. i. Masih rendahnya anak terlantar yang mandiri. j. Masih rendahnya tuna sosial yang mandiri. k. Masih rendahnya penyandang disabilitas yang mandiri. l. Pemuktahiran data kemiskinan belum optimal. m. Penanganan korban bencana masih belum optimal.
Tenaga Kerja		
1	Pengangguran dan masih rendahnya produktivitas tenaga kerja	a. Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja. b. Menurunnya jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan. c. Menurunnya pencari kerja yang kompeten. d. Minimnya jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi. e. Tingkat produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan. f. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja. g. Ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja sehingga jumlah penganggur relatif besar. h. Rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal angkatan kerja yang didominasi oleh tamatan (maksimal) sekolah dasar, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan tidak pernah sekolah. i. Sarana dan prasarana belum mendukung untuk melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan jaman maupun teknologi. j. Dengan adanya revolusi industri 4.0 maka dapat tercipta pengangguran yang dipengaruhi oleh melebarnya ketimpangan ekonomi karena peran digitalisasi dapat menggeser peran konvensional dalam pasar.



No.	Permasalahan	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> k. Proporsi tenaga kerja formal masih rendah, bahkan bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, berada pada posisi kedua terendah. l. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan, yang ditandai masih fluktuatifnya rasio kewirausahaan selama beberapa tahun terakhir.
2	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan pekerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan). b. Masih rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang hingga saat ini pada umumnya dirasakan masih jauh dari memadai. c. Minimnya perusahaan yang mendapatkan penghargaan K3. d. Menurunnya jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi. e. Minimnya perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan.
Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak		
	Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya upaya perlindungan anak. b. Belum optimalnya pengalokasian anggaran responsif gender dalam perencanaan dan penganggaran. c. Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan. d. Masih cukup tingginya kasus pernikahan anak. e. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan, ditandai dengan masih cukup tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. f. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. g. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan gender dan anak.
Pangan		
	Terdapat kecenderungan penurunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang perlu diwaspadai sebab akan mempengaruhi stabilitas pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya infrastruktur ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan b. Ketersediaan pangan dan kemandirian masyarakat dalam usaha menurunkan tingkat kerawanan pangan belum maksimal c. Sistem jaringan distribusi pangan belum efisien dan stabil, khususnya di wilayah 3T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) dalam menjaga stabilisasi harga pangan serta cadangan pangan minimal d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan Pangan Segar e. Rendahnya diversifikasi pangan dan masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan laki-laki dalam upaya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan keluarga f. Tata kelola pangan dituntut menggunakan digitalisasi di setiap rantai pangan g. Belum optimalnya penanganan Food loss and waste



No.	Permasalahan	Masalah
Lingkungan Hidup		
	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya pengelolaan sampah. b. Belum optimalnya pengawasan dan ketaatan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan. c. Terjadi penurunan kualitas ekosistem lahan gambut. d. Belum optimalnya pengelolaan mangrove e. Masih terdapat pelaku usaha yang belum taat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup f. Potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal g. Masih tingginya efek dari gas rumah kaca dan ancaman perubahan iklim
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
	Belum optimalnya pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. b. Belum optimalnya pemenuhan kepemilikan kartu identitas anak (KIA). c. Masih minimnya OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya jumlah lembaga ekonomi, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan budaya di desa yang aktif. Salah satu penyebabnya adalah cenderung menurunnya jumlah lembaga kemasyarakatan di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan. b. Belum optimalnya sarana prasarana kawasan perdesaan yang terbentuk/berkembang. c. Belum optimalnya upaya peningkatan status Desa Mandiri. d. Masih rendahnya ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan. e. Terjadi penurunan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa. f. Menurunnya kader dan pendamping desa yang mampu dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. g. Menurunnya layanan sosial dasar yang aktif di desa. h. Menurunnya pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat desa.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Belum optimalnya pengembangan kualitas keluarga dan pelayanan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Secara umum, kualitas keluarga masih rendah ditandai dengan capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang masih rendah. b. Menurunnya kepesertaan KB oleh masyarakat, ditandai dengan cenderung menurunnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR). c. Masih tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber KB dan/atau putus ber KB. d. Masih ditemukan usia kawin pertama di bawah rata-rata usia ideal pada PUS.
Perhubungan		
1	Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya jumlah ruas jalan provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan jalan. b. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan c. Belum optimalnya penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, perkotaan dan perdesaan. d. Masih kurang optimalnya penerapan peraturan sistem transportasi dan manajemen lalu lintas. e. Belum optimalnya pelayanan terminal tipe B yang ditandai dengan adanya kecenderungan penurunan tingkat kepuasan masyarakat. f. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi



No.	Permasalahan	Masalah
		g. Masih kurangnya sarana dan prasarana angkutan masal untuk mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan jasa transportasi daerah perkotaan. h. Belum berkembangnya transportasi laut dan sungai yang representatif yang digunakan untuk perlintasan regional, nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk pengembangan transportasi orang maupun barang. Diperlukan dukungan investasi baik dari pemerintah maupun swasta untuk pengembangan serta sarana dan prasarana transportasi laut dan sungai baik regional maupun internasional. i. Belum optimalnya panjang alur pelayaran sungai yang memenuhi standar. j. Belum adanya pembangunan transportasi perkeretaapian di Kalimantan Selatan untuk mendukung pengembangan wilayah dan perekonomian daerah. k. Belum optimalnya pelayanan jaringan penerbangan Bandar Udara Syamsudin Noor dan bandara lainnya di Kalimantan Selatan dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Kalimantan Selatan.
2	Masih tingginya jumlah fatalitas kecelakaan	a. Kurangnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelayakan armada b. Ketiadaan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas keselamatan di jalan c. Rendahnya <i>law enforcement</i> peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.
Komunikasi dan Informatika		
	Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Belum optimalnya sarana dan prasarana telekomunikasi dan pemenuhan standar infrastruktur TIK. Hal ini menyebabkan masih terdapat area blankspot dan belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. b. Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara terintegrasi. c. Masih rendahnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik. d. Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah daerah. e. Terbatasnya infrastruktur akses internet dan jaringan intra pemerintah daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah. f. Penerapan berbagi pakai data di perangkat daerah belum maksimal.
Koperasi dan UKM		
	UKM dan Koperasi belum berkembang secara baik dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan masyarakat	a. Masih banyaknya koperasi tidak aktif. b. Belum optimalnya pertumbuhan koperasi baru. c. Terjadi peningkatan nilai bisnis Koperasi dan UK, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 4,91%. d. Belum optimalnya jumlah Koperasi dan UK yang memiliki legalitas usaha. e. Masih minimnya usaha kecil yang mampu mengakses Pasar Modern. f. Menurunnya jenis produk unggulan koperasi dan UK yang mampu masuk ke pasar luar daerah. g. Masih rendahnya Koperasi Usaha Simpan Pinjam yang sehat. h. Koperasi berkualitas pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 35,14%. i. Masih rendahnya jumlah Koperasi Berprestasi. j. Peningkatan omset Koperasi dan Usaha Kecil masih belum optimal.



No.	Permasalahan	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> k. Peningkatan SHU/keuntungan Koperasi dan Usaha Kecil masih rendah. l. Masih rendahnya jumlah UMKM naik kelas. m. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru. n. Menurunnya peningkatan kemandirian (struktur) Permodalan Koperasi dan usaha kecil (UK). o. Lemahnya akses bagi KUKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan). p. Lemahnya daya saing sumber daya manusia KUKM. q. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan global.
Penanaman Modal		
	Belum optimalnya realisasi investasi PMA/PMDN	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi penurunan terhadap Investasi PMA dan PMDN b. Kurangnya pengawasan berkelanjutan kepada PMA & PMDN. c. Belum optimalnya promosi investasi yang berkelanjutan. d. Menurunnya nilai survey Kepuasan Masyarakat.
Kepemudaan dan Olah Raga		
1	Peran pemuda dalam pembangunan masih rendah sementara di sisi lain persaingan global menuntut SDM harus memiliki daya saing yang tinggi untuk dapat bertahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya jumlah pemuda yang berperan aktif di masyarakat, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan. b. Masih rendahnya jumlah pemuda yang mempunyai kapasitas kepemimpinan. c. SDM dengan kompetensi dan pengalaman profesional bidang kepemudaan masih sangat terbatas. d. Minimnya jumlah pemuda yang berwirausaha dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri. e. Menurunnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. f. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan.
2	Masih minimnya prestasi olah raga dan budaya berolahraga di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih terbatasnya atlet yang berprestasi. b. Pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi masih belum bisa dilakukan secara maksimal. c. Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar. d. Masih rendahnya jumlah tenaga keolahragaan bersertifikat e. Masih rendahnya organisasi cabang olahraga rekreasi yang aktif. f. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga. g. Masih kurangnya kegiatan- kegiatan olahraga yang melibatkan peran serta masyarakat secara massal guna membudayakan olahraga. h. Menurunnya kemitraan dengan pelaku olahraga.
Statistik		
	Belum optimalnya pengembangan statistik untuk dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral yang lengkap dan valid b. Masih rendahnya kemampuan ASN di perangkat daerah untuk menyusun metadata sesuai dengan standar BPS c. Masih rendahnya SDM Perstatistikan
Persandian		
	Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum seluruh perangkat daerah yang telah menyelenggarakan persandian dan keamanan informasi sesuai standar b. Masih rendahnya perangkat daerah dengan hasil audit persandian dan keamanan informasi level 1 (memenuhi kerangka kerja dasar) c. Belum optimalnya pemenuhan sarana/prasarana untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
Kebudayaan		
	Belum optimalnya pengembangan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya warisan budaya yang ditetapkan pemerintah pusat. b. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.



No.	Permasalahan	Masalah
	pembangunan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> c. Belum optimalnya pelestarian nilai sejarah. d. Belum optimalnya aktualisasi nilai tradisi. e. Rendahnya Nilai Tradisi yang diaktualisasikan. f. Belum banyaknya pelaku seni budaya yang mendapatkan penghargaan terbaik tingkat daerah pada event kesenia. g. Belum banyaknya penghargaan tingkat Nasional yang diraih oleh tim kesenian. h. Belum optimalnya pembinaan terhadap lembaga dan pelaku seni budaya daerah.
Perpustakaan		
	Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kunjungan ke perpustakaan belum optimal. b. Tidak adanya penambahan jumlah Perpustakaan Umum Provinsi yaitu hanya sebanyak 2 unit. c. Tidak adanya penambahan jumlah Perpustakaan Umum Kab/Kota yaitu hanya sebanyak 13 unit. d. Masih kurangnya koleksi bahan pustaka yang terbaru untuk layanan umum, referensi, deposit, layanan anak, layanan terpadu perpustakaan sekolah (LTPS). e. Belum optimalnya kegiatan pembinaan perpustakaan dan promosi perpustakaan.
Kearsipan		
	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum seluruh Perangkat Daerah mengelola arsip secara baku dan berbasis TIK. b. Masih rendahnya ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional. c. Depo arsip belum berjalan optimal. d. Kurangnya pemahaman ASN terhadap kearsipan. e. Belum lengkapnya regulasi daerah tentang pengelolaan arsip. f. Pencipta kearsipan skala provinsi belum menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan secara baik.
Kelautan dan Perikanan		
	Belum optimalnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah sementara potensi yang dimiliki besar	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan, yang diukur oleh LPE Perikanan pada tahun 2022 masih diangka 2,85 persen. b. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2021 yang mencapai 218.546,00 Ton. c. Menurunnya konsumsi Ikan di Masyarakat. d. Menurunnya luas rehabilitasi kawasan mangrove.
Pariwisata		
	Belum optimalnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengembangan usaha di bidang wisata. e. Objek Wisata Unggulan yang sesuai Sapta Pesona pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 100%. b. Menurunnya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan. c. Terjadi penurunan perjalan wisatawan nusantara yang datang. d. Belum optimalnya hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif yang telah dilindungi. e. Tingkat hunian akomodasi pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2022 yang mencapai 59%..
Pertanian		
	Belum optimalnya peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura b. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura yang unggul dan bersertifikat



No.	Permasalahan	Masalah
	sementara potensi yang dimiliki sangat besar	<ul style="list-style-type: none"> c. Keberlanjutan lahan pertanian, alih fungsi lahan terutama dari tanaman pangan dan hortikultura ke sub sektor lain seperti perkebunan, perikanan dan ke non pertanian seperti perumahan, jalan, industri dan jasa d. Kurangnya manajemen irigasi yang tepat, hal ini berpengaruh untuk memenuhi kebutuhan air pada setiap tanaman pangan dan hortikultura serta memastikan pertumbuhannya yang sehat e. Kurangnya sarana pengendalian bencana pertanian f. Kurangnya sarana dan prasarana pertanian g. Masih lemahnya kualitas, nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura h. Terbatasnya sumber daya manusia pertanian dan kurangnya minat generasi muda baik laki-laki maupun perempuan untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura i. Belum optimalnya kelembagaan pertanian, serta masih minimnya partisipasi perempuan dilibatkan dalam pengelolaan pada kelompok tani/gapoktanPertumbuhan ekonomi sektor perkebunan yang dapat dilihat dari indikator LPE Perkebunan mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 sampai 2024 dan menurun pada tahun 2024. j. Terjadi penurunan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet. k. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Perkebunan. l. Terjadi penurunan produk hasil perkebunan karet yang berkualitas. m. Belum optimalnya pengembangan ternak besar dan kecil serta unggas. n. Belum optimalnya pengembangan kawasan perkebunan/peternakan berbasis korporasi pekebun/peternak. o. Produksi daging, susu, dan telur belum optimal. p. Tidak adanya penambahan Skala Usaha Ternak. q. Penyakit Hewan r. Harga pakan dan bahan pakan ternak unggas cenderung meningkat. s. Jaminan keamanan pangan yang ASUH masih rendah.
Kehutanan		
	Belum optimalnya pengelolaan sektor kehutanan baik dari sisi ekonomi maupun konservasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum maksimalnya penerimaan Retribusi dan PNPB sektor kehutanan karena sedikitnya izin usaha pemanfaatan dan belum digalinya sumber- sumber pendapatan baru. b. Belum optimalnya Kontribusi Sektor Kehutanan. c. Menurunnya penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan. d. Menurunnya luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan. e. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan berbasis Perhutanan Sosial. f. Belum optimalnya penambahan luas izin dan pengelolaan perhutanan sosial. g. Masih rendahnya jumlah perhutanan sosial yang operasional. h. Belum optimalnya peningkatan kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. i. Masih rendahnya produksi dan pemasaran hasil KUPS yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kelola Perhutanan Sosial. j. Masih rendahnya pendapatan Kelompok Tani Hutan (KTH). k. Belum optimalnya Tutupan Hutan untuk mendukung perbaikan kualitas lingkungan. l. Masih luasnya lahan kritis.



No.	Permasalahan	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> m. Belum optimalnya luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Rehabilitasi DAS n. Belum optimalnya pemanfaatan RPHJP di KPH. o. Belum optimalnya penanganan konservasi flora dan fauna. p. Menurunnya jumlah populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esensial yang aman dari ancaman kepunahan.
Energi dan Sumber Daya Mineral		
	Belum optimalnya pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral baik secara ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan listrik	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya jumlah produksi batubara. b. Belum optimalnya porsi energi terbarukan pada bauran energi. c. Belum optimalnya penanganan penurunan muka air tanah dan kualitas air tanah. d. Belum optimalnya potensi energi baru terbarukan yang dapat dimanfaatkan. e. Belum optimalnya luas lahan terganggu yang telah direklamasi dan direvegetasi (IUP). f. Belum optimalnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), walaupun dari tahun ke tahun sudah menunjukkan semakin besarnya penurunan emisi untuk memenuhi baseline. g. Menurunnya cadangan air tanah akibat pengembalian air tanah yang berlebihan atau tidak sesuai kemampuan daya dukung air tanah serta pemanfaatan tata ruang pada zona imbuhan air tanah. h. Kurangnya pengelolaan terhadap bukaan lahan tambang sehingga meninggalkan lubang bekas tambang (void) yang tidak/belum direklamasi. Salah satunya akibat pertimbangan tanpa izin yang masih marak sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. i. Kurangnya pembangunan infrastruktur ketegalistrikan di daerah terpencil yang lokasinya sulit terjangkau dan masih banyaknya rumah tangga miskin yang belum mendapatkan sambungan listrik.
Perdagangan		
	Sektor perdagangan memiliki potensi yang besar dalam penguatan perekonomian daerah, namun belum dikelola secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan yang diukur oleh indikator LPE Perdagangan mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 sampai 2024 dan menurun pada tahun 2024 menjadi hanya 3,65 persen. b. Menurunnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. c. Menurunnya Nilai Ekspor Non Migas. d. Belum optimalnya pengelolaan pupuk yang mendorong swasembada pangan dan stabilitas harga. e. Belum optimalnya pengendalian stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok, terutama untuk pengendalian inflasi. f. Berlaku peraturan tentang larangan ekspor produk tambang menuntut adanya pergerakan investasi secara cepat dalam rangka hilirisasi produk-produk hasil tambang. g. Maraknya barang beredar di pasaran yang belum memenuhi ketentuan standar yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen terutama produk elektronik dan mainan anak. h. Belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri, sementara dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak dapat menjadi potensi pasar yang besar.
Perindustrian		
	Sektor industri memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian daerah, namun belum dikelola secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal. b. Menurunnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM). c. Belum optimalnya jumlah tenaga kerja yang terserap sektor industri. d. Masih rendahnya jumlah Industri Kecil dan Menengah yang naik kelas.



No.	Permasalahan	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> e. Masih rendahnya jumlah Kawasan Industri yang Operasional. f. Masih rendahnya produktivitas industri. g. Kurangnya jumlah wirausaha industri. h. Menurunnya jumlah SDM industri yang terampil. i. Terbatasnya IKM yang memiliki izin usaha industri. j. Belum tersedianya lahan clear dan clean untuk sentra IKM dan kawasan industri yang mendukung penumbuhan dan pengembangan industri. k. Terbatasnya data dan informasi industri yang memadai (<i>valid</i> dan <i>up to date</i>) untuk menarik investasi dan pengembangan industri. l. Lambatnya investasi di sektor hilir industri. m. Belum optimalnya pemanfaatan SDA lokal menjadi produk unggulan.
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah		
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun kondisi ini masih perlu terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di masa mendatang. Hal ini penting untuk dilakukan seiring dengan semakin kompetitifnya setiap daerah dalam meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi masuk ke wilayahnya. b. Belum optimalnya kompetensi ASN di lingkungan Pemda dalam mendukung akselerasi transformasi digital.
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. b. Belum optimalnya rata-rata nilai penghargaan perencanaan pembangunan daerah pemkab/kota
2	Perkembangan kebijakan mengenai keuangan daerah semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan daerah masih bertumpu pada APBD provinsi, sementara kebutuhan untuk mendanai pembangunan semakin meningkat. Pemerintah daerah belum banyak mengembangkan b. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah.
3	Belum optimalnya manajemen ASN	Belum optimalnya pengembangan profesionalitas ASN
4	Inovasi daerah belum menjadi budaya di pemerintahan daerah maupun masyarakat luas	Belum optimalnya upaya menumbuhkembangkan dan menyebarkan praktik inovasi yang baik. Hal ini diindikasikan dengan Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Selatan tahun 2023 yang masih berada pada kategori Inovatif dan belum mencapai kategori Sangat Inovatif.
Pengawasan		
	Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal. b. Tingkat Maturitas SPIP Pemda sudah baik selama beberapa tahun terakhir, namun masih perlu terus ditingkatkan. c. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada komponen Evaluasi Internal sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih perlu ditingkatkan untuk mendorong nilai SAKIP daerah.
Pemerintahan Umum		
	Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi dan penguatan kerukunan umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air ke seluruh masyarakat b. Upaya revolusi mental belum mencapai hasil yang optimal

Sumber: hasil analisis, 2025



2.3.2. Isu Strategis Daerah

2.3.2.1. Telaahan Isu Internasional

Perkembangan dan kondisi dunia internasional memberi pengaruh yang besar terhadap kondisi dalam negeri Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. Perubahan global yang cepat di berbagai aspek yang sangat didukung oleh kemajuan teknologi dan informatika menjadi tantangan bagi seluruh negara untuk melakukan adaptasi dan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan cepat.

Dalam menghadapi tantangan global kedepan, dapat diidentifikasi 10 (sepuluh) megatren global yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan di masa datang. Kesepuluh megatren global tersebut meliputi:

1. **Perkembangan demografi global.** Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55 persen).
2. **Geopolitik dan geoekonomi.** Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen.
3. **Perkembangan teknologi.** Teknologi akan menggantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini.
4. **Peningkatan urbanisasi dunia.** Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen.
5. **Konstelasi perdagangan global.** Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun.
6. **Tata kelola keuangan global.** Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDB), dan Fintech.
7. **Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*).** Jumlah middle dan upper class lebih dari 90 persen (8,8 miliar).
8. **Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam.** Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.
9. **Perubahan iklim.** Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.
10. **Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).** Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.



2.3.2.2. Telaahan Isu dan Kebijakan Nasional

a. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 memuat penjabaran visi dan misi serta program prioritas Presiden dan Wakil Presiden kedalam kebijakan pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun kedepan.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Misi atau Asta Cita pembangunan nasional Tahun 2025-2029 dimuat dalam gambar di bawah.





Gambar 2.69.
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Asta Cita merupakan delapan agenda pembangunan prioritas nasional yang menjadi landasan arah kebijakan pembangunan di Indonesia. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN dan Swasta).

Dukungan pemerintah daerah terhadap Prioritas Nasional 2025–2029 merupakan bentuk nyata sinergi pembangunan. Daerah menjadi pelaksana langsung di lapangan yang menentukan keberhasilan pencapaian target nasional. Pemerintah daerah berperan sebagai ujung tombak implementasi *Quick Wins* maupun prioritas nasional yang lainnya.



Gambar 2.70.
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional, sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



Tabel 2.114.
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Pembangunan Nasional
1	Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju
	a) Penumbuhan ekonomi dan 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029) b) GNI per kapita meningkat dari 4.879 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029) c) Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029) d) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)
2	Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional Meningkat
	<i>Global Power Index</i> meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029)
3	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
	Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5 (2026)
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
	Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission
	Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029)

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Selanjutnya, dalam RPJMN 2025-2029 juga dimuat arahan kebijakan pembangunan jangka menengah untuk setiap provinsi. Untuk mendukung pencapaian target indikator makro nasional, maka ditetapkan target indikator makro untuk Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.115.
Indikator Makro Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

INDIKATOR	2025	2029
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	8,1
PDRB Per Kapita (RP Juta)	72,7	106,3
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,3	1,3
Tingkat Kemiskinan (%)	3,44-3,94	1,64-2,64
Gini Ratio	0,307-0,311	0,274-0,278
Indeks Modal Manusia	0,57	0,61
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	75,97	80,99
IKLH	72,32	73,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86-4,25	3,29-3,97

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029



b. Telaahan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, salah satunya dengan membangun sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, serta mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.

Wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara dengan luas kurang lebih 56.180 hektar terletak pada dua kabupaten eksisting, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan Ibu Kota Nusantara beririsan dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu. Di dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara, terdapat 13 desa/kelurahan eksisting yaitu 11 desa terdiri dari Sungai Payang, Jonggon Desa, Argo Mulyo, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Dua, Sukaraja, Sukomulyo, Tengin Baru, Wonosari dan 2 Kelurahan terdiri dari Pemaluan dan Sepaku.



Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi yang baru.

Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai:

- a. kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
- b. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta
- c. simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Khusus, Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan kerja sama dengan Daerah Mitra dan daerah lain berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Dalam rangka kerja sama, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan dukungan pembangunan kepada Daerah Mitra sesuai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta dokumen rencana tata ruang. Daerah Mitra adalah kawasan-kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

2.3.2.3. Telaahan Isu dan Kebijakan Provinsi

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6



Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan sampai 20 tahun kedepan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 adalah **untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di selatan Pulau Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar kabupaten/kota dalam hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.**

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi, meliputi:

1. Perwujudan restorasi ekologis untuk membantu pemulihan ekosistem alam yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur.

Strategi atas kebijakan perwujudan restorasi ekologis untuk membantu pemulihan ekosistem alam yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur, meliputi: a. melakukan penghijauan dan penanaman kembali di dataran tinggi; b. melakukan konservasi lahan gambut; c. melakukan penanaman kembali bakau; d. membangun kembali fungsi lahan bekas tambang; e. meningkatkan perlindungan kawasan konservasi; f. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung khususnya kawasan hutan lindung, cagar alam, suaka alam, KKP, KKP3K dan suaka margasatwa; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi baik yang dikelola oleh daerah maupun pusat dengan melibatkan masyarakat; h. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana; i. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem bersama stakeholder dan masyarakat; dan j. memberdayakan budaya lokal seperti di sekitar sungai, kawasan meratus dan wilayah pesisir.

2. Pengembangan pariwisata berbasis alam untuk melindungi dan mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup.

Strategi atas kebijakan pengembangan pariwisata berbasis alam untuk melindungi dan mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup, meliputi: a. menjaga dan melestarikan geosites di kawasan Pegunungan Meratus; dan b. mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan pantai.



3. Perwujudan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan perekonomian wilayah.
Strategi atas kebijakan perwujudan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan perekonomian wilayah, meliputi: a. memperluas produktivitas padi lahan basah yang tinggi; b. mengembangkan industri minyak sawit; c. menetapkan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi laut; d. mendorong pelaksanaan kebijakan yang berbasis masyarakat; e. mengembangkan kawasan pertanian dan kawasan perikanan berkelanjutan; dan f. mengembangkan kawasan perikanan dengan prinsip berkelanjutan di daerah konservasi.
4. Penguatan hilirisasi industri dan konektivitas penyediaan rantai pasokan agar dapat bersaing dengan nasional dan global.
Strategi atas kebijakan penguatan hilirisasi industri dan konektivitas penyediaan rantai pasokan agar dapat bersaing dengan nasional dan global, meliputi: a. menyelenggarakan hilirisasi batu bara; b. mengembangkan produk turunan karet; c. menciptakan nilai tambah pada industri pengolahan kelapa sawit; d. menyelenggarakan hilirisasi minapolitan kelautan; e. menetapkan kawasan industri berbasis sumberdaya alam; f. mengembangkan industri padat modal dan teknologi tinggi; g. mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah; h. membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan peruntukan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; dan i. mengurangi dampak negatif kegiatan industri.
5. Peningkatan konektivitas multimoda pantai timur untuk mewujudkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang saling bersinergi.
Strategi atas kebijakan peningkatan konektivitas multimoda pantai timur untuk mewujudkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang saling bersinergi, meliputi: a. mengembangkan jaringan jalan-feri-kereta-bandara-sungai; b. mengembangkan jalan ramah lingkungan; c. mengembangkan koridor logistik cerdas; d. mendayagunakan secara optimal posisi strategis wilayah pada alur muara Sungai Barito dan Laut Jawa yang merupakan pintu gerbang Kalimantan Selatan dengan Indonesia bagian barat dan Selat



Makassar yang merupakan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sebagai pintu gerbang pantai timur – tenggara Kalimantan Selatan untuk pemantapan keterkaitan kota-kota regional dan nasional lainnya; e. menetapkan dan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumberdaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; dan f. mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata antar wilayah.

6. Perwujudan penataan ruang hijau metropolitan di Banjarbakula pada sektor infrastruktur dan ruang kawasan.

Strategi atas kebijakan perwujudan penataan ruang hijau metropolitan di Banjarbakula pada sektor infrastruktur dan ruang kawasan, meliputi: a. menyelenggarakan revitalisasi industri kecil; b. mengembangkan industri digital dan kreatif; c. menciptakan jalur Hub Logistik-Regional; d. membangun berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* (TOD); e. mengembangkan permukiman berbasis lahan basah; f. menciptakan kehidupan kota yang layak huni; g. mempertahankan, melestarikan, dan/atau menambah kawasan pertanian perkotaan dan perikanan; h. mengembangkan transportasi berbasis urbanisme sungai; dan i. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung kota metropolitan.



7. Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Strategi atas kebijakan pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, meliputi: a. mengembangkan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian; dan b. mengembangkan kawasan perikanan budidaya dan tangkap.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi terdiri atas: a. sistem pusat permukiman; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan prasarana lainnya. Sementara itu, rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas: a. Kawasan Lindung; dan b. Kawasan Budi Daya.

Peta rencana struktur dan pola ruang Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada gambar di bawah.



Adapun penjelasan masing-masing kawasan sebagai berikut:

- a. Kawasan lindung seluas kurang lebih 1.048.551 hektar terdiri atas: a. badan air; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan konservasi; e. kawasan pencadangan konservasi di laut; f. kawasan lindung geologi; dan g. kawasan ekosistem mangrove.
- b. Kawasan Budi Daya seluas kurang lebih 4.972.360 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh) hektar terdiri atas: a. kawasan hutan produksi; b. kawasan pertanian; c. kawasan perikanan; d. kawasan pertambangan dan energi; e. Kawasan peruntukan industri; f. kawasan pariwisata; g. kawasan permukiman; h. kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut; i. kawasan transportasi; dan j. kawasan pertahanan dan keamanan.

b. Telaahan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Komitmen pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan diwujudkan melalui berbagai kebijakan.

Kebijakan terkini terkait upaya penanggulangan kemiskinan antara lain Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program.

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan d. sinergi



kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program terdiri atas: a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan berbagai upaya dengan dukungan berbagai sektor dan pihak baik pemerintah dan non pemerintah. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin Kalimantan Selatan pada Maret 2024 sebesar 4,11 persen, turun 0,18 persen poin terhadap Maret 2023. Sementara jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 183,31 ribu orang, berkurang 5,6 ribu orang jika dibandingkan dengan Maret 2023.
2. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada periode Maret 2023-Maret 2024 berkurang 3,1 ribu orang. Sementara jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang 2,5 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan dari 3,84 persen menjadi 3,62 persen, dan di perdesaan turun dari 4,72 persen menjadi 4,61 persen.
3. Berdasarkan data Maret 2024, Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah (4,11%) di Pulau Kalimantan, sementara persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Kalimantan Barat (6,32%).
4. Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,571, turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,614. Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama juga mengalami penurunan dari 0,158 menjadi 0,116.



5. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,495, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 0,648. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,096, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,136.

c. Telaahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pembangunan yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Untuk menjaga keseimbangan dan kelestariannya perlu dilakukan berbagai langkah dan tindakan strategis yang tercakup dalam pembangunan berbasis sumber daya alam dan lingkungan. Tujuan dari rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam adalah: a. Menjaga keberlanjutan ketersediaan dan penggunaan sumber daya alam; b. Mencegah penyusutan/penurunan jumlah dan mutu cadangan modal sumber daya alam; dan c. Memastikan pemanfaatan sumber daya alam akan meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah harmonisasi rencana pembangunan provinsi Kalimantan Selatan melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Strategi dan kebijakan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, meliputi:

1. Strategi: Menerapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam.

Kebijakan:



- a. Menyesuaikan struktur ruang dan pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Selatan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem.
 - b. Membatasi ekstraksi sumber daya alam agar tidak melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan
2. Strategi: Melindungi, mempertahankan dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa ekosistem pengaturan air tinggi.
Kebijakan: Menetapkan kawasan dengan jasa pengatur air tinggi sebagai kawasan lindung/konservasi dalam tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Selatan.
3. Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi.
Kebijakan: Moratorium perijinan kegiatan/usaha yang berpotensi menurunkan di wilayah jasa lingkungan tinggi
4. Membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan membatasi pengembangan non pangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi.
Kebijakan: Memperketat perijinan kegiatan/usaha di daerah yang memiliki nilai tinggi untuk pertanian tanaman pangan.

2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Kegiatan dari rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup adalah berupaya untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan serta melakukan pengelolaan kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik dan tetap terjaga.

Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, pemukiman atau perkebunan, telah menyebabkan adanya perubahan kondisi iklim mikro. Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, perkebunan oleh masyarakat sekitar hutan di Kalimantan Selatan telah menyebabkan perubahan fungsi hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamik sumberdaya lahan dan lingkungan. Terbukanya penutupan lahan akibat pembukaan hutan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan tingkat erosi atau aliran permukaan dalam sistem lahan dan daerah aliran sungai (DAS).



Dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya kerja sama antara semua pihak baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat umum yang bersifat kolektif atau secara sendiri-sendiri dengan melibatkan ketiga komponen tersebut. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*) dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dapat mencegah atau menyelesaikan konflik melalui komunikasi dua arah yang terus menerus, dan menguntungkan berbagai pihak yang terlibat. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak memberikan keuntungan, di antaranya penelaahan kebutuhan dan masalah lingkungan yang lebih akurat, meningkatkan kredibilitas perencanaan lingkungan hidup, teridentifikasinya solusi-solusi alternatif yang dapat diterima secara sosial, dan menciptakan rasa memiliki atas rencana pengelolaan yang ditetapkan.

Tujuan perencanaan pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup adalah: a. Mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup; b. Mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup; c. Menjaga dan meningkatkan kinerja layanan ekosistem; dan Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan.

Strategi dan kebijakan Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, meliputi:

1. Strategi: Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan
Kebijakan: 1. Menurunkan beban pencemaran dari sumber pencemar yang berasal dari dunia usaha/kegiatan industri 2. Menurunkan beban pencemaran dari kegiatan limbah domestik
2. Strategi: Mempertahankan fungsi hutan sebagai wilayah pengatur air dan iklim dengan luasan yang cukup dan proporsional di setiap Kabupaten/Kota.
Kebijakan: 1. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan Jasa Pengatur dan Penyimpan Air 2. Pembangunan Hutan Kota di setiap ibukota Kabupaten/Kota 3. Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).



3. Strategi: Memperbaiki sistem pengelolaan dan pemulihan ekosistem bernilai penting (Karst, gambut, mangrove)
Kebijakan: Melaksanakan rehabilitasi kawasan hidrologis gambut terutama lahan gambut bekas kebakaran, daerah karst, dan mangrove
2. Penghentian (Moratorium) pemberian ijin usaha di lahan gambut, karst, dan mangrove
4. Strategi: Menjaga, meningkatkan dan memulihkan fungsi Daerah Aliran Sungai prioritas lintas kabupaten dan Ekosistemnya.
Kebijakan: 1. Pembatasan perijinan kegiatan /usaha di DAS prioritas 2. Penanaman/Rehabilitasi Hutan dan Lahan terutama di lahan kritis
5. Strategi: Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup
Kebijakan: 1. Pemberian penghargaan bagi usaha/kegiatan yang dapat mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan atau inovasi dalam pengelolaan lingkungan 2. Pengurangan pajak bagi pelaku usaha/kegiatan yang bisa mengurangi beban pencemaran lingkungan 3. Pemberian sanksi bagi pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
6. Strategi: Melanjutkan pengembangan kabupaten konservasi.
Kebijakan: Menetapkan kabupaten sebagai kabupaten konservasi
7. Strategi: Pemulihan kawasan bekas tambang, lahan kritis, dan bekas kebakaran lahan dan hutan.
Kebijakan: 1. Reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang 2. Rehabilitasi lahan kritis 3. Rehabilitasi areal bekas kebakaran
8. Strategi: Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3
Kebijakan: Rehabilitasi dan pembersihan (*clean up*) daerah yang terkontaminasi Limbah B3
9. Strategi: Mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan sumberdaya genetik dan habitat spesies tinggi.
Kebijakan: Memulihkan, mempertahankan dan mengendalikan kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah di sekitar kawasan konservasi.



3. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Tujuan perencanaan pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam adalah: a. Memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kriteria pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam. b. Mendorong pelaksanaan tindakan-tindakan efisiensi, diversifikasi, dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam yang diikuti upaya penyempurnaan terus menerus. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup.

Strategi dan kebijakan Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, meliputi:

1. Strategi: Mengembangkan sistem pemantauan IKLH Provinsi yang terintegrasi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota
Kebijakan: 1. sistem pemantauan kualitas air sungai-sungai lintas kabupaten/kota 2. sistem pemantauan kualitas udara 3. sistem perhitungan tutupan hutan/lahan yang akuntabel.
2. Strategi: Mengembangkan peraturan dan sistem penganggaran berbasis lingkungan hidup.
Kebijakan: Penetapan anggaran lingkungan hidup yang memadai bagi PPLH dari APBD.
3. Strategi: Mengembangkan sistem perijinan lingkungan hidup.
Kebijakan: Penyusunan kajian sebelum pemberian ijin lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Strategi: Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kebijakan: pengurangan pajak bagi pelaku usaha/kegiatan yang mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan.
5. Strategi: Memantapkan koordinasi antara pemerintah daerah dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Kebijakan: membentuk forum koordinasi perlindungan dan pengelolaan LH
6. Strategi: Mengembangkan perangkat pengawasan sumber dan bahan pencemar lingkungan.
Kebijakan: Meningkatkan peran pengawas lingkungan hidup



7. Strategi: Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan: 1. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan Lingkungan 2. Pemberian penghargaan bagi masyarakat dan swasta

4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Mitigasi merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan dan dalam rangka mitigasi, yaitu:

- a) Perubahan iklim mikro di suatu lokasi dikaitkan dengan keberadaan manusia (permukiman) di sekitar hutan, akan berpengaruh terhadap perasaan nyaman dan tidak nyaman bagi penghuninya. Masyarakat, sebagai tingkat kenyamanan sebenarnya berhubungan dengan kondisi nyata iklim mikro pada kurun waktu tertentu. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Efek gas rumah kaca merupakan akumulasi gas rumah kaca hasil emisi yang memantulkan panas/energi di atmosfer bumi dengan pantulan tersebut, sehingga bumi mengalami peningkatan temperatur. Pemanasan global dapat memberikan dampak terjadinya perubahan iklim global yaitu pada proses penguapan, pembentukan awan, pola hujan dan kecepatan angin.
- b) Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, permukiman, atau perkebunan, telah menyebabkan adanya perubahan kondisi iklim mikro, yang lebih mengarah kepada kondisi kurang nyaman. Perubahan-perubahan yang telah terjadi, juga nampak jelas ketika melakukan survei lapangan dengan membandingkan tutupan bervegetasi hutan dengan tutupan vegetasi bukan hutan apalagi tutupan semak belukar. Usaha-usaha yang dapat dilakukan misalnya dengan program penghijauan dan reboisasi, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penanaman tanaman buah-buahan di pekarangan rumah penduduk, dan sebagainya. Perubahan iklim mikro yang dipicu oleh kegiatan konversi hutan juga dapat berdampak terhadap karakteristik aliran sungai dan pembentukan lahan kritis.



- c) Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, perkebunan oleh masyarakat sekitar hutan di Kalimantan Selatan telah menyebabkan perubahan fungsi hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamik sumberdaya lahan dan lingkungan. Terbukanya penutupan lahan akibat pembukaan hutan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan erosi dan aliran permukaan dalam sistem lahan dan daerah aliran sungai (DAS).
- d) Pengelolaan lahan secara tradisional dan belum adanya penerapan tindakan konservasi tanah dan air yang dilakukan petani perambah hutan, menyebabkan terjadinya peningkatan erosi dan aliran permukaan yang sangat drastis pada gilirannya membawa dampak merugikan yang sangat besar bagi petani (*on site effect*) dan masyarakat lain yang dipengaruhinya (*off site effect*).
- e) Konversi hutan menjadi lahan pertanian dengan tanaman semusim, semak belukar, dan kebun, dapat menyebabkan terjadinya peningkatan erosi dan aliran permukaan yang sangat nyata dan menurunkan fungsi hidrologi DAS. Perubahan penggunaan hutan menjadi lahan untuk pemukiman menyebabkan infiltrasi air permukaan berkurang, meningkatkan aliran permukaan, dan pengisian air tanah menjadi berkurang, termasuk menurunnya debit aliran mata air.
- f) Perubahan pola pemanfaatan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, tegalan, dan permukiman akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu DAS atau sub DAS di Kalimantan Selatan. Selain itu, berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pertanian, dan perkebunan, akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air sungai.
- g) Secara umum penyebab kerusakan DAS di Kalimantan Selatan disebabkan oleh konversi hutan, yaitu berkurangnya tutupan hutan dalam suatu DAS menjadi daerah perladangan, pertanian, perkebunan rakyat, atau perkebunan swasta, dan juga tidak sedikit yang sudah menjadi lahan permukiman. Jika perubahan tutupan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit terjadi, maka dapat menyebabkan erosi di daerah hulu yang besar, terutama pada awal pembukaan lahan.
- h) Proses pembukaan lahan telah menyebabkan hilangnya tegakan vegetasi yang menutupi permukaan tanah, sehingga terjadi kehilangan bahan organik lebih cepat dan kerusakan terhadap struktur tanah. Peluang



terjadinya degradasi lahan oleh aliran permukaan (*run off*) dan erosi akan semakin besar bila terjadi curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng yang curam, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kerusakan utama yang dialami pada tanah tempat erosi terjadi adalah kemunduran kualitas sifat-sifat biologi, kimia, dan fisik tanah. Kemunduran kualitas tanah tersebut dapat berupa kehilangan keanekaragaman hayati, unsur hara dan bahan organik yang terbawa oleh erosi, tersingkapnya lapisan tanah yang miskin hara dan sifat-sifat fisik yang menghambat pertumbuhan tanaman, menurunnya kapasitas infiltrasi dan kapasitas tanah menahan air, meningkatnya kepadatan tanah dan ketahanan penetrasi, serta berkurangnya kemantapan struktur tanah.

- i) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sangat berbahaya bila terkontaminasi dengan lingkungan, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan di Kalimantan Selatan diwajibkan untuk mengelola Limbah B3 nya dengan baik dan benar. Perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan, pembangkit listrik dan industri besar lainnya dalam mengelola limbah B3 diatur dengan peraturan khusus, sehingga dalam mengelola, mendistribusikan dan pemusnahannya memerlukan tatacara dan Standart Operasional Prosedur tersendiri.
- j) Pengelolaan sampah skala rumah tangga perlu diterapkan dengan melakukan kegiatan *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

Tujuan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim adalah tersusunnya rencana pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi penyebab perubahan iklim (Gas Rumah Kaca).

d. Tantangan Bonus Demografi

Pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan tahun 2045 akan mencapai 5.096,51 ribu jiwa. Angka ini meningkat sebesar 25,5 persen dari jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2020 sebesar 4.062,58 ribu jiwa.

Rasio ketergantungan penduduk Kalimantan Selatan diproyeksikan oleh BPS pada tahun 2045 mencapai 52,77, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 46,25. Angka 52,77 berarti dari 100 orang usia



produktif akan menanggung 52 atau 53 orang belum atau sudah tidak produktif.

Jumlah penduduk usia produktif di Kalimantan Selatan pada tahun 2045 mencapai 65,46 persen. Proyeksi penduduk usia produktif tahun 2045 lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 mencapai 68,38 persen. Ini berarti terjadi tren penurunan penduduk usia produktif walaupun tipis.

Masih dominannya penduduk usia produktif di Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2045 menjadi modal dasar dalam pembangunan ketenagakerjaan. Walaupun angka usia produktif akan bertahap berkurang sampai tahun 2045, namun bila pemerintah daerah bersama seluruh pihak dapat bersinergi untuk memanfaatkan bonus demografi yang tersisa, maka diharapkan dapat membawa Kalimantan Selatan menjadi daerah yang maju dan sejahtera.

Era bonus demografi yang tersisa untuk Indonesia perlu dimanfaatkan secara tepat dan cepat. Sebab puncak bonus demografi Indonesia sudah terjadi pada 2020. Pada tahun 2020, jumlah usia pekerja cukup tinggi tetapi setelah tahun 2020 mulai menurun. Ini berarti orang-orang di usia kerja akan semakin berkurang. Sementara bila perekonomian diarahkan untuk bertransformasi menuju negara berpendapatan tinggi, maka harus memanfaatkan puncak bonus demografi karena penduduk yang bekerja jumlahnya banyak dan akan menanggung penduduk yang tidak/belum produktif lebih sedikit.

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memerhatikan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS RPJMD disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah telah disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan antara isu PB dengan 10 aspek Lingkungan hidup dalam KLHS, terdapat 4 isu yang menjadi isu paling strategis, yaitu 1. Resiliensi Bencana dan perubahan Iklim, 2. Alih fungsi lahan, 3. Ekonomi hijau, dan 4. Ketahanan pangan.

Rekomendasi KLHS terhadap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program untuk perumusan RPJMD diuraikan sebagai berikut:



1) Rekomendasi Tujuan

Berdasarkan hasil analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Muatan KLHS dan Isu-isu Staregis, terdapat 4 (empat) Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
- 2) Meningkatkan ketahanan ekologi, pangan dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
- 3) Memperkuat fondasi transformasi ekonomi yang produktif, inklusif, merata, dan berkelanjutan
- 4) Meningkatkan Stabilitas Daerah

2) Rekomendasi Sasaran

Terdapat 3 (tiga) sasaran yang direkomendasikan dalam rangka mewujudkan tujuan-1, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ketiga sasaran yang direkomendasikan yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua
- 3) Meningkatnya pemenuhan utilitas dasar

Rekomendasi sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan-2 meningkatkan ketahanan ekologi, pangan dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah:

- 1) Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
- 2) Meningkatnya pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman
- 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Rekomendasi sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan-3 memperkuat fondasi transformasi ekonomi yang produktif, inklusif, merata, dan berkelanjutan adalah:

- 1) Menurunnya tingkat pengangguran
- 2) Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor unggulan penggerak perekonomian daerah
- 3) Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
- 4) Meningkatnya integrasi ekonomi domestik dan global

Rekomendasi sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan-4 Meningkatkan Stabilitas Daerah adalah:

- 1) Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan



- 2) Terciptanya budaya birokrasi yang profesional dan berintegritas
- 3) Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

3) Rekomendasi Strategi dan Program

TUJUAN-1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

Sasaran 1 A: Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan Kesehatan

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat (<i>Universal Health Coverage</i>)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, dan Kotabaru (akses layanan kesehatan masih memerlukan penguatan)
	Program pengawasan ketenagakerjaan	Banjarmasin dan Banjarbaru (wilayah dengan sektor jasa/UMKM tinggi), serta Batulicin
Meningkatkan percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Hulu Sungai Tengah (wilayah dengan kasus malaria endemik lebih tinggi)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tanah Laut (wilayah dengan laporan kasus baru kusta)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tapin (wilayah dengan tantangan eliminasi filariasis lebih tinggi)
Meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat	Program Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong (wilayah dengan prevalensi penyakit tidak menular tinggi)
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesehatan	Kota Banjarmasin dan Banjarbaru (wilayah urban dengan pola hidup sedentari lebih tinggi)
	Pelayanan Kesehatan Dasar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Balangan (akses kesehatan jiwa terbatas)
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu (wilayah dengan prevalensi penyalahgunaan narkotika lebih tinggi)
	Program Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah (wilayah dengan prevalensi perokok cukup tinggi)
Meningkatnya kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Program Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	Kota Banjarmasin dan Banjarbaru
Meningkatkan akses kesehatan terutama di wilayah terpencil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Bumbu (wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan)
Meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak	Program Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong (wilayah dengan akses persalinan fasilitas kesehatan rendah)



Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Hulu Sungai Utara (wilayah dengan cakupan imunisasi anak yang perlu ditingkatkan)
	Program Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Barito Kuala (wilayah dengan angka kelahiran remaja relatif tinggi)
Meningkatkan status gizi masyarakat	Program Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat:	Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut, dan Hulu Sungai Utara (wilayah dengan angka stunting signifikan)

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran 1 B: Meningkatnya Kualitas Pendidikan untuk semua

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Meningkatkan Peningkatan kualitas layanan pendidikan formal dan Non Formal	Program Pengelolaan Pendidikan	Kabupaten Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, dan Tanah Laut (wilayah dengan partisipasi murni SMA/MA rendah)
Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Kabupaten Tabalong, Tanah Bumbu, dan Hulu Sungai Selatan (wilayah dengan jumlah SD/MI terakreditasi B relatif rendah)
Peningkatan akses pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Kabupaten Tabalong, Barito Kuala, dan Tanah Bumbu (wilayah dengan APK perguruan tinggi rendah)

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran 1 C: Meningkatnya pemenuhan utilitas dasar

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Seluruh kabupaten/kota
Optimalisasi pengelolaan sumberdaya air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Hulu Sungai Utara (wilayah dengan akses air bersih terbatas)
Meningkatnya akses terhadap layanan sanitasi	Program Kawasan Permukiman	Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala (wilayah dengan kawasan perkotaan kumuh signifikan)
Meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala (wilayah dengan kawasan perkotaan kumuh signifikan)

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029



TUJUAN-2: Meningkatkan ketahanan ekologi, pangan dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Sasaran 2 A: Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Meningkatkan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Seluruh kabupaten/kota
Meningkatkan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Seluruh kabupaten/kota

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran 2 B: Meningkatnya pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Meningkatnya pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan harga terjangkau	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Seluruh kabupaten/kota
Berkembangnya Provinsi Kalsel sebagai hub pangan di kawasan Kalimantan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Seluruh kabupaten/kota
Menurunnya food loss and food waste kota	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Seluruh kabupaten/kota

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran 2 C: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Meningkatkan konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kabupaten Tabalong (wilayah industri), Kabupaten Barito Kuala (pengelolaan lahan basah), dan Kota Banjarmasin
Optimalisasi pengelolaan sumberdaya air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya:	Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Laut (daerah penting untuk irigasi dan pertanian)
Optimalisasi sistem pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029



TUJUAN-3: Memperkuat fondasi transformasi ekonomi yang produktif, inklusif, merata, dan berkelanjutan

Sasaran 3 A: Menurunnya tingkat pengangguran

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Meningkatkan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenagakerjaan	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Seluruh kabupaten/kota
	Program Penempatan Tenaga Kerja	
Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan	Program pengawasan ketenagakerjaan	Seluruh kabupaten/kota

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran 3 B: Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor unggulan penggerak perekonomian daerah

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Meningkatkan Peningkatan kinerja industri manufaktur komoditas strategis daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kabupaten Tabalong, Tanah Bumbu, dan Barito Kuala (wilayah dengan potensi pengembangan industri manufaktur)
	Program Industri Pengendalian Izin	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
Meningkatkan neraca ekspor daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Perdagangan Internasional:	Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru (wilayah dengan akses pelabuhan dan potensi ekspor)

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran 3 C: Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Meningkatkan skema pembiayaan inovatif	Program pengelolaan pendapatan daerah	Seluruh kabupaten/kota
	Program pengembangan jasa konstruksi	
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
Peningkatan pendapatan daerah bersumber dari pajak dan non pajak	Program pengelolaan pendapatan daerah	Seluruh kabupaten/kota

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran 3 D: Meningkatnya integrasi ekonomi domestik dan global

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Transportasi Umum:	Provinsi Kalimantan Selatan
Meningkatnya Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas	Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (sebagai bagian dari pengembangan wilayah Banjarbakula)



Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
	Pengembangan Kawasan Industri dan Ekonomi Khusus:	Kota Banjarmasin (pusaka budaya sungai), Marabahan di Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Kandangan di Hulu Sungai Selatan

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

TUJUAN-4: Meningkatkan Stabilitas Daerah

Sasaran 4 A: Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Meningkatkan penegakan produk hukum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Kalimantan Selatan
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum:	Provinsi Kalimantan Selatan
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, dan Hulu Sungai Tengah (wilayah dengan kasus kekerasan anak yang tinggi)

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran 4 B: Terciptanya budaya birokrasi yang profesional dan berintegritas

Arahan Strategi	Arahan Program	Lokasi Prioritas
Menerapkan zona integritas pada Perangkat Daerah	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Assistensi	Provinsi Kalimantan Selatan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penerbitan dan Pemanfaatan Dokumen Kependudukan	Program pendaftaran penduduk	Provinsi Kalimantan Selatan
	Program pencatatan penduduk	Provinsi Kalimantan Selatan
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029



f. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Isu pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan gambaran hal-hal yang prioritas harus dilakukan atau ditangani karena sifatnya yang penting dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Faktor eksternal dan internal yang menjadi input bagi perumusan isu strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 antara lain potensi, dan permasalahan daerah; isu strategis KLHS; dan isu lingkungan dinamin baik di tingkat global, nasional, maupun regional. Perumusan isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 2.116.
Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Tantangan	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional (Isu Kalimantan dalam RPJMN)	Isu RPJPD Kalsel	
Jumlah penduduk usia produktif	Bonus demografi	Kepadatan penduduk cenderung meningkat		Perkembangan demografi global. Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55 persen).	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyakit menular tropis seperti malaria (tertinggi di Kalimantan Timur).	Pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal	1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah
Masyarakat Kalsel yang adaptif dan terbuka terhadap kemajuan pembangunan	Pengembangan IKN membutuhkan tenaga kerja yang banyak, namun tenaga kerja Kalsel belum secara signifikan ikut berkontribusi	Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia. Pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat belum optimal Masalah ketimpangan gender masih mewarnai pembangunan Cenderung meningkatnya ketimpangan pendapatan Belum optimalnya penanganan kemiskinan walaupun sudah berada pada peringkat 2 terendah se-Indonesia		Peningkatan urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan talenta tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.	Kehidupan sosial masyarakat serta budaya lokal sebagai modal sosial perlu diperkuat dan dilestarikan.	
						Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara.		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



Potensi Daerah	Tantangan	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				Isu Strategis Daerah	
				Global	Nasional	Regional (Isu Kalimantan dalam RPJMN)	Isu RPJPD Kalsel		
Pengembangan wilayah yang terpadu melalui 3 klaster (Banjarbakula, Banua Anam, dan Saijaan Bersujud)	Kemajuan IPTEK	Belum optimalnya pembangunan dan mutu layanan sarana dan prasarana wilayah		Pertumbuhan kelas menengah (<i>middle class</i>). Jumlah middle dan upper class lebih dari 90 persen (8,8 miliar).	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi.	2. Infrastruktur Dasar, Layanan Sosial, dan Teknologi yang Belum Merata dan Berkualitas	
		Konektivitas wilayah belum terintegrasi secara optimal			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.				Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan di berbagai sektor.
		Belum optimalnya cakupan dan mutu pelayanan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM)							
Posisi strategis berdampingan dengan IKN	IKN sebagai pusat dari superhub ekonomi di Kalimantan dapat menjadi kompetitor dalam menarik investasi	Belum kokohnya perekonomian daerah.	Alih Fungsi Lahan	Geopolitik dan geoekonomi. Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya	Pengembangan ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sementara sektor lainnya belum dikembangkan secara optimal.	3. Ketergantungan Ekonomi pada SDA Tak Terbarukan dan Minimnya Hilirisasi	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



Potensi Daerah	Tantangan	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional (Isu Kalimantan dalam RPJMN)	Isu RPJPD Kalsel	
Kekayaan alam terutama di sektor pertambangan dan penggalan, pertanian, kelautan & perikanan	Pengembangan gerbang logistik di Kalimantan membutuhkan perencanaan dan pendanaan yang besar	Belum optimalnya pengembangan sektor-sektor unggulan dan potensial yang akan mendorong transformasi ekonomi	Ekonomi Hijau	Konstelasi perdagangan global. Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun.		dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.	Hilirisasi industri dan industri non ekstraktif belum dikembangkan sebagai sektor unggul di masa datang, terutama untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara.	
Potensi yang besar pada sektor perdagangan dan industri		Struktur perekonomian daerah berkelanjutan yang masih rentan		Pemanfaatan luar angkasa (<i>space economy</i>). Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.				
Keuikan budaya menjadi daya tarik pariwisata dan <i>Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition</i> (MICE)								
Pemenuhan kebutuhan pangan di IKN menjadi peluang bagi Kalsel	Kebutuhan pangan dapat dipasok dari daerah lain khususnya provinsi lain di Kalimantan dan sebagian Sulawesi	Pengelolaan sumber daya alam selain pertambangan dan penggalian belum dioptimalkan. Potensi pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, dan perdagangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan.	Ketahanan Pangan	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.				
				Perkembangan teknologi. Teknologi akan menggantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam potensial yang berkelanjutan dan terintegrasi antarwilayah kabupaten/kota.	4. Kesenjangan Pembangunan dan Keterhubungan Antarwilayah Belum Merata

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



Potensi Daerah	Tantangan	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional (Isu Kalimantan dalam RPJMN)	Isu RPJPD Kalsel	
						infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.		
Adanya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengelola lingkungan hidup secara bijak.	Mempertahankan kualitas lingkungan yang seimbang dengan kemajuan pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya potensi bencana	Resiliensi Bencana dan perubahan Iklim	Perubahan iklim. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya.	Belum optimalnya pembangunan yang memerhatikan kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan resilien terhadap bencana.	5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang Belum Optimal
Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi		Belum optimalnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), walaupun dari tahun ke tahun sudah menunjukkan semakin besarnya penurunan emisi untuk memenuhi baseline						
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan kinerja pemerintah yang sangat baik	Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan prima terhadap kebutuhan masyarakat	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah		Tata kelola keuangan global. Pergeseran kebijakan fiskal, <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDB), dan Fintech.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.	6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal
SDM aparatur yang dapat beradaptasi dan terus bergerak maju		Kualitas pelayanan publik masih belum optimal						

Sumber: hasil analisis, 2025



Rumusan isu strategis pembangunan Kalimantan Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah, potensi dan tantangan daerah, KLHS RPJMD, serta telaahan dinamika di tingkat global, nasional, dan regional. Isu-isu strategis yang penting dan berdaya ungkit untuk pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2025-2029, yaitu:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu isu utama baik di tingkat nasional maupun regional. Pada pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan 20 tahun kedepan, isu tersebut kembali diangkat. Sebagai tahap pertama pembangunan jangka panjang Kalimantan Selatan periode 2025-2029, maka akan dilakukan penguatan fondasi transformasi pembangunan SDM. Percepatan pembangunan SDM akan ditempuh dengan transformasi sosial yang dititikberatkan pada penuntasan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas SDM dapat membentuk manusia yang produktif dan berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan kompetisi ketenagakerjaan global.

Transformasi sosial di Indonesia diiringi dengan transformasi digital yang membutuhkan SDM digital yang kompeten. Dalam mewujudkan SDM digital yang berkualitas, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti belum meratanya akses terhadap infrastruktur digital, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, serta ketidakseimbangan pasar tenaga kerja.

Isu mengenai kualitas SDM perempuan dan laki-laki yang belum seimbang masih menjadi tantangan dalam pembangunan. Ketidakseimbangan ini tampak dalam aspek pendidikan, keterampilan, akses terhadap pekerjaan layak, serta kesempatan untuk menduduki posisi strategis. Perempuan kerap menghadapi hambatan struktural maupun kultural yang membatasi ruang partisipasi dan pengembangan potensinya, sementara laki-laki lebih banyak memperoleh akses terhadap peluang peningkatan kualitas SDM. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya pemanfaatan seluruh potensi penduduk, sehingga menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.



Selanjutnya, kondisi sosial budaya menjadi salah satu modal dalam pembangunan daerah. Ditengah pesatnya kemajuan informasi dan teknologi yang memungkinkan seluruh masyarakat dunia dapat berinteraksi tanpa batas, kita perlu upaya konkrit untuk memperkuat sosial budaya yang difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya. Peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat perlu diperkuat secara berkesinambungan. Dengan demikian, kemajuan peradaban 20 tahun mendatang tidak serta merta menghilangkan jati diri dan nilai-nilai budaya serta agama warga masyarakat Kalimantan Selatan.

2. Infrastruktur Dasar, Layanan Sosial, dan Teknologi yang Belum Merata dan Berkualitas

Percepatan pengembangan wilayah Kalimantan Selatan membutuhkan sarana dan prasarana yang andal. Untuk itu perlu optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah.

Transformasi pembangunan jangka panjang dan menengah membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dasar, transportasi, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, serta infrastruktur sosial dan ekonomi, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan penerapan teknologi rendah karbon. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana diharapkan secara bertahap dapat menjangkau seluruh daerah di Kalimantan Selatan. Mutu pelayanan juga menjadi prioritas untuk secara terus menerus ditingkatkan sehingga dapat memberikan kualitas yang terbaik dan mampu memenuhi standar nasional maupun internasional.

Konektivitas daerah menjadi salah satu isu besar dalam pengembangan wilayah, terutama bagi Kalimantan Selatan yang akan diposisikan sebagai gerbang logistik di Kalimantan. Kondisi saat ini yang dihadapi adalah belum terintegrasinya konektivitas inter dan intra wilayah sehingga upaya pembangunan daerah dirasakan belum optimal.

Konektivitas yang baik membutuhkan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan yang berkualitas dan saling terintegrasi. Pengembangan konektivitas tidak saja terbatas pada sistem transportasi tapi dalam arti luas, meliputi pengembangan sistem



jaringan transportasi (jalan, kereta api, sungai, danau, dan penyeberangan, laut, dan bandar udara), sistem jaringan energi (infrastruktur minyak dan gas bumi; dan infrastruktur ketenagalistrikan), sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air (irigasi, air bersih, pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air), sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan limbah, dan sistem persampahan, serta sistem jaringan lainnya. Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan menjadi agenda dalam pembangunan daerah jangka panjang, dan pada periode pembangunan tahap pertama RPJPD Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 sudah mulai dilaksanakan.

Kebutuhan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang maju dan menjangkau seluruh wilayah telah dirasakan oleh seluruh penduduk dunia. Dengan kemajuan TIK, masyarakat tidak hanya dapat berkomunikasi dari mana saja, namun telah mendorong berkembang pesatnya kualitas pelayanan di sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang dan menengah, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mendorong kemajuan dan penerapan TIK dalam berbagai sektor pembangunan.

Lebih lanjut, isu lain yang dihadapi adalah belum optimalnya jangkauan dan mutu pelayanan dasar. Pelayanan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum, air limbah, perumahan, ketentraman dan ketertiban, rehabilitasi sosial dalam panti dan penanganan korban bencana masih belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk itu pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi penerapan SPM perlu segera ditata dan ditingkatkan. Penerapan SPM yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.

3. Ketergantungan Ekonomi pada SDA Tak Terbarukan dan Minimnya Hilirisasi

Potensi sumber daya alam (SDA) Provinsi Kalimantan Selatan yang didominasi dengan pertambangan dan penggalian menjadi tantangan



besar bagi kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor tersebut telah memberikan dampak besar bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun potensi besar di sektor pertambangan dan penggalan perlu diimbangi dengan pengembangan sektor ekonomi lainnya, mengingat produksi tambang dan hasil penggalan akan mengalami penurunan dan pada akhirnya akan habis.

Transformasi ekonomi daerah dalam 20 tahun kedepan akan diarahkan untuk mengembangkan hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan hilirisasi industri dan industri non ekstraktif. Dengan demikian, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak perlu dipersiapkan untuk memasuki era hilirisasi sumber daya alam dan hilirisasi industri yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan untuk menciptakan ekonomi hijau.

Kalimantan Selatan memiliki potensi di sektor pariwisata yang masih belum dikembangkan secara optimal. Terdapat potensi untuk pengembangan destinasi pariwisata bertaraf internasional berbasis alam, budaya dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Selain potensi pengembangan industri pariwisata, di Kalimantan Selatan terdapat potensi ekonomi kreatif. Peranan ekonomi kreatif pada tahun 2022 mencapai 4,89 persen dari total PDRB. Data menunjukkan tiga subsektor terbesar yang memberikan kontribusi pada sektor ekonomi kreatif adalah kuliner, fashion, dan kriya. Ketiganya menyumbang 80,43 persen terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan.

Kebijakan nasional yang telah digagas beberapa waktu lalu terkait hilirisasi, menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan jangka panjang baik di tingkat nasional maupun daerah. Hilirisasi industri dan industri non ekstraktif di Kalimantan Selatan belum berkembang dengan baik, dan masih dalam tahap persiapan pengembangan yang selaras dengan kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah pusat. Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya hilirisasi sumber daya alam terutama yang menjadi unggulan daerah dan memiliki potensi untuk pengembangan jangka panjang. Hilirisasi membutuhkan peningkatan produktivitas tenaga kerja; penerapan teknologi, informasi, dan



komunikasi termasuk akses digital; pengembangan inovasi; penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru; dan pengembangan perkotaan dan perdesaan.

4. Kesenjangan Pembangunan dan Keterhubungan Antarwilayah Belum Merata

Potensi sumber daya alam dari sektor pertambangan dan penggalian selama ini menjadi andalan bagi perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Walau demikian, terdapat sumber daya lainnya yang berkembang dan menjadi pendorong berkembang ekonomi daerah-daerah di Kalimantan Selatan.

Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beragam potensi sumber daya sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing. Namun tidak sedikit daerah yang belum mengelola dan mengembangkan potensinya dengan baik dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan kepaduan dalam pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia.

Hal utama lain yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah belum optimalnya konektivitas infrastruktur fisik dan ekonomi. Konektivitas infrastruktur fisik dan ekonomi belum terintegasi, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Masih terdapat beberapa wilayah dengan aksesibilitas yang sulit dijangkau atau memiliki kondisi transportasi yang tidak memadai maupun dalam kondisi rusak. Kondisi ini tidak saja dalam hal transportasi namun juga telekomunikasi. Permasalahan ini menyulitkan distribusi barang dan jasa baik antar maupun inter wilayah Kalimantan Selatan, yang berdampak pada ekonomi biaya tinggi.

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang Belum Optimal

Pendapatan daerah yang meningkat dari tahun ke tahun menjadi keinginan setiap daerah, dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi seringkali berdampak sebaliknya pada kelestarian



lingkungan hidup dan berpengaruh buruk pada ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana.

Beberapa daerah di wilayah Kalimantan Selatan masih rentan terhadap bencana dan perubahan iklim. Terjadinya degradasi lingkungan, deforestasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan pengelolaan sumber daya alam yang belum berkelanjutan termasuk belum terkelolanya mangrove secara baik, penggunaan energi yang belum bersih, pengelolaan dan pemanfaatan air yang belum bijak, merupakan sebagian pemicu masalah lingkungan hidup yang juga berdampak pada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi ini belum diimbangi dengan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan.

Menghadapi kondisi tersebut di atas, dan menanggapi tantangan dunia terhadap komitmen bersama mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan salah satu agendanya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan adaptasi terhadap perubahan iklim, maka diangkat isu pembangunan jangka panjang dan menengah terkait kelestarian lingkungan.

Pembangunan akan difokuskan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan potensi bencana, penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan demikian, diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK serta peningkatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana.

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Belum Efektif dan Akuntabel

Pengelolaan pemerintahan daerah masih dihadapkan pada berbagai kondisi yang belum optimal dan tantangan berupa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, serta pelayanan publik yang semakin baik dan akuntabel berbasis TIK. Dalam merespon kondisi dan tantangan yang ada, maka tata kelola pemerintahan daerah untuk pembangunan jangka panjang dan menengah akan difokuskan pada penataan dan transformasi regulasi, kelembagaan, proses bisnis, manajemen talenta, meritokrasi dan integritas, manajemen ASN strategis, pelayanan publik, pelayanan strategis, digitalisasi, tata kelola partai politik dan relasi pemerintah dengan masyarakat sipil.



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan tahun 2025-2030 telah menjadi Visi daerah yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan Kalimantan Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pernyataan visi RPJMD Tahun 2025-2029 selaras dengan visi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 yaitu **“KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN MENUJU BABUSSALAM”**. Visi tersebut memiliki makna dalam 20 tahun ke depan, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi gerbang logistik di Kalimantan. Posisi strategis Kalimantan Selatan yakni pintu gerbang IKN diharapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan global di Selatan Pulau Kalimantan sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara, yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, perumusan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 juga selaras dengan tujuan penataan ruang sebagaimana dimuat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 adalah untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di Selatan Pulau Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar kabupaten/kota dalam hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.

Keselarasan visi gubernur dan wakil gubernur dengan visi RPJPD dan tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Selatan menghasilkan rumusan visi RPJMD. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah:



KALSEL BEKERJA

(BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA)

MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN

Pokok-pokok pernyataan Visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

- a. BEKERJA; Ikhtiar melakukan sesuatu yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya.
- b. BERKELANJUTAN; 1). melanjutkan pembangunan periode sebelumnya; dan 2). pembangunan yang seimbang antara sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.
- c. BERBUDAYA; masyarakat yang memiliki warisan budaya, norma, dan nilai-nilai yang membentuk identitas dan memiliki pikiran dan akal yang maju.
- d. RELIGI; masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada adanya Tuhan dan memiliki nilai moral serta etika.
- e. SEJAHTERA; kebutuhan jasmaniah, rohani, dan rasa aman yang terpenuhi bagi masyarakat.
- f. GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN; pintu keluar masuk untuk distribusi barang dan jasa keseluruh Kalimantan, mulai dari pusat produksi, pengolahan, pergudangan, dan pengiriman ke konsumen.

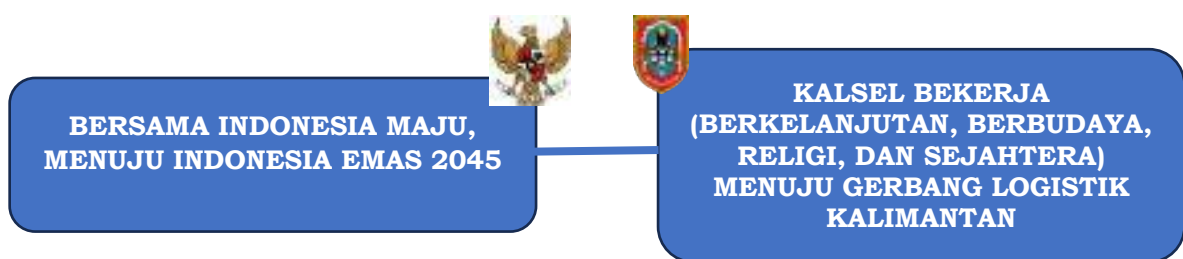
Provinsi Kalimantan Selatan memiliki posisi yang sangat strategis di Pulau Kalimantan, yakni sebagai gerbang logistik dari Indonesia bagian barat menuju tengah dan timur Kalimantan. Letaknya yang berada di bagian selatan pulau, menghadap langsung ke Laut Jawa, memberikan keuntungan geografis berupa akses laut yang efisien untuk arus barang nasional maupun internasional. Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, sebagai pelabuhan utama di provinsi ini, telah berkembang menjadi salah satu simpul logistik penting di Indonesia timur. Keunggulan ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang utama distribusi logistik, komoditas, dan bahan baku, tidak hanya untuk wilayahnya sendiri, tetapi juga untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan hingga IKN Nusantara.

Dalam konteks pembangunan IKN, Provinsi Kalimantan Selatan diposisikan sebagai daerah penyangga strategis yang mendukung pasokan logistik, infrastruktur dasar, dan konektivitas antarprovinsi. Kalimantan Selatan memiliki jaringan jalan nasional, pelabuhan, serta jalur sungai



yang mendukung konektivitas barang dan mobilitas penduduk ke arah IKN secara efisien. Selain itu, sumber daya yang dimiliki Kalimantan Selatan seperti hasil tambang, bahan bangunan, hasil pertanian dan peternakan, serta energi merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan dan penghidupan masyarakat di IKN.

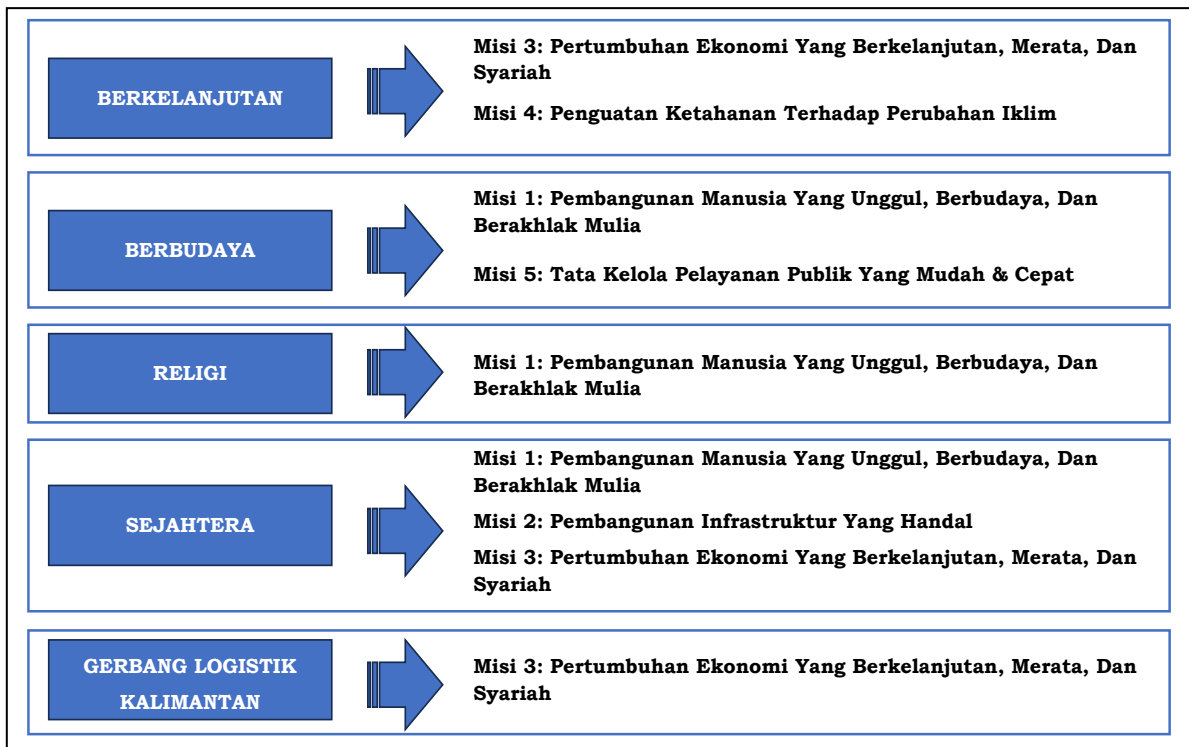
Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 selaras dengan visi RPJMN Tahun 2025-2029. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Hubungan visi RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1.

Keterkaitan Visi RPJMD dan Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMD diwujudkan melalui misi yang jelas dan menggambarkan pencapaian pokok-pokok visi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan menggambarkan kondisi yang diharapkan dapat terwujud selama 5 (lima) tahun ke depan. Gambaran perwujudan visi melalui 5 (lima) misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, ditunjukkan pada gambar di bawah. Sebuah pokok Visi dapat diwujudkan dengan satu atau lebih dari satu Misi. Antar Misi memiliki keterkaitan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.



Gambar 3.2.

**Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2025-2029**

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, meliputi:

**MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA,
DAN BERAKHLAK MULIA**

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) selain difokuskan pada penguatan pendidikan dan kesehatan, juga diarahkan pada aspek spiritual dan nilai-nilai hidup yang luhur, berbudaya, dan berakhlak mulia.

MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL

Pembangunan di berbagai sektor didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendorong perekonomian daerah serta posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik. Penyediaan sarana dan prasarana diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah serta tekoneksi dengan wilayah lain.



MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH

Perekonomian daerah dikembangkan dengan mengelola sumber daya alam didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, dan infrastruktur yang handal. Penerapan inovasi serta teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan ekonomi global. Posisi strategis Kalimantan Selatan yang berdampingan dengan IKN menjadi peluang untuk mewujudkan gerbang logistik yang maju dan unggul.

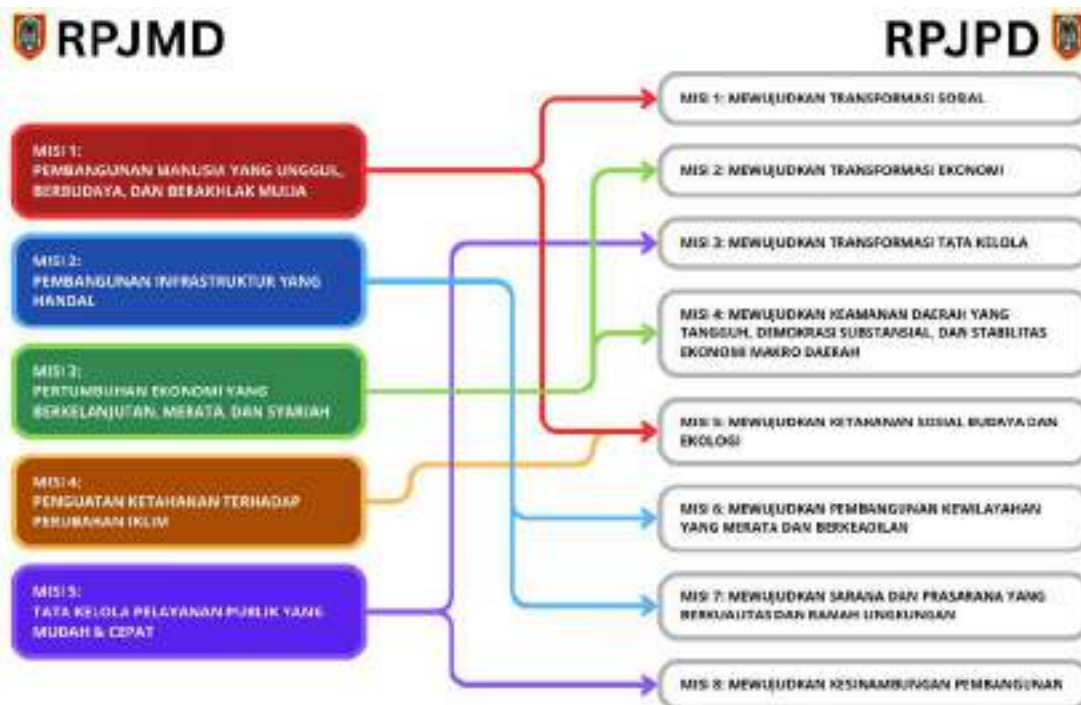
MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Pembangunan daerah dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, sehingga akan memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana. Sumber daya alam dan potensi wilayah dikelola secara berimbang sehingga selain bermanfaat untuk peningkatan perekonomian daerah, juga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT

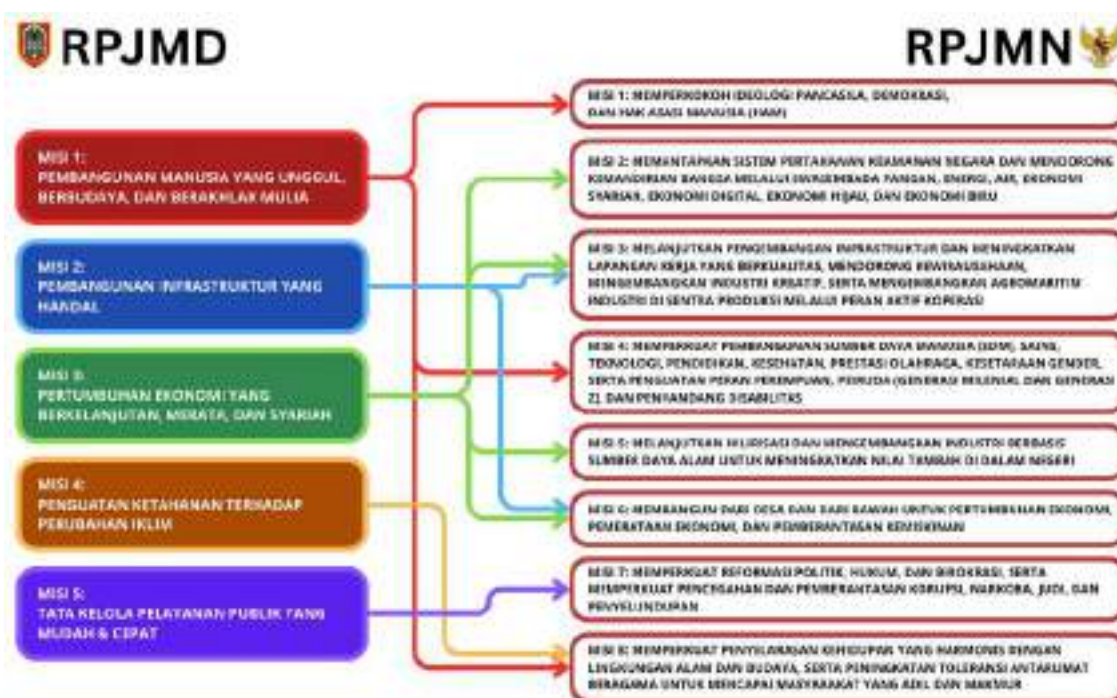
Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengedepankan prinsip profesional, bersih, dan melayani serta berbasis digital. Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan menjadi komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus daya tarik bagi peningkatan investasi daerah.

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, selain merupakan penjabaran dari misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam Gambar 3.3, juga memiliki keselarasan dengan misi RPJMN Tahun 2025-2029. Keselarasan dengan misi RPJMN 2025-2029 juga menjadi bentuk dukungan Kalimantan Selatan terhadap Asta Cita (lihat Gambar 3.4).



Gambar 3.3.

Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan



Gambar 3.4.

Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran daerah dirumuskan berdasarkan misi dan memiliki keterkaitan dengan visi RPJMD. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.



Sementara Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan daerah, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan RPJMD dirumuskan dengan menjabarkan Visi dan memedomani Misi, serta mempertimbangkan isu-isu strategis daerah. Berdasarkan hasil perumusan, maka terdapat beberapa tujuan yang dirumuskan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) isu strategis dan terkait dengan beberapa pokok visi. Demikian juga sebuah isu strategis daerah dapat menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan lebih dari 1 (satu) rumusan tujuan. Adapun gambaran keterkaitan antara isu strategis dan pokok visi yang menjadi landasan bagi perumusan tujuan RPJMD diuraikan sebagai berikut:

Isu Strategis:	<ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur Dasar, Layanan Sosial, dan Teknologi yang Belum Merata dan Berkualitas b. Ketergantungan Ekonomi pada SDA Tak Terbarukan dan Minimnya Hilirisasi c. Kesenjangan Pembangunan dan Keterhubungan Antarwilayah Belum Merata d. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang Belum Optimal
Pokok Visi:	BERKELANJUTAN
Misi:	Misi 3: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah
Tujuan:	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan b. Kesenjangan Pembangunan dan Keterhubungan Antarwilayah Belum Merata
Misi:	Misi 4: Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
Tujuan:	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana
Isu Strategis:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah b. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Belum Efektif dan Akuntabel
Pokok Visi:	BERBUDAYA
Misi:	Misi 1: Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia
Tujuan:	Menguatnya fondasi transformasi sosial



Misi: Misi 5: Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah & Cepat
 Tujuan: Menguatnya fondasi transformasi tata kelola pemerintahan

Isu Strategis: Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah
 Pokok Visi: RELIGI
 Misi: Misi 1: Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia
 Tujuan: Menguatnya fondasi transformasi sosial

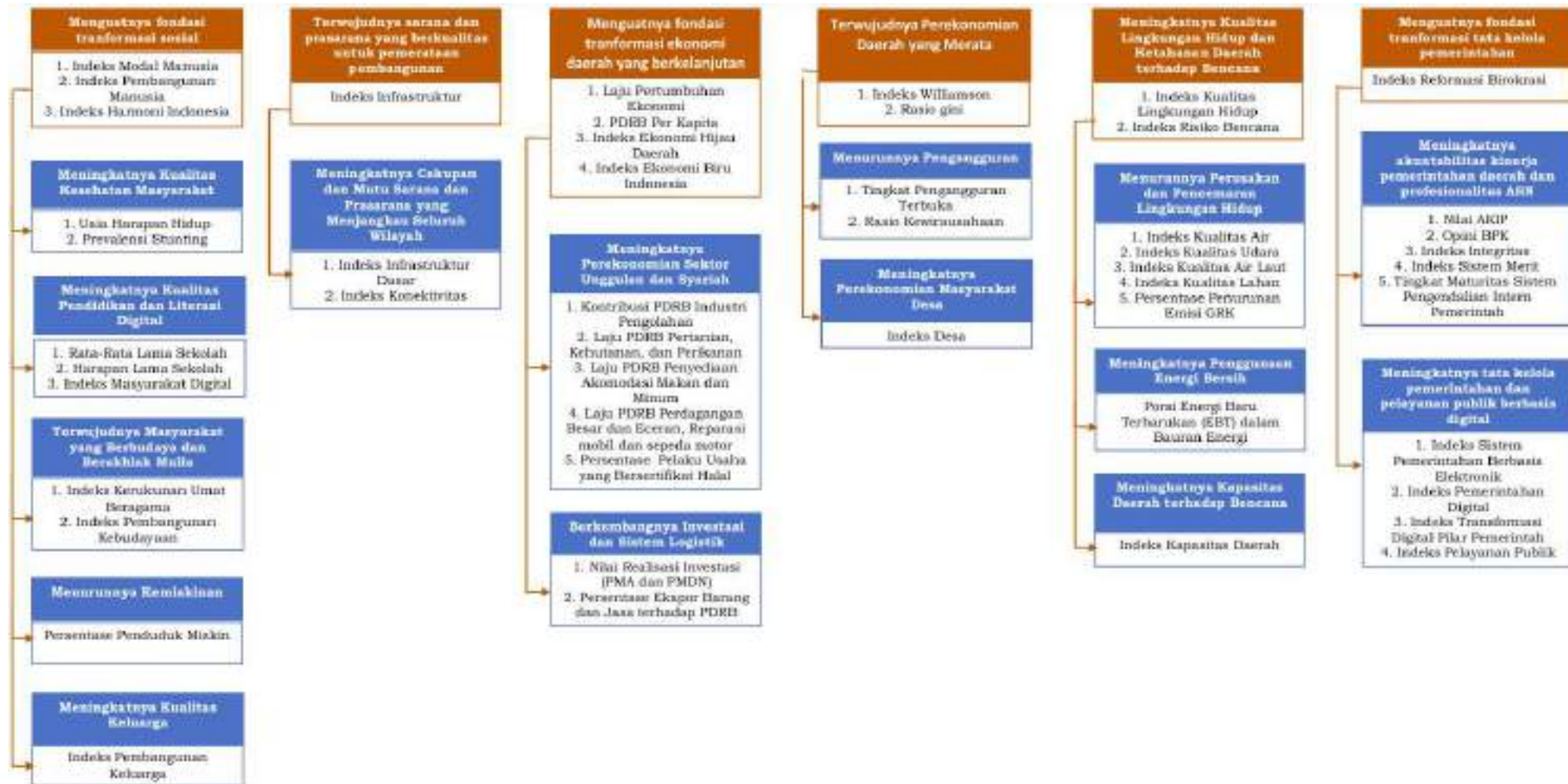
Isu Strategis: a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah
 b. Infrastruktur Dasar, Layanan Sosial, dan Teknologi yang Belum Merata dan Berkualitas
 c. Ketergantungan Ekonomi pada SDA Tak Terbarukan dan Minimnya Hilirisasi
 d. Kesenjangan Pembangunan dan Keterhubungan Antarwilayah Belum Merata
 Pokok Visi: SEJAHTERA
 Misi: Misi 1: Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia
 Tujuan: Menguatnya fondasi transformasi sosial
 Misi: Misi 2: Pembangunan Infrastruktur yang Handal
 Tujuan: Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan
 Misi: Misi 3: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah
 Tujuan: a. Menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
 b. Kesenjangan Pembangunan dan Keterhubungan Antarwilayah Belum Merata

Isu Strategis: Infrastruktur Dasar, Layanan Sosial, dan Teknologi yang Belum Merata dan Berkualitas
 Pokok Visi: MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN
 Misi: Misi 3: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah
 Tujuan: a. Menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
 b. Kesenjangan Pembangunan dan Keterhubungan Antarwilayah Belum Merata



Hubungan tujuan dan sasaran memberikan gambaran penjenjangan (*cascading*) kinerja. Penjenjangan kinerja ini akan dilanjutkan sampai ke tingkatan paling rendah yakni output di Renstra Perangkat Daerah. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dinyatakan dengan pernyataan yang jelas dan diukur dengan indikator kinerja. Masing-masing indikator kinerja disertai dengan target per tahun yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan tahunan.

Penjenjangan atau *cascading* kinerja pembangunan jangka menengah dimuat pada Gambar 3.5. Sementara rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 secara rinci disajikan pada Tabel 3.1.



Gambar 3.5.

Cascading Kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Sumber: hasil analisis, 2025



Tabel 3.1.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

MISI, TUJUAN, & SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET						
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN											
BERBUDAYA - RELIGI											
1	MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA										
1.1	Menguatnya fondasi transformasi sosial	1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,55	0,56	0,57	0,59	0,6	0,61	0,62
		2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,19	75,48	75,99	76,50	77,00	77,51	77,99
		3	Indeks Harmoni Indonesia*	Indeks	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,18	74,42	74,66	74,91	75,15	75,39	75,64
		2	Prevalensi Stunting	Persen	22,9	21,6	19,5	18,88	18,25	17,63	16,83
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,71	8,8	8,88	8,97	9,05	9,14
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,33	13,46	13,59	13,72	13,86	13,99
		3	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	44,62	50,12	56,31	63,25	71,06	79,82	89,67
1.1.3	Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	74,01	74,3	74,7	75,1	75,51	75,91	76,32
		2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61,65	59,81-59,89	60,38-60,5	60,96-61,11	61,53-61,72	62,1-62,33	62,67-62,94
1.1.4	Menurunnya Kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,02	3,44-3,94	3,23 - 3,46	2,91 - 3,41	2,61 - 3,11	2,30-2,64	1,89-2,39
1.1.5	Meningkatnya Kualitas Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,9	65,95	69,5	73,5	77	80	82,2



MISI, TUJUAN, & SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET						
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
SEJAHTERA											
2	MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL										
2.1	Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan		Indeks Infrastruktur	Indeks	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71
2.1.1	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	1	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	0,45	0,49	0,51	0,53	0,56	0,58	0,60
		2	Indeks Konektivitas	Indeks	0,85	0,85	0,91	0,98	1,02	1,09	1,13
BERKELANJUTAN - SEJAHTERA - GERBANG LOGISTIK											
3	MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH										
3.1	Menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,3 - 5,4	5,6 - 6,4	5,7 - 7,7	5,8 - 7,8	5,8 - 8,1	6,2 - 8,2
		2	PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	60.210	68.940-72.700	77.210-81.280	85.470-89.860	93.740-98.440	102.000-107.000	110.270-115.580
		3	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	53,01	54,73	56,525	58,32	60,115	61,91	63,35
		4	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	22,67	23,78	24,943	26,105	27,268	28,43	29,35
3.1.1	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah	1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	10,95	11,68	11,88	12,07	12,27	12,46	12,66
		2	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,16	5,4	5,95	6,5	7,05	7,6	8,15
		3	Laju PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	8,07	8,08	8,09	8,09	8,09	8,1	8,1
		4	Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	6,36	6,37	6,37	6,38	6,39	6,39	6,4



MISI, TUJUAN, & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE		TARGET				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		5	Persentase Produk Tersertifikasi Halal	Persen	4,35	4,79	5	5,5	6	6,5	7
3.1.2	Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	1	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Triliun Rupiah	24,85	25,40	26,40	27,40	28,40	29,40	30,40
		2	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	67,12	77,74	78,4	79,07	79,75	80,3	80,82
3.2	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Merata	1	Indeks Williamson	Indeks	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433
		2	Rasio gini	Poin	0,298	0,290 - 0,301	0,285 - 0,296	0,280 - 0,291	0,275 - 0,286	0,270 - 0,281	0,262- 0,274
3.2.1	Menurunnya Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,2	3,63 - 4,18	3,56 - 4,14	3,48 - 4,10	3,39 - 4,04	3,29 - 3,97	3,20-3,83
		2	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,95	3,02	3,07	3,12	3,16	3,21	3,26
3.2.2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa		Indeks Desa	Indeks	77,01	77,5	78,22	78,94	79,65	80	80,5
BERKELANJUTAN											
4	MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM										
4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,59	72,32	72,51	72,71	72,90	73,10	73,29
		2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	103,75**	83,79	82,75	82,07	81,62	81,14	80,49
4.1.1	Menurunnya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,08	70,52	72,72	72,92	73,12	73,32	73,52
		2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	96,41	70,97	71,27	71,57	71,87	72,17	72,47
		3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	84,27	80,05	80,1	80,16	80,21	80,27	80,32
		4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	52	70,37	70,44	70,51	70,58	70,65	70,72
		5	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan)	Persen	26,6	22,95	26,86	33,13	35,5	34,49	40,43



MISI, TUJUAN, & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE		TARGET				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1.2	Meningkatnya Penggunaan Energi Bersih		Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	Persen	11,93	15	16,8	18,6	20,4	24	25,8
4.1.3	Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66
BERBUDAYA											
5	MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT										
5.1	Menguatnya fondasi transformasi tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,54	84,68	84,82	84,96	85,1	85,24	85,39
5.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN	1	Nilai SAKIP	Poin	A (82,04)	82,96	83,88	84,82	85,76	86,72	87,69
		2	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3	Indeks Integritas	Indeks	71,53	76,36	77,34	78,32	79,29	80,27	81,05
		4	Indeks Sistem Merit	Indeks	279	325	330	335	340	345	350
		5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	3	3,05	3,08	3,1	3,16
5.1.2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintahan Digital***	Indeks	3,63	3,63	1,64	1,84	2,04	2,24	2,44
		2	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	N/A	54,05	54,95	55,85	56,75	57,65	58,55
		3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,58	4,6	4,61	4,63	4,65	4,67

Sumber: hasil analisis, 2025

Keterangan:

* Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah merupakan indikator baru, sehingga tahun 2024 belum ada realisasi.

** Indeks Risiko Bencana tahun 2024 menggunakan hasil konversi metode baru

*** Indeks SPBE secara nasional hanya berlaku sampai tahun 2025, selanjutnya diganti dengan Indeks Pemerintahan Digital mulai tahun 2026.



3.1.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Pelaksanaan pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan akan diarahkan sesuai prioritas daerah, yaitu:

1. Memperkuat Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.
2. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur yang Handal.
3. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah.
4. Memantapkan Pembangunan Rendah Karbon dan Memperkuat Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana.
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.



Gambar 3.6.

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subbab ini memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus, dan penentuan program



prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan pada subbab ini akan menyajikan rangkaian penahapan pembangunan, fokus kewilayahan, dan program prioritas pembangunan daerah.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Prioritas tahunan merupakan fokus yang memberikan panduan pembangunan tahun yang berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penahapan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang memuat prioritas pembangunan tahunan disajikan pada gambar di bawah.



Gambar 3.7.

**Penahapan Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahap I yakni periode tahun 2025-2029 mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi”, sebagaimana termuat dalam gambar di atas. Setiap tahapan tersebut memberikan gambaran fokus pembangunan daerah secara umum. Penjelasan setiap tahapan pembangunan diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2026 – Peningkatan Daya Saing SDM dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang Mendukung Pusat Distribusi Regional

Pada awal periode RPJMD, pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) antara lain meliputi pendidikan termasuk pendidikan vokasi, dan sistem kesehatan yang inklusif. Pemerintah provinsi mengembangkan model pembelajaran berbasis teknologi, mendorong



revitalisasi SMK sesuai kebutuhan pasar, serta memperluas akses pelatihan kerja berbasis wilayah. Layanan kesehatan diperkuat dengan pendekatan promotif dan preventif termasuk GERMAS, serta integrasi program pencegahan stunting, gizi anak, dan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dilaksanakan dengan skema berbasis komunitas dan digitalisasi layanan. Selain itu, revitalisasi kelembagaan adat dan pelestarian budaya lokal diperkuat sebagai bagian dari karakter Kalimantan Selatan yang berbudaya dan religius. Tahun ini menjadi titik balik dalam mempersiapkan generasi produktif Kalimantan Selatan yang berdaya saing dan berkarakter religius dan budaya.

Tahun 2027 – Penguatan Investasi dan Perekonomian Dengan Infrastruktur Terintegrasi yang Berkualitas

Memasuki tahun kedua, pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan difokuskan pada pengembangan investasi. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi strategis karena wilayah berada pada simpul perdagangan regional dengan dukungan pelabuhan samudera, jaringan sungai, dan kedekatan dengan IKN. Basis ekonomi daerah yang kuat di sektor pertambangan, pertanian, perdagangan dan perindustrian memberikan fondasi bagi pengembangan hilirisasi, khususnya pengolahan mineral non-logam, oleokimia, dan produk pertanian dan perikanan bernilai tambah. Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan mulai diarahkan menuju hilirisasi dan produksi berkelanjutan, sejalan dengan semangat ekonomi hijau dan rendah emisi. Pembangunan diarahkan untuk mendorong diversifikasi menuju sektor ramah lingkungan seperti energi baru terbarukan, pariwisata berbasis alam dan budaya, dan digitalisasi layanan.

Pengembangan konektivitas antarwilayah menjadi faktor pendorong iklim investasi yang mendorong berkembangnya perekonomian daerah. Tahun ini juga menitikberatkan pada mengembangkan hub logistik berbasis darat, sungai, dan pelabuhan yang menghubungkan wilayah Hulu–Tengah–Hilir Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur (IKN), sehingga memperkuat peran provinsi sebagai koridor logistik regional.

Tahun 2028 – Pemantapan Infrastruktur Logistik dan Pelayanan Publik yang Prima

Tahun ketiga diarahkan untuk pemantapan sistem layanan publik terpadu berbasis digital dan reformasi birokrasi yang nyata. Penguatan



digitalisasi pemerintahan daerah, layanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja birokrasi dilakukan secara menyeluruh. Program-program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat semakin adaptif dan inklusif melalui transformasi digital dan kemitraan multisektor.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan arah pembangunan jangka menengah dan panjang yang menekankan peran sebagai gerbang logistik dan perdagangan regional, termasuk pengembangan kawasan industri hijau, sentra distribusi, dan jaringan perdagangan modern. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api potensial, pelabuhan pengumpan, dan pengembangan gerbang logistik diarahkan untuk mendukung kelancaran rantai pasok IKN secara efisien dan berkelanjutan.

Tahun 2029 – Pemantapan Investasi Daerah yang Mendorong Hilirisasi SDA dengan Pelayanan Publik yang Prima

Tahun keempat merupakan fase transformasi ekonomi wilayah menuju sistem ekonomi hijau dan berkelanjutan. Fokus diarahkan pada penguatan sektor unggulan (antara lain pertanian modern, perikanan budidaya, kehutanan sosial) yang didorong oleh inovasi, teknologi, dan keterlibatan UMKM lokal. Kawasan strategis provinsi seperti Batulicin, Banjarmasin, dan Banjarbaru difungsikan sebagai klaster pertumbuhan baru berbasis industri hilirisasi dan ekonomi sirkular. Insentif investasi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan dan menciptakan nilai tambah di daerah. Penataan ruang dan pengendalian alih fungsi lahan juga diperkuat untuk menjamin kelestarian ekosistem DAS dan kawasan penyangga. Literasi iklim juga dikembangkan di sektor pendidikan dan masyarakat untuk memperkuat kesadaran ekologis. Tahun ini juga memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai sumber pangan, energi bersih, dan hasil tambang terolah untuk IKN dan pasar nasional.

Tahun 2030 – Penguatan Fondasi Gerbang Logistik Kalimantan yang Menyejahterakan Masyarakat

Tahun 2030 merupakan tahap konsolidasi capaian dan integrasi pembangunan lintas sektor, dengan fokus menjadikan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan yang terhubung dengan Ibu Kota Negara Nusantara. Inisiatif konektivitas antarmoda, kawasan industri hijau, dan digitalisasi rantai pasok diperkuat melalui kerjasama lintas provinsi dan



nasional. Kalimantan Selatan akan mengukuhkan perannya sebagai simpul distribusi pangan, energi, dan logistik regional melalui penguatan pelabuhan, jalan, jalur sungai, dan logistik digital. Integrasi pengelolaan wilayah pesisir, hulu, dan kawasan adat juga diharmonisasikan dalam sistem tata kelola berkelanjutan. Puncaknya, pada tahun ini, visi “Kasel Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan” secara nyata tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, daya saing wilayah, serta posisi Kalimantan Selatan di tingkat nasional dan regional Kalimantan.

Sebagai tahap awal dari 4 (empat) tahapan pembangunan jangka panjang, RPJMD Tahun 2025-2029 melaksanakan *game changers* yang dimuat dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045. Upaya transformasi super prioritas atau disebut juga sebagai *Game Changers* dalam rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045, meliputi:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan lanjutan, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular.
2. Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun.
3. Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik serta tenaga medis dan kesehatan yang berkualitas dan terdistribusi secara adil.
4. Penuntasan kemiskinan dengan perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi serta satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
5. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Selatan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi.
6. Peningkatan hilirisasi industri strategis dengan mendorong pengembangan pusat-pusat industri.
7. Implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi.
8. Penguatan karakter dan jati diri bangsa berbasis agama nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal.
9. Percepatan penyelesaian jalan Trans Kalimantan dan pembangunan jaringan jalur kereta api serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
10. Percepatan integrasi infrastruktur konektivitas.



11. Peningkatan ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan.
12. Pemanfaatan energi baru terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik sebagai pasokan di wilayah Kalimantan Selatan maupun antarpulau.
13. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendukung transformasi digital.
14. Pengelolaan sampah dan limbah terpadu dari hulu ke hilir yang mendorong ekonomi sirkular.
15. Peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, ditetapkan 10 janji, berbagai prioritas dalam mewujudkan visi dan misi menuju Gerbang Logistik Kalimantan. Rangkaian janji, prioritas, dan upaya perwujudan Gerbang Logistik Kalimantan disajikan pada gambar-gambar di bawah. Keseluruhannya merupakan rangkaian kebijakan yang diterjemahkan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah.



Gambar 3.8.

**10 Janji Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030**



MISI 1 PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA

<p>1. PENDIDIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Negeri Belajar (NMBL) di seluruh kabupaten, provinsi, dan seluruh Indonesia secara menyeluruh. Mendorong Ekuitas Pendidikan, IT dan C. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi ke Indonesia dan ke luar negeri. 	<p>2. KESEHATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERAKAN). Membangun Pusat, Jaringan, Struktur, Sistem, Standart & Indeks Kesehatan. Strategi Jarak Jauh yang akan memberikan hasil terbaik berdasarkan Sistem dan Free Day (PFD) yang merupakan nilai-nilai yang tinggi. Membangun Pusat Pendidikan Kesehatan. Penerapan standar dengan GHA. 	<p>3. PEMUDA & PENGUSAHA</p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun Borneo Internasional Student. Mendorong Pembangunan Domo Smart City. Mendorong Peningkatan Praktek Challenge dan Keagamaan. 	<p>4. PASTI</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Cakupan Jaringan Sosial Terpadu dan Universal Health Coverage (UHC). Peningkatan Tanggapan Bencana. Peningkatan stabilitas sosial dan layanan sosial secara merata bagi seluruh masyarakat.
<p>5. KEMERDEKAAN, POLISI & HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Gerakan Rakyat Berdaya Berani & Tegas. Membangun pemerintahan yang Responsif & Akut. Mendorong Pembangunan Sistem dan Budaya Berani & Tegas. Mendorong Inovasi dan Integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 	<p>6. PEREMPATAN KUALIFIKASI KETUMBUHAN BERKUALITAS</p> <ol style="list-style-type: none"> Membantu menuliskan (Sobat Brg). Mendorong akses dan akses. Mendorong Perilaku yang Berkualitas dan Aman. Mendorong Partisipasi Perempuan & Anak di Bidang. Mendorong Inovasi & Akses untuk meningkatkan akses kepada aksesitas melalui dalam field. 	<p>7. PERBUDAYAAN & ANAK</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Peningkatan Moralitas. Mendorong Perputakaan Digital. 	

Gambar 3.9.
Prioritas dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Misi 1

MISI 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL

<p>8. PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Peningkatan Kawasan Metro Inland Hijau Batuikoh & Pulau Laut. Mendorong Pembangunan Sport City. Mendorong Pembangunan Aero City. 	<p>9. INFRASTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong peningkatan konektivitas kawasan ekonomi & kota - desa. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Batuikoh-KN, Lintas Tengah Kalimantan, Lintas Barat Kalimantan. Mendorong Pembangunan SPAM Regional Tana & Kobaqan. Mendorong Pembangunan Jembatan Pulau Laut & Dadakup. Mendorong Pembangunan Jalan Kusan, Tabalong & Plem Kusan. Mendorong Pembangunan Embung Jato dan Buntal. Mendorong Pembangunan Siring kupa Mertapura dan perlat. 	<p>10. PERBUDAYAAN & PERMUKIMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Peningkatan Kawasan Kamuh. Mendorong Pembangunan Rumah Layak Huni.
<p>11. ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Pembangunan Reklamasi Lembang bekas tambang. Mendorong Pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT). 		<p>12. KOMINFO</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Pembangunan Jaringan Internet ke seluruh wilayah Kalimantan.

Gambar 3.10.
Prioritas dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Misi 2



Gambar 3.11.

Prioritas dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Misi 3



Gambar 3.12.

Prioritas dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Misi 4



Gambar 3.13.

Prioritas dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Misi 5



Gambar 3.14.

Pengembangan Gerbang Logistik Kalimantan

Janji, prioritas dan sub prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang diuraikan di atas, akan diimplementasikan dalam pembangunan jangka menengah. Implementasi melalui berbagai program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Program-program perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari program prioritas pembangunan daerah bersama dengan program-program lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.



Pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah melalui berbagai program prioritas. Pelaksanaan beberapa program prioritas pembangunan daerah dapat bersifat *cross cutting* atau berkaitan dengan/dipengaruhi oleh urusan lain atau instansi lain. Dalam beberapa kasus, sebuah program prioritas dapat memiliki kontribusi bagi pencapaian lebih dari satu sasaran pembangunan.

Program prioritas pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan untuk mencapai sasaran RPJMD. Penentuan sebuah program perangkat daerah menjadi program prioritas pembangunan daerah dengan pertimbangan memiliki kontribusi langsung atau besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan selaras dengan arah kebijakan.

Beberapa kriteria dalam penentuan program prioritas selain menjawab sasaran RPJMD, yaitu merupakan pelaksanaan janji dan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi, mendukung Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029, program strategis nasional, serta mendukung reformasi birokrasi tematik seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Penentuan program ini juga mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun anggaran. Program prioritas pembangunan daerah selanjutnya akan dijabarkan ke sub kegiatan prioritas di Renstra Perangkat Daerah.

Penentuan program prioritas dilakukan melalui proses penjenjangan kinerja. Program prioritas bersifat strategis dalam menjawab *outcome* yang akan dicapai dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Daftar rencana program prioritas pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan di setiap Misi RPJMD disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.2.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS	
VISI: KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN									
Prioritas Daerah 1 - Memperkuat Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia									
MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA	Menguatnya fondasi transformasi sosial			Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks				
				Indeks Pembangunan Manusia	Indeks				
				Indeks Harmoni Indonesia	Indeks				
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
				Prevalensi Stunting	Persen				
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Prevalensi <i>underweight</i> (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita	Persen				
				Angka Kematian Neonatal (per 1.000 KH)	Angka				
				Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	Angka				
				Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Peningkatan Kebugaran terhadap Masyarakat Usia Produktif dan Lansia	Persen				
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen				
Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV	Persen								
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Persen								
Persentase Kabupaten/ Kota Eliminasi Malaria	Persen								



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
				Persentase Kabupaten/ Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen			
				Persentase Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Skrining PTM Prioritas	Persen			
				Persentase Kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	Persen			
				Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen			
				Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen			
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi	Persen			
				Persentase FKTP terakreditasi Paripurna	Persen			
				Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persen			
				Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi Paripurna	Persen			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
				Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Diintegrasikan ke JKN Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen			
				Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	Persen			
				Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Angka			
				Persentase Pasien Keluar Sembuh/Mandiri	Persen			
				Persentase sampel uji yang dilayani tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan	Persen			
			Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Persentase Faskes yang Memenuhi Sediaan Farmasi sesuai standar	Persen			
				Persentase FKTP yang Mengimplementasikan Penggunaan Antibiotik Rasional	Persen			
			Meningkatnya Pemenuhan, Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan	Persentase Fasyankes dengan SDMK sesuai Standart	Persen	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan lanjutan, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen			Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik serta tenaga medis dan kesehatan yang berkualitas dan terdistribusi secara adil
			Meningkatnya Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai Standar	Persen	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Advokasi, Bina Suasana, Gerakan Pemberdayaan dan Kemitraan Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas)	Persen	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan lanjutan, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Persentase partisipasi masyarakat berusia 10 - 60 tahun yang berolahraga	Persen	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga	
				Persentase Pemuda yang Berolahraga	Persen			
			Meningkatnya Kualitas Tenaga Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS	
				Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/ Internasional	Persen				
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Koefisien Variasi (CV) Harga Beras di Tingkat Konsumen	Persen	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan		
			Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Thn					
			Konsumsi Pangan Lokal Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Thn					
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan	Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun				
				Indeks Masyarakat Digital	Indeks				
			Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK/SLB		Angka Putus Sekolah jenjang SMA				Persen
					Angka Putus Sekolah jenjang SMK				Persen
					Angka Putus Sekolah jenjang SLB				Persen
			Meningkatnya capaian hasil belajar peserta didik SMA/SMK/SLB		Nilai rata-rata Akhir Siswa SMA				Nilai
					Nilai rata-rata kompetensi literasi SMA				Nilai
					Nilai rata-rata kompetensi numerasi SMA				Nilai
				Nilai rata-rata Akhir Siswa SMK	Nilai				
				Nilai rata-rata Uji Kompetensi Keahlian SMK	Nilai				
				Nilai rata-rata kompetensi literasi SMK	Nilai				
				Nilai rata-rata kompetensi numerasi SMK	Nilai				
				Nilai rata-rata Akhir Siswa SLB	Nilai				
								Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik serta tenaga medis dan kesehatan yang berkualitas dan	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
				Nilai rata-rata kompetensi Literasi SDLB	Nilai			terdistribusi secara adil
				Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SDLB	Nilai			
				Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMPLB	Nilai			
				Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB	Nilai			
				Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMALB	Nilai			
				Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMALB	Nilai			
			Meningkatnya kualitas satuan pendidikan SMA/SMK/SLB yang memiliki lingkungan belajar kondusif, dan mendorong penguatan karakter	Indeks Iklim Keamanan SMA	Indeks			
				Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	Indeks			
				Indeks Iklim Keamanan SMK	Indeks			
				Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	Indeks			
				Indeks Iklim Keamanan SDLB	Indeks			
				Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	Indeks			
				Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Indeks			
				Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	Indeks			
				Indeks Iklim Keamanan SMALB	Indeks			
				Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	Indeks			
				Nilai Rata-rata karakter peserta didik SMA sesuai profil pelajar pancasila	Nilai			
				Nilai Rata-rata karakter peserta didik SMK sesuai profil pelajar pancasila	Nilai			
				Nilai rata-rata karakter peserta didik SLB sesuai profil pelajar pancasila	Nilai			
			Meningkatnya kualitas satuan pendidikan	Indeks Inklusivitas SMA	Indeks			
				Indeks Inklusivitas SMK	Indeks			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			SMA/SMK/SLB yang inklusif	Indeks Inklusivitas SDLB	Indeks			
				Indeks Inklusivitas SMPLB	Indeks			
				Indeks Inklusivitas SMALB	Indeks			
			Meningkatnya prestasi peserta didik SMA/SMK/SLB pada kompetisi nasional	Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMA pada kompetisi Nasional	Persen			
				Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMK pada kompetisi Nasional	Persen			
				Persentase medali yang diperoleh peserta didik SLB pada kompetisi Nasional	Persen			
			Meningkatnya kualitas kelembagaan satuan pendidikan SMA/SMK/SLB	Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi minimal B	Persen			
				Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi minimal B	Persen			
				Persentase Satuan Pendidikan SLB terakreditasi minimal B	Persen			
			Meningkatnya Guru yang bersertifikat	Persentase Guru bersertifikat Pendidik	Persen			
			Meningkatnya pemerataan distribusi guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan	Indeks Distribusi Guru	Indeks	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan	Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik serta tenaga medis dan kesehatan yang berkualitas dan terdistribusi secara adil



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	Persen	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika	
		Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks			
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks			
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah dalam pembinaan mental spiritual, dan kesejahteraan rakyat	Tingkat kondusifitas kerukunan umat beragama	Poin	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusaan Pemerintahan Daerah	Penguatan karakter dan jati diri bangsa berbasis agama nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal
				Persentase peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sadakah (ZIS)	Persen			
				Persentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Persen			
			Tertatanya Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai layanan dasar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desa	Nilai	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
				Nilai aktivitas dan fasilitas masyarakat	Nilai			
		Nilai pengelolaan lingkungan		Nilai				
		Jumlah Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Melayani 6 SPM		Angka				



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya penduduk yang berpenghasilan dari pertunjukan kesenian	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	Persen	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan	
			Meningkatnya pelestarian tradisi budaya	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	Persen			
			Meningkatnya seniman yang menghasilkan karya berkualitas dan diakui	Persentase seniman yang mendapatkan anugerah kebudayaan tingkat provinsi	Persen	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian warisan sejarah dan budaya secara berkelanjutan	Persentase lembaga yang mampu menyelenggarakan kegiatan kebudayaan	Persen	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan	
				Persentase anak usia sekolah yang aktif terlibat dalam pelestarian warisan sejarah dan budaya	Persen			
			Meningkatnya Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Persen	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transtibumlinmas	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya Kualitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	Persen	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Nilai Sub Komponen Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada IDI Kalimantan Selatan	Poin	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa	
				Persentase Pendidikan Politik bagi Masyarakat	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang diberikan Pemahaman terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa	
		Menurunnya kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	Persen			
			Meningkatnya PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial	Penuntasan kemiskinan dengan perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi serta satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
			Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	Persen	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			dan direhabilitasi sosial di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen			
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen			
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen			
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen			
			Meningkatnya penerima bantuan sosial bersyarat yang mandiri	Persentase penerima bantuan sosial bersyarat yang mandiri	Persen	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial	
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pada korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	Persen	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial	
			Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja	Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog Sosial dengan perusahaan	Persen	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perangkat Daerah Pelaksana	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
				Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen		Urusan Tenaga Kerja	
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen			
		Meningkatnya Kualitas Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks			
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase peningkatan keluarga yang memenuhi komponen keluarga sejahtera	Persen	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) Perempuan	Persen			
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, Pemenuhak Hak, serta Perlindungan perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Persentase Anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen			
				Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio			
			Meningkatnya kesempatan ketenagakerjaan yang layak melalui pengembangan kewirausahaan pemuda	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga	
				Persentase Pemuda NEET	Persen			
			Meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial kemasyarakatan	Persen			
				Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Organisasi	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
				Persentase Pemuda yang Menduduki Posisi Manajerial	Persen			
			Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan direhabilitasi sosial di dalam panti	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial	
				2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen			
				3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen			
				4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen			
				5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen			
Prioritas Daerah 2 - Memantapkan Pembangunan Infrastruktur yang Handal								
MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL	Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah		Indeks Infrastruktur	Indeks			
				Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks			
				Indeks Konektivitas	Indeks			
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	Persen	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	Persen						



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan sampah dan limbah terpadu dari hulu ke hilir yang mendorong ekonomi sirkular
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Cakupan Pelayanan Air Limbah yang layak	Persen	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen			
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase permukiman di kawasan strategis yang sesuai standar	Persen	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya infrastruktur jalan provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan	Percepatan integrasi infrastruktur konektivitas
				Tingkat Aksesibilitas Jalan	Persen			Percepatan penyelesaian



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
							Umum dan Penataan Ruang	jalan Trans Kalimantan dan pembangunan jaringan jalur kereta api serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Air	Rasio	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan	Percepatan integrasi infrastruktur konektivitas
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendukung transformasi digital
				Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Mengakses Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	Persen	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan ESDM	Peningkatan ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen			
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	Persen	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan tepat waktu di Tahun Berjalan	Persen	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS		
Prioritas Daerah 3 - Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah										
MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN , MERATA, DAN SYARIAH	Menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah					
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks					
				Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks					
		Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah							Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen
									Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen
									Laju PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen
									Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	Persen
									Persentase Produk Tersertifikasi Halal	Persen
									Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang
									Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Juta USD
									Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Triliun Rupiah
Persentase Produk yang Dihasilkan melalui Penerapan Technological Readiness Level (TRL) Skala 6	Persen									



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan berdasarkan Verifikasi Teknis	Persen	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi yang Menyampaikan Data ke SIINas	Persen	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan Dan Perikanan	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan Dan Perikanan	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Pelaku Usaha KP Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundangan	Persen	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan Dan Perikanan	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan Dan Perikanan	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata	
				Rata-rata Lama Menginap Wisatawan	Hari			
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah Bersertifikat	Persen	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata	
			Meningkatnya Dividen yang Disetorkan oleh BUMD kepada Pemerintah Provinsi	Persentase peningkatan dividen BUMD yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi	Persen	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIA	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Terwujudnya BLUD dengan nilai IKM sangat baik	Persentase BLUD dengan Nilai IKM sangat Baik	Persen	N DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terjaganya Kestabilan Inflasi	Tingkat Inflasi	Persen			
			Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Persen	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Persen			
			Meningkatkan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Tanaman Perkebunan per hektar per tahun	Kg/Ha/Tahun	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	
			Meningkatnya Produksi Ternak	Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen			
			Meningkatnya Prasarana yang Mendukung Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	
				Persentase Ketersediaan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Sesuai untuk Peningkatan Produksi	Persen			
			Tersedianya Prasarana Yang Mendukung Produksi Perkebunan dan Peternakan	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai untuk peningkatan produksi	Persen	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	
				Persentase ketersediaan prasarana peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	
				Persentase Unit Usaha Yang Menghasilkan Produk ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persen			
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam	Persen	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen			
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen			
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Tanaman Perkebunan	Luas Areal Pengendalian Penanggulangan Bencana	Ha	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	
			Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Perkebunan	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan	Persen	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian	Persentase Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas	Persen	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	
				Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
				Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian	Persen			
				Persentase Kelembagaan Petani yang Naik Kelas	Persen			
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pekebun dan Peternak	Persentase Kelembagaan sektor Perkebunan dan Peternakan yang meningkat kapasitasnya	Persen	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	Persen	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan	Peningkatan ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan
					Persentase Cadangan Pangan			
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Koefisien Variasi (CV) Harga Beras di Tingkat Konsumen	Persen	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan	
				Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Th n			
				Konsumsi Pangan Lokal Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Th n			
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan	Persen	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan	
					Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan			
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Terwujudnya tertib PUHH	Persentase Pelaku usaha yang tertib PUHH	Persen	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kehutanan	
			Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar hutan	Persentase peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Persen	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kehutanan	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah dalam pembinaan mental spiritual, dan kesejahteraan rakyat	Tingkat kondusifitas kerukunan umat beragama	Poin	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAHAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusaan Pemerintahan Daerah	
				Persentase peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sadakah (ZIS)	Persen			
				Persentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Persen			
			Meningkatnya dukungan UMKM terhadap kewirausahaan dan perekonomian syariah	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Persen	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
				Jumlah Produk tersertifikasi halal	Produk			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS	
			Meningkatnya tata kelola kegeologian	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	m3	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan ESDM		
				Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Ha				
				Persentase terkelolanya Warisan Geologi	Persen				
			Meningkatnya pelayanan infrastruktur sumber daya air	Persentase infrastruktur Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				Persentase pengendali daya rusak air dalam kondisi baik	Persen				
				Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku	Persen				
		Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik			Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Triliun Rupiah			
					Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen			
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Potensi Investasi yang terpetakan	Persen	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal		
				Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen				
			Meningkatnya Investor yang Terdaftar	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal		
		Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai Ketentuan	Persen	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
						PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha yang terselesaikan	Persen	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal	
				Persentase pelaku usaha yang diawasi sesuai dengan kewenangan Provinsi	Persen			
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan Yang Mendukung Arus Distribusi Barang	Persen	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan	Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Selatan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KABUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan	
			Meningkatnya Volume Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas (Bea Cukai)	USD	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persen	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan	
				Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS		
				Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persen	PERLINDUNGAN KONSUMEN				
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi	Persen	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan			
			Meningkatnya infrastruktur jalan provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
				Tingkat Aksesibilitas Jalan	Persen					
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan			
			Terwujudnya Perekonomian daerah yang Merata	Menurunnya Pengangguran			Indeks Williamson	Indeks		
							Rasio gini	Poin		
							Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen		
							Rasio Kewirausahaan	Poin		
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja				Persentase lulusan pelatihan vokasi dan produktivitas yang bekerja atau berwirausaha sesuai kompetensi	Persen	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			Persen					



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga kerja	S TENAGA KERJA		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja	Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog Sosial dengan perusahaan;	Persen	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja	
				Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen			
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen			
			Meningkatnya kesesuaian kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja dan industri	Persentase lulusan yang bekerja dan/atau berwirausaha sesuai dengan program keahlian	Persen	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan	
				Masa Tunggu Lulusan SMK (sejak lulus sampai bekerja atau wirausaha)	Bulan			
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Rekomendasi Tehnis Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diterbitkan	Persen	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi yang menindaklanjuti hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	Persen	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang Sehat	Persen	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Perkoperasian yang bersertifikat	Persen	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	Persen	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
				Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen			
			Meningkatnya dukungan UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Persen	2.17.07 PROGRAM	Perangkat Daerah	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			terhadap kewirausahaan dan perekonomian syariah	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
			Meningkatnya UMKM yang naik kelas	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Persen	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
		Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa		Indeks Desa	Indeks			
			Optimalnya Penataan Desa melalui tata kelola pemerintahan desa	Nilai kelembagaan dan pelayanan desa	Nilai	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
				Nilai tata kelola keuangan desa	Nilai			
			Optimalnya kerja sama dan sarana prasarana desa	Nilai Kondisi Akses Jalan	Nilai	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
				Nilai Utililitas Dasar	Nilai			
				Persentase Kerjasama di desa	Persen			
			Meningkatnya Perekonomian dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai Produksi Desa	Nilai	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
				Nilai Fasilitas Pendukung Ekonomi	Nilai			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS		
Prioritas Daerah 4 - Memantapkan Pembangunan Rendah Karbon dan Memperkuat Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana										
MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks					
				Indeks Risiko Bencana	Indeks					
		Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan				Indeks Kualitas Air	Indeks			
						Indeks Kualitas Udara	Indeks			
						Indeks Kualitas Air Laut	Indeks			
						Indeks Kualitas Lahan	Indeks			
						Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan)	Persen			
						Terwujudnya tertib PUHH	Persentase Pelaku usaha yang tertib PUHH			
		Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Persentase Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi	Persen						
		Terlindunginya kawasan hutan dan lahan sesuai dengan kewenangan	Persentase Luas Kawasan Hutan dan lahan yang Dilindungi sesuai dengan kewenangan	Persen						
Meningkatnya luas penanaman dan pemeliharaan DAS	Persentase luas rehab DAS	Persen	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kehutanan						
Meningkatnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup						
Meningkatnya Pengelolaan Wilayah	Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN	Perangkat Daerah Pelaksana						



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pemenuhan rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Persen	KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Urusan Kelautan Dan Perikanan	
			Meningkatnya pengendalian pencemaran air sungai	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter IKA	Persen	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase kabupaten/kota dengan nilai ISPU kategori baik	Persen			
			Meningkatnya kualitas eko-sistem gambut	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Poin			
			Meningkatnya pengendalian pencemaran air laut	Persentase titik pantau Air Laut dengan Kategori Baik	Persen			
			Menurunnya emisi GRK sektor limbah	Angka Emisi GRK sektor Limbah	Gg CO2-e			
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Meningkatnya kapasitas SDM dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Entitas Yang Memahami tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya tata kelola mineral bukan logam dan batuan	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan kewajiban sesuai regulasi	Persen	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan ESDM	
				Persentase luas lahan yang direklamasi akibat kegiatan usaha pertambangan	Persen			
			Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di kalsel	Persen	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah dan limbah terpadu dari hulu ke hilir yang mendorong ekonomi sirkular
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin			
				Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
		Meningkatnya Penggunaan Energi Bersih	Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Persentase rumah tangga penerima listrik bersumber dari pembangkit EBT	Persen	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan ESDM	Pemanfaatan energi baru terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik sebagai pasokan di wilayah Kalimantan Selatan maupun antarpulau
		Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks			
		Meningkatnya kualitas layanan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan Penanggulangan Bencana	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Kawasan	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transtibumlinmas (Sub Urusan Bencana)	
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen			
				Persentase Penanganan Pascabencana	Persen			
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur sumber daya air	Meningkatnya pelayanan infrastruktur sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	Persen	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase pengendali daya rusak air dalam kondisi baik	Persen			
				Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku	Persen			
		Meningkatnya cakupan sistem drainase perkotaan	Meningkatnya cakupan sistem drainase perkotaan	Persentase Luas Genangan yang Tertangani	Persen	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase wilayah yang tercakup oleh sistem drainase terencana	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen			
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pada korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	Persen	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial	
Prioritas Daerah 5 - Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT	Menguatnya fondasi transformasi tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks			
				Nilai SAKIP	Poin			
				Opini BPK	Predikat			
				Indeks Integritas	Indeks			
				Indeks Sistem Merit	Indeks			
				Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level			
		Meningkatnya internalisasi RB di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan RB dengan baik	Persen	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit	
		Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas	Nilai laporan kinerja pemerintah daerah	Point				
				Persentase perangkat daerah dengan kualifikasi Nilai SAKIP minimal AA	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			kinerja perangkat daerah					dengan pemanfaatan teknologi informasi
			Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah	Indeks BERAKHLAK Perangkat Daerah	Indeks			
			Terbentuknya kelembagaan yang sesuai ketentuan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Indeks Kelembagaan Provinsi	Indeks			
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A)	Unit			
			Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Laksana dengan "Baik"	Persen			
				Jumlah dokumen proses bisnis pmda	Dokumen			
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Proses Bisnis	Persen			
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah, Layanan Informasi Produk Hukum Daerah, Dan Bantuan Hukum Dalam Koordinasi Dan Fasilitasi Bidang Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Persen	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum	Persen			
				Indeks Reformasi Hukum	Persen			
				Indeks Kualitas Kebijakan	Poin			
			Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN	Perangkat Daerah Pelaksana	

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			di Provinsi Kalimantan Selatan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Unsur Sekretariat Daerah Urusaan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	Persentase Formasi Pengadaan ASN yang terisi	Persen	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Penataan ASN	Persentase Jabatan Manajerial yang terisi	Persen			
			Meningkatnya Peran Perangkat Daerah dalam Pembinaan Profesionalitas ASN	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Profesionalitas ASN Kategori Tinggi	Persen			
			Meningkatnya pengembangan kompetensi teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis yang Tepat Sasaran	Persen	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Pendidikan dan Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Fasilitasi Uji Kompetensi Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Uji Kompetensi	Persen			
			Meningkatnya Mutu Kelembagaan BPSDMD Prov. Kalsel	Persentase Pemenuhan Unsur Mutu Kelembagaan	Persen			
			Meningkatnya pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar	Persen			
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Persen			
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Fungsional	Persen			
			Meningkatnya Keterpaduan Proses	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	5.01.02 PROGRAM	Perangkat Daerah	Peningkatan integrasi



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			Perencanaan Dengan Penyediaan Data, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Rata-rata persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Persen	PERENCANAAN PENGENDALIAN , DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pelaksana Unsur Perencanaan Urusan Pemerintahan Daerah	perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
				Rata-rata persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Kabupaten/ Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi	Persen			
				Persentase keterisian data sektoral dan spasial provinsi	Persen			
				Persentase program prioritas dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Perencanaan Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen			
				Persentase program prioritas bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			infrastruktur dan kewilayahan	Persentase program prioritas bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen			
			Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Persentase Inovasi SKPD yang sesuai mekanisme Indeks Inovasi Daerah	Persen	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya pendayagunaan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk unggulan dan Inovasi Daerah	Persentase HKI yang difasilitasi	Persen			
			Meningkatnya kegiatan konservasi dan identifikasi keanekaragaman hayati tumbuhan di kebun raya banua	Persentase tumbuhan yang di eksplorasi dan dikoleksi	Persen			
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD</i>	Persen	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan Daerah	
				Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	Persen			
				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen			
				<i>Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya</i>	Persen			
				Persentase Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen			

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen			
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen			
				Persentase Penurunan SILPA	Persen			
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen			
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	<i>Assets management</i>	Persen	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen			
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen			
				Persentase Peningkatan Pendapatan pada UPPD	Persen			
				<i>Revenue Mobilization</i> : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen			
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen			
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan anggaran ataupun	Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban I	Persen	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Pengawasan Urusan	
				Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban II	Persen			



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
			proses dan kewenangannya	Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irbab III	Persen		Pemerintahan Daerah	
				Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irbab I	Persen			
				Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irbab II	Persen			
				Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irbab III	Persen			
				Persentase SKPD dengan data dukung SPIP lengkap dan valid	Persen			
				Persentase SKPD dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal minimal 20%	Persen			
				Nilai penerapan strategi pencegahan korupsi pada perangkat daerah	Nilai			
				Persentase kasus pengawasan dan Pemeriksaan Pengaduan kasus yang ditangani	Persen			
			Meningkatnya kualitas pedoman penyelenggaraan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase ketersediaan pedoman teknis pengawasan	Persen	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintahan Digital	Indeks			
				Indeks Transformasi Digital	Indeks			
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	Persen	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika	Implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi
			Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Publikasi Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	Persen	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik	
			Meningkatnya kematangan dalam penerapan sistem keamanan informasi	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian	
			Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai Ketentuan	Persen	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	2.12.02 PROGRAM	Perangkat Daerah Pelaksana		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	GAME CHANGERS
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	PENDAFTARAN PENDUDUK	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen			
		Meningkatnya Kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen			
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen			
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen			

Sumber: hasil analisis, 2025



Implementasi dari janji dan sub prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2025-2029, dalam bentuk program perangkat daerah dimuat dalam tabel di bawah. Program perangkat daerah yang menjadi pelaksana janji dan sub prioritas kepala daerah akan menjadi bagian dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah. Lebih lanjut, program-program tersebut akan dirinci kedalam kegiatan dan sub kegiatan di Renstra Perangkat Daerah terkait.

Tabel 3.3.
Implementasi Janji dan Sub Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030 dalam Program Perangkat Daerah

No.	Janji, Sub Prioritas & Gerbang Logistik	Program	Perangkat Daerah
MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA			
1	Mendorong Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun berbasis vokasi, pesantren, dan sesuai kebutuhan dunia usaha	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pendidikan
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan
		4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pendidikan
2	Mendorong Kejar Paket A, B, dan C	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pendidikan
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan
3	Peningkatan Akses Pendidikan bagi yang berprestasi dan tidak mampu	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pendidikan
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan
4	Mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan
		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan
5	Membangun Pusat Jantung, Stroke, & Infeksi Terpadu.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan
6	Setiap daerah didorong untuk memfasilitasi hari bebas kendaraan bermotor/Car Free Day (CFD) guna menunjang olahraga jalan sehat	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
7	Membangun Pusat Pendidikan Kesehatan	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan



No.	Janji, Sub Prioritas & Gerbang Logistik	Program	Perangkat Daerah
8	Penurunan Stunting dengan CSR	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan
		4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
9	Membangun Borneo Internasional Stadium	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
10	Mendorong Pembangunan Borneo Sport City	1.03.08 PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
11	Mendorong Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
12	Mendorong Peningkatan Wirausaha Muda Mandiri	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
13	Mendorong Cakupan Jaminan Sosial Terpadu/ <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Sosial
		1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Sosial
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Sosial
14	Meningkatkan Tanggap Bencana	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Sosial
		1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Transtibumlinmas (Sub Urusan Bencana)
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Membangun Kembali Sejarah termasuk mendorong Riset Sejarah dan Budaya Banjar & Dayak	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pendidikan
		2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kebudayaan
		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kebudayaan



No.	Janji, Sub Prioritas & Gerbang Logistik	Program	Perangkat Daerah
		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
16	Melestarikan penyelenggaraan Event Budaya & Religi	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kebudayaan
		2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kebudayaan
		4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
17	Mendorong Pembangunan Institut Seni Budaya Banjar & Dayak	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kebudayaan
		2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kebudayaan
18	Mendorong kesadaran politik, ketaatan hukum, dan cinta kepada tanah air	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa
19	Mendorong Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Tenaga Kerja
20	Mendorong Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Tenaga Kerja
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Tenaga Kerja
21	Membantu menurunkan Stunting	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan
		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pangan
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	Meningkatkan akses disabilitas	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Sosial
		1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Sosial
23	Mendorong Perlindungan Perempuan dan Anak	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan



No.	Janji, Sub Prioritas & Gerbang Logistik	Program	Perangkat Daerah
			Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Mendorong Partisipasi Perempuan di segala bidang	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25	Mendorong Peningkatan Minat Baca	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perpustakaan
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pendidikan
26	Mendorong Perpustakaan Digital	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perpustakaan
MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL			
27	Pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perhubungan
28	Mendorong Bandara Internasional Syamsuddin Noor	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perhubungan
29	Mendorong Pengembangan Aero City	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perhubungan
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Mendorong Pengembangan Kawasan Metro Industri Hijau Batulicin & Pulau Laut	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perindustrian
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Mendorong peningkatan konektivitas kawasan ekonomi & kota - desa	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perhubungan
32	Mendorong Pembangunan Jalan Tol Batulicin-IKN, Lintas Tengah Kalsel, Lintas Barat Kalsel	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33	Mendorong Pembangunan SPAM Regional Tanbu & Kotabaru	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Mendorong Pembangunan Jembatan Pulau Laut & Dadahup	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Mendorong Penataan Kawasan Kumuh	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman



No.	Janji, Sub Prioritas & Gerbang Logistik	Program	Perangkat Daerah
36	Mendorong Pembangunan Rumah Layak Huni	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
37	Mendorong Pembangunan Jaringan internet ke seluruh wilayah Kalsel	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH			
38	Hilirisasi Industri terutama Industri besar dan kecil, termasuk hilirisasi Industri Hasil Hutan	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perindustrian
		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perindustrian
39	Mendorong pembangunan & Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) & Kawasan Industri (KI)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perindustrian
40	Mendorong Pengembangan Industri halal termasuk Halal Food	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perindustrian
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perdagangan
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perdagangan
41	Mendorong Bangga Produk Lokal	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perdagangan
42	Mendorong Ekonomi berbasis Pesantren	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pendidikan
		4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
43	Mendorong Pembangunan Corporate Farming	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
44	Mendorong Pembangunan Resi Gudang	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KABUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perdagangan
45	Mendorong Pembangunan Pabrik Pupuk & Pakan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
46	Mendorong swasembada daging	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian



No.	Janji, Sub Prioritas & Gerbang Logistik	Program	Perangkat Daerah
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
47	Mendorong pembangunan Desa Unggul	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
48	Mendorong Ekspor Komoditi Non Migas	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perdagangan
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
		3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kehutanan
		3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan ESDM
49	Membangun Pusat Distribusi	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perdagangan
50	Pengembangan Geopark Meratus	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan ESDM
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Lingkungan Hidup
51	Mendorong Wisata Religi, Alam, & Budaya	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pariwisata
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pariwisata
52	Mendorong Pembangunan Home Stay standar Internasional	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
53	Mendorong Ekonomi Kreatif (EKRAF)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pariwisata
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER	



No.	Janji, Sub Prioritas & Gerbang Logistik	Program	Perangkat Daerah
		DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
54	Mendorong Peningkatan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan
55	Mendorong Produktivitas Ikan Tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
56	Mendorong Produktivitas Perikanan Budidaya dan Hasil Kelautan	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
57	Mendorong Produktivitas Budidaya Ikan Air Tawar	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
58	Mendorong Perkebunan Kopi	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
59	Mendorong Peningkatan Investasi yang berkualitas	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Penanaman Modal
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Penanaman Modal
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Penanaman Modal
		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Penanaman Modal
60	Mendorong Pembangunan Waduk Kusan, Tabalong, & Kiwa	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
61	Mendorong Pembangunan Embung Jaro dan Barabai	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM			
62	Mendorong Peningkatan Penerapan konsep Ekonomi Hijau, Biru, & Sirkular	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
		3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan



No.	Janji, Sub Prioritas & Gerbang Logistik	Program	Perangkat Daerah
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
		2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Lingkungan Hidup
		3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kehutanan
63	Mendorong <i>Carbon Trade</i>	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Lingkungan Hidup
		3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kehutanan
		3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
		2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Lingkungan Hidup
64	Mendorong Pengelolaan sampah, limbah cair, & B3	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Lingkungan Hidup
65	Mendorong Pembangunan TPS 3R Terpadu	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Lingkungan Hidup
66	Mendorong Pembangunan Siring sungai Martapura dan pantai	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
67	Mendorong Pengelolaan Sungai Terpadu	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
68	Mendorong Pemanfaatan Hasil hutan (herbal, madu, dll)	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kehutanan
		3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kehutanan
69	Mendorong Pembangunan Sistem Penanganan Karhutla, Pengendalian Banjir, dan penanganan gempa	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kehutanan
70	Mendorong Restorasi Lahan Gambut	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kehutanan
71	Mendorong Reklamasi lubang bekas tambang	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan ESDM
72	Mendorong Pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan ESDM
MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT			



No.	Janji, Sub Prioritas & Gerbang Logistik	Program	Perangkat Daerah
73	Mendorong Kemudahan perijinan	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Penanaman Modal
74	Mendorong Peningkatan Pajak Daerah	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan
75	Mendorong Peningkatan Zakat, Infaq, Sodalqoh	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
76	Mendorong Pencegahan & Pemberantasan Korupsi	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah
77	Mendorong Perencanaan Berkualitas	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan
78	Mendorong pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
		2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
79	Mendorong Inovasi Daerah	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
80	Mendorong Peningkatan Keamanan & Ketertiban Masyarakat	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Transtibumlinmas
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa
81	Mendorong Peningkatan Kualitas & Akhlak ASN Pemerintah Daerah	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kepegawaian
		5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
82	Mendorong Kerjasama & Kolaborasi lintas sektor dan lembaga.	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
84	Mendorong Satu Nomor Identitas Digital	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: hasil analisis, 2025





Proyek strategis merupakan indikasi rencana aksi dari janji dan prioritas gubernur dan wakil gubernur, serta beberapa prioritas provinsi yang penting untuk dilaksanakan pada periode tahun 2025-2030. Sebagian indikasi proyek strategis Provinsi Kalimantan Selatan telah dimulai sejak tahun 2024 dan dilanjutkan atau dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Rencana pelaksanaan proyek-proyek tersebut tidak hanya bersumber dari APBD provinsi, kabupaten/kota namun juga melibatkan APBN dan sumber pendanaan pembangunan lainnya seperti KPBU dan partisipasi masyarakat luas termasuk dunia usaha.

Indikasi proyek strategis dipilih dengan mempertimbangkan:

- a. Berkontribusi dan berdampak signifikan pada pencapaian visi dan misi, serta program prioritas gubernur dan wakil gubernur.
- b. Bersifat strategis dan terukur.
- c. Memerlukan konsentrasi, keterpaduan, dan sinergi sumber daya antar pemangku kepentingan pembangunan.
- d. Dapat diselesaikan atau sebagian keluaran/outputnya dapat berfungsi dalam periode RPJMD tahun 2025-2029.



Tabel 3.4.

Indikasi Proyek Strategis RPJMD Tahun 2025-2030

No	Nama Proyek dan Rincian Kegiatan	Tahun Pelaksanaan							Pwerangkat Daerah Penanggung Jawab	Skema Pembiayaan (APBN/APBD Provinsi/APBD Kab/Kota, KPBU, dll)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I	Janji Gubernur									
	Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut									
		Tahap Perencanaan							Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
		Tahap Pelaksanaan							Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih									
		Tahap Perencanaan							Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	APBD
		Tahap Pelaksanaan							Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	Non Pemerintah
	Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional									
		Tahap Perencanaan							Dinas PUPR	APBD
		Tahap Pelaksanaan							Dinas PUPR, Dispora	APBN, APBD, non pemerintah
	Mendorong Bandara Internasional Syamsudin Noor									
		Tahap Perencanaan							Dinas Perhubungan, PT. Angkasa Pura I	APBN, APBD, non pemerintah
		Tahap Pelaksanaan							Dinas Perhubungan	APBN, APBD, non pemerintah



No	Nama Proyek dan Rincian Kegiatan	Tahun Pelaksanaan							Pwerangkat Daerah Penanggung Jawab	Skema Pembiayaan (APBN/APBD Provinsi/APBD Kab/Kota, KPBU, dll)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Peningkatan Transportasi Publik ke Daerah Pelosok									
	Tahap Perencanaan								Dinas Perhubungan	APBN, APBD
	Tahap Pelaksanaan								Dinas Perhubungan	APBN, APBD, non pemerintah
	Pengembangan Industri Halal termasuk Halal Food									
	Pemberian Sertifikasi Halal bagi UMKM								Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	APBD Provinsi
	Peningkatan Kualitas dan Akses Kesehatan									
	Anggaran Jaminan Kesehatan untuk Kab/Kota								Dinas Kesehatan	APBD Provinsi
	Pemberian Makanan Tambahan								Dinas Kesehatan	APBD Provinsi
	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Wilayah Mekar Putih								Dinas Kesehatan	APBD Provinsi
	Relokasi Puskesmas Aranio								Dinas Kesehatan	APBD Kab Banjar
	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2								Dinas Kesehatan	APBD Kab Kotabaru, Tapin, Barito Kuala, & Banjar (DAK)
	Pelaksanaan Skrining Kesehatan di Kab/Kota								Dinas Kesehatan	APBD Provinsi
	Pembangunan Ruangan Hemodialisa Datu Sanggul								Dinas Kesehatan	APBN
	Pembangunan Gedung Jantung Terpadu RSUD Ulin Banjarmasin								RSUD Ulin	APBD Provinsi
	Pembangunan Gedung Pelayanan RSUD HM. Ansari Saleh								RSUD HM. Ansari Saleh	APBD Provinsi



No	Nama Proyek dan Rincian Kegiatan	Tahun Pelaksanaan							Pwerangkat Daerah Penanggung Jawab	Skema Pembiayaan (APBN/APBD Provinsi/APBD Kab/Kota, KPBU, dll)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Memperkuat Ketahanan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif									
	Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)								Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	APBD
	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)								Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	APBD
	Rancang Bangun Pabrik Pupuk Organik								Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	APBD
	Optimasi Lahan Terkait Infrastruktur Pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura								Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	APBD
	Pengembangan Tanaman Pangan								Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	APBD
	Peningkatan Produksi, Kualitas Dan Daya Saing Produk (Sentra Sayuran, Buah dan Tanaman Hias)								Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	APBD dan APBN
	Pembangunan Klaster Hortikultura (Cabai, Pisang, Jeruk dan Nanas)								Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	APBD
	Shrimp Estate								Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD
	Haruan Estate								Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD
	Program pengembangan peternakan sapi berkelanjutan terintegrasi perkebunan, tanaman pangan, kehutanan, dan pertambangan								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Meningkatkan cluster SITI HAWA LARI (Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Kering)								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD



No	Nama Proyek dan Rincian Kegiatan	Tahun Pelaksanaan							Pwerangkat Daerah Penanggung Jawab	Skema Pembiayaan (APBN/APBD Provinsi/APBD Kab/Kota, KPBU, dll)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Pengembangan Kopi Diversifikasi Terintegrasi								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Pengembangan Korporasi Pekebun Berbasis Kawasan Karet								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Diversifikasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Penjualan Karbon								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Penguatan Korporasi Berbasis Perkebunan dan Peternakan								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Hilirisasi Industri Perkebunan								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Pembinaan dan Pengawasan Gudang Produk Asal Hewan								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Fasilitasi Pembangunan Pabrik mini pupuk								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Fasilitasi Pembangunan Pabrik Pakan Skala Kecil								Dinas Perkebunan dan Peternakan	APBD
	Pengembangan Wisata Religi, Alam, & Budaya.								Dinas Pariwisata	APBD
	Pengembangan Ekonomi Kreatif (EKRAF).								Dinas Pariwisata	APBD
	Meningkatkan Pariwisata dan Kebudayaan									
	Pengembangan Home Stay standar Internasional								Dinas Pariwisata	APBD



No	Nama Proyek dan Rincian Kegiatan	Tahun Pelaksanaan							Pwerangkat Daerah Penanggung Jawab	Skema Pembiayaan (APBN/APBD Provinsi/APBD Kab/Kota, KPBU, dll)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Pengembangan Geopark Meratus								Dinas Pariwisata	APBD
	Pengembangan Wisata Religi, Alam, & Budaya.								Dinas Pariwisata	APBD
II	Prioritas Misi									
	Jalan Lintas Tengah Pulau Laut									
	Tahap Perencanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan									
	Tahap Perencanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Pengembangan Jalan Lintas Banjarbaru – Batulicin									
	Tahap Perencanaan								Dinas PUPR	APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Jembatan Tabukan - Dadahup									
	Tahap Perencanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Jalan Lintas Barat Kalsel									



No	Nama Proyek dan Rincian Kegiatan	Tahun Pelaksanaan							Pwerangkat Daerah Penanggung Jawab	Skema Pembiayaan (APBN/APBD Provinsi/APBD Kab/Kota, KPBU, dll)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Tahap Perencanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
Pemenuhan Akses Air Minum										
	Tahap Perencanaan								Dinas PUPR	APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
Bendungan Kusan										
	Tahap Perencanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN/KPBU
Bendungan Riam Kiwa										
	Tahap Perencanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR	APBN
Bendungan Pancur Hanau										
	Tahap Perencanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
Bendung Kumap										
	Tahap Perencanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD



No	Nama Proyek dan Rincian Kegiatan	Tahun Pelaksanaan							Pwerangkat Daerah Penanggung Jawab	Skema Pembiayaan (APBN/APBD Provinsi/APBD Kab/Kota, KPBU, dll)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Lanjutan Pembangunan Embung Jaro									
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Siring Sungai Martapura dan Pengaman Pantai									
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Sistem Pengendalian Banjir									
	Tahap Perencanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN, APBD
	Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih									
	Tahap Perencanaan								Dinas PUPR	APBN, APBD, non pemerintah
	Tahap Pelaksanaan								Dinas PUPR, Dinas Perindustrian	APBN, APBD, non pemerintah
	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Prov.Kalsel									
	Tahap Perencanaan								Dinas PUPR	APBN,APBD
	Tahap Pelaksanaan								Dinas PUPR	APBN,APBD
	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Banjarbakula									
	Tahap Perencanaan								Kementerian PUPR, Dinas PUPR	APBN,APBD



No	Nama Proyek dan Rincian Kegiatan	Tahun Pelaksanaan							Pwerangkat Daerah Penanggung Jawab	Skema Pembiayaan (APBN/APBD Provinsi/APBD Kab/Kota, KPBU, dll)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Tahap Pelaksanaan								Kementerian PUPR	APBN
	Revolusi Hijau									
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan								Dinas Kehutanan	APBN, APBD, non pemerintah
	Martapura Asri									
	Pelaksanaan Program dalam rangka Peningkatan Indeks Kualitas Air								Dinas Lingkungan Hidup	APBN, APBD, non pemerintah
	Pembangunan Gedung Pemerintah									
	Pelaksanaan pembangunan gedeung-gedung pemerintah								Dinas PUPR	APBD

Sumber: hasil analisis, 2025



3.2.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Lebih lanjut, arah kebijakan dirumuskan untuk solusi permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah. Selain itu, rumusan arah kebijakan pembangunan yang dipilih merupakan upaya untuk mengimplementasikan janji dan program prioritas kepala daerah sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan misi RPJMD akan dilaksanakan dengan berbagai arah kebijakan. Selanjutnya, arah kebijakan akan menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam Renstra Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakan RPJMD tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.5.
Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2025-2029

MISI	ARAH KEBIJAKAN	
MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA	1	Meningkatkan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
	2	Meningkatkan upaya penuntasan stunting
	3	Meningkatkan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan
	4	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer dan lanjutan, dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis
	5	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi
	6	Meningkatkan budaya berolahraga masyarakat dan prestasi olahraga
	7	Meningkatkan ketahanan dan diversifikasi pangan, serta pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya
	8	Menerapkan Wajib sekolah 12 tahun
	9	Meningkatkan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
	10	Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif secara mersta
	11	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan Tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah
	12	Meningkatkan kualitas lulusan yang terserap pasar kerja atau berwirausaha
	13	Meningkatkan gerakan gemar membaca dan literasi sekolah
	14	Meningkatkan kompetensi digital SDM
	15	Meningkatnya ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal



MISI	ARAH KEBIJAKAN	
	16	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan
	17	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
	18	Meningkatkan pemberdayaan serta penguatan kapasitas dan kemandirian pemuda
	19	Meningkatkan penanganan penyandang disabilitas dan perannya dalam pembangunan
	20	Meningkatkan kerukunan antar etnis dan antar umat beragama
	21	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat
	22	Meningkatkan kapasitas Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan
	23	Meningkatkan perlindungan dan pembinaan SDM, lembaga, dan pranata adat
	24	Meningkatkan penerapan nilai-nilai luhur budaya lokal dalam pendidikan karakter khususnya generasi muda
	25	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
	26	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
	27	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah
	28	Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
	29	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
	30	Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan
	31	Meningkatkan etika dan budaya politik
	32	Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal termasuk rumah tangga miskin
	33	Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan pada daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim
	34	Meningkatkan pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan
	35	Meningkatkan pemenuhan SPM sosial
	36	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial
	37	Meningkatkan cakupan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan
MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL	1	Meningkatkan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
	2	Meningkatkan penyediaan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
	3	Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau ke seluruh wilayah
	4	Meningkatkan pasokan dan kualitas layanan listrik
	5	Percepatan penyelesaian jalan-jalan penghubung antar kawasan dan percepatan pembangunan jaringan jalur kereta api serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah
	6	Meningkatkan koordinasi pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan Banjarmasin serta kota-kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya



MISI	ARAH KEBIJAKAN		
	7	Mewujudkan sistem transportasi yang aman dan andal bagi pengguna serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas	
	8	Meningkatkan koordinasi pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah	
	9	Meningkatkan koordinasi pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik)	
	10	Meningkatkan koordinasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sisi Timur wilayah Kalimantan Selatan secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu	
	11	Mengembangkan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi	
	12	Meningkatkan penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	
	13	Meningkatkan penanganan permukiman kumuh	
	14	Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama di daerah kepulauan dan afirmasi	
	15	Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	
MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH	1	Mengembangkan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan Selatan melalui hilirisasi komoditi unggulan	
	2	Meningkatkan hilirisasi industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia.	
		3	Mengembangkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		4	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
		5	Mengembangkan pariwisata unggulan termasuk Geopark Meratus, dan ekonomi kreatif
		6	Meningkatkan produktivitas BUMD
		7	Meningkatkan pengendalian inflasi daerah.
		8	Pembangunan irigasi baru terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya
		9	Pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan
		10	Optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan hutan melalui perhutanan sosial dalam rangka peningkatan ekonomi di dalam dan di sekitar hutan
		11	Mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal
		12	Mengembangkan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian (dalam arti luas) dan kompleksitas industri
		13	Mengembangkan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas



MISI	ARAH KEBIJAKAN	
		pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani
	14	Meningkatkan penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung sistem ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, dan pengembalian material ke dalam siklus produksi
	15	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
	16	Meningkatkan rantai nilai domestik Kalimantan Selatan untuk mendukung rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional
	17	Mengembangkan infrastruktur berkualitas untuk daerah potensial investasi
	18	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i>
	19	Meningkatkan penempatan tenaga kerja
	20	Meningkatkan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan
	21	Meningkatkan kualitas lulusan yang terserap pasar kerja atau berwirausaha
	22	Meningkatkan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
	23	Meningkatkan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
	24	Meningkatkan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan
MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM	1	Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis termasuk lahan pasca tambang, ruang terbuka hijau, serta penghambatan laju deforestasi sekaligus mendukung program pusat untuk Pengendalian Kerusakan Lahan
	2	Meningkatkan pelestarian <i>geosites</i> di kawasan Pegunungan Meratus
	3	Meningkatkan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal sekaligus mendukung program pusat untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	4	Menurunkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sekaligus mendukung 6 program pusat untuk Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Pengendalian Kerusakan Lahan, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	5	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana sekaligus mendukung program pusat untuk Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
	6	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir sekaligus mendukung program pusat untuk Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
	7	Meningkatkan rehabilitasi ekosistem laut dan pesisir dengan penanaman bakau, terumbu karang buatan, dan pembinaan kelompok masyarakat pesisir sekaligus mendukung program pusat untuk Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut



MISI	ARAH KEBIJAKAN	
	8	Mengembangkan <i>carbon tax</i> dan <i>carbon trading</i> , program <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) serta transisi energi (<i>Energy Transition Mechanism/ETM</i>)
	9	Mengembangkan interkoneksi antarwilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan
	10	Meningkatkan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
	11	Meningkatkan ketangguhan, sistem pendataan kebencanaan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
	12	Mengembangkan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor
	13	Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai
	14	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah
MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT	1	Meningkatkan penataan regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah
	2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.
	3	Mengembangkan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah (<i>smart ASN</i>) dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
	4	Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi
	5	Meningkatkan kualitas pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi
	6	Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah
	7	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan termasuk penerapan manajemen risiko
	8	Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan Selatan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	9	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah
	10	Mengembangkan pembiayaan inovatif
	11	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah
	12	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu
	13	Meningkatkan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	14	Meningkatkan tata kelola data pembangunan termasuk pengembangan jaringan informasi Geospasial Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan berkualitas, mendorong percepatan kebijakan Satu Peta dan Satu Data
	15	Meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat, termasuk kecepatan respon terhadap laporan masyarakat
	16	Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana publik dan pemerintahan

Sumber: hasil analisis, 2025



Keterkaitan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya yang akan ditempuh dalam mencapai sasaran dan mewujudkan misi pembangunan jangka menengah disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 3.6.

Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi dan Sasaran Pembangunan

MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Pemantapan Kesehatan untuk Semua	1	Meningkatkan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	
			2	Meningkatkan upaya penuntasan stunting	
			3	Meningkatkan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan	
			4	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer dan lanjutan, dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis	
			5	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi	
			6	Meningkatkan budaya berolahraga masyarakat dan prestasi olahraga	
			7	Meningkatkan ketahanan dan diversifikasi pangan, serta pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya	
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital	Pemantapan Pendidikan Berkualitas yang Merata	8	Menerapkan Wajib sekolah 12 tahun	
			9	Meningkatkan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah	
			10	Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif secara mersta	
			11	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan Tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah	
			12	Meningkatkan kualitas lulusan yang terserap pasar kerja atau berwirausaha	
			13	Meningkatkan gerakan gemar membaca dan literasi sekolah	
	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Penguatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Pengembangan Transformasi Digital	14	Meningkatkan kompetensi digital SDM
				15	Meningkatnya ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
				16	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan
				17	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan



MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia	Pemantapan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		18	Meningkatkan pemberdayaan serta penguatan kapasitas dan kemandirian pemuda		
			19	Meningkatkan penanganan penyandang disabilitas dan perannya dalam pembangunan		
			20	Meningkatkan kerukunan antar etnis dan antar umat beragama		
			21	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat		
			22	Meningkatkan kapasitas Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		
			23	Meningkatkan perlindungan dan pembinaan SDM, lembaga, dan pranata adat		
			24	Meningkatkan penerapan nilai-nilai luhur budaya lokal dalam pendidikan karakter khususnya generasi muda		
			25	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		
			26	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		
			27	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah		
			Pemantapan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kehidupan Berdemokrasi	28	Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	
				29	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	
				30	Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	
				31	Meningkatkan etika dan budaya politik	
			Menurunnya Kemiskinan	Perlindungan Sosial yang Adaptif	32	Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal termasuk rumah tangga miskin
					33	Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan pada daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim
					34	Meningkatkan pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan
35	Meningkatkan pemenuhan SPM sosial					
36	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial					
37	Meningkatkan cakupan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan					



MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Pengembangan Infrastruktur Berkualitas	1	Meningkatkan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
			2	Meningkatkan penyediaan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
			3	Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau ke seluruh wilayah
			4	Meningkatkan pasokan dan kualitas layanan listrik
			5	Percepatan penyelesaian jalan-jalan penghubung antar kawasan dan percepatan pembangunan jaringan jalur kereta api serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah
			6	Meningkatkan koordinasi pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan Banjarmasin serta kota-kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya
			7	Mewujudkan sistem transportasi yang aman dan andal bagi pengguna serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas
			8	Meningkatkan koordinasi pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah
			9	Meningkatkan koordinasi pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik)
			10	Meningkatkan koordinasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sisi Timur wilayah Kalimantan Selatan secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu
			11	Mengembangkan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi



MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			12	Meningkatkan penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	
			13	Meningkatkan penanganan permukiman kumuh	
			14	Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama di daerah kepulauan dan afirmasi	
		Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan	15	Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	
MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah	Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1	Mengembangkan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan Selatan melalui hilirisasi komoditi unggulan	
			2	Meningkatkan hilirisasi industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia.	
			3	Mengembangkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	
			4	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	
			5	Mengembangkan pariwisata unggulan termasuk Geopark Meratus, dan ekonomi kreatif	
			6	Meningkatkan produktivitas BUMD	
			7	Meningkatkan pengendalian inflasi daerah.	
			8	Pembangunan irigasi baru terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya	
			9	Pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan	
			10	Optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan hutan melalui perhutanan sosial dalam rangka peningkatan ekonomi di dalam dan di sekitar hutan	
			Pengembangan ekonomi syariah	11	Mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal
			Penerapan Ekonomi Hijau	12	Mengembangkan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian (dalam arti luas) dan kompleksitas industri



MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			13	Mengembangkan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani
			14	Meningkatkan penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung sistem ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, dan pengembalian material ke dalam siklus produksi
			15	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
	Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan Sistem Logistik yang Andal	16	Meningkatkan rantai nilai domestik Kalimantan Selatan untuk mendukung rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional
			17	Mengembangkan infrastruktur berkualitas untuk daerah potensial investasi
			18	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i>
	Menurunnya Pengangguran	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	19	Meningkatkan penempatan tenaga kerja
			20	Meningkatkan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan
			21	Meningkatkan kualitas lulusan yang terserap pasar kerja atau berwirausaha
		Pengembangan Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	22	Meningkatkan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
			23	Meningkatkan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Pengembangan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	24	Meningkatkan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan	
MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM	Menurunnya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	1	Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis termasuk lahan pasca tambang, ruang terbuka hijau, serta penghambatan laju deforestasi
			2	Meningkatkan pelestarian <i>geosites</i> di kawasan Pegunungan Meratus



MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			3	Meningkatkan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	
			4	Menurunkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	
			5	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	
			6	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir	
			7	Meningkatkan rehabilitasi ekosistem laut dan pesisir dengan penanaman bakau, terumbu karang buatan, dan pembinaan kelompok masyarakat pesisir	
			8	Mengembangkan <i>carbon tax</i> dan <i>carbon trading</i> , program <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) serta transisi energi (<i>Energy Transition Mechanism/ETM</i>)	
			9	Mengembangkan interkoneksi antarwilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan	
	Meningkatnya Penggunaan Energi Bersih	Meningkatkan Ketahanan Energi yang Ramah Lingkungan		10	Meningkatkan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
				11	Meningkatkan ketangguhan, sistem pendataan kebencanaan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
				12	Mengembangkan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor
				13	Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai
				14	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah
	Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana	Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN	Penataan Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1	Meningkatkan penataan regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	
			2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.	



MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
			3	Mengembangkan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah (<i>smart ASN</i>) dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah		
			4	Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi		
			5	Meningkatkan kualitas pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi		
			6	Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah		
			7	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan termasuk penerapan manajemen risiko		
			8	Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan Selatan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.		
			9	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah		
			10	Mengembangkan pembiayaan inovatif		
			11	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Pemantapan Pelayanan Publik	12	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu
					13	Meningkatkan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	14	Meningkatkan tata kelola data pembangunan termasuk pengembangan jaringan informasi Geospasial Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan berkualitas, mendorong percepatan kebijakan Satu Peta dan Satu Data				
	15	Meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat, termasuk kecepatan respon terhadap laporan masyarakat				
	16	Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana publik dan pemerintahan				

Sumber: hasil analisis, 2025



3.2.3. Arahan Pengembangan Kewilayahan

Keberhasilan pembangunan provinsi sangat dipengaruhi oleh pencapaian di kabupaten/kota. Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) tahun ke depan perlu bersinergi dengan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Sinergi perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota dimuat pada bagian ini melalui arahan pengembangan wilayah sampai ke kabupaten/kota dan indikator makro daerah.

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan daerah, ditetapkan *highlight* intervensi kewilayahan. Terdapat beberapa *highlight* indikasi intervensi untuk mewujudkan transformasi pembangunan di Kalimantan Selatan pada periode 2025-2029. Pemerintah dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 memberikan arahan indikasi intervensi tersebut.

<p>A. Kawasan Pertumbuhan</p> <p>Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Banjarmasin 2. Kota Banjarbaru 3. Kabupaten Banjar 4. Kabupaten Barito Kuala 5. Kabupaten Tanah Laut <p>Kawasan Pertumbuhan Industri Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kabupaten Tanah Laut 7. Kabupaten Tanah Bumbu 8. Kabupaten Kotabaru 	<p>D. Kawasan Afirmasi</p> <p>Kawasan Prioritas Perdesaan (KPP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Agropolitan, Kabupaten Tanah Bumbu 2. KPP Agrowisata Horikultura Kabupaten Tabalong 3. KPP Agrominapolitan Kabupaten Banjar <p>Kawasan Transmigrasi (KT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. KT Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala
<p>C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi</p> <p>Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Barito Kuala 2. Kabupaten Banjar 3. Kabupaten Tapin 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 7. Kabupaten Tabalong 	<p>E. Kawasan Konservasi</p> <p>Kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Hulu Sungai Utara 2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4. Kabupaten Tabalong 5. Kabupaten Tanah Laut 6. Kabupaten Banjar 7. Kabupaten Kotabaru 8. Kabupaten Tapin

Gambar 3.15.

Arahan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Adapun *highlight* indikasi intervensi pembangunan di Kalimantan Selatan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 3.7.
Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
A1 A2 A3 A4 A5	Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin: A1: Kota Banjarmasin A2: Kota Banjarbaru A3: Kabupaten Banjar A4: Kabupaten Barito Kuala A5: Kabupaten Tanah taut	Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, melalui: - Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional, dengan output: bantuan peralatan/sarana, penyelidikan geologi tata lingkungan untuk penataan ruang dan infrastruktur - Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya, dengan output: bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU) bidang perumahan, bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/pekerja, bantuan pembangunan rumah swadaya, pemukiman kembali, peremajaan, dan pemugaran permukiman kumuh, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, fasilitasi literasi digital, jalan non-status yang dikembangkan di kawasan transmigrasi di Kabupaten Barito Kuala, subsidi angkutan umum perkotaan di Kota Banjarmasin - Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan, dengan output: PBK Provinsi Kalimantan Selatan, pilot project kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh, dengan output pemetaan komponen kerentanan dan kapasitas, penguatan instrumen peringatan dini bencana Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan <i>Transit Oriented Development (TOD)</i> - Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu melalui pembentukan kelembagaan (atau forum) pengelola WM Banjarmasin dan penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, dengan output: daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di wilayah metropolitan, daerah yang melakukan penilaian indeks maturasi perkotaan lintas K/L secara terpadu di wilayah metropolitan, daerah yang dikuatkan tata kelola smart city-nya di wilayah metropolitan, dan daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP perkotaan pada wilayah metropolitan - Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan output: Metropolitan Statistical Area
A6 A7 A8	Kawasan Pertumbuhan Industri Baru A6: Kabupaten Tanah Laut A7: Kabupaten Tanah Bumbu A8: Kawasan Kotabaru	Pengembangan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor, melalui: - Penguatan industri dasar seperti hilirisasi kimia berbasis batubara



No.	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan hilirisasi nikel, dengan output industri smelter/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya, kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel, perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi, industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor industri logam, industri yang terfasilitasi melalui pendampingan dalam rangka peningkatan investasi dan/atau ekspor, industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan akses pasar dan pendampingan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri - Pengembangan industri karet, dengan output penyusunan data supply demand sektor tekstil, kulit dan alas kaki, dan penerapan tingkat komponen dalam negeri - industri kecil, peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri karet, serta pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, dan informasi pasar, promosi dan pemasaran - Pengembangan hilirisasi kelapa sawit, dengan output kriteria standar CPO untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan industri hasil perkebunan, mineral logam, dan maritim, fasilitasi peningkatan ketersediaan keberlanjutan produk hilir kelapa sawit melalui pembentukan lembaga sertifikasi (LS) ISPO Hilir, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF - Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel) berbahan baku technical oil, fasilitasi penyediaan pasokan bioetanol untuk bahan bakar nabati (biofuel) dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional, serta kebijakan pembangunan rendah karbon (PRK) dan penurunan gas rumah kaca (GRK) sektor industri - Peningkatan investasi hilirisasi besi baja
<p>C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7</p>	<p>Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu: C1: Kabupaten Barito Kuala C2: Kabupaten Banjar C3: Kabupaten Tapin C4: Kabupaten Hulu Sungai Selatan C5: Kabupaten Hulu Sungai Tengah C6: Kabupaten Hulu Sungai Utara C7: Kabupaten Tabalong</p>	<p>Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dengan output: sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara - Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output: kawasan karet - Penguatan pascapanen pangan nabati, dengan output: sarana pascapanen tanaman perkebunan - Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul - Pengembangan pengairan dan irigasi dengan output: pembangunan dan/atau pengembangan irigasi di Wilayah Sungai (WS) Cengal-Batulicin untuk meningkatkan ketahanan pangan - Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output: intervensi cetak sawah di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong
	<p>Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP):</p>	<p>Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, melalui:</p>



No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
D1 D2 D3	D1: KPP Agropolitan, Kabupaten Tanah Bumbu D2: KPP Agrowisata Hortikultura, Kabupaten Tabalong D3: KPP Agrominapolitan, Kabupaten Banjar	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan rincian output: fasilitasi lembaga posyandu dalam penerapan 6 bidang SPM, sarana puskesmas, pustu dan posyandu (SOPHI), fasilitasi program P4GN bidang pencegahan berbasis sumber daya pembangunan desa, desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting, revitalisasi posyandu, dan kampanye posyandu aktif, sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan - Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan rincian output: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, penguatan interkoneksi ketenagalistrikan Barito Mahakam; pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu, desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator, kabupaten/kota yang difasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, OM BTS 4G/Lastmile, pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi, sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan - Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal - Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya) - Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa
D4	Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala D4: KT Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala	<p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan output: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman - Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output: bantuan sarana produksi pertanian. - Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi. - Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan output: perpindahan dan penempatan transmigran.
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8	Kawasan Pcgunungan Meratus (Geopark Maratus dan Kawasan Loksado): E1: Kabupaten Hulu Sungai Utara E2: Kabupaten Hulu Sungai Tengah E3: Kabupaten Hulu Sungai Selatan E4: Kabupaten Tabalong E5: Kabupaten Tanah Laut E6: Kabupaten Banjar E7: Kabupaten Kotabaru E8: Kabupaten Tapin	<p>Pengembangan ekowisata kelas dunia di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja - Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jembatan Laut-Pulau Kalimantan



No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan nasional, dengan output: pembangunan jalan strategis ruas Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah)-Serapat- Batas Kota Banjarmasin - Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, dengan output: Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan ruas Walangsi-Kaparkias dan Pagatan- Batulicin - Pengembangan/pembangunan/rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, dengan output: Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional di Kab. Kotabaru - Pengembangan pelabuhan logistik di Pulau Laut, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan - Pengembangan bandara, dengan output: Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik - Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk - Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan intervensi spesifik dan sensitif stunting, dengan output: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapat makanan tambahan dari buffer-stock, dan kegiatan koordinasi dan advokasi terkait perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita - Intensifikasi penemuan kasus, pengobatan, serta peningkatan upaya pencegahan, dengan output: pemberian obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, serta NSPK pencegahan dan pengendalian TBC - Eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan output: peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, supervisi dan monitoring evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit tropis, serta assessment eliminasi penyakit tropis (kusta) - Pencegahan dan pengendalian kejadian penyakit malaria, dengan output: layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria - Pengendalian penyakit menular lainnya, dengan output NSPK pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin - Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - Pembiayaan JKN/KIS melalui Bantuan Masyarakat, dengan output: cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS - Pembangunan rumah sakit lengkap di kabupaten, melalui: pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	Provinsi Kalimantan Selatan	Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan Prasarana Sarana Umum (PSU) melalui fasilitasi pembangunan rumah baru, penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan pada perumahan tapak, penyaluran subsidi/bantuan pembiayaan rumah, serta penanganan permukiman kumuh, dengan output: bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI, rumah swadaya, dan MBR/pekerja, bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU) bidang perumahan; pembangunan, peningkatan, dan perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional dan kabupaten/kota; infrastruktur air minum berbasis masyarakat; fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka; pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, melalui: - Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri; - Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK; - Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK. - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan
	Provinsi Kalimantan Selatan	Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui: - Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan output: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial; - Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan, dengan output: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan kualitas pemuda, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: - Pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, dengan output: pengembangan tata kelola pembinaan olahraga prestasi, dan pengembangan sistem pembinaan olahragawan elite cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade; - Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, dan pencegahan perilaku berisiko; - Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan, dengan output: peningkatan partisipasi ketenagakerjaan layak pemuda, dan peningkatan kewirausahaan pemuda - Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik; - Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas, dengan output: penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial; - Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia, dengan output: lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi Sosial
	Provinsi Kalimantan Selatan	Perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya, melalui



No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; - Pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya; - Penguatan data, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan output: penguatan instrumen peringatan dini bencana; dan - Penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat

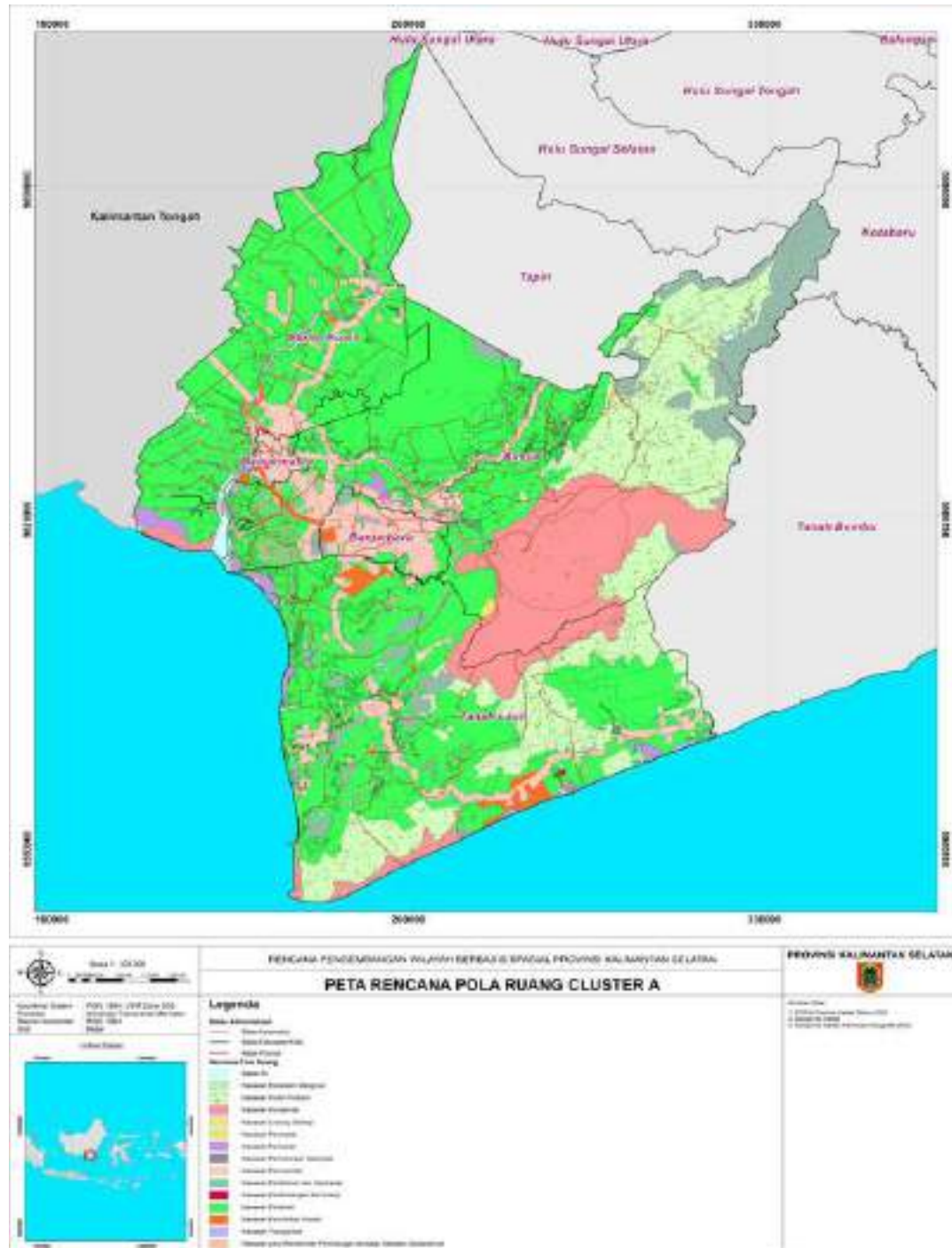
Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan arahan pengembangan kewilayahan yang dibagi menjadi 3 (tiga) klaster. Pengembangan 3 (tiga) klaster wilayah, meliputi:

1. Klaster Banjarbakula, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
2. Klaster Benua Anam, meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin.
3. Klaster Saijaan Bersujud, meliputi Kabupaten Tanah Bumu dan Kabupaten Kotabaru.

Pembagian klaster tersebut didasarkan pada aglomerasi pusat-pusat kegiatan; keterkaitan fungsional; potensi pengembangan wilayah antar kabupaten/kota; deliniasi berdasarkan batas administrasi wilayah; dan sinkronisasi arah pengembangannya dengan konsep pengembangan kawasan-kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Selatan.

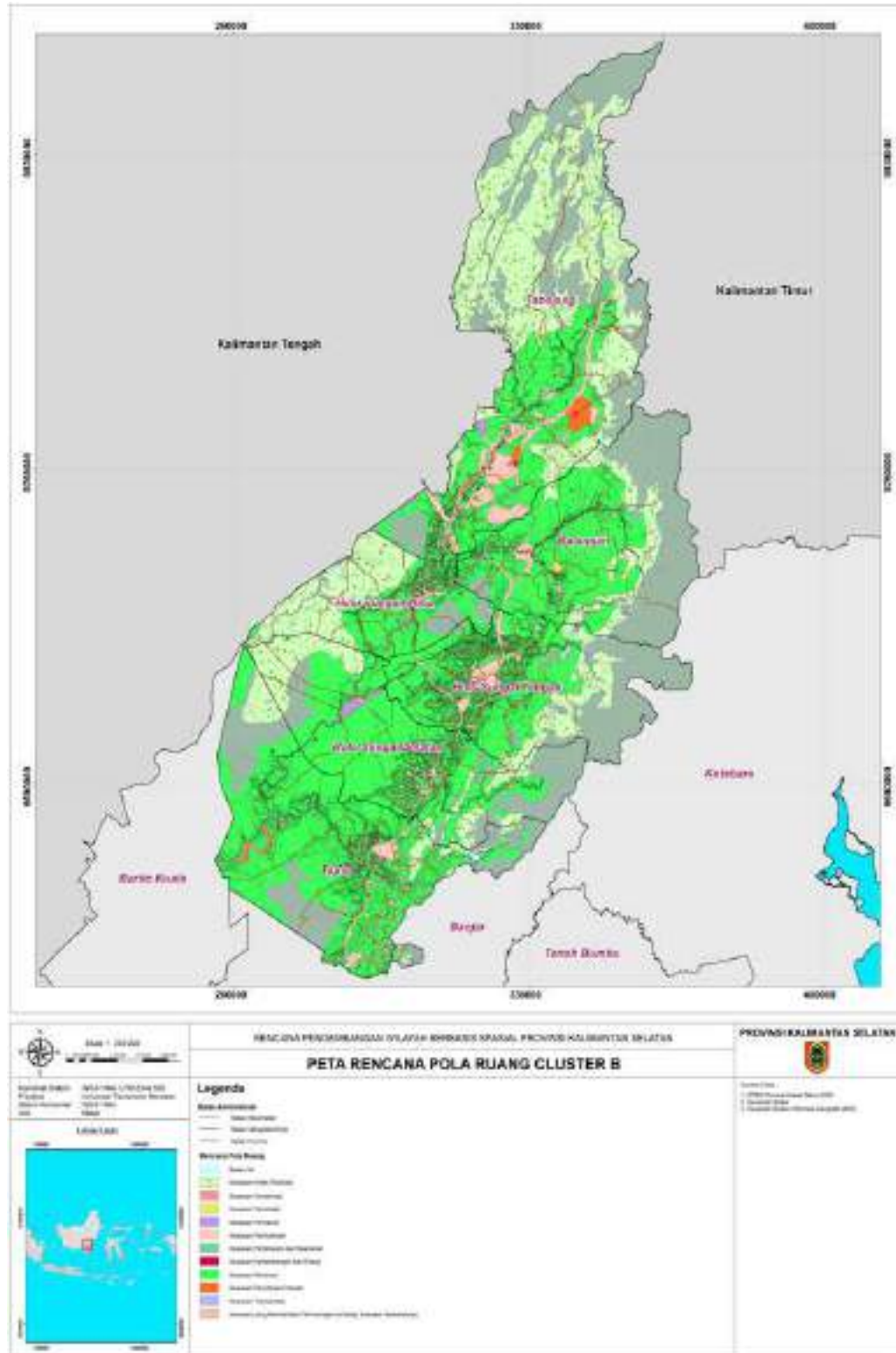
Peta rencana pola ruang untuk masing-masing klaster dimuat pada beberapa gambar di bawah.



Gambar 3.16.

Peta Rencana Pola Ruang Klaster Banjarbakula

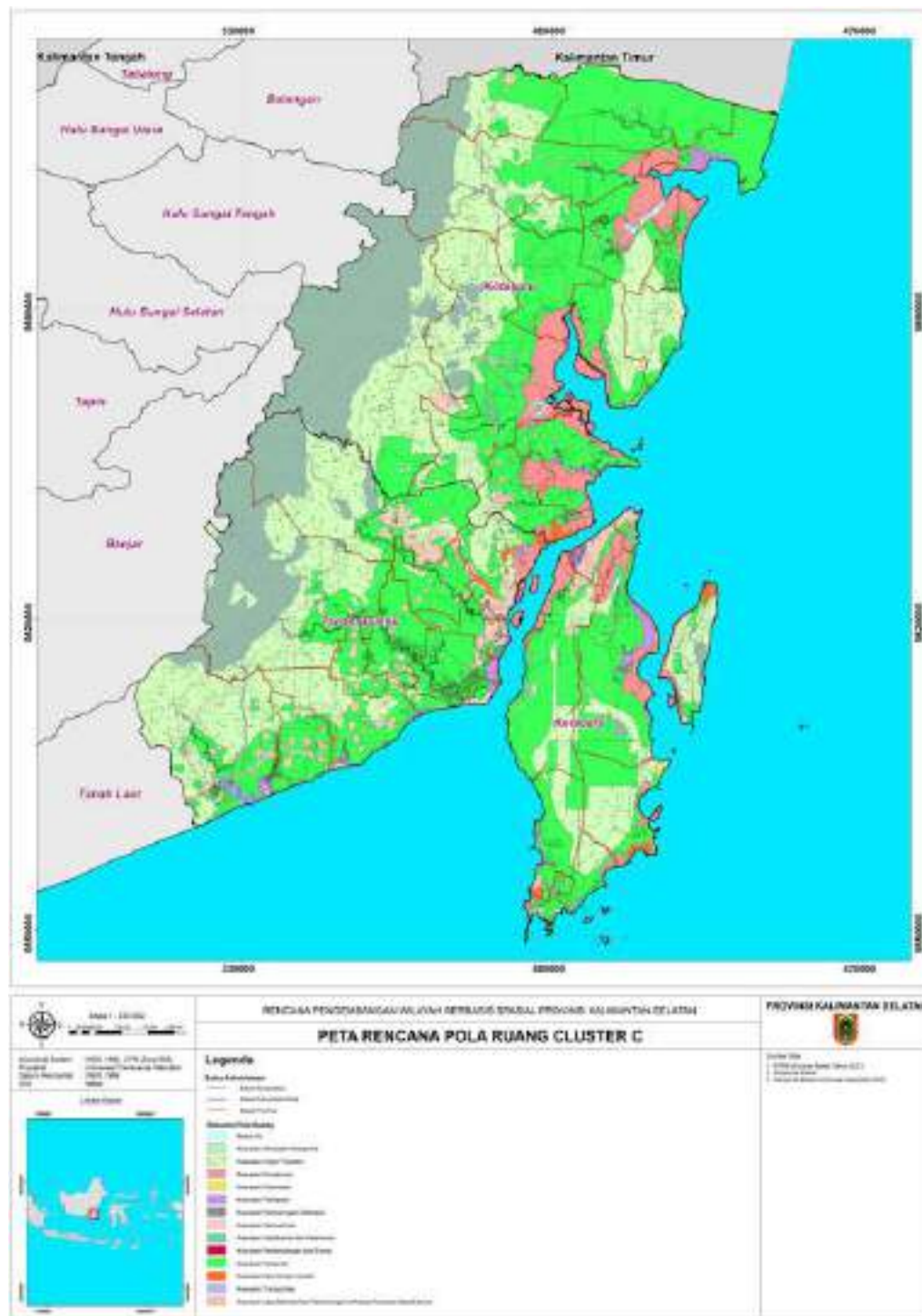
Sumber: Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial Provinsi Kalimantan Selatan, 2024



Gambar 3.17.

Peta Rencana Pola Ruang Klaster Banua Anam

Sumber: Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial Provinsi Kalimantan Selatan, 2024



Gambar 3.18.

Peta Rencana Pola Ruang Klaster Saijaan Bersujud

Sumber: Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Arahan pembangunan kewilayahan pada periode tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Klaster Banjarbakula dan Sekitarnya

a. Arah Pengembangan Kawasan

Klaster Banjarbakula dan Sekitarnya dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan pengembangan Wilayah Metropolitan (WM) Banjarbakula dan kawasan perdesaan sekitarnya sebagai pusat kegiatan



ekonomi berskala internasional, nasional, dan regional melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, industri kelautan, pertanian, pusat distribusi dan pergudangan, serta pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar kawasan berbasiskan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan pengembangan WM Banjarbakula sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tentang RTR KSN Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula sebagai berikut:

1) Kawasan Perkotaan Inti

- Kawasan perkotaan inti Kota Banjarmasin, sebagai perkotaan dengan pelayanan skala internasional, nasional, dan regional untuk pengembangan pusat perdagangan barang dan/atau jasa, pusat pelayanan olahraga, dan pusat pelayanan kesehatan. Terkait transportasi, diarahkan untuk melayani transportasi laut pada skala internasional dan nasional, transportasi sungai pada skala regional, sistem angkutan umum penumpang dan barang skala nasional dan regional. Sektor lainnya meliputi pengembangan pusat pendidikan, kegiatan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif berskala internasional, pusat pertahanan dan keamanan, serta pusat kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan lainnya.
- Kawasan perkotaan inti Kota Banjarbaru dan Kawasan Perkotaan Martapura, sebagai perkotaan dengan pelayanan skala internasional, nasional, dan regional untuk pengembangan pusat perdagangan barang dan/atau jasa, pusat pelayanan olahraga, dan pusat pelayanan kesehatan. Terkait transportasi, diarahkan untuk melayani transportasi udara pada skala internasional dan nasional, transportasi sungai pada skala regional, sistem angkutan umum penumpang dan barang skala nasional dan regional. Sektor lain terutama sebagai pusat pemerintahan provinsi, pendidikan tinggi, pariwisata dan ekonomi kreatif berskala internasional, pusat pertahanan dan keamanan, serta pusat kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan lainnya.

2) Kawasan Perkotaan Sekitarnya yang meliputi Kawasan Perkotaan Kertak Hanyar-Gambut, Kawasan Perkotaan Sungai Tabuk, Kawasan Perkotaan Marabahan, Kawasan Perkotaan Alalak, Kawasan Perkotaan Pelaihari, Kawasan Perkotaan Jorong, dan Kawasan Perkotaan Kintap sebagai pusat kegiatan yang melayani kegiatan pemerintahan, perdagangan barang dan/atau jasa, pendidikan, kesehatan,



transportasi, sistem angkutan penumpang dan barang, industri, kegiatan pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pusat pelayanan olahraga, pertahanan dan keamanan, serta pusat kegiatan kemasyarakatan lainnya.

3) Pusat Pertumbuhan Kelautan

- Pusat Industri Kelautan dan Perikanan meliputi Industri Maritim dan Industri Pengolahan Ikan
- Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan meliputi pengembangan pelabuhan perikanan serta sentra kegiatan perikanan tangkap dan budidaya

Sebagai salah satu hub dalam pengembangan regional dan mendorong konektivitas Ibukota Nusantara, Klaster Banjarbakula dan Sekitarnya juga memiliki peranan penting dalam mendukung swasembada pangan dan mendorong terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan terutama didukung pengembangan sistem logistik terpadu dengan didukung potensi unggulan dan pengembangan kawasan terintegrasi. Adapun arah pengembangan Klaster Banjarbakula dan sekitarnya:

- 1) Mendorong perwujudan sistem perkotaan nasional yang berkelanjutan, inklusif, produktif, dan ramah lingkungan.
- 2) Pengembangan “Sentra Pangan Lestari”, dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat produksi pertanian, intervensi cetak sawah, dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan alih fungsi lahan pertanian.
- 3) Mendorong perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura, kelautan, perikanan, perkebunan, serta peternakan yang memperhatikan ketahanan iklim.
- 4) Pengembangan ekonomi unggulan berupa perdagangan barang dan/atau jasa, hilirisasi industri yang terintegrasi dengan pusat-pusat produksi dan distribusi, pariwisata (UNESCO Global Geopark Meratus dan wisata unggulan lainnya) dan ekonomi kreatif yang didukung modernisasi sektor perdagangan, logistik, dan jasa melalui transformasi digital dan investasi infrastruktur perkotaan.
- 5) Penataan kawasan permukiman kumuh dan permukiman pada bantaran sungai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



- 6) Pengendalian daya rusak air, dengan fokus penanganan banjir dan genangan secara terintegrasi, terutama pada kawasan terbangun.
- 7) Peningkatan *link and match* pendidikan dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).
- 8) Terkait pengelolaan sampah untuk dapat memaksimalkan penerapan Prinsip 5R (*Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Rot*).
- 9) Meminimalkan sampah hingga menjadi residu sekecil mungkin.

b. Arah Pengembangan Infrastruktur

- 1) Pengembangan sistem logistik melalui pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan dan bandara, pembangunan pusat distribusi, penyediaan kantong parkir untuk angkutan bermuatan besar, serta pengembangan/peningkatan jalan untuk jalur logistik.
- 2) Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas antar Kawasan Perkotaan Inti, Kawasan destinasi wisata, Kawasan Perkotaan Sekitarnya, dan pusat-pusat kegiatan lainnya untuk angkutan penumpang dan barang melalui pengembangan jalan, pengembangan kawasan berorientasi atau *Transit Oriented Development* (TOD), pengembangan sistem angkutan umum massal (*Bus Rapid Transit* atau *Buy The Service* Regional Banjarbakula dan angkutan massal perkotaan lainnya) dan non massal, pengembangan moda transportasi terintegrasi dan terpadu, yang mudah diakses dan dijangkau masyarakat.
- 3) Pembangunan sistem drainase, penataan lalu lintas, dan moda transportasi air terpadu.
- 4) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar perkotaan seperti optimalisasi SPAM jaringan perpipaan yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan untuk peningkatan akses air minum, penyediaan sarana sanitasi dan persampahan, penanganan rumah tidak layak huni, dan pembangunan perumahan vertikal.
- 5) Pengembangan prasarana sumber daya air yaitu pembangunan bendungan multifungsi, pengembangan sistem jaringan irigasi, pengembangan drainase terintegrasi dan pengendalian banjir.



- 6) Pengembangan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yaitu pembangunan lumbung pangan dan pembangunan sarana prasarana energi berkelanjutan.

c. Arahan dan Indikasi Intervensi Pengembangan Kabupaten/Kota

1) Kota Banjarmasin

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
 - Mendorong perwujudan perkotaan metropolitan yang layak huni, inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi (pusat perdagangan dan jasa, pariwisata) berskala internasional dan pengembangan *Central Business District* (CBD) didukung penguatan infrastruktur perkotaan yang handal seperti jaringan transportasi, sumber daya air (air bersih, air limbah, sistem drainase), energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transformasi digital untuk modernisasi berbagai sektor (perdagangan, logistik, jasa, dan keuangan) dan investasi infrastruktur perkotaan.
 - Pengembangan Pelabuhan Trisakti untuk pelayanan transportasi laut berskala nasional dan internasional serta pengembangan jalur logistik (distribusi) dan transit untuk wilayah Kalimantan Tengah menuju wilayah Utara dan Timur Kalimantan Selatan menuju Ibukota Nusantara.
 - Penataan kawasan melalui revitalisasi pasar tradisional, kampung ekonomi, dan ruang publik berbasis komunitas, serta pembangunan kawasan *mixed-use* komersial-terintegrasi di pusat kota dan tepian sungai.
 - Penguatan sektor pariwisata dengan mengembangkan UNESCO Global Geopark Meratus (Situs Rute Barat) dengan, serta melakukan penataan kawasan sempadan sungai dengan konsep *Waterfront City* dan penguatan branding "Kota Seribu Sungai".
 - Penguatan UMKM dan Ekonomi Digital dengan prioritas pelatihan dan inkubasi untuk UMKM *go digital*, *startup*, serta pengembangan *e-commerce* lokal, serta penyediaan akses pembiayaan KUR legalitas, dan promosi produk kreatif.



- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
- Peningkatan *link and match* Pendidikan dengan dunia kerja khususnya di bidang digital, hospitality, dan keuangan.
 - Penguatan sektor perbankan syariah, pendidikan kejuruan, dan layanan kesehatan unggulan.
 - Pengembangan pusat pelatihan kewirausahaan dan inovasi pemuda perkotaan.
 - Kolaborasi lintas pelaku (pentahelix) Pemerintah Daerah, masyarakat, perguruan tinggi, pelaku swasta dan media dalam penataan kawasan ekonomi perkotaan.
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik ekonomi, insentif investasi hijau, dan digitalisasi birokrasi.
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Penerapan aturan penyediaan waduk, sumur resapan, pengembangan kolam retensi air hujan dan sistem polder, serta pengembangan saluran drainase terintegrasi
 - Penataan sistem peringatan dini banjir dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

2) Kota Banjarbaru

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
- Mendorong perwujudan perkotaan yang layak huni, inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan pengembangan kota cerdas (*smart city*), pengembangan pusat pemerintahan provinsi modern dan ramah lingkungan, pusat perdagangan dan jasa, pengembangan bandara internasional, Aero City dan CBD yang terintegrasi dengan pusat pelayanan transportasi publik antarmoda terintegrasi.



- Penataan kawasan melalui: 1) penataan kawasan perumahan, hijau, dan industri secara berkelanjutan dan inklusif; 2) revitalisasi pasar tradisional, kampung ekonomi, dan ruang publik berbasis komunitas; 3) pembangunan kawasan *mixed-use* komersial-terintegrasi di pusat kota; 4) Pengembangan kota berbasis *knowledge economy* dan industri kreatif.
 - Penguatan sektor pariwisata dengan mengembangkan UNESCO Global Geopark Meratus (Situs Rute Barat dan Selatan) diantaranya situs Penambangan Tradisional Intan Cempaka dan pusat sasirangan, dengan didukung peningkatan amenities pariwisata, fasilitasi usaha pariwisata rakyat, dan pelatihan pemandu wisata lokal.
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas
- Penguatan sektor pendidikan vokasi, pelatihan kerja, inkubasi startup, dan kolaborasi riset-pasar.
 - Penyediaan pelatihan digitalisasi UMKM, akses KUR, pendampingan branding dan ekspor lokal.
 - Mendorong digitalisasi layanan publik dan ekonomi melalui platform smart city.
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Penerapan aturan penyediaan waduk, sumur resapan, pengembangan kolam retensi air hujan dan embung, serta pengembangan saluran drainase terintegrasi
 - Penataan sistem peringatan dini banjir dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

3) Kabupaten Banjar

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian



- Pengembangan Kawasan Perkotaan Martapura sebagai bagian dari kawasan inti WM Banjarbakula sebagai pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, dan sebagai kawasan ekonomi penyangga Banjarmasin–Banjarbaru–Martapura (Banjarbakula) didukung dengan infrastruktur transportasi publik, layanan dasar dan infrastruktur perdesaan.
- Pengembangan “Sentra Pangan Lestari”, dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat produksi pertanian, intervensi cetak sawah, dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan alih fungsi lahan pertanian.
- Penguatan swasembada pangan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Agrominapolitan Banjar yaitu pengembangan pertanian terpadu (padi–ikan–ternak) khususnya di lahan rawa dan pembentukan kawasan pangan strategis dan sentra agribisnis yang didukung pembangunan jalan pertanian, pasar desa, cold storage, dan pelabuhan sungai.
- Hilirisasi produk unggulan daerah melalui penguatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan: beras kemasan, tepung ikan dan makanan olahan serta penyiapan infrastruktur rumah kemas, sertifikasi halal, dan branding produk lokal.
- Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif meliputi: 1) pendampingan usaha mikro melalui inkubasi bisnis, koperasi, dan digitalisasi; 2) promosi produk unggulan Banjar melalui festival, *e-commerce*, dan kemitraan pasar modern; dan 3) pengembangan kerjasama dan promosi pusat batu mulia Martapura.
- Penguatan sektor pariwisata dengan mengembangkan UNESCO Global Geopark Meratus (Situs Rute Barat, Selatan dan Timur) diantaranya pada situs Pasar Terapung Lok Baintan, Tahura Sultan Adam, dan Gunung Api Purba Bawah Laut dengan didukung peningkatan amenities pariwisata, fasilitasi usaha pariwisata rakyat, dan pelatihan pemandu wisata lokal.



- Penguatan tata kelola wisata religi antara lain di Makam Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Makam Guru Sekumpul Martapura dan Masjid Agung Al Karomah.
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
 - Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan untuk peningkatan keterampilan petani, nelayan, dan pelaku usaha.
 - Pusat pelatihan pertanian dan pengolahan pangan.
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
 - Restorasi lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi DAS, dan pembangunan pertanian berbasis ekosistem rawa.
 - Pembangunan sistem mitigasi dan pengendali banjir.
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

4) Kabupaten Barito Kuala

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
 - Pengembangan kawasan perkotaan sekitar WM Banjarbakula sebagai daerah mitra dan pusat kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dan logistik, pelayanan perdagangan barang dan jasa, pelayanan publik, industri maritim, sentra kegiatan perikanan budidaya, serta intensifikasi dan diversifikasi pertanian rawa yang didukung penyediaan infrastruktur berupa pengembangan daerah irigasi dan inovasi teknologi pertanian rawa, pengembangan akses jalan produksi dan distribusi, pasar desa dan pengembangan pasar modern, *cold storage*, dan rumah kemas.
 - Pengembangan “Sentra Pangan Lestari”, dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat produksi pertanian, intervensi cetak sawah, dan meningkatkan



pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan alih fungsi lahan pertanian.

- Hilirisasi pertanian dan perikanan dengan melaksanakan pembangunan unit pengolahan hasil: beras kemasan, abon ikan, kerupuk, dan pakan ikan didukung dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Tabunganen.
 - Promosi dan *branding* Kabupaten Barito Kuala sebagai destinasi agrowisata dan wisata air.
 - Pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala didukung pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik.
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
- Pelatihan petani-nelayan berbasis vokasi terutama budidaya, pengolahan dan manajemen usaha.
 - Penguatan koperasi petani, BUMDes, dan kelompok usaha bersama.
 - Akselerasi digitalisasi UMKM dan pelaku usaha tani, nelayan dan peternak
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

5) Kabupaten Tanah Laut

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
- Mendorong pengembangan kawasan perkotaan sekitar WM Banjarbakula sebagai pusat pengembangan kegiatan hilirisasi industri pada Kawasan Industri Jorong dan KPI Bati-Bati (pertanian, pengolahan ikan, peternakan, pakan, industri kaca, dan industri galangan kapal), pusat pertumbuhan kelautan



(sentra kegiatan perikanan tangkap dan budidaya) dengan didukung sistem logistik terpadu dan terintegrasi antara pusat produksi, pusat distribusi, pergudangan, pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, dan sarana prasarana penyimpanan seperti *cold storage*.

- Pengembangan kluster ekonomi: kluster jagung–pakan ternak–sapi, kluster perikanan budidaya–olahan–ekspor yang didukung perkuatan sentra produksi sektor pertanian dan perkebunan (komoditas kelapa sawit, karet, jagung dan cabai), sektor peternakan (sentra sapi dan pengolahan daging nasional), pengembangan kawasan minapolitan dan desa perikanan berkelanjutan.
 - Perluasan promosi dan penataan kawasan wisata unggulan terutama wisata bahari, alam, dan budaya.
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
- Revitalisasi Balai Latihan Kerja dengan mengintegrasikan pendidikan vokasi dan teknologi pertanian berbasis potensi daerah.
 - Perluasan kerjasama dengan pelaku usaha dalam pelatihan dan magang sesuai kebutuhan dunia usaha.
 - Pengembangan kewirausahaan muda didukung dengan fasilitas dan insentif usaha.
 - Fasilitasi akses permodalan melalui KUR dan Koperasi Desa Merah Putih.
 - Penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan promosi investasi.
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
 - Penguatan pengawasan lingkungan dan penerapan ekonomi hijau: pertanian organik, perikanan berkelanjutan, dan energi terbarukan.
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif



- Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

2. Klaster Banua Anam

a. Arah Pengembangan Kawasan

Klaster Banua Anam merupakan wilayah yang memiliki kondisi hamparan wilayah yang cukup heterogen yang terdiri dari hamparan pegunungan sampai dataran rawa dan memberikan nilai strategis yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Rawa Batang Banyu dan KSP Pegunungan Meratus. KSP Rawa Batang Banyu diarahkan untuk pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan. Adapun KSP Pegunungan Meratus bertujuan sebagai pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

Arah pengembangan kawasan pada Klaster Banua Anam sebagai berikut:

- 1) Mendorong pengembangan “Sentra Pangan Lestari”, dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat produksi pertanian, intervensi cetak sawah, dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan alih fungsi lahan pertanian.
- 2) Pengembangan hilirisasi industri hasil pertanian terutama komoditas padi, tanaman hortikultura, dan perkebunan karet serta pengolahan produk turunannya.
- 3) Pengembangan kawasan transit, simpul transportasi dan perdagangan dalam pengembangan sistem logistik untuk menunjang distribusi logistik dan angkutan penumpang dengan memperhatikan potensi interaksinya terhadap Ibukota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah, terutama pada kawasan perbatasan antar provinsi.
- 4) Sebagai salah satu kawasan bernilai konservasi tinggi dan memiliki kekayaan geologi bernilai internasional, Klaster Banua Anam berpotensi dikembangkan sebagai kawasan konservasi, kawasan pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif dengan skala global.
- 5) Pengembangan geosite dan kawasan sekitarnya dalam mendukung pengembangan UNESCO Global Geopark Meratus.



- 6) Perwujudan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Agrowisata Hortikultura di Kabupaten Tabalong.
- 7) Terkait pengelolaan sampah untuk dapat memaksimalkan penerapan Prinsip 5R (*Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Rot*).
- 8) Meminimalkan sampah hingga menjadi residu sekecil mungkin.

b. Arah Pengembangan Infrastruktur

- 1) Peningkatan layanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dalam mengintegrasikan pusat produksi dan pusat distribusi, salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan jalan lintas.
- 2) Pengembangan infrastruktur dalam mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian dan ketahanan pangan melalui pembangunan dan pengembangan daerah irigasi permukaan/rawa serta pembangunan tampungan air (bendung/bendungan).
- 3) Peningkatan layanan prasarana dan sarana yang mendukung UNESCO Global Geopark Meratus dan pariwisata unggulan, seperti pengembangan/penataan kawasan pariwisata dan sekitarnya, penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta peningkatan amenities pariwisata seperti penyediaan akomodasi, tempat makan dan minum, tempat ibadah, toilet umum, tempat parkir dan area peristirahatan, dan fasilitas lainnya yang memudahkan aktivitas wisatawan.
- 4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan, salah satunya pengembangan pemenuhan dan pelayanan air minum pada Klaster Banua Anam.
- 5) Pengembangan transportasi publik baik angkutan umum massal maupun non massal yang terintegrasi sampai ke pelosok.
- 6) Mendorong pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir.
- 7) Pengembangan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yaitu pembangunan lumbung pangan dan pembangunan sarana prasarana energi berkelanjutan.



c. Arahan dan Indikasi Intervensi Pengembangan Kabupaten

1) Kabupaten Tabalong

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
 - Pengembangan KPP Agrowisata Hortikultura melalui pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, pengembangan kawasan unggulan pariwisata,
 - Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) pada Kawasan Peruntukan Industri Seradang dan sekitarnya yang berbasis pada sumber daya alam berkelanjutan.
 - Pengembangan kawasan transit dan simpul transportasi pada Terminal Mabuun dan kawasan Gerbang Babussalam sebagai koridor ekonomi Utara-Tengah Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur-Kalimantan Tengah.
 - Revitalisasi Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan dengan prioritas pengembangan rantai nilai dan kluster pertanian terpadu, modernisasi sistem irigasi, alat dan mesin pertanian, dan pemasaran digital hasil pertanian
 - Pengembangan pariwisata alam, geologi dan budaya lokal dengan prioritas penataan destinasi wisata seperti wisata budaya Dayak dan situs geologi Air Rerjun Lano dan Goa Liang Tapah, serta wisata lintas provinsi dengan melibatkan mitra lokal, penguatan amenities, dan SDM pariwisata.
 - Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
 - Peningkatan keterampilan dan kualitas sumberdaya manusia lokal pada sektor industri, konstruksi, dan jasa modern, serta peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional untuk industri



- Pengembangan SDM Unggul dan Vokasi Berbasis Industri dengan prioritas: Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), SMK berbasis industri, dan pelatihan UMKM. Perluasan kerjasama dengan perusahaan tambang dan swasta dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
 - Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan prioritas: Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan UMKM melalui pelatihan, akses permodalan (KUR), dan pemasaran digital. Promosi produk lokal melalui pameran, festival budaya, dan jejaring perdagangan (*e-commerce*).
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Rehabilitasi lingkungan dan tata kelola tambang dengan prioritas rehabilitasi dan reklamasi bekas tambang untuk kehutanan rakyat, agroforestri, dan wisata edukasi.
 - Mendorong pembangunan infrastruktur bendungan untuk penanggulangan banjir
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

2) Kabupaten Balangan

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
- Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dengan prioritas pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas pusat produksi dan pasar, serta pengembangan jaringan distribusi dan logistik ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional.
 - Pengembangan hilirisasi industri hasil pertambangan, pertanian, dan peternakan.
 - Pengembangan klaster pertanian berbasis integrasi: sapi-kelapa sawit dan padi-ikan. Penguatan penyuluhan, penyediaan benih unggul, peralatan mesin pertanian, pendampingan dan akses teknologi, permodalan dan pasar.



- Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif Lokal dengan prioritas fasilitasi akses permodalan KUR, pendampingan Koperasi dan BUMDes, pelatihan digital, pemasaran produk lokal, promosi produk khas Balangan melalui festival budaya, pasar daring, dan kemitraan regional.
 - Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya dengan prioritas pengembangan kawasan wisata alam Pegunungan Meratus dan wisata budaya Dayak. Penataan kembali kawasan bekas tambang untuk geowisata, wisata edukasi, atau agroforestri.
 - Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
- Pengembangan SDM dan Pendidikan Vokasi dengan prioritas: Pelatihan kerja berbasis pertambangan berkelanjutan, pertanian modern, UMKM digital, dan pariwisata. Perluasan kerjasama pemerintah, lembaga pendidikan dan pelaku usaha industri dalam pelatihan dan penyediaan tenaga kerja terampil siap pakai.
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Pengelolaan Lingkungan dan Pascatambang dengan prioritas: Reklamasi tambang untuk pertanian rakyat, hutan sosial, dan wisata edukatif. Edukasi lingkungan dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan pascatambang.
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

3) Kabupaten Hulu Sungai Utara

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian



- Penguatan sistem pusat kegiatan perkotaan dan sistem logistik yang mengintegrasikan koridor ekonomi Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur.
 - Penguatan pertanian dan sistem tani terpadu dengan prioritas pengembangan rantai nilai produksi pertanian lahan rawa dengan komoditas padi.
 - Pengembangan peternakan itik alabio dengan prioritas pengembangan sentra pembibitan, pakan, dan pengolahan produk unggas lokal dengan komoditas unggulan telur asin, daging itik dan rendang itik. Promosi Itik Alabio sebagai ikon ekonomi dan *branding* daerah.
 - Penguatan perikanan air tawar dan hilirisasinya dengan prioritas pengembangan rantai nilai perikanan air tawar mulai dari unit pembenihan, pakan ikan lokal, pengolahan hasil perikanan (bakso ikan, abon, nugget, dendeng ikan), distribusi dan pemasaran.
 - Pengembangan pariwisata budaya dan ekowisata dengan prioritas penataan kawasan wisata budaya Candi Agung Amuntai, wisata kerbau rawa, fasilitasi wisata susur sungai dan wisata pertanian lahan basah.
 - Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dengan prioritas peningkatan kapasitas produk kerajinan purun dan makanan khas lokal untuk pasar nasional. Promosi melalui berbagai festival seni budaya dan ekonomi kreatif.
 - Pembangunan kawasan ekonomi terpadu berbasis desa agropolitan dan minapolitan didukung revitalisasi infrastruktur ekonomi dengan prioritas perbaikan jalan usaha tani, pasar produksi, dan fasilitas distribusi hasil pertanian dan perikanan.
 - Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
- Peningkatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi dengan prioritas: Pelatihan dan Pendidikan keterampilan petani, UMKM dan wirausaha pemula. Penguatan koperasi, BUMDes, dan kelompok ekonomi produktif desa.



c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana

- Adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lahan basah dengan prioritas penerapan pertanian adaptif terhadap banjir dan perubahan iklim, pengembangan program konservasi rawa/gambut dan pengendalian banjir berbasis masyarakat.
- Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
- Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
- Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan
- Mendorong pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir

4) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian

- Pengembangan pertanian dan perkebunan terpadu dengan prioritas: Pengembangan pertanian ramah lingkungan dan organik di dataran tinggi dan tengah. Integrasi pertanian–perikanan–peternakan di lahan potensial. Revitalisasi jaringan irigasi dan infrastruktur produksi pertanian.
- Hilirisasi dan diversifikasi produk lokal dengan prioritas pengembangan industri rumah tangga berbasis hasil pertanian, peternakan, dan hortikultura. Pengembangan industri pengolahan pascapanen: beras kemasan, olahan cabai, pupuk organik, produk peternakan olahan abon dan daging asap.
- Pengembangan pariwisata alam, ekowisata, dan wisata geologi Pegunungan Meratus dengan prioritas penataan kawasan wisata Pegunungan Meratus sebagai destinasi ekowisata nasional. Fasilitas wisata berbasis masyarakat: homestay, kuliner lokal dan wisata edukasi. Pelatihan pemandu wisata, UMKM wisata, dan pemasaran digital.
- Penguatan UMKM dan koperasi desa dengan prioritas pendampingan dan fasilitasi UMKM, pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital. Fasilitas pembiayaan melalui KUR,



koperasi, dan BUMDes. Promosi produk lokal melalui festival budaya, pasar digital, dan kemitraan.

- Peningkatan infrastruktur ekonomi dan aksesibilitas dengan prioritas: Pembangunan dan perbaikan jalan produksi, pasar desa, dan fasilitas logistik lokal. Peningkatan akses internet dan transportasi di wilayah-wilayah terpencil.
 - Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
- Peningkatan SDM Lokal dan Vokasi dengan prioritas: Pelatihan di bidang pertanian, peternakan, wisata, dan pengolahan produk. Perluasan kerjasama pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha untuk menciptakan SDM yang siap kerja.
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana dengan prioritas: Perlindungan kawasan hutan Meratus, reboisasi, dan edukasi konservasi lingkungan. Pengembangan sistem peringatan dini bencana banjir dan longsor berbasis masyarakat.
 - Mendorong pembangunan infrastruktur bendungan untuk penanggulangan banjir
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

5) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
- Penguatan pertanian berkelanjutan dan berbasis komoditas unggulan dengan prioritas pengembangan klaster hortikultura dan padi organik dengan dukungan teknologi dan pasar, revitalisasi sistem irigasi, pergudangan/penyimpanan, dan rumah kemas.



- Hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan dengan prioritas pengembangan pengolahan hasil pertanian dan peternakan, serta pengembangan industri rumahan berbasis pangan dan herbal lokal.
 - Pengembangan UNESCO Global Geopark Meratus melalui penataan KPPN Loksado dan sekitarnya dengan melibatkan masyarakat lokal, pengembangan amenities sesuai standar, promosi paket wisata, penguatan UMKM dan Koperasi beserta digitalisasi pemasaran.
 - Pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas dengan prioritas peningkatan akses jalan desa, pasar tani, jaringan internet, dan sentra logistik.
 - Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
- Peningkatan SDM dan Pendidikan Vokasi dengan prioritas: Penguatan Balai Latihan Kerja pertanian, peternakan, dan pariwisata berbasis potensi lokal. Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga pelatihan untuk membangun SDM kompeten.
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan dengan prioritas: Konservasi Pegunungan Meratus dan pengembangan pertanian ramah lingkungan. Literasi dan edukasi pengelolaan sampah, air bersih, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan
- 6) Kabupaten Tapin**
- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian



- Pengembangan “Sentra Pangan Lestari”, dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat produksi pertanian, intervensi cetak sawah, dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan alih fungsi lahan pertanian.
 - Perwujudan rencana Kawasan Industri Tapin dan mendorong hilirisasi produk pertanian dan perkebunan.
 - Penguatan pertanian berbasis klaster komoditas unggulan didukung pengembangan daerah irigasi rawa/permukaan, pembangunan jalan usaha tani, pasar desa dan gudang logistik hortikultura, serta pemanfaatan teknologi *smart farming*.
 - Penguatan sistem logistik melalui pembangunan pelabuhan yang terkoneksi dengan jalur distribusi/logistik.
 - Penguatan kelembagaan ekonomi lokal dengan prioritas penguatan koperasi tani, BUMDes, dan kemitraan agribisnis, serta fasilitasi akses pembiayaan KUR dan pembentukan pasar tani digital.
 - Pengembangan UNESCO Global Geopark Meratus melalui pengembangan situs rute utara dengan pelibatan masyarakat lokal, pengembangan amenities, promosi paket wisata, penguatan UMKM berbasis potensi lokal.
 - Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
- Penguatan SDM dan vokasi berbasis potensi lokal dengan prioritas pelatihan kerja dan vokasi di sektor pertanian, peternakan, tambang, dan pengolahan pangan.
 - Penguatan BLK dan kerjasama dengan politeknik.
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Revitalisasi Pertambangan Ramah Lingkungan dengan prioritas Penegakan tata kelola tambang berkelanjutan dan pemanfaatan lahan pascatambang. Reklamasi lahan bekas tambang untuk pertanian atau hutan rakyat.
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri



- Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
- Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

3. Klaster Saijaan – Bersujud

a. Arah Pengembangan Kawasan

Klaster Saijaan-Bersujud merupakan wilayah yang hamparannya terdiri dari Pegunungan Meratus, dataran rendah, sampai kawasan pesisir yang bernilai strategis sebagai kawasan lindung, kawasan industri dan KEK, serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis pada sektor kemaritiman skala internasional.

Adapun arah pengembangan Klaster Saijaan Bersujud sebagai berikut:

- 1) Perwujudan sistem perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 2) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Agropolitan di Kabupaten Tanah Bumbu melalui diversifikasi ekonomi lokal dan pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan) didukung dengan pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan.
- 3) Pengembangan WPPI Tanah Bumbu – Kotabaru dan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan berorientasi ekspor melalui pengembangan KI Batulicin, KI Sebuku, KEK Setangga, rencana KEK Mekar Putih, dan rencana KI Tarjun.
- 4) Pengembangan sistem logistik terintegrasi dengan prioritas penyediaan sarana dan prasarana distribusi, konektivitas, dan transportasi dalam rangka mendukung peran Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik.
- 5) Pengembangan ekowisata, wisata geologi bernilai internasional, wisata alam, dan bahari pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek penataan ruang dan ekonomi biru.
- 6) Pengembangan wilayah di sekitar kaki Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut.
- 7) Terkait pengelolaan sampah untuk dapat memaksimalkan penerapan Prinsip 5R (*Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Rot*)
- 8) Meminimalkan sampah hingga menjadi residu sekecil mungkin.



b. Arah Pengembangan Infrastruktur

- 1) Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri dan KEK untuk pemenuhan sumber air baku dan energi.
- 2) Pengembangan simpul utama transportasi dan pintu gerbang perdagangan laut Kalimantan bagian timur dan selatan melalui rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pengembangan bandara, pelabuhan, dan terminal (angkutan dan barang), percepatan pembangunan jalan penghubung antarwilayah, pelabuhan perikanan terpadu, dan konektivitas antarpulau.
- 3) Pembangunan Bendungan Kusan sebagai tampungan multifungsi untuk penanganan banjir, pengembangan irigasi, dan pemenuhan sumber air baku.
- 4) Pengembangan pemenuhan dan pelayanan air minum pada Klaster Saijaan – Bersujud.
- 5) Pengembangan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yaitu pembangunan lumbung pangan dan pembangunan sarana prasarana energi berkelanjutan

c. Arahan dan Indikasi Intervensi Pengembangan Kabupaten

1) Kabupaten Tanah Bumbu

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
 - Pengembangan kawasan industri dan KEK pengembangan industri pengolahan dengan menerapkan prinsip industri hijau.
 - Pengembangan sekitar kawasan industri dan KEK sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis perdagangan dan jasa, permukiman, dan fasilitas umum.
 - Pengembangan pusat distribusi yang terintegrasi dengan pusat-pusat produksi dan simpul logistik didukung dengan peningkatan jalan akses dan transformasi ekonomi digital.
 - Peningkatan UMKM, ekonomi kreatif, dan pengembangan pariwisata unggulan melalui pengembangan wisata bahari dan pengembangan situs geosite Meratus sebagai wisata geologi dan edukasi.



- Pengembangan sentra produksi melalui pengembangan klaster pertanian–perikanan–peternakan dan klaster perkebunan di kawasan non-tambang didukung pengembangan daerah irigasi dan penyediaan sarpras pendukung.
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
- Peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal.
 - Perluasan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan.
 - Perluasan akses KUR, pelatihan digital, legalitas produk, dan promosi.
 - Penyederhanaan perizinan dan insentif investasi untuk sektor hilir dan industri ramah lingkungan.
 - Penguatan kelembagaan promosi investasi daerah.
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Rehabilitasi lahan bekas tambang, pengendalian pencemaran, dan perhutanan sosial.
 - Pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan biomassa dan tenaga surya.
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan
 - Mendorong pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir/banjir rob

2) Kabupaten Kotabaru

- a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
- Pengembangan simpul utama transportasi dan pintu gerbang perdagangan laut Kalimantan bagian timur dan selatan melalui rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, percepatan pembangunan jalan penghubung antar wilayah, pelabuhan perikanan terpadu, dan konektivitas antar pulau.



- Percepatan pembangunan kawasan industri dan KEK, serta didukung dengan pengembangan kawasan sekitarnya berbasis kemaritiman, dengan potensi unggulan melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam, serta pengembangan industri perikanan terpadu (*cold storage*, pabrik pakan, industri pengolahan hasil laut)
 - Pengembangan kawasan unggulan meliputi pengembangan kawasan minapolitan untuk perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan kawasan agropolitan berbasis hortikultura dan perkebunan di wilayah daratan, pengembangan wisata geologi, kawasan ekowisata dan wisata bahari di wilayah pesisir dan gugusan Pulau Sembilan
 - Pengembangan Pelabuhan Stagen, Bandara Gusti Syamsir Alam, dan terminal
 - Pengembangan UMKM dan pengembangan produk olahan lokal seperti ikan kering, abon laut, kerajinan laut, dan kuliner bahari, didukung dengan digitalisasi, revitalisasi koperasi desa, serta perluasan akses pembiayaan.
- b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
- Revitalisasi pendidikan vokasi berbasis potensi lokal: pertambangan, perikanan, pariwisata, dan agroindustri.
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan kepulauan dan kawasan pesisir terutama perijinan, promosi dan perluasan investasi swasta.
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
- Rehabilitasi lahan bekas tambang, perlindungan kawasan konservasi pesisir, dan pengembangan ekowisata berkelanjutan.
 - Pemanfaatan energi terbarukan di wilayah kepulauan dengan energi matahari (*solar cell*) dan bioenergi.
 - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
 - Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
 - Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan



- Mendorong pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir/banjir rob.

Pencapaian target-target pembangunan di tingkat provinsi merupakan cerminan dari sinergi provinsi dan kabupaten/kota. Arah target indikator makro kabupaten/kota diharapkan dapat mendukung pencapaian target indikator makro di tingkat provinsi. Indikator makro daerah dimaksud, meliputi: Laju Pertumbuhan Ekoomi (LPE), Rasio Gini, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Arah target indikator makro per tahun untuk 13 kabupaten/kota disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 3.8.

Arahan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	KABUPATEN/KOTA	LPE (%)				Rasio Gini (Poin)				Persentase Penduduk Miskin (%)			
		Baseline		Target		Baseline		Target		Baseline		Target	
		2024	2025	2026	2030	2024 (maret)	2025	2026	2030	2024	2025	2026	2030
1	Tanah Laut	5,01	5,1 - 5,2	5,4 - 6,2	6 - 7,9	0,257	0,24 - 0,249	0,236 - 0,245	0,218 - 0,228	3,74	2,82 - 3,23	2,96 - 3,46	1,58 - 2,08
2	Kotabaru	5,34	4,6 - 4,6	4,8 - 5,5	5,4 - 7,1	0,296	0,293 - 0,304	0,288 - 0,299	0,268 - 0,279	4,45	3,38 - 4,00	3,73 - 4,23	2,68 - 3,18
3	Banjar	4,76	4,7 - 4,7	4,9 - 5,7	5,5 - 7,2	0,258	0,275 - 0,286	0,27 - 0,281	0,251 - 0,262	2,36	1,90 - 2,18	1,72 - 2,22	0,9 - 1,4
4	Barito Kuala	5,02	4,3 - 4,3	4,5 - 5,2	5,1 - 6,6	0,272	0,289 - 0,3	0,284 - 0,295	0,264 - 0,275	4,36	3,41 - 4,25	3,39 - 3,89	2,08 - 2,58
5	Tapin	4,89	5,2 - 5,3	5,5 - 6,4	6,2 - 8,1	0,26	0,26 - 0,27	0,256 - 0,266	0,237 - 0,245	3,33	2,43 - 2,84	2,56 - 3,06	1,11 - 1,61
6	Hulu Sungai Selatan	5,15	5,6 - 5,7	5,9 - 6,8	6,6 - 8,7	0,288	0,271 - 0,282	0,267 - 0,277	0,248 - 0,258	3,38	3,08 - 3,52	2,01 - 2,51	0,19 - 0,69
7	Hulu Sungai Tengah	4,95	4,6 - 4,7	4,8 - 5,6	5,4 - 7,1	0,251	0,208 - 0,216	0,205 - 0,213	0,190 - 0,200	5,81	4,59 - 5,26	4,93 - 5,43	3,22 - 3,72
8	Hulu Sungai Utara	4,43	4,8 - 4,9	5,1 - 5,9	5,7 - 7,5	0,276	0,251 - 0,261	0,247 - 0,256	0,230 - 0,239	5,75	5,03 - 5,86	4,55 - 5,05	2,68 - 3,18
9	Tabalong	4,87	5,4 - 5,5	5,7 - 6,6	6,4 - 8,4	0,3	0,263 - 0,273	0,259 - 0,269	0,240 - 0,250	5,64	4,48 - 5,44	4,74 - 5,24	2,97 - 3,47
10	Tanah Bumbu	4,82	5,4 - 5,5	5,7 - 6,5	6,4 - 8,3	0,309	0,259 - 0,269	0,255 - 0,265	0,237 - 0,246	3,41	3,88 - 4,00	2,24 - 2,74	0,62 - 1,12
11	Balangan	4,15	4,8 - 4,9	5,1 - 5,9	5,7 - 7,5	0,218	0,239 - 0,248	0,235 - 0,244	0,218 - 0,227	4,87	3,92 - 4,89	3,60 - 4,10	1,07 - 1,57
12	Kota Banjarmasin	5,63	6,2 - 6,3	6,5 - 7,5	7,3 - 9,6	0,347	0,343 - 0,356	0,337 - 0,35	0,310 - 0,322	4,58	4,02 - 4,30	3,89 - 4,39	2,96 - 3,46
13	Kota Banjarbaru	6,71	6,9 - 7	7,3 - 8,4	8,2 - 10,7	0,3	0,297 - 0,309	0,292 - 0,304	0,272 - 0,283	3,79	3,11 - 3,56	3,04 - 3,54	1,79 - 2,29
	KALIMANTAN SELATAN	5,05	5,3 - 5,4	5,6 - 6,4	6,2 - 8,2	0,302	0,290 - 0,301	0,285 - 0,296	0,262 - 0,274	4,02	3,44 - 3,94	3,23 - 3,46	1,89 - 2,39



Lanjutan Tabel 3.8

NO.	KABUPATEN/KOTA	TPT (%)				IPM (Poin)				IKLH (Poin)				PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (%)		
		Baseline		Target		Baseline		Target		Baseline		Target		Target		
		2024	2025	2026	2030	2024	2025	2026	2030	2024	2025	2026	2030	2025	2026	2030
1	Tanah Laut	3,43	2,70 - 3,25	2,63 - 3,21	2,25 - 2,94	73,42	73,64 - 74,34	74,12 - 74,62	75,86 - 76,56	68,57	70,16	70,25	70,6	2,05	2,01	1,46
2	Kotabaru	6,05	4,81 - 5,36	4,75 - 5,32	4,38 - 5,05	72,42	72,64 - 73,34	73,08 - 73,58	74,66 - 75,36	76,09	75,72	75,92	76,98	1,92	1,88	1,36
3	Banjar	2,71	2,25 - 2,81	2,18 - 2,77	1,85 - 2,50	74,41	74,82 - 75,52	75,37 - 75,87	77,52 - 78,22	74,59	71,39	71,6	72,46	0,93	0,91	0,66
4	Barito Kuala	3,41	2,27 - 2,82	2,19 - 2,78	1,87 - 2,50	71,4	71,85 - 72,55	72,54 - 73,04	75,18 - 75,88	64,02	66,36	66,57	73,5	3,03	2,97	2,16
5	Tapin	3,86	3,16 - 3,71	3,09 - 3,67	2,71 - 3,40	74,06	74,5 - 75,2	75,17 - 75,67	77,64 - 78,34	66,11	69,87	70,08	71,45	1,7	1,67	1,21
6	Hulu Sungai Selatan	2,11	1,37 - 1,93	1,30 - 1,89	1,00 - 1,62	73,95	74,31 - 75,01	74,97 - 75,47	77,51 - 78,21	67,39	72,86	73,11	74,12	1,38	1,36	0,98
7	Hulu Sungai Tengah	3,2	2,49 - 3,04	2,42 - 3,00	2,04 - 2,73	73,33	73,63 - 74,33	74,1 - 74,6	76,07 - 76,77	71,67	73,26	73,43	74,2	1,46	1,43	1,04
8	Hulu Sungai Utara	3,73	3,25 - 3,80	3,18 - 3,76	2,81 - 3,49	71,74	72,12 - 72,82	72,78 - 73,28	75,1 - 75,8	65,33	69,16	69,41	70,73	2,21	2,17	1,57
9	Tabalong	3,44	2,64 - 3,20	2,57 - 3,16	2,20 - 2,89	75,97	76,22 - 76,92	76,71 - 77,21	78,5 - 79,2	73,98	71,96	72,17	78,53	2,36	2,31	1,68
10	Tanah Bumbu	6,37	5,74 - 6,27	5,67 - 6,24	5,30 - 5,97	74,5	74,87 - 75,57	75,44 - 75,94	77,66 - 78,36	74,92	75,06	75,27	76,12	1,66	1,63	1,18
11	Balangan	2,69	1,84 - 2,40	1,77 - 2,36	1,44 - 2,09	73,83	74,31 - 75,01	75,05 - 75,55	77,94 - 78,64	70,08	72,1	72,31	73,37	0,83	0,82	0,59
12	Kota Banjarmasin	6,59	6,57 - 7,11	6,51 - 7,07	6,15 - 6,80	80,53	80,73 - 81,43	81,19 - 81,69	83 - 83,7	58,72	60,88	61,13	62,1	0,65	0,64	0,46
13	Kota Banjarbaru	4,93	4,38 - 4,93	4,31 - 4,89	3,95 - 4,67	81,65	81,79 - 82,49	82,17 - 82,67	83,59 - 84,29	66,84	62,94	63,02	63,32	1,00	0,99	0,72
	KALIMANTAN SELATAN	4,2	3,63 - 4,18	3,56 - 4,14	3,20-3,83	75,19	75,48	75,99	77,99	75,59	72,32	72,51	73,29	75,97	76,41	82,88

Sumber: hasil proyeksi, 2025



3.2.4. Dukungan Terhadap Prioritas Nasional

Rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan selain ditujukan untuk melaksanakan visi dan misi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga untuk mendukung pembangunan nasional. Sinergi pembangunan provinsi dan nasional juga dinyatakan dalam bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap berbagai kebijakan nasional.

Rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2025-2029 selaras dengan Prioritas Nasional (PN). Prioritas Nasional merupakan wujud praktis dari Asta Cita yaitu 8 (delapan) misi Presiden periode Tahun 2025-2029. Dukungan program perangkat daerah terhadap setiap PN dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.9.

**Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Prioritas Nasional
Tahun 2025-2029**

NO	PRIORITAS NASIONAL/ASTA CITA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN



NO	PRIORITAS NASIONAL/ASTA CITA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL



NO	PRIORITAS NASIONAL/ASTA CITA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		PROGRAM PENATAAN DESA
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Sumber: hasil analisis, 2025

Selain terhadap PN, dukungan pemerintah daerah juga diprioritaskan untuk pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). PSN adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam RPJMN dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis



Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Strategis Nasional, meliputi:

- a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan
 - 2) Kemiskinan Ekstrem;
 - 3) Sekolah Rakyat; dan
 - 4) Pembangunan 3 Juta Rumah.
- b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
- c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - 2) Makan Bergizi Gratis.
- d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Pengendalian Inflasi;
 - 2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - 3) Kemudahan perizinan di daerah.
- f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Seluruh PSN sebagaimana dimuat di atas, memiliki padanan dengan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Keterkaitan ini menunjukkan arah pembangunan daerah telah sejalan dengan fokus pembangunan nasional, baik pada sektor ekonomi, infrastruktur, maupun sosial.

Selanjutnya, sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Kegiatan Prioritas



Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029. KPU nasional juga disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan terhadap beberapa KPU dimuat pada tabel di bawah, namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut saja.

Adapun program-program yang diidentifikasi dapat mendukung KPU bersifat dinamis dan dapat disesuaikan kembali bila terdapat kebijakan baru dari Pemerintah Pusat. Hal ini berlaku juga untuk pelaksanaan PSN oleh pemerintah daerah. Lebih rinci mengenai dukungan dan pelaksanaan PSN dan KPU akan dimuat dalam perencanaan dan penganggaran tahunan, dengan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku.



Tabel 3.10.

Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN			RPJMD	
No.	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
1	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPALD	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya keberfungsiaan dan kualitas infrastruktur SPALD	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan



RPJMN			RPJMD	
No.	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
			3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
			3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
5	Pengembangan Pangan Hewan	Meningkatnya produksi bahan pangan hewani	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
		Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
			3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
6	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
			3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pertanian
			2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pangan
			2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pangan
			2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pangan
7	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



RPJMN			RPJMD	
No.	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Meningkatnya kapasitas infrastruktur jaringan tenaga listrik	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan ESDM
			3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan ESDM
			2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
9	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi karakteristik ekosistem gambut	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kehutanan
		Meningkatnya pemulihan ekosistem gambut		



RPJMN			RPJMD	
No.	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
10	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat berbasis siklus hidup melalui penguatan edukasi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan
			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan
11	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan
			1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kesehatan
12	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13	Konservasi Sumber Daya Air	Terwujudnya kuantitas air secara berkelanjutan melalui peningkatan tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas ekosistem perairan darat	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Kehutanan

Sumber: hasil analisis, 2025



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, diperlukan berbagai program yang selain bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, juga untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah. Bab ini memuat rencana program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan program didukung oleh penganggaran yang memadai.

Pendanaan pembangunan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan rencana pembangunan guna mencapai visi dan misi RPJMD, serta target pembangunan nasional. Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber pendanaan termasuk didalamnya dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah. Dengan demikian, sub-sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah yang menggunakan APBD diharapkan menjadi stimulus bagi partisipasi aktif unsur non pemerintah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Penentuan program perangkat daerah oleh masing-masing perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah, visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, serta keselarasan dengan rencana pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Nomenklturnya berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan



Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimuat dalam SIPD.

Rencana program perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030 yang lebih lanjut dijabarkan ke kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, disajikan pada tabel di bawah.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



Tabel 4.1.

Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030

URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
PENDIDIKAN						1.962.089.73 7.935		1.958.052.16 6.414		1.996.753.24 5.343		2.018.688.95 4.119		2.042.715.1 47.427	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	1.202.645.551. 622	100	1.131.702.528. 847	100	1.135.980.230. 000	100	1.137.755.807. 000	100	1.139.534.15 4.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
	Persentase laporan/ telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	Angka	N/A	87,25	87,25		95,2		95,3		95,4		95,5		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BLUD	Angka	N/A	75,11	75,11		79,12		81,12		83,13		85,13		
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD	Rp	N/A	8.000.00 0.000	8.000.00 0.000		9.400.00 0.000		10.100.0 00.000		10.800.0 00.000		11.500.0 00.000		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
Menurunnya angka putus sekolah jenjang SMA	Angka Putus Sekolah jenjang SMA	Persen	0,11	0,1	0,09	361.285.445.8 50	0,08	367.419.041.0 00	0,07	381.111.058.1 00	0,06	381.608.921.1 00	0,05	418.983.056. 000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
	Angka Putus Sekolah jenjang SMK	Persen	0,20	0,18	0,17		0,16		0,15		0,14		0,13		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029**



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Angka Putus Sekolah jenjang SLB	Persen	0,53	0,51	0,49		0,47		0,45		0,43		0,41		
Meningkatnya capaian hasil belajar peserta didik SMA/SMK/SLB	Nilai rata-rata Akhir Siswa SMA	Nilai	83,15	84,06	84,98	30.824.227.74 1	85,89	39.823.064.86 7	86,81	42.043.566.00 0	87,72	42.109.292.00 0	88,64	42.175.124.0 00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
	Nilai rata-rata kompetensi literasi SMA	Nilai	75,31	76,14	76,97		77,8		78,62		79,45		80,28		
	Nilai rata-rata kompetensi numerasi SMA	Nilai	63,1	64,47	65,84		67,21		68,58		69,95		71,32		
	Nilai rata-rata Akhir Siswa SMK	Nilai	81,16	81,89	82,62		83,35		84,08		84,81		85,54		
	Nilai rata-rata Uji Kompetensi Keahlian SMK	Nilai	85,74	86,32	86,9		87,48		88,06		88,64		89,22		
	Nilai rata-rata kompetensi literasi SMK	Nilai	72,37	73,17	73,96		74,76		75,55		76,35		77,15		
	Nilai rata-rata kompetensi numerasi SMK	Nilai	60,82	61,7	62,58		63,46		64,34		65,22		66,1		
	Nilai rata-rata Akhir Siswa SLB	Nilai	68,3	69,05	69,8		70,55		71,31		72,06		72,81		
	Nilai rata-rata kompetensi Literasi SDLB	Nilai	70,82	71,6	72,38		73,16		73,94		74,72		75,49		
	Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SDLB	Nilai	72,65	73,45	74,25		75,05		75,85		76,65		77,44		
	Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMP LB	Nilai	77,09	77,94	78,79		79,63		80,48		81,33		82,18		
	Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMP LB	Nilai	73,84	74,65	75,46		76,28		77,09		77,9		78,71		
	Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMALB	Nilai	76,45	77,29	78,13		78,97		79,81		80,65		81,5		
	Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMALB	Nilai	68,65	69,41	70,16		70,92		71,67		72,43		73,18		
Meningkatnya kesesuaian kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja dan industri	Persentase lulusan yang bekerja dan/atau berwirausaha sesuai dengan program keahlian	Persen	65,06	65,78	66,49	4.489.250.000	67,21	5.057.894.000	67,92	5.065.800.000	68,64	5.073.718.000	69,35	5.081.649.00 0	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	
	Masa Tunggu Lulusan SMK (sejak lulus sampai bekerja atau wirausaha)	Bulan	3,5	3,46	3,42		3,38		3,35		3,31		3,27		
	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK	Persen	85,18	85,95	86,71		87,48		88,25		89,01		89,78		
Meningkatnya kualitas satuan pendidikan SMA/SMK/SLB yang memiliki lingkungan belajar kondusif, dan mendorong penguatan karakter	Indeks Iklim Keamanan SMA	Indeks	73,84	74,65	75,46	5.751.808.650	76,28	6.896.657.000	77,09	10.842.924.000	77,9	10.859.875.000	78,71	10.876.854.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	Indeks	72,4	73,2	73,99		74,79		75,59		76,38		77,18		
	Indeks Iklim Keamanan SMK	Indeks	71,23	72,01	72,8		73,58		74,36		75,15		75,93		
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	Indeks	69,35	70,11	70,88		71,64		72,4		73,16		73,93		
	Indeks Iklim Keamanan SDLB	Indeks	80,46	81,35	82,23		83,12		84		84,89		85,77		
	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	Indeks	70,81	71,59	72,37		73,15		73,93		74,7		75,48		
	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Indeks	75,76	76,59	77,43		78,26		79,09		79,93		80,76		
	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	Indeks	74,14	74,96	75,77		76,59		77,4		78,22		79,03		
	Indeks Iklim Keamanan SMALB	Indeks	74,87	75,69	76,52		77,34		78,16		78,99		79,81		
	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	Indeks	75,18	76,01	76,83		77,66		78,49		79,31		80,14		
	Nilai Rata-rata karakter peserta didik SMA sesuai profil pelajar pancasila	Nilai	57,32	58,3	59,28		60,26		61,24		62,22		63,2		
	Nilai Rata-rata karakter peserta didik SMK sesuai profil pelajar pancasila	Nilai	55,34	56,28	57,22		58,16		59,1		60,04		60,98		
	Nilai rata-rata karakter peserta didik SLB sesuai profil pelajar pancasila	Nilai	62,08	62,76	63,45		64,13		64,81		65,49		66,18		
Meningkatnya kualitas satuan pendidikan	Indeks Inklusivitas SMA	Indeks	62,32	63,01	63,69	300.000.000	64,38	150.235.000	65,06	150.470.000	65,75	150.706.000	66,43	150.942.000	Perangkat Daerah pelaksana

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
SMA/SMK/SLB yang inklusif															Urusan Pendidikan
	Indeks Inklusivitas SMK	Indeks	59,07	60,31	61,55		62,79		64,03		65,27		66,51		
	Indeks Inklusivitas SDLB	Indeks	73,34	74,15	74,95		75,76		76,57		77,37		78,18		
	Indeks Inklusivitas SMPLB	Indeks	72,26	73,05	73,85		74,64		75,44		76,23		77,03		
	Indeks Inklusivitas SMALB	Indeks	73,68	74,49	75,3		76,11		76,92		77,73		78,54		
Meningkatnya prestasi peserta didik SMA/SMK/SLB pada kompetisi nasional	Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMA pada kompetisi Nasional	Persen	1235,00 %	13,89	15,43	10.444.220.910	16,98	13.348.332.700	18,52	15.061.348.000	20,06	15.084.891.000	21,6	15.108.470.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
	Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMK pada kompetisi Nasional	Persen	3421,00 %	34,76	35,3		35,85		36,4		36,95		37,49		
	Persentase medali yang diperoleh peserta didik SLB pada kompetisi Nasional	Persen	11,54	13,97	16,4		18,83		21,26		23,69		26,12		
Meningkatnya kualitas kelembagaan satuan pendidikan SMA/SMK/SLB	Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi minimal B	Persen	76,33	77,17	78,01	135.355.482.512	78,85	194.544.339.800	79,69	203.932.894.243	80,53	223.164.169.019	81,37	207.606.203.427	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi minimal B	Persen	70,63	71,41	72,19		72,97		73,74		74,52		75,3		
	Persentase Satuan Pendidikan SLB terakreditasi minimal B	Persen	38,46	39,33	40,2		41,07		41,94		42,81		43,68		
Meningkatnya Guru yang bersertifikat	Persentase Guru bersertifikat Pendidik	Persen	59,85	61,11	62,36	208.912.493.650	63,62	196.159.368.200	64,88	198.204.307.000	66,13	198.514.103.000	67,39	198.824.384.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM															
Meningkatnya satuan pendidikan yang menerapkan Muatan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menjadikan muatan lokal sebagai penguatan budaya daerah	Persen	N/A	14,22	23,7	881.257.000	33,18	1.560.470.000	42,65	1.562.915.000	52,13	1.565.362.000	61,61	1.567.816.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN															
Meningkatnya pemerataan distribusi guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan	Indeks Distribusi Guru	Indeks	0,8	0,81	0,82	600.000.000	0,83	600.000.000	0,84	2.006.258.000	0,85	2.009.394.000	0,86	2.012.536.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA															
Meningkatnya satuan pendidikan yang melestarikan bahasa dan sastra	Persentase satuan pendidikan yang melestarikan bahasa dan sastra melalui praktik pembelajaran	Persen	N/A	14,22	23,7	600.000.000	33,18	790.235.000	42,65	791.475.000	52,13	792.716.000	61,61	793.959.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
KESEHATAN						1.548.717.74 9.116		1.554.458.38 1.197		1.584.542.28 0.585		1.601.681.79 9.072		1.620.443.5 79.330	
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	1.366.672.378. 832	100	1.371.738.223. 339	100	1.398.285.884. 696	100	1.413.410.723. 626	100	1.429.967.13 4.160	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan antar Bidang terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BLUD	Angka	89,3	95	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD	Rp.	N/A	766.576. 526.059	729.672. 229.302		729.673. 905.354		742.050. 815.316		749.626. 031.521		758.365. 569.929		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	Angka	89,3	95	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		
	Nilai Pendapatan UPT	Rp.	N/A	300.000.000	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Prevalensi <i>underweight</i> (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita	Persen	SKI 2023: 21,5	20,1	18,8	6.727.525.782	17,6	6.752.462.703	16,4	6.883.145.139	15,4	6.957.598.055	14,37	7.039.097.968	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (per 1.000 KH)	Angka	9,6	9,2	8,4		8		7,8		7,2		7		
	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	Angka	11,2	10,9	10,4		9,9		9,4		8,9		8,4		
	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Peningkatan Kebugaran terhadap Masyarakat Usia Produktif dan Lansia	Persen	38	38	53		69		84		100		100		
Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	81,78	85	88	8.100.856.700	91	8.130.884.144	93	8.288.243.584	95	8.377.895.030	95	8.476.032.014	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Persen	75,2	88	88,68		89,36		90,04		90,72		91,4		
	Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV	Persen	62	74	80		87		94		95		95		
	Persentase Kabupaten/ Kota Eliminasi Malaria	Persen	84	92	92		92		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase Kabupaten/ Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	n/a	n/a	23		30		38		53		61		
	Persentase Kabupaten/ Kota yg Melaksanakan Skrining PTM Prioritas	Persen	38	46	54		61		69		78		84		
	Persentase Kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	Persen	54	61	69		78		84		92		100		
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi	Persen	96	96	96	113.515.652.137	100	113.936.420.605	100	116.141.466.335	100	117.397.733.732	100	118.772.907.309	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
	Persentase FKTP terakreditasi Paripurna	Persen	44	45	46		47		48		49		50		
	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persen	41,3	85	90		92		94		95		96,5		
	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi Paripurna	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1,49	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Diintegrasikan ke JKN Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	Persen	60	65	70		75		80		90		100		
	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Angka	89	89	90		90		90		90		90		
	Persentase Pasien Keluar Sembuh/ Mandiri	Persen	95	95	95		95		95		95		95		
	Persentase sampel uji yang dilayani tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan	Persen	n/a	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Persentase Faskes yang Memenuhi Sediaan Farmasi sesuai standar	Persen	70,29	71	75	19.853.131.665	79	19.926.721.268	83	20.312.369.082	87	20.532.081.885	90	20.772.590.585	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
	Persentase FKTP yang Mengimplementasikan Penggunaan Antibiotik Rasional	Persen	40	40	43		46		49		52		55		
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															
Meningkatnya Pemenuhan, Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan	Persentase Fasyankes dengan SDMk sesuai Standart	Persen	85	85,5	86,5	31.556.763.500	87,5	31.673.734.955	88,5	32.286.726.250	89,5	32.635.962.082	90,5	33.018.253.214	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai Standar	Persen	75	75	78	377.315.400	81	378.713.995	84	386.043.361	87	390.219.075	90	394.790.024	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
Meningkatnya Kualitas Advokasi, Bina Suasana, Gerakan Pemberdayaan dan Kemitraan Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas)	persen	20	30	40	1.914.125.100	50	1.921.220.188	60	1.958.402.138	70	1.979.585.587	80	2.002.774.056	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.504.819.435.014		2.514.103.992.260		2.562.760.210.092		2.590.480.819.132		2.620.825.110.154	
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	78.798.472.326	100	79.090.552.832	100	80.621.216.312	100	81.493.271.844	100	82.447.865.114	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	Angka	88,6	95	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Nilai pendapatan UPT	Rp.	925.000.000	925.000.000	1.023.032.161		1.068.375.205		1.121.793.596		1.177.882.162		1.236.776.014		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BLUD	Angka	n/a	n/a	85		85,5		86		86,5		87		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD	Rp.	29.917.616.017	22.000.000.000	25.000.000.000		25.092.666.932		25.578.292.933		25.854.965.661		26.157.824.727		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)															
Meningkatnya pelayanan infrastruktur sumber daya air	Persentase infrastruktur Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	54,8	55,23	39,75	92.000.762.068	40,41	92.341.779.201	41,08	94.128.897.688	41,74	95.147.061.761	42,41	96.261.592.357	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase pengendali daya rusak air dalam kondisi baik	Persen	37,58	41,86	17,04		22,15		27,25		32,35		37,45		
	Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku	Persen	28,84	34,53	21,26		29,86		31,44		33,02		34,6		
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	Persen	100	100											

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase Rumah Tanggah dengan Akses Air Minum Aman	Persen	N/A	n/a	51	64.728.418.400	55,5	64.968.345.757	60	66.225.697.876	64,5	66.942.041.400	69	67.726.184.934	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL															
Meningkatnya layanan persampahan regional	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	57,98	54,27	78,4	7.705.498.800	80,05	7.734.060.597	81,7	7.883.740.220	83,35	7.969.016.275	85	8.062.363.482	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH															
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Cakupan Pelayanan Air Limbah yang layak	Persen	97	100											
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	n/a	11,05	2.179.749.400	14,09	2.187.829.028	17,02	2.230.170.747	20	2.254.293.835	21	2.280.700.110	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE															
Meningkatnya cakupan sistem drainase perkotaan	Persentase Luas Genangan yang Tertangani	Persentase	15,9	23,7											

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase wilayah yang tercakup oleh sistem drainase terencana	Persentase	N/A	n/a	0,06	8.000.000.000	5	8.029.653.418	6	8.185.053.738	7	8.273.589.011	8	8.370.503.913	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN															
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase permukiman di kawasan strategis yang sesuai standar	Persen	10	10	100	6.492.981.500	100	6.517.048.887	100	6.643.175.313	100	6.715.032.549	100	6.793.690.881	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG															
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik	Persen	86,95	100	100	301.447.059.800	100	302.564.426.762	100	308.420.047.971	100	311.756.135.185	100	315.407.974.189	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA															
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase sarana dan prasarana Bangunan dan Lingkungan dalam kondisi baik	Persen	81,24	100	100	29.636.436.800	100	29.746.289.506	100	30.321.978.478	100	30.649.962.231	100	31.008.988.774	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya infrastruktur jalan provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	82,91	83	81	1.900.687.997.088	82	1.907.733.234.069	83	1.944.654.174.528	84	1.965.688.915.849	85	1.988.714.539.541	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tingkat Aksesibilitas Jalan	Persen	51,78	60,11	26,81		46,88		73,62		85,37		100		
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI															
Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap	Persen	70	70	70	4.151.317.432	70	4.166.705.026	70	4.247.344.533	84	4.293.286.786	84	4.343.577.351	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	Persen	53,46	83	83		83		85		85		85		
	Persentase Meningkatnya tertib Jasa Konstruksi	Persen	21,5	41,5	41,5		41,5		45		45		48		
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															
Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	87,05	87	87	8.990.741.400	87	9.024.067.177	87,5	9.198.712.688	88	9.298.212.406	89	9.407.129.508	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						53.956.686.790		54.186.798.015		55.204.797.616		55.801.931.365		56.455.582.237	
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	13.218.966.790	100	13.267.965.234	100	13.524.744.193	100	13.671.037.297	100	13.831.176.655	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	17.250.000.000	100	17.344.051.383	100	17.649.022.124	100	17.839.926.306	100	18.048.899.062	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	Persen	60,81	56,38	42,76	9.468.720.000	37,32	9.503.817.489	31,81	9.687.747.754	26,21	9.792.537.218	20,53	9.907.244.726	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
															Kawasan Permukiman
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	48,04	48,91	49,53	14.019.000.000	50,16	14.070.963.909	50,78	14.343.283.545	51,4	14.498.430.544	52,03	14.668.261.794	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						60.373.453.330		60.597.239.609		61.769.996.166		62.438.143.685		63.169.531.612	
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	17.674.429.558	100	17.739.943.366	100	18.083.269.812	100	18.278.871.117	100	18.492.986.157	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Transtibumli nmas
	Persentase Laporan/ Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	18.686.329.186	100	18.755.593.802	100	19.118.576.436	100	19.325.376.342	100	19.551.749.935	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Transtibumli nmas
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	Cakupan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100	2.331.574.000	100	2.340.216.445	100	2.385.507.356	100	2.411.310.674	100	2.439.556.285	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Transtibumli nmas
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	12.840.839.580	100	12.888.436.720	100	13.137.870.502	100	13.279.978.906	100	13.435.537.923	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Transtibumli nmas (Sub Urusan Bencana)
	Persentase laporan/ telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	persepsi internal antar bidang/ unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
Meningkatnya kualitas layanan Penanggulangan Bencana	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Kawasan	N/A	N/A	29	8.840.281.006	29	8.873.049.276	29	9.044.772.060	29	9.142.606.646	31	9.249.701.312	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Transtibumli nmas (Sub Urusan Bencana)
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Pascabencana	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100		
SOSIAL						105.292.664.884		105.697.852.047		107.717.101.370		108.836.114.715		110.145.686.792	
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	60.278.187.170	100	60.501.620.326	100	61.672.526.335	100	62.339.619.551	100	63.069.853.386	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial
	Persentase laporan/ telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	Angka	87,57	90	95		95		95		95		95		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL															
Meningkatnya PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	37,29	37,5	38	3.903.173.025	38,5	3.917.614.766	39	3.993.616.491	39,5	4.075.747.550	40	4.473.977.498	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL															
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan direhabilitasi sosial di dalam panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	95,45	100	100	34.798.739.664	100	34.942.695.439	100	35.592.120.151	100	35.892.153.767	100	35.996.877.509	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
Meningkatnya penerima bantuan sosial bersyarat yang mandiri	Persentase penerima bantuan sosial bersyarat yang mandiri	Persen	16,85	3,15	3,25	3.316.012.925	3,35	3.328.282.173	3,45	3.392.850.847	3,55	3.429.493.636	3,65	3.469.618.712	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA															
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pada korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	100	100	100	2.796.552.100	100	2.806.899.343	100	2.861.353.190	100	2.892.255.804	100	2.926.095.200	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN															
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	200.000.000	100	200.740.000	100	204.634.356	100	206.844.407	100	209.264.487	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial
TENAGA KERJA						63.143.600.608		63.377.653.557		64.604.220.527		65.303.025.017		66.067.969.494	
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	53.026.796.793	100	53.223.350.015	100	54.253.397.666	100	54.840.240.407	100	55.482.626.254	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
	Persentase laporan / telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang / unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	IKM Layanan BLUD	Angka	100	100	85		85		86		86		87		
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD	Rupiah	2.500.000.000	2.500.000.000	2.625.000.000		2.750.000.000		2.875.000.000		3.000.000.000		3.125.000.000		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	
	IKM Layanan UPT	Angka	88,4	90	90		92		95		95		96		
	Nilai Pendapatan UPT	Rupiah	105.766.000	105.766.000	53.160.000		59.686.000		65.957.000		72.219.400		79.441.340		
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA															
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100.012.400	100	100.383.114	100	102.325.859	100	103.432.687	100	104.644.273	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi dan produktivitas yang bekerja atau berwirausaha sesuai kompetensi	Persen	56	58	60	4.210.327.860	62	4.225.934.187	64	4.307.719.974	66	4.354.315.290	68	4.405.320.728	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	5,88	5,91	5,96		6		6,03		6,07		6,11	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah per Tenaga kerja	601,06	643,07	683,82		724,57		765,33		806,08		846,83	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja	
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	47,11	43,26	43,58	1.775.618.680	43,89	1.782.200.325	44,33	1.816.691.789	44,67	1.836.342.400	45,09	1.857.852.889	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL															
Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja	Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog	Persen	66,52	67,46	68,42	1.172.813.675	69,28	1.177.160.917	70,14	1.199.942.869	71,06	1.212.922.292	72,08	1.227.130.182	Perangkat Daerah pelaksana

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Sosial dengan perusahaan;														Urusan Tenaga Kerja
	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	18,76	23,76	28,76		33,76		38,76		43,76		48,76		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	58,58	58,98	59,11		59,37		59,77		60,3		60,96		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Meningkatnya kualitas pengawasan ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Persen	89,76	90,88	92	2.858.031.200	93	2.868.624.999	94	2.924.142.370	95	2.955.771.941	96	2.990.395.168	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan budang ketenagakerjaan	Persen	58,58	58,98	59,11		59,37		59,77		60,3		60,96		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						19.687.974.375		19.760.951.790		20.143.391.419		20.361.276.439		20.599.784.360	
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPTD	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	15.643.945.500	100	15.701.932.913	100	16.005.817.131	100	16.178.947.253	100	16.368.464.206	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase laporan/ telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan secretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	Angka	92,5	92,5	92,5		92,75		93		93,25		93,5		
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persen	32,95	32,97	33	357.080.000	33,5	358.403.588	34	365.339.881	34,5	369.291.652	35	373.617.461	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) Perempuan	Persen	51,9	52	53,5		54		54,5		55		55		
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN															
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Persen	100	100	100	846.422.200	100	849.559.633	100	866.001.416	100	875.368.693	100	885.622.587	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	12,54	12,35	12,34		12,32		12,31		12,3		12,29		
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA															
Meningkatnya Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, Pemenuhak Hak, serta Perlindungan perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	N/A	71,63	72,02	481.426.275	72,56	483.210.778	73,04	492.562.501	73,8	497.890.402	74,29	503.722.590	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK															
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender berdasarkan data gender dan anak	Persen	100	100	100	199.777.300	100	200.517.815	100	204.398.496	100	206.609.413	100	209.029.594	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender berdasarkan data gender dan anak	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)															
terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	59,16	60,25	60,25	1.271.252.900	60,5	1.275.965.053	60,75	1.300.659.188	61	1.314.728.028	61,25	1.330.128.489	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
															dan Perlindungan Anak
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	78,4	78,5	78,5	888.070.200	79	891.362.010	79,5	908.612.806	80	918.440.998	80	929.199.433	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio	4,2	4,15	4,1		4,05		4		3,95		3,9		
PANGAN						10.567.956.500		10.607.128.505		10.812.411.482		10.929.366.096		11.057.390.153	
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN															
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	Persen	78,57	80,77											Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan
	Persentase Cadangan Pangan	Persen	214,89	248,45	276,74	4.841.419.500	276,74	4.859.365.080	276,74	4.953.409.847	276,74	5.006.989.397	276,74	5.065.640.108	
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Koefisien Variasi (CV) Harga Beras di Tingkat Konsumen	Persen	6,39	6,3	6,3	3.395.059.700	6,25	3.407.644.091	6,25	3.473.593.261	6,1	3.511.166.078	6	3.552.295.063	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan
	Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Thn	90	90	90		90		88		88		88		
	Konsumsi Pangan Lokal Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Thn	19,7	22,8	22,9		23		23		23,5		23,5		
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN															
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan	Persen	15,89	13,69											Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	1,94	7,74	5,81	960.549.000	5,16	964.109.445	3,87	982.768.148	3,23	993.398.456	1,94	1.005.034.895	
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN															
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	74,85	80	81	1.370.928.300	82	1.376.009.889	83	1.402.640.226	84	1.417.812.165	85	1.434.420.087	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan
PERTANAHAN						75.597.349.785		75.877.564.763		77.346.046.310		78.182.675.308		79.098.489.020	
2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM															
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Pengadaan Tanah Selesai Tepat Waktu	Persen	52,94	80	20	3.141.164.700	40	3.152.807.984	60	3.213.825.234	80	3.248.588.218	100	3.286.641.426	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanahan
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN															
Meningkatnya penyelesaian	Persentase Penyelesaian Sengketa	Persen	45	80											Perangkat Daerah pelaksana

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
sengketa tanah garapan	Tanah Garapan di Tahun Berjalan															Urusan Pertanahan
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan tepat waktu di Tahun Berjalan	Persen	50	80	100	68.443.873.285	100	68.697.572.634	100	70.027.097.613	100	70.784.559.738	100	71.613.713.641		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanahan
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE																
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Berita Acara Penetapan Akses & Aset Reforma Agraria yang Disepakati	Persentase	N/A	N/A	100	1.256.604.400	100	1.261.262.227	100	1.285.671.818	100	1.299.578.544	100	1.314.801.506		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanahan
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH																
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Penatagunaan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tertangani	Persentase	68	80	20	2.755.707.400	40	2.765.921.918	60	2.819.451.645	80	2.849.948.808	100	2.883.332.447		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanahan
LINGKUNGAN HIDUP						38.267.502.670		38.409.347.951		39.152.695.725		39.576.198.698		40.039.785.103		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	28.359.813.364	100	28.464.934.039	100	29.015.824.550	100	29.329.680.027	100	29.673.241.091		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	
	Persentase laporan/ telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan BLUD	Angka	N/A	95	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		
	Nilai Pendapatan UPTD Laboratorium Lingkungan	Rupiah	1.510.34 9.756,00	1.700.00 0.000,00	1.800.00 0.000,00		1.900.00 0.000,00		2.000.00 0.000,00		2.100.00 0.000,00		2.200.00 0.000,00		
	Nilai Pendapatan UPTD TPA Sampah dan Limbah B3 Regional Banjarbakula	Rupiah	3.148.59 3.752,71	2.700.00 0.000,00	3.000.00 0.000,00		3.270.63 0.000,00		3.597.69 3.000,00		3.957.46 2.300,00		4.200.00 0.000,00		
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP															
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk mitigasi dampak KRP	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	Persen	100	100	100	704.201.000	100	706.811.246	100	720.490.378	100	728.283.707	100	736.814.653	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang sudah diintegrasikan dengan rencana pembangunan lingkungan hidup	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya pengendalian pencemaran air sungai	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter IKA	Persen	11,66	15,63	15,63	1.253.311.181	16,67	1.257.956.801	17,71	1.282.302.421	18,75	1.296.172.702	19,79	1.311.355.768	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase kabupaten/kota dengan nilai ISPU kategori baik	Persen	61,54	69,23	76,92	194.042.000	84,62	194.761.251	92,31	198.530.525	100	200.677.970	100	203.028.665	
Meningkatnya pengendalian pencemaran air laut	Persentase titik pantau Air Laut dengan Kategori Baik	Persen	100	100	100	69.600.000	100	69.857.985	100	71.209.968	100	71.980.224	100	72.823.384	
Menurunnya emisi GRK sektor limbah	Angka Emisi GRK sektor Limbah	Gg CO ₂ -e	842	924	945	383.877.000	966	385.299.908	988	392.756.734	1010	397.005.066	1032	401.655.491	
Meningkatnya kualitas ekosistem gambut	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Poin	44,54	55,65	50,73	451.233.550	50,76	452.906.127	50,8	461.671.357	50,84	466.665.118	50,88	472.131.524	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)															
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,387	0,398	0,4124	489.551.750	0,4295	491.366.360	0,4509	500.875.923	0,4567	506.293.747	0,4637	512.224.355	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															
Meningkatnya Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	100	100	100	1.620.701.625	100	1.626.709.043	100	1.658.191.237	100	1.676.127.394	100	1.695.761.162	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup	Persen	96,8	100	100	616.799.625	100	619.085.902	100	631.067.260	100	637.893.325	100	645.365.459	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH															
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Adat Lingkup Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Yang memahami PPLH	Persen	17,4	17,4	17,4	25.295.625	34,78	25.389.388	52,17	25.880.756	73,91	26.160.701	100	26.467.141	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
Meningkatnya kapasitas SDM dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Entitas Yang Memahami tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	623.538.150	100	625.849.405	100	637.961.658	100	644.862.298	100	652.416.066	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	Persen	84,61	61,54	61,54	489.991.800	61,54	491.808.041	61,54	501.326.152	69,2	506.748.847	69,2	512.684.785	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP															
Meningkatnya penyelesaian terhadap kasus lingkungan hidup	Persentase kasus LH yang diselesaikan	Persen	100	100	100	372.321.125	100	373.701.199	100	380.933.552	100	385.053.996	100	389.564.429	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah.	Persentase pengelolaan sampah di kalsel	Persen	75,35	60	60	2.613.224.875	70	2.622.911.256	85	2.673.673.254	100	2.702.593.576	100	2.734.251.130	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	58,9	58	58		59		60		61		62		
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII						12.467.778.942		12.513.993.259		12.756.180.324		12.894.160.099		13.045.199.711	
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan Fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	10.500.828.942	100	10.539.752.365	100	10.743.731.354	100	10.859.943.073	100	10.987.154.274	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
															Pencatatan Sipil
	Persentase laporan/ telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	98,66	99,35	99,37	550.000.000	99,38	552.038.685	99,39	562.722.455	99,4	568.809.255	99,4	575.472.173	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	5,58	30	32		35		38		40		42		
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	70,78	75	82		85		87		89		90		
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
Meningkatnya Kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	97,34	97,35	98,78	525.000.000	99,1	526.946.018	99,37	537.144.162	99,5	542.954.289	99,5	549.314.347	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDU-DUKAN															
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	32.30	40	45	752.421.000	50	755.209.999	55	769.825.805	60	778.152.779	65	787.267.905	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDU-DUKAN															
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan secara tepat waktu	Persen	100	100	100	139.529.000	100	140.046.192	100	142.756.548	100	144.300.703	100	145.991.012	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						25.987.473.771		26.083.628.306		26.589.650.692		26.876.818.922		27.191.277.702	
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	15.757.463.446	100	15.804.560.458	100	16.111.168.927	100	16.285.169.550	100	16.475.706.036	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Laporan/ Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA															
Optimalnya Penataan Desa melalui tata kelola pemerintahan desa	Nilai kelembagaan dan pelayanan desa	Nilai	31	31,67	32,34	125.000.300	33,01	125.462.801	33,68	127.896.779	34,35	129.278.065	35	130.790.618	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Nilai tata kelola keuangan desa	Nilai	33	35	37		39		41		43		45		
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA															
Optimalnya kerja sama dan sarana prasarana desa	Nilai Kondisi Akses Jalan	Nilai	43	44,17	44,5	2.557.859.100	45,25	2.578.476.368	46	2.628.498.810	46,75	2.656.886.598	47,5	2.687.972.170	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Nilai Utilitas Dasar	Nilai	21	21,25	21,5		21,75		22		22,25		22,5		
	Persentase Kerjasama di desa	Persen	62	65	68		71		74		77		80		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA															
Meningkatnya Perekonomian dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai Produksi Desa	Nilai	26	26,67	27,34	3.447.705.950	28,01	3.460.502.158	28,68	3.527.635.900	29,35	3.565.734.369	30	3.607.453.460	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Nilai Fasilitas Pendukung Ekonomi	Nilai	79	82,17	85,34		88,51		91,68		94,85		98		
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
Tertatannya Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai layanan dasar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desa	Nilai	104	110,83	117,66	4.099.444.975	124,49	4.114.626.521	131,32	4.194.450.276	138,15	4.239.750.340	145	4.289.355.418	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Nilai aktivitas dan fasilitas masyarakat	Nilai	57	61,67	66,34		71,01		75,68		80,37		85		
	Nilai pengelolaan lingkungan	Nilai	43	44,5	46		47,5		49,5		50,5		52		
	Jumlah Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Melayani 6 SPM	Angka	n/a	6	39		65		130		260		325		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1.305.911.500		1.310.752.122		1.336.119.502		1.350.571.905		1.366.392.234	
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK															
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	Persen	10,3	10,2	9,9	695.160.500	9,7	697.737.251	9,5	711.240.770	9,3	718.934.048	9	727.355.497	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
															dan Keluarga Berencana
	Jumlah kelahiran hidup per 1000 kelahiran dari WUS 15-19 tahun (age specific fertility rate)	Angka	23,8	23,6	23,4		23,2		23		22,8		22,6		
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)															
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate</i> (mCPR)	Persen	75,87	76,37	76,87	230.837.000	77,37	231.692.644	77,87	236.176.661	78,37	238.731.313	78,87	241.527.764	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	5,08	5,07	5,06		5,04		5,02		5,01		5		
	Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi	Persen	94,92	94,93	94,94		94,96		94,98		94,99		95		
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)															
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase peningkatan keluarga yang memenuhi komponen keluarga sejahtera	Persen	N/A	N/A	5	379.914.000	6	381.322.227	7	388.702.071	8	392.906.544	9	397.508.973	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERHUBUNGAN						107.437.953.852		107.806.080.472		109.923.178.230		111.112.184.300		112.413.726.636	
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	31.831.095.758	100	31.949.083.357	100	32.567.403.667	100	32.919.675.510	100	33.305.288.948	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perhubungan
	Persentase Laporan/Telahaan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal antar Bidang/Unit terhadap layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	Angka	80	80	80		84		86		88		90		
	Nilai Pendapatan UPT	Rupiah	100.000.000	100.000.000	120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0,63	0,63	0,63	71.593.960.394	0,65	71.859.336.099	0,65	73.250.051.647	0,67	74.042.375.500	0,67	74.909.690.700	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perhubungan
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN															
Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Air	Rasio	0,62	0,62	0,62	3.982.897.700	0,62	3.997.661.016	0,63	4.075.028.964	0,63	4.119.107.331	0,64	4.167.357.598	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perhubungan
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretaapian di kewenangan Provinsi	Persentase pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	Persen	100		100	30.000.000			100	30.693.952	100	31.025.959	100	31.389.390	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					64.353.231.920		64.591.768.581		65.841.832.688		66.554.024.058		67.333.622.448		
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	25.230.274.980	100	25.323.795.467	100	25.813.894.568	100	26.093.115.729	100	26.398.764.430	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK															
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	76	77	78	21.178.938.140	79	21.257.441.628	80	21.668.843.350	81	21.903.228.734	82	22.159.798.071	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Mengakses Informasi	Persen	40	50	60		70		80		90		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Publik Pemerintah Daerah														
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA															
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	Persen	83	84	85	17.944.018.800	86	18.010.531.486	87	18.359.094.770	88	18.557.679.595	89	18.775.059.947	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						29.991.770.952		30.102.940.767		30.685.532.119		31.017.448.323		31.380.779.513	
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Layanan UPT	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	19.448.093.402	100	19.520.181.208	100	19.897.961.201	100	20.113.191.483	100	20.348.792.739	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat	Angka	N/A	100	100		100		100		100		100		
	IKM Layanan UPT	Angka	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Pendapatan UPT	Rp.	10.000.000	15.000.000	20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
USAHA SIMPAN PINJAM															
Meningkatnya Kualitas layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendasi Tehnis Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diterbitkan	Persen	0	n/a	25	442.847.550	30	444.489.043	37	453.091.374	43	457.992.328	49	463.357.144	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang menindaklanjuti hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	Persen	45	50	38	569.954.250	41	572.066.886	46	583.138.271	58	589.445.902	64	596.350.535	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI															
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang Sehat	Persen	39	42	56	300.000.000	59	301.112.003	62	306.939.515	64	310.259.588	66	313.893.897	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN															
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Perkoperasian yang bersertifikat	Persen	18	18	42	1.548.000.000	42	1.553.737.936	46	1.583.807.898	50	1.600.939.474	50	1.619.692.507	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	Persen	31	39	45	2.591.609.375	50	2.601.215.635	55	2.651.557.750	60	2.680.238.856	65	2.711.634.552	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	38,81	40	45		50		55		60		65		
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
Meningkatnya dukungan terhadap kewirausahaan dan perekonomian syariah	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Persen	23,94	n/a	25	4.201.532.875	27,27	4.217.106.601	28,57	4.298.721.546	28,89	4.345.219.528	29,31	4.396.118.421	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	n/a	1.000	1.500		2.010		2.510		3.010		3.510		
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
Meningkatnya UMKM yang naik kelas	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Persen	0,3	0,4	0,5	889.733.500	0,6	893.031.455	0,7	910.314.564	0,8	920.161.164	0,9	930.939.718	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
PENANAMAN MODAL						22.955.742.900		23.040.832.432		23.486.748.656		23.740.797.776		24.018.891.970	
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	16.040.960.500	100	16.100.419.164	100	16.412.015.464	100	16.589.539.316	100	16.783.865.328	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL															
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Potensi Investasi yang terpetakan	Persen	10	10	10	1.625.154.700	15	1.631.178.624	20	1.662.747.319	25	1.680.732.758	30	1.700.420.472	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL															
Meningkatnya Investor yang Terdaftar	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	5,4	6,61	7,57	2.169.544.600	8,33	2.177.586.402	9,46	2.219.729.892	10,27	2.243.740.045	11,27	2.270.022.695	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai Ketentuan	Persen	73,11	70	72	1.770.083.300	74	1.776.644.428	76	1.811.028.367	78	1.830.617.718	80	1.852.061.149	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha yang terselesaikan	Persen	80	80	80	849.999.800	82	853.150.475	84	869.661.755	86	879.068.626	88	889.365.831	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
	Persentase pelaku usaha yang diawasi sesuai dengan kewenangan Provinsi	Persen	NA	0,07	0,08		0,09		0,1		0,11		0,12		
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL															
Meningkatnya Kualitas penyediaan data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	500.000.000	100	501.853.339	100	511.565.859	100	517.099.313	100	523.156.495	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						140.949.485.559	141.470.998.656	144.215.536.029	145.773.063.819	147.478.608.665					
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	20.628.160.414	100	20.418.374.608	100	21.014.491.075	100	21.088.207.579	100	21.183.184.607	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN															
Meningkatnya kesempatan ketenagakerjaan yang layak melalui pengembangan kewirausahaan pemuda	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	0,81	0,9	0,94	1.944.000.000	1,13	1.951.192.800	1,33	1.989.045.940	1,49	2.010.527.636	1,6	2.034.050.810	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Pemuda NEET	Persen	22,26	22	21,82		21,38		21		20,71		20,4		
Meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial kemasyarakatan	Persen	65,85	67,5	67,5	16.391.329.900	68	16.451.977.821	68,5	16.771.146.190	69	16.952.274.569	72	17.150.616.182	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Organisasi	Persen	1,45	2,36	2,44		3		3,44		4,44		5,44		
	Persentase Pemuda yang Menduduki Posisi Manajerial	Persen	1,14	1,22	1,36		1,45		1,68		1,76		1,88		
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN															
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Persentase partisipasi masyarakat berusia 10 - 60 tahun yang berolahraga	Persen	0,416	0,417	0,418	32.071.699.000	0,419	32.190.364.286	0,42	32.814.857.353	0,421	33.169.257.813	0,422	33.557.338.129	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase Pemuda yang Berolahraga	Persen	26,06	30,1	32,6		35,7		39		41,26		45		
Meningkatnya Kualitas Tenaga Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	46,67	46,67	46,67	69.507.644.245	53,33	69.764.822.529	58,82	71.118.260.086	62,5	71.886.337.295	68,75	72.727.407.441	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persen	10,76	10,76	10,76		11,03		11,25		12,57		12,63		
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN															
Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pemuda (16-30) dalam Kepramukaan	Persen	0,65	0,658	0,665	406.652.000	0,669	694.266.612	0,678	507.735.385	0,687	666.458.927	0,696	826.011.496	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
STATISTIK						1.466.904.000		1.472.341.340		1.500.836.007		1.517.070.101		1.534.840.707	
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL															
Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Publikasi Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	Persen	65	70	75	1.466.904.000	80	1.472.341.340	85	1.500.836.007	90	1.517.070.101	95	1.534.840.707	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Statistik
PERSANDIAN						2.291.374.150		2.299.867.534		2.344.377.569		2.369.735.999		2.397.494.536	
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI															
Meningkatnya kematangan dalam penerapan sistem keamanan informasi	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	65,4	65,8	66	2.291.374.150	67	2.299.867.534	68	2.344.377.569	69	2.369.735.999	70	2.397.494.536	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Persandian

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
KEBUDAYAAN						28.675.663.494		40.079.067.000		40.141.734.000		40.204.491.000		40.267.351.000	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN															
Meningkatnya penduduk yang berprestasi dari pertunjukan kesenian	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	Persen	0,33	0,36	0,38	5.892.944.700	0,41	7.369.393.000	0,44	7.380.913.000	0,46	7.392.450.000	0,49	7.404.005.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
Meningkatnya pelestarian tradisi budaya	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	12,95	15,89	5.205.615.700	18,84	9.857.329.000	21,78	9.872.743.000	24,73	9.888.178.000	27,67	9.903.639.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL															
Meningkatnya seniman yang menghasilkan karya berkualitas dan diakui	Persentase seniman yang mendapatkan anugerah kebudayaan tingkat provinsi	Persen	N/A	32,06	34,11	924.227.700	36,17	2.150.511.000	38,22	2.153.874.000	40,28	2.157.242.000	42,33	2.160.615.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH															
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian warisan sejarah dan budaya secara berkelanjutan	Persentase lembaga yang mampu menyelenggarakan kegiatan kebudayaan	Persen	N/A	39,03	48,06	8.152.954.084	57,09	9.634.340.000	66,12	9.649.401.000	75,15	9.664.485.000	79,33	9.679.592.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
	Persentase anak usia sekolah yang aktif terlibat dalam pelestarian warisan sejarah dan budaya	Persen	N/A	28,54	30,07		31,61		33,14		34,68		36,21		
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Persen	20	21,19	22,37	3.647.336.380	23,56	4.664.763.000	24,74	4.672.058.000	25,93	4.679.364.000	27,11	4.686.683.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN															
Meningkatnya pelestarian koleksi museum serta tingkat kepuasan wisatawan terhadap kunjungan pusat kebudayaan	Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan	Persen	N/A	11,37	12,73	4.852.584.930	14,1	6.402.731.000	15,47	6.412.745.000	16,83	6.422.772.000	18,2	6.432.817.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
	Nilai Kepuasan Pengunjung Pusat Kebudayaan	Nilai	N/A	69,83	71,67		73,5		75,33		77,17		79		
PERPUSTAKAAN						25.965.231.656		26.061.476.980		26.565.852.563		26.853.207.420		27.167.760.521	
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	21.033.483.556	100	21.111.448.369	100	21.520.024.563	100	21.752.800.213	100	22.007.608.164	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perpustakaan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	74,63	75	75,5	4.381.333.800	76	4.397.574.090	76,5	4.482.681.661	77	4.531.169.483	77,5	4.584.246.696	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perpustakaan
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO															
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	Persen	N/A	N/A	100	550.414.300	100	552.454.521	100	563.146.339	100	569.237.724	100	575.905.661	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perpustakaan
KEARSIPAN						2.351.314.200		2.360.029.816		2.405.704.181		2.431.725.962		2.460.210.714	
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP															
Meningkatnya tata kelola arsip statis dan dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	47,5	47,5	50	2.008.842.600	50,5	2.016.288.777	51	2.055.310.618	51,5	2.077.542.297	52	2.101.878.212	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kearsipan
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP															
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	47	47,5	48	342.471.600	48,5	343.741.039	49	350.393.563	49,5	354.183.665	50	358.332.502	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kearsipan
KELAUTAN DAN PERIKANAN						81.352.534.431		81.654.082.022		83.234.358.259		84.134.679.365		85.120.213.470	
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT dan BLUD	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	55.776.499.634	100	55.983.245.117	100	57.066.705.856	100	57.683.979.308	100	58.359.676.053	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	IKM Layanan BLUD	Angka	90,65	90,68	90,99		91,32		91,66		92,01		92,31		
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD	Rp,	570.500.000	622.160.000	700.000.000		717.184.800		758.762.400		781.718.400		811.815.600		
	IKM Layanan UPT	Angka	88,67	88,67	89,85074074		90,22762222		90,63184874		91,01099329		91,24589409		
	Nilai Pendapatan UPT	Rp,	1.968.125.000	2.027.648.000	2.117.067.000		2.155.626.000		2.197.776.000		2.239.587.000		2.282.578.000		
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL															
Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	12.134,55	12.106,75	12.098,85	6.000.000.000	12.097,25	6.022.240.064	12.094,45	6.138.790.304	12.090,95	6.205.191.759	12.085,95	6.277.877.934	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
	Persentase pemenuhan rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	219.734	221.000	221.500	5.863.514.567	222.000	5.885.248.723	222.500	5.999.147.728	223.000	6.064.038.711	224.000	6.135.071.453	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kelautan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
																dan Perikanan
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	151.434,32	156.627,93	162.337,59	7.912.887.051	168.291,39	7.942.217.570	174.817,69	8.095.925.717	181.826,12	8.183.496.919	189.281,01	8.279.356.503		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Pelaku Usaha KP Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundangan	Persen	100	100	100	2.499.999.900	100	2.509.266.593	100	2.557.829.191	100	2.585.496.463	100	2.615.782.368		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	35,97	36	36,1	3.299.633.279	36,2	3.311.863.955	36,3	3.375.959.463	36,4	3.412.476.205	36,5	3.452.449.159		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
PARIWISATA						42.144.903.000		42.301.120.555		43.119.786.982		43.586.200.793		44.096.759.432		
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Meningkatnya kelancaran tugas	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	15.684.851.950	100	15.742.990.634	100	16.047.669.511	100	16.221.252.342	100	16.411.264.327		Perangkat Daerah pelaksana

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
dan fungsi perangkat daerah															Urusan Pariwisata
	Persentase laporan/ telaaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA															
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	48,23	7,5	8	14.130.684.700	8,5	14.183.062.588	9	14.457.551.704	9,5	14.613.934.707	10	14.785.118.946	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pariwisata
	Rata-rata Lama Menginap Wisatawan	Hari	1,3	1,34	1,36		1,38		1,4		1,45		1,5		
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA															
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	20	20	20	7.785.886.300	20	7.814.746.068	20	7.965.987.221	20	8.052.152.917	20	8.146.473.967	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pariwisata
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL															
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang	Persen	13,38	14	15	3.010.469.700	15	3.021.628.540	15	3.080.107.034	15	3.113.423.629	15	3.149.893.550	Perangkat Daerah pelaksana

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Memiliki Kekayaan Intelektual														Urusan Pariwisata
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah Bersertifikat	Persen	16,48	18	18	1.533.010.350	20	1.538.692.725	20	1.568.471.512	20	1.585.437.198	20	1.604.008.642	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pariwisata
PERTANIAN						223.288.066.387		224.115.723.186		228.453.102.817		230.924.211.551		233.629.204.168	
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	70.723.166.400	100	70.985.314.353	100	72.359.114.692	100	73.141.801.547	100	73.998.567.633	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
	Persentase Laporan/ Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal antar bidang/unit terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	IKM Layanan UPT	Angka	N/A	95	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		
	Nilai Pendapatan UPT	Rp	620.678.225	613.255.000	614.755.000		618.505.000		619.005.000		619.505.000		620.005.000		
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Persen	88,07	1,03	1,03	59.156.555.100	1,03	59.375.829.358	1,03	60.524.947.810	1,03	61.179.628.028	1,03	61.896.271.990	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Persen	205,82	4	4		4,33		4,83		5		5		
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															
Meningkatnya Prasarana yang Mendukung Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	2,25	2,25		16.988.692.400		17.051.664.000		17.381.670.030		17.569.682.345		17.775.489.526	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
	Persentase Ketersediaan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Sesuai untuk Peningkatan Produksi	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100		
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN															
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luasan pertanian yang dapat dikendalikan akibat bencana alam	Persen	2,5	2,5	2,5	1.948.001.000	2,5	1.955.221.611	2,5	1.993.061.608	2,5	2.014.619.958	2,5	2.038.218.749	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	N/A	96,25	96,5		96,75		97		97,25		97,5		
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	N/A	65	65,25		65,5		65,75		66		66,25		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN															
Meningkatnya kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian	Persentase Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas	Persen	3,88	3,93		10.183.167.400		10.220.913.115		10.418.721.550		10.531.417.738		10.654.780.321	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
	Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	1,41	1,45	1,49		1,53		1,57		1,61		1,64		
	Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian	Persen	22,23	24,23	26,23		28,23		30,23		32,23		34,23		
	Persentase Kelembagaan Petani yang Naik Kelas	Persen	N/A	N/A	3,98		4,03		4,08		4,13		4,18		
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	100	100	100	37.560.540.662	100	37.699.765.464	100	38.429.380.471	100	38.845.059.560	100	39.300.081.572	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A		100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A		100		100		100		100		100		
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A		100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A		100		100		100		100		100		
	IKM Layanan UPT	Angka	88,73	96,4	96,7		97,05		97,5		98		98,5		
	Nilai Pendapatan UPT	Rupiah	1.064.629.810,00	1.750.760.000,00	750.760.000,00		752.760.000,00		754.760.000,00		1.256.760.000,00		1.758.760.000,00		
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Tanaman Perkebunan per hektar per tahun	Kg/Ha/ Tahun	1.025	1.028	1.031	2.383.965.700	1.034	2.392.802.291	1.037	2.439.110.921	1.040	2.465.494.052	1.044	2.494.374.277	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
Meningkatnya Produksi Ternak	Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen	5,28	9	9	5.974.884.625	9	5.997.031.594	9	6.113.093.967	9	6.179.217.472	9	6.251.599.391	
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															
Tersedianya Prasarana Yang Mendukung Produksi Perkebunan dan Peternakan	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai untuk peningkatan produksi	Persen	100	100	100	15.593.592.800	100	15.651.393.216	100	15.954.299.380	100	16.126.872.254	100	16.315.778.693	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
	Persentase ketersediaan prasarana peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi	Persen	100	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER															
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	31,25	85	95	1.101.505.800	95	1.105.588.726	95	1.126.985.521	95	1.139.175.785	95	1.152.519.827	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
	Persentase Unit Usaha Yang Menghasilkan Produk ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN															
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Tanaman Perkebunan	Luas Areal Pengendalian Penanggulangan Bencana	Ha	9982	9000	9000	646.245.500	9000	648.640.924	9000	661.194.268	9000	668.346.208	9000	676.175.061	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN															
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Perkebunan	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan	Persen	100	100	100	129.461.000	100	129.940.870	100	132.455.655	100	133.888.388	100	135.456.726	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN															
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pekebun dan Peternak	Persentase Kelembagaan sektor Perkebunan dan Peternakan yang meningkat kapasitasnya	Persen	100	100	100	898.288.000	100	901.617.664	100	919.066.944	100	929.008.216	100	939.890.402	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian
KEHUTANAN						101.082.234.909		101.456.914.130		103.420.440.592		104.539.108.498		105.763.655.350	
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	81.635.157.159	100	81.937.752.340,00	100	83.523.518.537	100	84.426.967.402	100	85.415.925.301	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kehutanan
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	Angka	95	95	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	
Terwujudnya tertib PUHH	Persentase Pelaku usaha yang tertib PUHH	Persen	100	100	100	1.585.898.100	100	1.591.776.512	100	1.622.582.647	100	1.640.133.637	100	1.659.345.781	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kehutanan
Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Persentase Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi	Persen	N/A	1	1	7.102.172.450	1	7.128.497.911	1	7.266.457.895	1	7.345.056.992	1	7.431.095.285	
Terlindungnya kawasan hutan dan lahan sesuai dengan kewenangan	Persentase Luas Kawasan Hutan dan lahan yang Dilindungi sesuai dengan kewenangan	Persen	N/A	100	100	6.369.890.200	100	6.393.501.327	100	6.517.236.699	100	6.587.731.695	100	6.664.898.855	
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA															
Terlindungnya populasi Flora dan Fauna bernilai penting pada kawasan Ekosistem Esensial dan/atau area preservasi diluar kawasan hutan	Persentase populasi Flora dan Fauna bernilai penting pada kawasan Ekosistem Esensial dan/atau area preservasi diluar kawasan hutan yang aman dari ancaman kepunahan	Persen	100	100	100	2.637.761.900	100	2.647.539.232	100	2.698.777.863	100	2.727.969.734	100	2.759.924.538	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kehutanan
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN															
Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan	Persen	N/A	10	10	1.450.714.300	10	1.456.091.630	10	1.484.271.813	10	1.500.326.736	10	1.517.901.216	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kehutanan
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)															
Meningkatnya luas penanaman dan pemeliharaan DAS	Persentase luas rehab DAS	Persen	N/A	100	100	300.640.800	100	301.755.178	100	307.595.138	100	310.922.302	100	314.564.374	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kehutanan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						31.729.556.000		31.847.167.224		32.463.515.120		32.814.663.232		33.199.046.581	
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	27.067.452.900	100	27.167.783.212	100	27.693.569.569	100	27.993.122.610	100	28.321.027.551	Perangkat Daerah pelaksana Urusan ESDM
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	IKM Layanan UPT	Angka	88	88,2	88,29		88,34		88,41		88,43		88,52		
	Nilai Pendapatan UPT	Rp	N/A	330.750.000	348.000.000		365.400.000		383.600.000		402.850.000		423.000.000		
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN															
Meningkatnya tata kelola kegeologian	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	m3	N/A	689.719.925	733.066.050	1.165.365.200	1.545.530.792	1.169.684.833	1.994.900.680	1.192.322.098	2.054.405.201	1.205.219.089	14.811.881.502	1.219.336.746	Perangkat Daerah pelaksana Urusan ESDM
	Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Ha	N/A	0,001	0,014		0,108		0,129		0,143		0,22		
	Persentase terkelolanya Warisan Geologi	Persen	N/A	N/A	17,65		35,29		58,82		76,47		100		
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya tata kelola mineral bukan logam dan batuan	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan kewajiban sesuai regulasi	Persen	28,17	36,52	46,48	495.790.000	63,38	497.627.734	74,65	507.258.474	87,32	512.745.337	100	518.751.517	Perangkat Daerah pelaksana Urusan ESDM
	Persentase luas lahan yang direklamasi akibat kegiatan usaha pertambangan	Persen	2,65	2,75	3,08		3,34		3,65		3,95		4,17		
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN															
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase rumah tangga penerima listrik bersumber dari pembangkit EBT	Persen	N/A	0,12	0,09	1.205.832.900	0,14	1.210.302.533	0,2	1.233.725.886	0,24	1.247.070.729	0,21	1.261.678.626	Perangkat Daerah pelaksana Urusan ESDM
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN															
Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,79	99,83	99,87	1.795.115.000	99,91	1.801.768.912	99,95	1.836.639.093	99,99	1.856.505.467	100	1.878.252.141	Perangkat Daerah pelaksana Urusan ESDM
PERDAGANGAN						20.185.929.950		20.260.752.678		20.652.865.175		20.876.261.028		21.120.800.704	
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	17.773.720.375	100	17.839.601.820	100	18.184.857.050	100	18.381.557.198	100	18.596.874.493	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
	Persentase Laporan/Telaah Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	IKM Layanan BLUD	Angka	88,31	89,02	90		91		92		93		94		
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD	Rp.	100.000.000	105.000.000	110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN															
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	149.999.000	100	150.554.998	100	153.468.734	100	155.128.760	100	156.945.902	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
	Tertib Usaha	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan Yang Mendukung Arus Distribusi Barang	Persen	100	100	100	99.952.000	100	100.322.490	100	102.264.061	100	103.370.221	100	104.581.076	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KABUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING															
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	0,06	0,05	0,04	450.398.375	0,03	452.067.856	0,02	460.816.863	0,02	465.801.381	0,01	471.257.670	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR															
Meningkatnya Volume Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas (Bea Cukai)	USD	11.357.831.553	11.457.124.553	11.586.124.100	499.954.000	11.701.985.341	501.807.168	11.819.005.194	511.518.795	11.937.195.246	517.051.740	12.056.567.199	523.108.364	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN															
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persen	100	100	100	1.061.906.200	100	1.065.842.344	100	1.086.469.914	100	1.098.221.934	100	1.111.086.251	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi	Persen	100	100	100	150.000.000	100	150.556.002	100	153.469.758	100	155.129.794	100	156.946.948	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
PERINDUSTRIAN						23.218.130.900		23.304.193.018		23.755.206.140		24.012.159.085		24.293.431.943	
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Layanan UPT	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	17.909.523.800	100	17.975.908.625	100	18.323.801.842	100	18.522.004.914	100	18.738.967.380	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perindustrian
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang terkait Layanan	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Sekretariat yang ditindaklanjuti														
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	IKM Layanan UPT	Angka	N/A	95	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI															
Meningkatnya Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	203.888	207.000	213.000	1.111.191.300	223.000	1.160.000.000	233.000	1.190.000.000	243.000	1.200.000.000	253.000	1.230.000.000	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perindustrian
Meningkatnya Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Juta USD	11.659	11.710	12.170	1.938.335.000	12.640	1.900.299.078	13.110	1.965.329.587	13.830	1.959.470.737	14.560	1.988.736.203	
Meningkatnya Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Triliun Rupiah	1,54	1,55	1,60	1.047.068.600	1,70	1.050.000.000	1,80	1.050.000.000	1,90	1.100.000.000	2	1.100.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi	Persentase Produk yang Dihasilkan melalui Penerapan Technological Readiness Level (TRL) Skala 6	Persen	50	50	50	795.570.500	50	800.000.000	50	800.000.000	50	800.000.000	50	800.000.000	
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI															
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan berdasarkan Verifikasi Teknis	Persen	2,89	5,19	6,49	208.221.000	7,79	208.992.808	9,09	213.037.202	10,39	215.341.562	11,69	217.864.023	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perindustrian
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Persentase Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi yang Menyampaikan Data ke SIINas	Persen	60,51	61,5	63	208.220.700	64,5	208.992.507	66	213.037.509	67,5	215.341.872	70	217.864.337	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perindustrian
TRANSMIGRASI						372.766.000		374.147.723		381.388.717		385.514.086		390.029.908	
3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI															
Terwujudnya kawasan Transmigrasi yang berkembang	Jumlah Kabupaten yang diidentifikasi potensi kawasan transmigrasi	Kabupaten	N/A	N/A	4	137.266.000	4	137.774.801	4	140.441.198	4	141.960.309	4	143.623.199	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Transmigrasi
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI															
Meningkatnya Sumber Daya di kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	Persen	100	100	100	235.500.000	100	236.372.922	100	240.947.519	100	243.553.777	100	246.406.709	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Transmigrasi
SEKRETARIAT DAERAH						283.378.352.653		284.426.852.559		289.944.733.499		293.076.136.622		296.505.127.418	
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	190.829.110.999	100	191.535.178.710	100	195.250.961.177	100	197.359.671.557	100	199.668.779.715	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase Aduan/Keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya tata kelola layanan keprotokolan dan penyusunan materi komunikasi pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah	Persentase pemenuhan layanan keprotokolan dan materi komunikasi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	9.473.437.404	100	9.508.489.122	100	9.692.953.811	100	9.797.637.713	100	9.912.270.074	
4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI															
Meningkatnya internalisasi RB di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan RB dengan baik	Persen	100	100	100	313.552.600	100	314.712.745	100	320.818.172	100	324.283.008	100	328.077.119	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusaan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai laporan kinerja pemerintah daerah	Point	12,34	12,34	12,55	418.049.700	12,6	419.596.484	12,65	427.736.656	12,7	432.356.212	12,75	437.414.779	
	Persentase perangkat daerah dengan kualifikasi Nilai SAKIP minimal AA	Persen	4,25	4,25	28,57		38,77		48,97		59		69		
Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah	Indeks BERAKHLAK Perangkat Daerah	Indeks	N/A	-	79,5	234.695.700	79,7	235.564.074	79,8	240.134.017	80	242.727.465	80,02	245.567.376	
Terbentuknya kelembagaan yang sesuai ketentuan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Indeks Kelembagaan Provinsi	Indeks	N/A	-	82,3	1.063.471.200	82,6	1.067.406.044	82,6	1.088.113.721	82,9	1.099.865.349	82,9	1.112.733.774	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A)	Unit	3	3	5	243.016.000	6	243.915.159	7	248.647.113	8	251.332.502	9	254.273.092	
Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Laksana dengan "Baik"	Persen	80	80	82	741.816.900	84	744.561.623	86	759.006.118	88	767.203.384	90	776.179.664	
	Jumlah dokumen proses bisnis pemda	Dokumen	1	1	1										
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Proses Bisnis	Persen	100	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Nilai Rata-Rata Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai	N/A	95,9	96,1	2.810.692.450	96,3	2.821.092.012	96,6	2.875.821.197	96,9	2.906.880.066	97,1	2.940.890.563	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusaan Pemerintahan Daerah
	Nilai LPPD	Nilai	N/A	N/A	3,48		3,51		3,54		3,57		3,6		
	Persentase Realisasi Capaian SPM	Persen	96,97	96,8	97		97,25		97,5		97,75		98		
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT															
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah dalam pembinaan mental spiritual, dan kesejahteraan rakyat	Tingkat kondusifitas kerukunan umat beragama	Poin	74,01	74,03	74,7	67.652.132.400	75,1	67.902.445.290	75,51	69.219.752.729	75,91	69.967.326.059	76,32	70.785.943.773	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusaan Pemerintahan Daerah
	Persentase peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sadakah (ZIS)	Persen	32	32	33		34		35		37		38		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM															
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah, Layanan Informasi Produk Hukum Daerah, Dan Bantuan Hukum Dalam Koordinasi Dan Fasilitasi Bidang Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Persen	100	100	100	3.678.127.100	100	3.691.736.170	100	3.763.355.852	100	3.804.000.095	100	3.848.506.896	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusaan Pemerintahan Daerah
	Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,46	97,56	97,66		97,75		97,85		97,95		98,05		
	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	N/A	50	55		65		65		70		70		
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusaan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Dividen yang Disetorkan oleh BUMD kepada Pemerintah Provinsi	Persentase peningkatan dividen BUMD yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi	Persen	-	5	6	530.608.000	7	532.571.250	8	542.903.132	9	548.766.486	10	555.187.054	
Terwujudnya BLUD dengan nilai IKM sangat baik	Persentase BLUD dengan Nilai IKM sangat Baik	Persen	-	55	60	247.737.200	65	248.653.828	70	253.477.712	75	256.215.271	80	259.212.990	
Terjaganya Kestabilan Inflasi	Tingkat Inflasi	Persen	1,95	2,5±1	2,5 ± 1	879.035.700	2,5 ± 1	882.288.132	2,5 ± 1	899.404.522	2,5 ± 1	909.118.091	2,5 ± 1	919.754.772	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA															
Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	93,75	90	90	3.398.124.600	90	3.410.697.660	90	3.476.865.196	91	3.514.415.340	92	3.555.533.999	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusaan Pemerintahan Daerah
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	73,36	30	30		30		30		30		30		
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN															
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	N/A	N/A	100	864.744.700	100	867.944.256	100	884.782.374	100	894.338.024	100	904.801.778	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah Urusaan Pemerintahan Daerah
SEKRETARIAT DPRD						247.208.822.575		248.125.151.517		252.927.192.012		255.663.029.570		258.657.815.166	
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	155.704.003.875	100	156.281.151.906	100	159.305.707.923	100	161.028.869.974	100	162.915.129.951	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat DPRD Urusaan Pemerintahan Daerah
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
Meningkatnya kualitas fasilitasi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan	Angka	97,33	98	100	91.504.818.700	100	91.843.999.611	100	93.621.484.089	100	94.634.159.596	100	95.742.685.215	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat DPRD Urusaan Pemerintahan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Angka	83,68	98	100		100		100		100		100		
PERENCANAAN						39.476.106.440		39.622.432.525		40.389.257.347		40.826.135.827		41.304.365.018	
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	23.317.848.940	100	23.404.281.211	100	23.857.231.286	100	24.115.287.800	100	24.397.769.458	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Perencanaan Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan antar Bidang terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
Meningkatnya Keterpaduan Proses Perencanaan Dengan Penyediaan Data, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPd	Persen	N/A	N/A	80	6.490.990.500	80	6.515.050.654	80	6.641.138.384	80	6.712.973.586	80	6.791.608.016	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Perencanaan Urusan Pemerintahan Daerah
	Rata-rata persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80		80		
	Rata-rata persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80		80		
	Persentase keterisian data sektoral dan spasial provinsi	Persen	N/A	N/A	85		85		85		85		85		
	Persentase program prioritas dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	N/A	N/A	80	2.803.026.800	80	2.813.416.780	80	2.867.865.679	80	2.898.886.521	80	2.932.843.499	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Perencanaan Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	N/A	N/A	80	2.779.254.200	80	2.789.556.062	80	2.843.543.177	80	2.874.300.930	80	2.907.969.917	
	Persentase program prioritas bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
MMENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	N/A	N/A	80	4.084.986.000	80	4.100.127.818	80	4.179.478.821	80	4.224.686.990	80	4.274.174.128	
	Persentase program prioritas bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
KEUANGAN						2.891.962.025.704		2.902.682.943.262		2.879.942.241.066		2.832.469.648.479		3.025.897.656.874	
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	703.482.599.530	100	706.090.198.482	100	719.755.373.920	100	727.540.751.873	100	736.063.018.732	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-6,66	8,32	7,5	1.900.596.801.941	7,1	1.907.643.026.023	6,75	1.865.645.017.798	6,41	1.807.201.076.435	6,09	1.988.619.293.832	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan Daerah
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	Persen	11,32	15,78	16,1		16,42		16,75		17,08		17,42		
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	46,53	0,52	0,53		0,54		0,55		0,56		0,57		
	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	38,6	14,89	14,59		14,3		14,01		13,73		13,46		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	N/A	25,6	26,78		27,96		28,05		28,5		28,89		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	N/A	49,32	48,08		47,76		46,65		46,53		46,45		
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	N/A	79,1	80,68		82,29		83,94		85,62		87,33		
	Persentase Penurunan SILPA	Persen	N/A	90,9	88,63		86,41		84,25		82,14		80,09		
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Assets management	Persen	25	100	100	4.114.211.200	100	4.129.461.347	100	4.209.380.051	100	4.254.911.652	100	4.304.752.836	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	N/A	2	2		1,5		1,5		1,5		2		
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah Serta Layanan UPT	persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	253.480.725.933	100	254.420.302.940	100	259.344.175.389	100	262.149.423.531	100	265.220.189.448	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan Daerah
	persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	
	nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan antar Bidang terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Pendapatan UPT	Rp.	1.636.86 9.918.98 7	1.209.50 0.000.00 0.000	1.014.50 0.000.00 0.000		1.045.00 0.000.00 0.000		1.077.00 0.000.00 0.000		1.110.50 0.000.00 0.000		1.145.00 0.000.00 0.000		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	Angka	90,92	95	95,2		95,5		95,8		96		96,2		
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Persen	100	100	100	109.752.000	100	110.158.818	100	112.290.754	100	113.505.370	100	114.834.949	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	100	100	100	30.177.935.10 0	100	30.289.795.65 2	100	30.876.003.15 4	100	31.209.979.61 8	100	31.575.567.0 77	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	42,83	43,37	46,27		49,17		52,07		54,97		57,87		
	Persentase Peningkatan Pendapatan pada UPPD	Persen	9,09	-16,66	-16,12		3,01		3,06		3,11		3,15		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	16,74	11,17	9,8		8,43		7,06		5,69		4,32		
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
KEPEGAWAIAN						35.092.501.775		35.222.579.152		35.904.252.292		36.292.617.819		36.717.742.284	
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	21.509.027.900	100	21.588.755.414	100	22.006.569.074	100	22.244.607.530	100	22.505.176.413	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintah n Daerah
	Persentase laporan telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan antar Bidang terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH															
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	Persentase Formasi Pengadaan ASN yang ter isi	Persen	76	100	100	1.833.417.500	100	1.840.213.429	100	1.875.827.631	100	1.896.117.896	100	1.918.328.642	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya penataan ASN	Persentase Jabatan Manajerial yang ter isi	Persen	94	100	100	3.954.080.175	100	3.968.736.764	100	4.045.544.917	100	4.089.304.363	100	4.137.205.656	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Peran Perangkat Daerah dalam Pembinaan Profesionalitas ASN	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Profesionalitas ASN Kategori Tinggi	Persen	73,5	75	80	7.795.976.200	85	7.824.873.545	90	7.976.310.670	95	8.062.588.030	100	8.157.031.573	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						36.879.813.600		37.016.516.006		37.732.907.745		38.141.053.288		38.587.829.957	
5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	25.561.043.200	100	25.655.790.319	100	26.152.314.526	100	26.435.196.266	100	26.744.852.868	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendidikan dan Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	
Meningkatnya pengembangan kompetensi teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis yang Tepat Sasaran	Persen	70	70	75	1.360.241.600	77,27	1.365.283.608	81,82	1.391.706.351	81,82	1.406.760.021	81,82	1.423.238.526	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendidikan dan Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Fasilitasi Uji Kompetensi Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Uji Kompetensi	Persen	80	80	80	615.257.300	80	617.537.874	80	629.489.270	80	636.298.267	80	643.751.737	
Meningkatnya Mutu Kelembagaan BPSDMD Prov. Kalsel	Persentase Pemenuhan Unsur Mutu Kelembagaan	Persen	82	82	82	1.136.550.000	82	1.140.762.850	82	1.162.840.376	82	1.175.418.471	82	1.189.187.088	
Meningkatnya pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar	Persen	N/A	N/A	46	8.206.721.500	55	8.237.141.355	60	8.396.557.222	73	8.487.380.263	95	8.586.799.738	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pendidikan dan Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Persen	N/A	N/A	65		70		76		82		90		
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Fungsional	Persen	N/A	N/A	1,848		2,354		1,928		1,966		2,006		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						27.819.922.632		27.923.042.739		28.463.445.764		28.771.326.316		29.108.347.878	
5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	19.929.809.99 ₂	100	20.003.683.81 ₉	100	20.390.821.11 ₃	100	20.611.382.50 ₇	100	20.852.820.1 ₂₀	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	Angka	91	95	95		95		95		95		95		
	Nilai Pendapatan UPT	Rp.	2.400.00 0.000	1.400.00 0.000	1.500.00 0.000		1.600.00 0.000		1.700.00 0.000		1.800.00 0.000		1.900.00 0.000		
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Optimalnya Pemanfaatan Riset dalam Kebijakan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	90,74	90,15	90,2	3.142.207.000	90,25	3.153.854.219	90,3	3.214.891.706	90,35	3.249.666.225	90,4	3.287.732.16 ₅	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Daerah
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH															
Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Persentase Inovasi SKPD yang sesuai mekanisme Indeks Inovasi Daerah	Persen	22,92	28,13	38,54	1.468.015.300	48,96	1.473.456.792	59,38	1.501.973.044	69,79	1.518.219.435	69,79	1.536.003.55 ₄	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya pendayagunaan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk unggulan dan Inovasi Daerah	Persentase HKI yang difasilitasi	Persen	N/A	N/A	100	103.500.000	100	103.883.643	100	105.894.135	100	107.039.560	100	108.293.400	
Meningkatnya kegiatan konservasi dan identifikasi keanekaragaman hayati tumbuhan di kebun raya banua	Persentase tumbuhan yang dieksplorasi dan dikoleksi	Persen	100	100	100	3.176.390.340	100	3.188.164.266	100	3.249.865.766	100	3.285.018.589	100	3.323.498.639	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Penelitian dan Pengembang an Urusan Pemerintah an Daerah
PENGELOLAAN PENGHUBUNG						15.896.236.996		15.955.159.577		16.263.944.567		16.439.866.777		16.632.440.089	
5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	14.851.514.096	100	14.906.564.203	100	15.195.055.412	100	15.359.415.768	100	15.539.332.893	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengelolaan Penghubung Urusan Pemerintah an Daerah
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan antar Bidang terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Terselenggaranya Pelayanan Penghubung	Persentase Kegiatan Koordinasi Yang Terealisasi terhadap Yang Direncanakan	Persen	N/A	N/A	80	1.044.722.900	85	1.048.595.374	90	1.068.889.155	95	1.080.451.009	100	1.093.107.196	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengelolaan Penghubung Urusan Pemerintahan Daerah
INSPEKTORAT DAERAH					71.382.495.570		71.647.089.067		73.033.696.675		73.823.680.262		74.688.436.087		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
meningkatkan kelancaran tugas fungsi dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	53.549.155.470	100	53.747.646.125	100	54.787.840.444	100	55.380.464.078	100	56.029.179.758	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah
	persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aduan/ Keluhan antar Bidang terkait Layanan Sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan anggaran ataupun proses dan kewenangannya	Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban I	Persen	N/A	N/A	80	14.008.297.100	80	14.060.221.655	80	14.332.333.343	85	14.487.361.893	90	14.657.063.952	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban II	Persen	N/A	N/A	80		80		80		85		90		
	Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban III	Persen	N/A	N/A	80		80		80		85		90		
	Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irban I	Persen	N/A	N/A	80		80		80		85		90		
	Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irban II	Persen	N/A	N/A	80		80		80		85		90		
	Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irban III	Persen	N/A	N/A	80		80		80		85		90		
	Persentase SKPD dengan data dukung SPIP lengkap dan valid	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100		
	Persentase SKPD dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal minimal 20%	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai penerapan strategi pencegahan korupsi pada perangkat daerah	Nilai	N/A	N/A	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		
	Persentase kasus pengawasan dan Pemeriksaan Pengaduan kasus yang ditangani	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI															
meningkatnya kualitas pedoman penyelenggaraan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	persentase ketersediaan pedoman teknis pengawasan	Persen	100	100	100	3.825.043.000	100	3.839.221.287	100	3.913.522.888	100	3.955.854.291	100	4.002.192.377	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						51.565.626.929		51.756.765.239		131.587.585.658		211.722.835.869		53.953.787.978	
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	Persen	N/A	100	100	14.188.668.504	100	14.241.261.642	100	14.516.877.050	100	14.673.901.754	100	14.845.788.905	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	Nilai	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	Persen	N/A	100	100		100		100		100		100		
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	8.673.703.500	100	8.705.854.317	100	8.874.341.327	100	8.970.332.415	100	9.075.409.095	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
Meningkatnya etika dan budaya politik	Nilai Sub Komponen Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada IDI Kalimantan Selatan	Poin	58	80	80	21.785.409.325	90	21.866.161.302	90	101.118.499.898	90	180.924.175.148	100	22.794.357.904	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa
	Persentase Pendidikan Politik bagi Masyarakat	Persen	96,67	100	100		100		100		100		100		
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN															
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	90	93	93	3.890.000.000	94	3.904.419.063	95	3.979.982.456	98	4.023.032.733	99	4.070.157.734	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA															
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang diberikan Pemahaman terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	76,61	80	80	1.120.000.000	85	1.124.151.504	90	1.145.907.545	95	1.158.302.483	100	1.171.870.607	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH
			2024	2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
Meningkatnya Kualitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	Persen	100	100	100	1.907.845.600	100	1.914.917.411	100	1.951.977.382	100	1.973.091.336	100	1.996.203.733	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintah Umum Kesatuan Bangsa
JUMLAH						11.132.749.974.354		11.174.015.485.552		11.390.269.599.622		11.513.474.731.797		11.648.340.902.344	

Sumber: hasil proyeksi, 2025



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dalam 2 (dua) bentuk indikator, yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030. IKU menjadi tanggung jawab kepala daerah dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dan dukungan dari seluruh perangkat daerah, pemerintah pusat dan instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama lima tahun ke depan disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 4.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030

INDIKATOR		SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,55	0,56	0,57	0,59	0,6	0,61	0,62
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,19	75,48	75,99	76,50	77,00	77,51	77,99
3	Indeks Harmoni Indonesia*	Indeks	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
4	Prevalensi Stunting	Persen	22,9	21,6	19,5	18,88	18,25	17,63	16,83
5	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	44,62	50,12	56,31	63,25	71,06	79,82	89,67
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	74,01	74,3	74,7	75,1	75,51	75,91	76,32
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61,65	59,81- 59,89	60,38-60,5	60,96- 61,11	61,53- 61,72	62,1-62,33	62,67- 62,94
8	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,02	3,44 - 3,94	3,23 - 3,46	2,91 - 3,41	2,61 - 3,11	2,3 - 2,64	1,89 - 2,39
9	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,9	65,95	69,5	73,5	77	80	82,2
10	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71
11	Indeks Konektivitas	Indeks	0,85	0,85	0,91	0,98	1,02	1,09	1,13
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,3 - 5,4	5,6 - 6,4	5,7 - 7,7	5,8 - 7,8	5,8 - 8,1	6,2 - 8,2
13	PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	60.210	68.940- 72.700	77.210- 81.280	85.470- 89.860	93.740- 98.440	102.000- 107.000	110.270- 115.580
14	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	53,01	54,73	56,525	58,32	60,115	61,91	63,35
15	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	22,67	23,78	24,943	26,105	27,268	28,43	29,35
16	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	10,95	11,68	11,88	12,07	12,27	12,46	12,66
17	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,16	5,4	5,95	6,5	7,05	7,6	8,15
18	Laju PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	8,07	8,08	8,09	8,09	8,09	8,1	8,1
19	Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	6,36	6,37	6,37	6,38	6,39	6,39	6,4
20	Persentase Produk Tersertifikasi Halal	Persen	4,35	4,79	5	5,5	6	6,5	7
21	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Triliun Rupiah	24,85	25,40	26,40	27,40	28,40	29,40	30,40

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



INDIKATOR		SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
22	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	67,12	77,74	78,4	79,07	79,75	80,3	80,82
23	Indeks Williamson	Indeks	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433
24	Rasio Gini	Poin	0,298	0,290 – 0,301	0,285 - 0,296	0,280 - 0,291	0,275 - 0,286	0,270 - 0,281	0,262-0,274
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,2	3,63 - 4,18	3,56 - 4,14	3,48 - 4,10	3,39 - 4,04	3,29 - 3,97	3,20-3,83
26	Indeks Desa	Indeks	77,01	77,5	78,22	78,94	79,65	80	80,5
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,59	72,32	72,51	72,71	72,90	73,10	73,29
28	Indeks Risiko Bencana	Indeks	103,75**	83,79	82,75	82,07	81,62	81,14	80,49
29	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan)	Persen	26,6	22,95	26,86	33,13	35,5	34,49	40,43
30	Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	Persen	11,93	15	16,8	18,6	20,4	24	25,8
31	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66
32	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,54	84,68	84,82	84,96	85,1	85,24	85,39
33	Nilai SAKIP	Poin	A (82,04)	82,96	83,88	84,82	85,76	86,72	87,69
34	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Indeks Integritas	Indeks	71,53	76,36	77,34	78,32	79,29	80,27	81,05
36	Indeks Sistem Merit	Indeks	279	325	330	335	340	345	350
37	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	3	3,05	3,08	3,1	3,16
38	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintahan Digital***	Indeks	3,63	3,63	1,64	1,84	2,04	2,24	2,44
39	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,58	4,6	4,61	4,63	4,65	4,67

Sumber: hasil proyeksi, 2025

Keterangan:

* Indeks Harmoni Indonesia merupakan indikator baru, sehingga tahun 2024 belum ada realisasi.

** Indeks Risiko Bencana Tahun 2024 menggunakan hasil konversi metode baru

*** Indeks SPBE secara nasional hanya berlaku sampai tahun 2025, selanjutnya diganti dengan Indeks Pemerintahan Digital mulai tahun 2026.



4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). Indikator Kinerja Daerah disajikan dalam beberapa kelompok yakni Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Indikator yang ditetapkan menjadi IKD meliputi indikator sasaran visi RPJPD dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD Tahun 2025-2045; indikator tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; IKK; dan indikator lain yang bersifat penting dan/atau mendukung pembangunan nasional. Indikator-indikator yang disajikan pada tabel di bawah, dilengkapi dengan target yang terukur setiap tahun. Penyajian indikator dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yakni Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 4.3.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,95	83,16	83,83	84,51	85,19	85,87	86,55
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Persen	3,68	3,02	2,48	2,04	1,67	1,37	1,13
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	45,91	49,29	52,67	56,05	59,43	62,81
4	Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	5,28	5,3	5,32	5,34	5,36	5,37
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	75,59	72,32	72,51	72,71	72,90	73,10	73,29
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,08	70,52	72,72	72,92	73,12	73,32	73,52
7	Indeks Kualitas Udara	Indeks	96,41	70,97	71,27	71,57	71,87	72,17	72,47
8	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	84,27	80,05	80,1	80,16	80,21	80,27	80,32
9	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	52	70,37	70,44	70,51	70,58	70,65	70,72
10	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,387	0,398	0,412	0,429	0,451	0,457	0,464
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	8,7	11,55	14,38	17,2	20,03	22,85
12	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	9,2	9,76	17,32	24,88	32,44	40	47,56
13	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	65,85	66,41	68,56	70,71	72,85	75	77,15
14	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	72,52	75,97	76,41	77,94	79,46	80,99	82,88

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Persentase Penurunan Emisi GRK:								
16	- Kumulatif	Persen	15,26	15,61	16,13	16,95	17,79	18,49	18,44
17	- Tahunan	Persen	26,6	22,95	26,86	33,13	35,5	34,49	40,43
18	Indeks Risiko Bencana	Indeks	103,75	83,79	82,75	82,07	81,62	81,14	80,49
19	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,3 - 5,4	5,6 - 6,4	5,7 - 7,7	5,8 - 7,8	5,8 - 8,1	6,2 - 8,2
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,02	3,44 - 3,94	3,23 - 3,46	2,91 - 3,41	2,61 - 3,11	2,3 - 2,64	1,89 - 2,39
3	PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	60.210	68.940-72.700	77.210-81.280	85.470-89.860	93.740-98.440	102.000-107.000	110.270-115.580
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,2	3,63 - 4,18	3,56 - 4,14	3,48 - 4,10	3,39 - 4,04	3,29 - 3,97	3,20-3,83
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen		50	52,5	55	57,5	60	62,5
6	Rasio Gini	Indeks	0,298	0,290 - 0,301	0,285 - 0,296	0,280 - 0,291	0,275 - 0,286	0,270 - 0,281	0,262-0,274
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,55	0,56	0,57	0,59	0,6	0,61	0,62
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,19	75,48	75,99	76,50	77,00	77,51	77,99
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,18	74,42	74,66	74,91	75,15	75,39	75,64
10	Prevalensi Stunting	Persen	22,9	21,6	19,5	18,88	18,25	17,63	16,83
11	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	146	189	172	154	137	119	102
12	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Persen	90	95	95	95	95	95	95
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Persen	75,2	88	88,68	89,36	90,04	90,72	91,4
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	N/A	98,9	98,94	98,97	99,01	99,04	99,08

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	- Literasi Membaca	Persen	15,38	15,38 - 15,38	25-40,38	34,62-50	44,23-59,61	53,85-69,23	63,47-78,85
	- Numerasi	Persen	0	0-7,69	1,92-9,61	3,85-11,54	5,77-13,46	7,69-15,38	9,61-17,3
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	- Literasi Membaca	Persen	52,78	55-57,5	56,39-58,89	57,77-60,27	59,16-61,66	60,54-63,04	61,93-64,43
	- Numerasi	Persen	43,82	45,26-47,76	46,16-48,66	47,06-49,56	47,96-50,46	48,86-51,36	49,76-52,26
17	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,02	9,13 - 9,15	9,25-9,27	9,37-9,39	9,48-9,51	9,6 - 9,63	9,72-9,75
18	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,71	8,8	8,88	8,97	9,05	9,14
19	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,33	13,46	13,59	13,72	13,86	13,99
20	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	81,16	82,38	83,61	84,87	86,14	87,43	88,74
21	Indeks Literasi Digital	Indeks	belum rilis	3,88	4,03	4,18	4,33	4,49	4,66
22	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	13.399	13.860	14.338	14.831	15.342	15.870	16.417
23	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	N/A	10,5	10,58	10,66	10,73	10,81	10,89
24	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	N/A	74,78	75,8	76,83	77,85	78,87	79,89
25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	N/A	26	28,13	30,25	32,38	34,5	36,63

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	N/A	39,52	42,17	44,82	47,46	50,11	52,76
27	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	74,01	74,3	74,7	75,1	75,51	75,91	76,32
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	61,65	59,81-59,89	60,38-60,5	60,96-61,11	61,53-61,72	62,1-62,33	62,67-62,94
30	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	62,46	62,48	62,05	62,62	62,80	62,95	63,00
31	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,9	65,95	69,5	73,5	77	80	82,2
32	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,486	0,472	0,466	0,46	0,455	0,422	0,417
33	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,67	61,90	64,80	66,50	69,30	71,26	74,10
34	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	N/A	54,05	54,95	55,85	56,75	57,65	58,55
35	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	52,09	58	58,3	58,6	59,9	59,1	59,2
36	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	44,62	50,12	56,31	63,25	71,06	79,82	89,67
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio Ketergantungan	Persen	47,1	47,16	47,12	47	46,84	46,69	46,61
2	Indeks Williamson	Indeks	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433
3	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	10,95	11,68	11,88	12,07	12,27	12,46	12,66
4	Kontribusi Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB	Persen	1,98	2,12-2,37	2,21-2,48	2,31-2,59	2,40-2,69	2,49-2,80	2,56-2,89
5	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,16	5,4	5,95	6,5	7,05	7,6	8,15
6	Laju PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	8,07	8,08	8,09	8,09	8,09	8,1	8,1
7	Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	6,36	6,37	6,37	6,38	6,39	6,39	6,4

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	N/A	12,1	13,24	14,37	15,51	16,64	17,78
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Persen	N/A	10,72	10,9	11,08	11,25	11,43	11,61
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persen	N/A	2,26	2,44	2,62	2,79	2,97	3,15
11	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,95	3,02	3,07	3,12	3,16	3,21	3,26
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,78	0,79	0,8	0,8	0,81	0,82
13	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	N/A	0,68	0,75	0,83	0,9	0,97	1,04
14	Persentase Produk Tersertifikasi Halal	Persen	4,348	4,79	5	5,5	6	6,5	7
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,22	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	51,9	52	53,5	54	54,5	55	55
17	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	51,71	53	54	56	58	60	62
18	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	53,01	54,73	56,525	58,32	60,115	61,91	63,35
19	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	22,67	23,78	24,943	26,105	27,268	28,43	29,35
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,89	7,21	7,54	7,86	8,19	8,51	8,84
21	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Poin	10,5	10,3	10,15	10	9,85	9,7	9,55
22	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Triliun Rupiah	24,85	25,40	26,40	27,40	28,40	29,40	30,40
23	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	1,3	1,3	1,32	1,34	1,35	1,37	1,39
24	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Persen	21,35	21,43	21,52	21,6	21,69	22,53	22,8
25	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	67,12	77,74	78,4	79,07	79,75	80,3	80,82

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	Persen	11,93	15	16,8	18,6	20,4	24	25,8
27	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71
28	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	0,45	0,49	0,51	0,53	0,56	0,58	0,6
29	Indeks Konektivitas	Indeks	0,85	0,85	0,91	0,98	1,02	1,09	1,13
30	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	60,6	64	66,25	68,5	70,75	73	75,25
31	Persentase Desa Mandiri	Persen	33,67	36,61	39,55	42,22	44,63	47,03	49,71
32	Indeks Desa	Indeks	77,01	77,5	78,22	78,94	79,65	80	80,5
33	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/kapita	N/A	942	1032	1126	1221	1315	1409
34	Intensitas Energi Primer	SBM/miliar rupiah	N/A	144,29	141,5	138,77	136,09	133,46	130,89
35	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	N/A	0,52 WM Banjarmasin (terdiri dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut)	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53
36	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	1,54	1,92	1,91	1,9	1,89	1,88	1,87
37	Tingkat Inflasi	Persen	1,95	3,2-3,9	3,1-3,9	3,0-3,9	2,8-3,8	2,7-3,8	2,6-3,8

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
38	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	31,98	32,65	33,41	34,18	34,94	35,7	36,46
39	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16
40	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	N/A	2.302.966,62	2.788.129,64	3.273.292,65	3.758.455,67	4.243.618,68	4.728.781,70
41	Total Kredit/PDRB	Persen	26,92	23,5	23,9	24,3	24,7	25,1	25,5
42	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	87,98	88,69	89,41	90,12	90,83	91,54
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Persen	97,46	97,56	97,66	97,75	97,85	97,95	98,05
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,54	84,68	84,82	84,96	85,1	85,24	85,39
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintahan Digital*	Indeks	3,63	3,63	1,64	1,84	2,04	2,24	2,44
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,58	4,6	4,61	4,63	4,65	4,67
5	Nilai SAKIP	Indeks	A (82,04)	82,96	83,88	84,82	85,76	86,72	87,69
6	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks Integritas	Indeks	71,53	76,36	77,34	78,32	79,29	80,27	81,05
8	Indeks Sistem Merit	Indeks	279	325	330	335	340	345	350
9	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	3	3,05	3,08	3,1	3,16
10	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	90,74	100	100	100	100	100	100
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	64,62	66,09	67,56	69,03	70,5	71,97
12	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Indeks	N/A	81,11 - 84,37	81,20-84,45	81,28-84,53	81,37-84,61	81,45 - 84,70	81,54-84,78
13	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,56	3,61	3,66	3,71	3,76	3,81	3,86

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
	PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	88,19	73,31	74,31	75,31	76,31	77,31	78,31
2	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	Persen	75,08	41,59	42,73	43,88	45,02	46,16	47,3
	KESEHATAN								
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk	1,49	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	46,44	0,62	3,68	31,41	33,35	34,97	35,59

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Persen	4,53	6,8	15,51	27,35	40,95	54,56	61,36
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	56,76	39,08	39,75	40,41	41,08	41,74	42,41
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persen	82	70	73,33	76,67	80	83,33	86,67
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Persen	0	0	0	0	0	0	0
6	Rasio kemantapan jalan	Persen	82,91	80	81	82	83	84	85
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Persen	99,61	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	98,67	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang	Persen	0	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni								
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	39,19	43,62	57,24	62,68	68,19	73,79	79,47
4	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Persen	79,02	79,8	80,6	81,4	82,2	83	83,8
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	90,74	100	100	100	100	100	100
	SOSIAL								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	94,17	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
TENAGA KERJA									
1	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	5,88	5,92	5,96	6	6,03	6,07	6,11
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	601.066.495,9 1	643.076.250, 58	683.828.096,8 4	724.579.943,1 0	765.331.789,3 5	806.083.635,6 1	846.835.481,8 7
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	58,58	58,98	59,11	59,37	59,77	60,3	60,96
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	47,11	43,26	43,58	43,89	44,33	44,67	45,09
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	58,58	58,98	59,11	59,37	59,77	60,3	60,96

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	32,95	32,97	33	33,5	34	34,5	35
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio	4,16	4,15	4,1	4,05	4	3,95	3,94
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	12,54	12,54	12,34	12,32	12,31	12,3	12,29
	PANGAN								
1	Persentase Cadangan Pangan	Persen	214,89	248,45	276,74	276,74	276,74	276,74	276,74
	PERTANAHAN								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu.	Persen	4,78	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ketersediaan pembangunan lintas kabupaten/kota	Persen	0	100	100	100	100	100	100
	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,59	72,32	72,51	72,71	72,90	73,10	73,29
2	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	3,2	0	0	0	0	0	0

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	32,3	40	45	50	55	60	65
2	Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	56,28	5,02	5,29	5,58	5,91	6,29	6,71
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio Angka Kelahiran Total	2,24	2,21	2,21	2,2	2,2	2,19	2,19
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	Persen	75,87	76,37	76,87	77,37	77,87	78,37	78,87
3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	5,08	5,07	5,06	5,04	5,02	5,01	5
	PERHUBUNGAN								
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,649	0,65	0,66	0,82	0,98	1	1
2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	Nilai	0,618	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persen	100	77	78	79	80	81	82
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	60	70	80	90	100
4	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	38,81	40	45	50	55	60	65
2	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	25,75	34	35	37	39	41	43

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	13,8	14,8	15	15,03	15,05	15,08	15,1
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	20,49	20,49	20,5	20,53	20,55	20,58	20,6
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	182	185	188	191	194	197	200
STATISTIK									
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	84,03	70	73	76	79	82	85
KEBUDAYAAN									
1	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen	9,09	18,18	27,27	36,36	45,45	54,54	63,63
PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	74,63	75	75.50	76	76.50	77	77.50
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	81,16	81,5	82	82,5	83	83,5	84
KEARSIPAN									

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	83,3	48	48,5	49	49,5	50	50,5
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Ton	371.168,32	377.627,93	383.837,59	390.291,39	397.317,69	404.826,12	413.281,01
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	100
PARIWISATA									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	6,7	7	7,2	7,4	7,6	7,8	8
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Persen	48,27	10	10,5	11	11,5	12	12,5
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	40,48	52	54	56	58	60	62
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,93	2,44	2,46	2,49	2,52	2,56	2,61

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
PERTANIAN									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	4,42	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
2	Persentase Penurunan Kejadian Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	Persen	-31,25	85	95	95	95	95	95
KEHUTANAN									
1	Peningkatan akses Legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kerusakan Hutan per Tahun (deforestasi)	Persen	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3	Persentase Luas Lahan Kritis Yang di Rehabilitasi	Persen	46,01	48	50	52	54	56	58
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Persen	99,36	99,4	99,45	99,5	99,55	99,6	99,65
PERDAGANGAN									
1	Nilai Ekspor Non Migas	USD	11.357.831.553	11.457.124.553	11.586.124.100	11.701.985.341	11.819.005.194	11.937.195.246	12.056.567.199
2	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Tertib Usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan									
7	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Koefisien Variasi Harga Barang (rata-rata)	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	
8	Persentase UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
PERINDUSTRIAN										
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	Persen	21,11	4,59	5,26	5,83	6,3	6,67	6,94	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	90,1	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	75	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100	100	100	100	100	100	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100	100	100	100	100	100
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	125	125	125	125	125	125	125
KEUANGAN									
1	<i>Budget Execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-6,66	8,32	7,5	7,1	6,75	6,41	6,09
2	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	11,32	15,78	16,1	16,42	16,75	17,08	17,42
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	46,53	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
4	<i>Cash Management</i> : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	38,60	14,89	14,59	14,3	14,01	13,73	13,46
5	<i>Assets Management</i>	Persen	4	100	100	100	100	100	100
6	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	16,74	11,17	9,8	8,43	7,06	5,69	4,32
7	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Rasio PAD	Persen	42,84	43,37	46,27	49,17	52,07	54,97	57,87
PENGAWASAN									
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2	2	3	3,05	3,08	3,1	3,16

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3,1	3,2	3,3	3.4	3.5
PENGADAAN									
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	1	1	1	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	18,57	15	15	15	15	15	15
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	73,36	30	30	30	30	30	30
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	81,74	82	84	85	85	85	85
KEPEGAWAIAN									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	76,5	77	77,5	78	78,5	79	80
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	17,31	17,5	18	18,5	19	19,5	20
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	65,64	67	69	71	73	75	77

Sumber: hasil proyeksi, 2025

Keterangan: * Indeks SPBE secara nasional hanya berlaku sampai tahun 2025, selanjutnya diganti dengan Indeks Pemerintahan Digital mulai tahun 2026.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun sampai dengan tahun 2030. Pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik unsur pemerintah maupun non pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi “**KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan**” kedalam 5 (lima) misi, yaitu: (1) PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA; (2) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL; (3) PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH; (4) PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM; dan (5) TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT. Visi dan misi tersebut dicapai dengan 6 (enam) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran terukur melalui mekanisme cascading kinerja sampai dengan penentuan outcome untuk memilih program prioritas pembangunan daerah.

Tahapan pembangunan 5 (lima) tahun dirancang berkesinambungan dengan tema besar per tahun, yaitu: tahun 2026 Peningkatan Daya Saing SDM dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang Mendukung Pusat Distribusi Regional; tahun 2027 Penguatan Investasi dan Perekonomian Dengan Infrastruktur Terintegrasi yang Berkualitas; tahun 2028 Pemantapan Infrastruktur Logistik dan Pelayanan Publik yang Prima; tahun 2029 Pemantapan Investasi Daerah yang Mendorong Hilirisasi SDA dengan Pelayanan Publik yang Prima; dan tahun 2030 Penguatan Fondasi Gerbang Logistik Kalimantan yang Menyejahterakan Masyarakat.



5.2. Kaidah Pelaksanaan

Mengingat pentingnya dokumen ini, maka perlu diarahkan beberapa kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi untuk memastikan pelaksanaan rencana jangka menengah dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan dan program-program pembangunan daerah. Dengan demikian akan terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam kinerja maupun penganggaran serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Perda RPJMD Tahun 2025-2029.
4. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, mulai tahun 2026 hingga 2030. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
5. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
6. Pemerintah daerah melakukan manajemen risiko strategis pemerintah daerah serta manajemen risiko strategis dan operasional perangkat daerah, secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
7. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan alternatif dan inovatif, serta penguatan manajemen investasi untuk mendanai pembangunan baik dari dari sektor publik



maupun non publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Pelaksanaan RPJMD akan melibatkan partisipasi masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan (antara lain perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat). Untuk itu perlu dibangun komunikasi publik yang baik dan berkesinambungan.
9. Pelaksanaan RPJMD diintegrasikan dengan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial serta tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
10. Pemerintah daerah provinsi mendukung dan melaksanakan serta menyampaikan laporan kinerja Program Strategis Nasional sesuai peraturan yang berlaku.
11. RPJMD akan menjadi pedoman dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap tahun.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perumusan RPJMD untuk memastikan seluruh tahapan dan tatacara penyusun RPJMD telah dilaksanakan, dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD untuk memastikan bahwa RPJPD telah dipedomani pada saat penyusunan RPJMD telah dilakukan. Selanjutnya, pemerintah daerah provinsi akan melakukan Evaluasi Hasil terhadap RPJMD dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.
2. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.



3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD dan RKPD secara berkala.
4. Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada gubernur. Selanjutnya, gubernur menyampaikan laporan dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
6. Bila berdasarkan hasil Evaluasi terhadap RPJMD perlu dilakukan perubahan RPJMD, maka dilakukan sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
7. Kepala perangkat daerah berkewajiban melakukan Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah, bersamaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD. Pelaksanaan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah bersumber dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.
8. Tatacara Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

5.4. Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah pada tahun 2029 akan menyusun RKPD Tahun 2030. Penyusunan RKPD tahun 2030 dilakukan dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 untuk rencana tahun 2030. Penyusunan RKPD tahun 2030 dapat berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, sebab dokumen ini memuat kebijakan termasuk program tahun 2030 sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.



Labih lanjut, teknis penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah di akhir periode RPJMD Tahun 2025-2029 akan dilakukan dengan memedomani kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Gubernur Kalimantan Selatan,

H. MUHIDIN